



PEMERINTAH
KABUPATEN
BATU BARA

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
2025-2029



H.BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si
BUPATI BATU BARA



SYAFRIZAL, S.E., M.AP
WAKIL BUPATI BATU BARA



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang; perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan arah kebijakan jangka menengah daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633)
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
 22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040. (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan

dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman bagi :

- a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
- b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah; dan/atau
- c. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

Ruang Lingkup RPJMD, terdiri dari:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Daerah
- c. Bab III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
- d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- e. Bab V Penutup

Pasal 5

Sistematika RPJMD, adalah sebagai berikut :

- (1) Bab I Pendahuluan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 poin a memuat :
 - a. Latar belakang
 - b. Dasar hukum penyusunan
 - c. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya
 - d. Maksud dan tujuan
 - e. Sistematika penulisan
- (2) Bab II Gambaran Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin b memuat :
 - a. Aspek geografi dan demografi
 - b. Aspek kesejahteraan masyarakat
 - c. Aspek daya saing daerah
 - d. Aspek pelayanan umum
 - e. Realisasi dan proyeksi keuangan daerah
 - f. Permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah
- (3) Bab III Visi Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin c memuat :
 - a. Visi dan Misi Kepala Daerah
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
 - c. Program Prioritas Daerah RPJMD
- (4) Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin d memuat:

Daftar program perangkat daerah Tahun 2025 – 2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, indikator program target dan Pagu indikatif program perangkat daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2030 melalui Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (IKD).
- (5) Bab V Penutup, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 poin e, memuat :

Kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (6) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sampai ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan :
 - a. Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - b. Rencana strategis Perangkat Daerah
 - c. Rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya.
- (3) Perangkat daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- (1) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029;
- (2) Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya; dan
- (3) Seluruh Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029.
- (4) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun; dengan menelaah saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat yang telah diselaraskan dengan pencapaian pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 – 2029

BAB V**PENGENDALIAN DAN EVALUASI****Pasal 8**

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan secara berkala untuk menjamin dan memastikan tercapainya visi dan misi Bupati yang dituangkan dalam RPJMD;
- (2) Bupati melalui Bappelitbangda bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi RPJMD;
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, indikasi program prioritas, dan kebutuhan pendanaan;
- (4) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana program prioritas, kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah;
- (5) Hasil evaluasi RPJMD dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.

BAB VI**PERUBAHAN RPJMD****Pasal 9**

Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:

- (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan struktur organisasi dan tata kerja, atau perubahan kebijakan nasional;
- (4) Perubahan RPJMD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi.

- (5) Perubahan atau pemuktahiran atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri dapat disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan.
- (6) Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Perubahan renstra perangkat daerah dapat dilakukan bersamaan dengan perubahan RPJMD.
- (2) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa harus didahului dengan perubahan RPJMD pada kondisi apabila :
 - a. Terjadi perubahan organisasi dan tata kerja perangkat daerah; dan
 - b. Terjadi perubahan atau pemukhtahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri.
- (3) Penyesuaian muatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan selama target tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam RPJMD tidak berubah.

BAB VII

KEADAAN KAHAR

Pasal 11

- (1) Keadaan darurat/keadaan kahar (*force majeure*) dimaksud antara lain berupa bencana alam, kerusakan massal, konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar kewenangan pemberi dan penerima tugas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Target kinerja dan pagu indikatif yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah per tahun digunakan sebagai ukuran capaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi
 - b. Kondisi strategis daerah;atau
 - c. Fiskal daerah

- (3) Penyesuaian target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada RKPD dan Renja Perangkat Daerah dengan ketentuan selama tidak mengubah target kondisi akhir RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah serta sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

NORMA DELI SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (3-69/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH
NIP. 198409192011011009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 23 Tahun 2014 menjelaskan RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi Kepala Daerah Dengan mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah . RPJMD ini menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan pada masa jabatan Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara periode tahun 2025-2029 yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang menetapkan Baharuddin Siagian, SH, M.Si dan Syafrizal, SE, M.AP sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2019-2023 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030.

Dengan Memperhatikan beberapa uraian tersebut maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029. Dokumen RPJMD Kabupaten Batu Bara disusun dengan tahapan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakan

dengan berbagai upaya dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, dan indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan tersedianya dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 ini maka diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan Kabupaten Batu Bara karena selain sebagai pedoman dan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah tetapi juga dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan strategik daerah, RPJMD merupakan elaborasi visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertical pada semua tingkatan pemerintahan.

Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan daerah. Dengan adanya perencanaan akan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dalam penyusunan RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga berkomitmen melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan pengintegrasian muatan-muatan KLHS RPJMD 2025-2029 untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029 yang mempedomani Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian TPB

dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. .

Selain itu, RPJMD ini juga diselaraskan dengan kajian Teknokratik RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara periode 2025-2029, RPJPN Tahun 2025-20245, RPJMN 2025-2029, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara 2020-2040.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pendekatan;

- 1) **Politik**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- 2) **Teknokratik**, menggunakan kerangka berpikir, asumsi dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- 3) **Partisipatif**, melibatkan para pemangku kepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan ini bermaksud untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan melalui konsultasi publik.
- 4) **Atas-Bawah** dan **Bawah-Atas**, dilakukan secara berjenjang dan diselaraskan melalui musyawarah mulai dari tingkat kabupaten dan konsultasi substantive ditingkat pusat dan provinsi, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 juga dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama periode kepemimpinan nya. penyusunan RPJMD ini tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai kompas pembangunan lima tahunan yang sarat nilai, arah, dan komitmen strategis untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 180);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

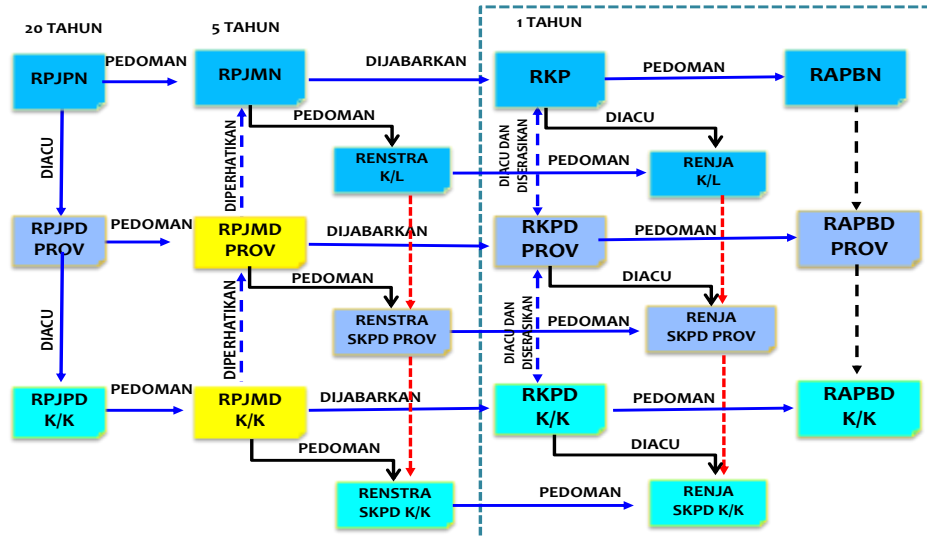
- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Nomor 459 Tahun 2018);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
 24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040. (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 Nomor 11);
 25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 merupakan bagian integral dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. RPJMD Kabupaten Batu Bara memiliki kaitan dengan dokumen perencanaan yang lain baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2045, dan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, serta diselaraskan dengan dokumen RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Batu Bara Periode 2025-2029.

Selanjutnya dokumen RPJMD Kabupaten Batu Bara dijadikan sebagai landasan dalam perumusan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan seluruh Perangkat Daerah, perumusan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan perumusan kebijakan rencana perangkat daerah tahunan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Keterkaitan antara RPJMD dengan sejumlah dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, RKPD dan APBD seperti tergambar dalam Gambar 1.1.



Sumber:Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen perencanaan

1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Batu Bara dengan RPJPD Kabupaten Batu Bara

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya perda RPJPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2045, daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 adalah rencana pembangunan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batu Bara 2025-2045. Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Batu Bara ini selain memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Batu Bara 2025-2045. Dengan cara menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Batu Bara.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Batu Bara dengan RPJMN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan kdimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Mengingat Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 juga memperhatikan keselarasannya dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian visi misi nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Batu Bara dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Batu Bara selain memperhatikan RPJMN juga memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Batu Bara dengan RTRW Kabupaten Batu Bara

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada

RTRW. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

RPJMD Kabupaten Batu Bara periode 2025-2029 berpedoman Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040. RTRW memiliki fungsi dan kedudukan sebagai pedoman pembangunan seluruh sektor, dan harus mengakomodasi seluruh kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan. Rencana umum tata ruang kabupaten adalah penjabaran RTRW provinsi kedalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan peranannya didalam pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan. Pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan dalam rencana struktur dan pola ruang operasional. Dalam operasionalnya rencana tata ruang wilayah akan dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup blok-blok perencanaan dan peraturan zonasi. Sehingga RTRW sangat berperan besar dalam merespon dinamika pembangunan yang ada, semestinya menjadi sektor terdepan dalam tatanan perencanaan di Kabupaten Batu Bara.

RTRW Kabupaten Batu Bara disusun untuk dijadikan pedoman penataan ruang wilayah, serta diselenggarakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah (pengembangan wilayah) berdasarkan kebijakan, skenario dan strategi pengembangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu ditetapkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Batu Bara, yaitu: "Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Batu Bara sebagai kawasan investasi maju yang berbasis sektor agro, industri, jasa pelabuhan dan hasil laut yang unggul, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dalam rangka mewujudkan kemandirian kabupaten."

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Rencana struktur ruang bertujuan untuk pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan sekaligus menghindari terjadinya pemusatan kegiatan yang berlebihan agar terjamin keserasian agar tercapai pemanfaatan ruang yang sesuai dan seimbang dengan pola pemanfaatan tata ruang seoptimal mungkin dengan penyebaran prasarana dan sarana sosial, dan kecenderungan yang berlaku dilapangan.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Batu Bara Kabupaten Batu Bara dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program Pemerintah Daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun 2025-2029 disusun dengan maksud sebagai pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, lembaga swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Batu Bara disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Sebagai Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Tolak ukur keberhasilan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai visi, misi dan program pembangunan daerah.

4. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini Memuat mengenai latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Batu Bara yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Dalam Bab ini juga dimuat tentang realisasi dan Proyeksi Keuangan Daerah, Permasalahan pembangunan daerah dan Isu Strategis Daerah.

BAB III VISI MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas daerah RPJMD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Indikator program target dan pagu indikatif program perangkat daerah, Target keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama dan target penyelenggaraan

pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini Memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

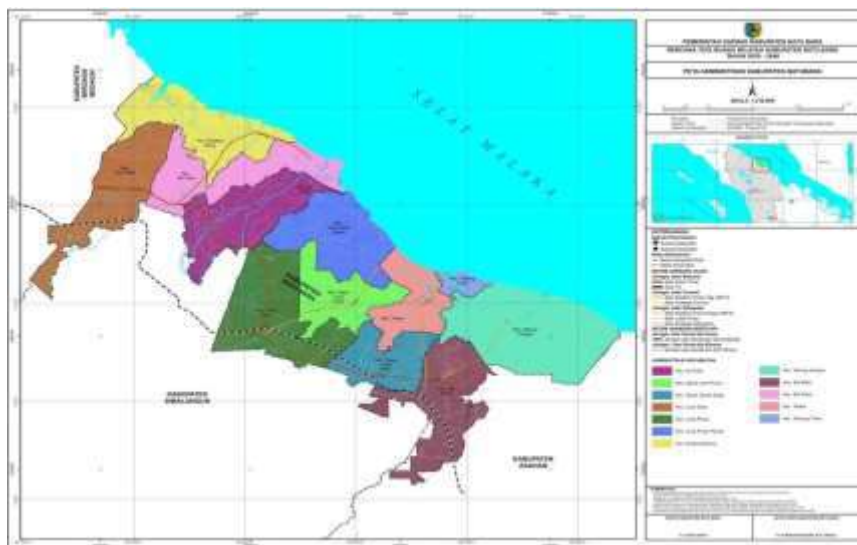
2.1 Aspek Geografi dan Demografi

1. Posisi dan peran strategis daerah

Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Batu Bara terletak pada garis 3° - 4° Lintang Utara dan 99° - 100° Bujur Timur. Adapun luas wilayah dari Kabupaten Batu Bara adalah sebesar 888.62 km^2 atau 88.862,10 ha yang terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dan 151 desa/kelurahan yang beribu kota di Kecamatan Lima Puluh. Adapun batas administrasi Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai
- ❖ Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
- ❖ Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
- ❖ Sebelah Timur : Selat Malaka

Gambar Peta Wilayah Kabupaten Batu Bara



Sumber: RTRW Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040

Dilihat dari Posisi Geografis nya Kabupaten Batu Bara Berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera Utara yang memiliki potensi strategis berbatasan langsung ke Selat Malaka, yang dapat mendukung pengembangan sektor maritim dan perdagangan internasional.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, daerah Nibung Hangus merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 13.150,80 ha. Sedangkan Kecamatan Talawi merupakan wilayah terkecil dengan luas 4.924,24 ha. Untuk mengetahui luas wilayah dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Ha)
1	Sei Suka	Kel. Perkebunan Sipare-pare	7.596,56
2	Laut Tador	Desa Perkebunan Tanjung Kasau	8.232,28
3	Lima Puluh	Kel. Lima Puluh Kota	10.220,16
4	Lima Puluh Pesisir	Desa Parupuk	8.049,71
5	Datuk Lima Puluh	Desa Simpang Dolok	5.461,96
6	Talawi	Kel. Labuhan Ruku	4.924,24
7	Datuk Tanah Datar	Desa Karang Baru	5.061,21
8	Tanjung Tiram	Kel. Tanjung Tiram	1.077,18
9	Nibung Hangus	Desa Ujung Kubu	13.150,80
10	Sei Balai	Desa Sei Balah	8.576,39
11	Air Putih	Kel. Indrapura	8.259,08
12	Medang Deras	Desa Pangkalan Dodek	8.257,52
Batu Bara			88.866

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara 2020-2040

a) Topografi dan Iklim

Topografi Kabupaten Batu Bara terletak 0-50 meter dpl dengan presentase kemiringan dan memiliki ketinggian berdasarkan kecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

0 – 7 m = 28,56%

7 – 25 m = 22,69%

25 – 100 m = 23,60%

100 – 500 m = 15,89 %

500 – 1 000 m = 4,27 %

Tabel 2.2
Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Batu Bara

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi di Atas Permukaan Laut (m)
1	Sei Balai	Sei Balai	14
2	Tanjung Tiram	Tanjung Tiram	1
3	Nibung Hangus	Ujung Kubu	1
4	Talawi	Labuhan Ruku	3
5	Datuk Tanah Datar	Karang Baru	14
6	Lima Puluh	Lima Puluh Kota	28
7	Lima Puluh Pesisir	Perupuk	5
8	Datuk Lima Puluh	Simpang Dolok	4
9	Air Putih	Indrapura	10
10	Sei Suka	Sei Suka Deras	13
11	Laut Tador	Perkebunan Tanjung Kasau	32,9
12	Medang Deras	Pangkalan Dodek	2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Rincian tinggi kecamatan di Kabupaten Batu Bara di atas permukaan laut adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Sei Balai dengan ibu kota Sei Balai berada pada ketinggian 14 meter di atas permukaan laut.
- 2) Kecamatan Tanjung Tiram dengan ibu kota Tanjung Tiram berada pada ketinggian 1 meter di atas permukaan laut.
- 3) Kecamatan Nibung Hangus dengan ibu kota Ujung Kubu berada pada ketinggian 1 meter di atas permukaan laut.
- 4) Kecamatan Talawi dengan ibu kota Labuhan Ruku berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut.
- 5) Kecamatan Datuk Tanah Datar dengan ibu kota Karang Baru berada pada ketinggian 14 meter di atas permukaan laut.
- 6) Kecamatan Lima Puluh dengan ibu kota Lima Puluh Kota berada pada ketinggian 28 meter di atas permukaan laut.
- 7) Kecamatan Lima Puluh Pesisir dengan ibu kota Perupuk berada pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut.

- 8) Kecamatan Datuk Lima Puluh dengan ibu kota Simpang Dolok berada pada ketinggian 4 meter di atas permukaan laut.
- 9) Kecamatan Air Putih dengan ibu kota Indrapura berada pada ketinggian 10 meter di atas permukaan laut.
- 10) Kecamatan Sei Suka dengan ibu kota Sei Suka Deras berada pada ketinggian 13 meter di atas permukaan laut.
- 11) Kecamatan Laut Tador dengan ibu kota Perkebunan Tanjung Kasau berada pada ketinggian 32,9 meter di atas permukaan laut.
- 12) Kecamatan Medang Deras dengan ibu kota Pangkalan Dodek berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut.

Dilihat dari Kondisi Topografi dan Iklim, Kabupaten Batu Bara merupakan daerah yang rentan terhadap banjir akibat topografi dataran rendah dan perubahan iklim yang meningkatkan risiko banjir pesisir dan abrasi pantai.

b) Geologi

Kondisi Geologi menunjukkan susunan jenis batuan yang membentuk suatu wilayah, yang secara umum digambarkan dengan formasi batuan. Selain formasi batuan, kondisi geologi juga menggambarkan tentang struktur sesar atau patahan yang terdapat di suatu wilayah. Formasi batuan bisa menggambarkan secara utuh mengenai kekuatan pondasi suatu daerah sekaligus mengenai potensi kemampuan penyimpanan air pada wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi geologi menjelaskan jenis batuan dan formasi batuan sehingga sifat dari batuan tersebut dapat dipahami dan diidentifikasi, baik sifat kimiawi maupun sifat fisisnya. Dengan sifat batuan yang dapat diidentifikasi, sangat membantu untuk memahami potensi dan kendala pengembangan ke depannya. Formasi batuan atau kelompok batuan, dikelompokkan berdasarkan adanya keseragaman beberapa jenis batuan dan pola terjadinya atau asal muasalnya sehingga disebut sebagai formasi batuan. Untuk Kabupaten Batu Bara sendiri formasi geologinya terdiri dari 2 formasi batuan yaitu :

1) Formasi Aluvium Muda

Aluvium adalah tanah liat lepas, lanau, pasir, atau kerikil yang telah diendapkan oleh air yang mengalir di dasar sungai, di dataran banjir, di kipas aluvial atau pantai, atau dalam pengaturan serupa. Aluvium juga kadang-kadang disebut endapan aluvial. Alluvium pada umumnya mempunyai umur skala geologis muda dan tidak terkonsolidasi menjadi batuan padat. Sedimen yang diendapkan di bawah air, di laut, muara, danau, atau kolam, tidak disebut sebagai alluvium. Formasi ini terdapat di hampir semua kecamatan terutama yang berada ke arah wilayah pesisir atau ke arah laut. Di seluruh wilayah pesisir terdapat formasi batuan ini, formasi aluvium muda. Kecamatan tersebut antara lain adalah Medang Deras, Sei Suka, Air Putih, Limapuluh Pesisir, Datuk Limapuluh, Talawi, Tanjung Tiram, Sei Balai dan Nibung Hangus.

2) Formasi Tuffa Toba

Formasi Tuffa Toba adalah formasi geologi yang umum terdapat di wilayah Sumatera Utara terutama yang berada di wilayah kawasan Danau Toba dan sekitarnya termasuk ke wilayah Batu Bara dan sekitarnya. Dapat dipahami ketika masa pembentukannya, akibat aktivitas vulkanologi dari Danau Toba dan kawasannya, memberikan pengaruh ke wilayah yang sangat luas, termasuk ke wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara seperti Kabupaten Batu Bara. Satuan Tuffa Toba ini terdiri dari batuan riadasit, batuan gamping dan batu apung. Batuan gamping ini tergolong ke dalam batuan yang cukup keras sedangkan batuan apung adalah batuan hasil dari pendinginan lava gunung berapi yang kemudian tersedimentasi dan mengeluarkan gas sehingga memiliki cukup banyak rongga di dalamnya. Formasi Tuffa Toba ini terdapat ke arah daratan dimana ada beberapa kecamatan di dalamnya yaitu Kecamatan Sei Balai, Datuk Tanah Datar, Talawi, Limapuluh, Datuk Limapuluh, Limapuluh Pesisir, Sei Suka, Air Putih dan Laut Tador.

Formasi Tuffa Toba memiliki potensi dalam penyimpanan air tanah yang penting untuk mendukung irigasi dan pemukiman, serta perlu diperhatikan untuk tambang yang berkelanjutan guna menghindari kerusakan lingkungan

c) Jenis Tanah

Jenis tanah yang berada di Kabupaten Batu Bara sama seperti jenis tanah kebanyakan yang berada di wilayah Pantai Timur Sumatera Utara. Jenis tanah di wilayah Batu Bara, terdiri dari 3 bagian utama yaitu kelompok jenis tanah yang berada ke arah pantai, ke arah daratan dan ke arah perbukitan. Jenis tanah atau kelompok tanah berdasarkan USDA di Kabupaten Batu Bara terdiri dari jenis tanah sebagai berikut :

- 1) Dystropepts, Humitropepts
- 2) Dystropepts, Kandidults, Tropaquepts
- 3) Eutropepts, Fluvaquents, Tropaquepts
- 4) Hydraquents Tropopsamments
- 5) Hydraquents, Eutropepts
- 6) Hydraquents, Sulfaquents
- 7) Sulfaquents, Hydraquents
- 8) Tropaquents, Dystropepts, Kandidults
- 9) Tropaquents, Tropaquepts

Secara umum jenis tanah yang terdapat atau yang membentuk wilayah Kabupaten Batu Bara adalah jenis tanah aluvial dan jenis tanah gleihumus dan hidromofil kelabu. Tanah ini merupakan tanah vulkanis, hasil dari letusan gunung berapi dan ini sesuai dengan formasi batuan pembentuknya yaitu tuffa toba yang merupakan hasil dari letusan gunung berapi. Gunung berapi yang dimaksudkan, diidentifikasi adalah Gunung Toba di masa lampau yang berada di Kawasan Danau Toba. Tanah vulkanis ini adalah jenis tanah yang subur, yang banyak memiliki unsur hara dan sangat cocok untuk wilayah pertanian dan perkebunan dan ini terlihat dari wilayah Kabupaten Batu Bara yang memiliki cukup banyak wilayah persawahan dan perkebunan. Persawahan umumnya berada ke wilayah daratan atau ke wilayah tengah karena wilayah ini lebih subur dan merupakan wilayah dengan jenis tanah vulkanis yang subur. Pada saat ini, wilayah Batu Bara sebagian besar memang ditanami tanaman perkebunan, kelapa sawit dan tumbuh subur akan tetapi pada dasarnya di wilayah tersebut juga bagus atau cocok untuk tanaman padi atau persawahan.

Jenis tanah vulkanis di Kabupaten Batu Bara sangat mendukung sektor pertanian, namun alih fungsi lahan untuk industri dapat menurunkan kesuburan tanah yang berpotensi merugikan sektor pertanian di masa depan. Untuk itu penegakan Regulasi lahan pangan berkelanjutan dan tata tata ruang penting untuk di perhatikan.

d) Hidrologi

Kabupaten Batu Bara dialiri beberapa aliran sungai besar maupun kecil tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi tersebar di berbagai kecamatan. Sungai besar di Kabupaten Batu Bara yang terutama adalah sungai Bah Bolon. Sungai ini mengalir dari hulunya di Kabupaten Simalungun dan Batu Bara merupakan hilir dari sungai ini dan berakhir di muara dan langsung menuju pada buangan akhir di lautan bebas, Selat Malaka. Untuk pembagian penanganan sungai, dibagi ke dalam 3 kewenangan yaitu kewenangan nasional, provinsi dan kabupaten. Untuk pembagian wilayahnya sendiri, bagian utamanya adalah disebut dengan WS atau Wilayah Sungai dan untuk pembagian yang lebih kecilnya disebut DAS (Daerah Aliran Sungai). WS atau Wilayah Sungai yang terdapat di Kabupaten Batu Bara hanya 1 WS yaitu WS Bah Bolon dan 5 DAS (Daerah Aliran Sungai) yaitu DAS Bolon, DAS Kiri, DAS Perupuk, DAS Silau Bonto dan DAS Sipare-pare. WS Bah Bolon merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini dikelola oleh bidang SDA (Sumber Daya Air), Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.3
Daftar Inventarisasi DAS di Kabupaten Batu Bara

No.	Wilayah Sungai (WS)	DAS (Daerah Aliran Sungai)
1	WS BAH BOLON	DAS Bolon
2		DAS Kiri
3		DAS Perupuk
4		DAS Silau Bonto
5		DAS Sipare-pare

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Batu Bara Tahun 2020-2040

Sungai dari DSA bah Bolon merupakan Sumber air utama yang mengalir wilayah Kabupaten Batu bara memiliki debit aliran air debir minimum (30,40 m²/detik) pada bulan April, dan debit maksimum 47,83 m³/detik pada bulan september(Randi Gunawan, Wahana Hijau, Jurnanl Perencanaan dan Pengembaangan Wialayah, 2006).

Sungai-sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Batu Bara tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum sungai ini dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti MCK (mandi, cuci, kakus) khususnya di wilayah yang berada di pelosok perdesaan. Disamping itu, fungsi dari sungai ini adalah untuk mengalir atau untuk sebagai sumber bagi pengairan persawahan baik untuk sawah irigasi maupun sawah non irigasi. Dapat dikatakan bahwa kedudukan atau peran dari jaringan sungai ini adalah vital bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Batu Bara. Dari daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersih, dapat dilihat bahwa tidak semua wilayah di Kabupaten Batu Bara memiliki jasa ekosistem air bersih yang baik, terutama untuk wilayah pesisir. Sumber air utama untuk air minum dan air bersih selain sungai adalah air tanah dalam. Untuk kualitas air baku dari sungai di Kabupaten Batu Bara sendiri tidak terlalu baik atau masih dalam kategori sedang.

Sungai-sungai yang mengalir wilayah Kabupaten Batu Bara tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum sungai ini dimanfaatkan masyarakat untuk keperluan sehari-hari seperti MCK (mandi, cuci, kakus) khususnya di wilayah yang berada di pelosok perdesaan. Disamping itu, fungsi dari sungai ini adalah untuk mengalir atau untuk sebagai sumber bagi pengairan persawahan baik untuk sawah irigasi maupun sawah non irigasi. Dapat dikatakan bahwa kedudukan atau peran dari jaringan sungai ini adalah vital bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Batu Bara. Dari daya dukung jasa ekosistem penyediaan air bersih, dapat dilihat bahwa tidak semua wilayah di Kabupaten Batu Bara memiliki jasa ekosistem air bersih yang baik, terutama untuk wilayah pesisir. Sumber air utama untuk air minum dan air bersih selain sungai adalah air tanah dalam. Untuk kualitas air baku dari sungai di Kabupaten Batu Bara sendiri tidak terlalu baik atau masih dalam kategori sedang.

Sungai-sungai yang ada di Kabupaten Batu Bara, yaitu :

- 1) Sungai Batu Bara Kanan
- 2) Sungai Batu Bara Kiri
- 3) Sungai Titi Merah
- 4) Sungai Balai
- 5) Sungai Muka
- 6) Sungai Kuba
- 7) Sungai Magung
- 8) Sungai Bahapal
- 9) Sungai Bacang

Tabel 2.4
Daftar Daerah Irigasi (D.I) di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Nama D.I dan Kecamatan	Bangunan Utama		Panjang Saluran		
	Bendung /Intake	Pintu Pembagi	Induk/ Main	Panjang Saluran Sekunder	Pembuang
1. Simodong (Sei Suka)	1	48	6,719	28 025	60,375
2. Tanjung Muda (Air Putih)	2	30	7,900	16 898	22,448
3. Cinta Maju/Cinta Damai (Air Putih)	2	32	16,889	3 708	21,306
4. Purwodadi (Lima Puluh)	1	32	12,948	13 456	21,682
5. Sei Balai (Sei Balai)	1	21	3,359	9 515	13,618
Jumlah/Total	7	163	47,815	71,602	139,429

Sumber: Kabupaten Batu Bara Dalam Angka, BPS Kab.Batu Bara

e) Klimatologi

Kabupaten Batu Bara memiliki curah hujan yang tidak terlalu tinggi dan sama seperti wilayah pesisir lainnya, yang cenderung memiliki suhu yang cukup panas serta kelembaban yang lebih rendah dari daerah lainnya. Kabupaten Batu Bara sendiri termasuk ke dalam iklim tropis dimana terdapat lebih banyak bulan kering dibandingkan bulan basah. Curah hujan di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022 adalah sebesar 1825 mm dengan rata-rata curah hujan per bulannya adalah sebesar 152 mm/bulan. Jumlah hari hujan pada tahun 2022 adalah sebanyak 169 hari dan rata-rata hari hujannya adalah sebanyak kurang lebih 14 hari per bulannya. Bulan dengan curah hujan

paling tinggi adalah di bulan Agustus, disusul dengan bulan November dan Desember. Untuk bulan dengan hari hujan terbanyak adalah bulan Oktober sebanyak 25 hari, disusul dengan bulan November dan Desember.

Ada anomali yang bisa diperhatikan dari jumlah curah hujan dan hari hujan per bulan di tahun 2022. Ada fenomena dimana pada bulan tertentu, curah hujan tinggi tetapi jumlah hari hujan tidak terlalu tinggi. Jumlah curah hujan tertinggi ada di bulan Agustus tetapi jumlah hari hujannya sendiri hanya 14 hari hujan dan bukan yang tertinggi di dalam periode tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas hujan yang terjadi cukup tinggi ketika terjadi hujan dan memungkinkan terjadi potensi banjir yang cukup besar pada bulan tersebut. Bulan kering sendiri terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sedangkan bulan basah dimulai dari Agustus sampai dengan bulan Desember. Potensi terjadinya perubahan cuaca, bisa saja terjadi, dimana bulan basah dan bulan kering muncul secara acak atau tidak seperti biasanya, tetapi hingga saat ini, fenomena tersebut belum banyak terjadi.

Tabel 2.5
Rata-Rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Batu Bara
Menurut Stasiun Klimatologi Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	101	11
2	Februari	22	4
3	Maret	99	9
4	April	71	3
5	Mei	59	6
6	Juni	34	5
7	Juli	69	5
8	Agustus	150	13
9	September	232	17
10	Oktober	179	13
11	November	124	15
12	Desember	181	15
TOTAL		1321	116
Rata-rata		110.08	9,66

Sumber: Kab. Batu Bara Dalam Angka Tahun 2024

2. Potensi Sumber Daya Alam

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, beberapa potensi Sumber Daya Alam ada di Kabupaten Batu Bara seperti potensi pertanian, potensi perkebunan, potensi perikanan, potensi bahan tambang, dan potensi pariwisata.

1) Potensi Pertanian

Pertanian yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yang paling besar atau yang paling utama adalah berupa pertanian berupa persawahan atau pertanian tanaman padi. Untuk jenis tanaman pertanian lainnya adalah berupa jagung, ubi kayu dan sedikit tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yang paling banyak dibudidayakan adalah tanaman cabai dimana terdapat sebuah industri pengolahan cabai yang mengolah dari tanaman cabai menjadi cabai berupa pasta yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pada tahun 2022 produksi padi sawah di Batu Bara mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu sekitar 2,13 persen. Produksi padi sawah Kabupaten Batubara tahun 2022 mencapai 157.472,84 ton dengan rata-rata produksi 55,40 kw/ha. Kecamatan dengan produksi padi terbesar adalah Kecamatan Air Putih dan Medang Deras. Sedangkan produksi padi ladang pada tahun yang sama adalah nol karena di Batu Bara tidak ada yang mengusahakan padi ladang. Untuk tanaman jagung, produsen jagung terbesar di Batu Bara untuk tahun 2022 adalah Kecamatan Nibung Hangus dengan produksi sebesar 2.847,08 ton atau 77,19 persen dari total produksi jagung di Batu Bara yang mencapai 3.688,33 ton. Tanaman ubi kayu diusahakan di seluruh kecamatan induk di Batu Bara kecuali Tanjung Tiram dan Nibung Hangus. Produksi ubi kayu tahun 2022 mencapai 14.756,74 ton. Untuk tanaman bahan makanan lainnya seperti kacang kedelai, kacang tanah dan kacang hijau, mengalami peningkatan produksinya di tahun 2022, kecuali ubi jalar.

2) Potensi Perkebunan

Perkebunan merupakan potensi utama dari Kabupaten Batu Bara dan tanaman kelapa sawit merupakan komoditas utama di Batu Bara. Komoditi penting yang dihasilkan perkebunan di Kabupaten Batu Bara adalah kelapa

sawit, karet, kelapa, coklat dan pinang. Di sepanjang jalan dapat kita lihat tanaman kelapa sawit baik yang ditanam oleh perusahaan maupun oleh masyarakat atau pribadi. Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu sentra perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera Utara. Tanaman kelapa sawit ditanam di seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara dengan luasan yang berbeda-beda. Produksi kelapa sawit perkebunan rakyat berupa TBS (Tandan Buah Segar) tahun 2022 adalah sebesar 172.636 ton dengan total luas tanaman kurang lebih 11.877,95 ha. Kecamatan Laut Tador merupakan kecamatan penghasil kelapa sawit terbesar di Batu Bara. Untuk tanaman karet, utamanya adalah berupa tanaman yang diusahakan oleh rakyat. Produksi karet rakyat di Batu Bara pada tahun 2022 sebesar 210 ton. Kecamatan Laut Tador juga merupakan kecamatan penghasil karet terbesar di Batu Bara. Untuk tanaman kelapa, produksi tanaman kelapa (kopra) perkebunan rakyat di Batu Bara pada tahun 2022 mencapai 52.131 ton dengan luas tanaman mencapai 8.506 ha. Kecamatan Laut Tador juga merupakan penghasil kelapa (kopra) terbesar di Batu Bara dengan total produksi 15.970 ton. Untuk tanaman kakao atau coklat, produksi kakao atau coklat pada tahun 2022 sebesar 1.205 ton. Kecamatan Datuk Tanah Datar merupakan penghasil kakao terbesar di Kabupaten Batu Bara.

3) Potensi Perikanan

Perikanan merupakan salah satu potensi yang pada dasarnya sangat besar yang terdapat di Kabupaten Batu Bara yang belum sepenuhnya dapat dimaksimalkan. Dari 12 kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 6 diantaranya memiliki garis pantai atau setengah dari keseluruhan kecamatan di Batu Bara. Panjang garis pantai dari Kabupaten Batu Bara adalah sepanjang kurang lebih 60 km dan ini merupakan potensi perikanan yang sangat besar apabila dapat dioptimalkan dengan baik.

Produksi ikan tangkap dari laut di Batu Bara pada tahun 2022 sebesar 47.435,4 ton sedangkan ikan tangkap dari perairan umum sebesar 6,6 ton. Produksi perikanan laut terbesar dihasilkan oleh Kecamatan Tanjung Tiram yaitu sebesar 13.358,6 ton disusul Kecamatan Medang Deras dengan produksi sebesar 10.763,7 ton. Produksi perikanan budidaya di Batu Bara tahun 2022

sebanyak 2.135,15 ton yaitu sebanyak 99 ton dari hasil budidaya laut dan 1.184,95 ton dari hasil budidaya tambak, 846,68 ton dari hasil budidaya kolam dan 4,52 hasil jaring apung. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya sebanyak 709 rumah tangga, terdiri dari 15 rumah tangga budidaya laut, 200 rumah tangga petambak, dan 489 rumah tangga budidaya kolam.

Nilai Kontribusi dari Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan Sekitar 22,54% berdasarkan ADHB dan Sekitar 22,39% berdasarkan ADHK.

Tabel 2.6
Kontribusi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
berdasarkan ADHB Dan ADHK

Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)	6.827,21	19,51	7.533	20,25	8.615	21,08	9.588,97	21.9	10.667,33	22,54
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	5 382,26	19,5	5640,46	23,04	5992,67	23.52	6182,03	23.31	6.182,03	22,39

Sumber: BPS, Kabupaten Batu Bara

4) Potensi Bahan Tambang

Potensi bahan tambang tidak terlalu banyak yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, hanya berupa galian C dan pasir. Galian C biasanya berupa quarry yang memecah batu-batu alam yang besar lalu kemudian displit menjadi batu yang lebih kecil yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan material bangunan. Selain Galian C ada juga tambang pasir kuarsa. Pasir Kuarsa dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan kaca, melalui serangkaian proses yang cukup panjang untuk menjadi kaca. Untuk tambang Galian C ini seperti umumnya di daerah-daerah lain memanfaatkan potensi yang ada di alam yang kemudian diusulkan atau dimohonkan ijinnya untuk dieksplorasi tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Galian ini memang tidak terdapat banyak dan untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat akan tetapi apabila dilakukan penambangan secara tidak terkendali dan sporadis akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan perlu

diperhatikan posisi dan lingkungan di sekitarnya agar tidak merusak alam dan ekosistem itu sendiri secara keseluruhan.

5) Potensi Pariwisata

a) Wisata Pantai

Wisata Pantai atau Wisata Bahari adalah kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pantai atau kelautan sebagai objek wisatanya beserta dengan segala aktivitas yang dapat dilakukan di dalamnya. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu kurang lebih 60 km, maka sudah pasti potensi wisata bahari cukup besar yang terdapat di Kabupaten Batu Bara. Potensi wisata tersebut sebagian sudah dikembangkan atau sudah berjalan dan sebagian lagi belum berjalan atau belum dikembangkan dan hanya berupa potensi. Hal yang paling diminati oleh pengunjung atau wisatawan dari wisata bahari adalah pemandangan dari pantai tersebut dan juga pantai itu sendiri termasuk pasir pantai tersebut. Kebanyakan wisatawan ingin menikmati dengan berlari dan berjemur di tepi pantai dan sekaligus mandi atau berenang di kawasan pantai. Kebanyakan dari pantai di Sumatera Utara, yang berada di wilayah pesisir timur, biasanya berlumpur jadi memang tidak terlalu menarik untuk dijadikan spot berjemur atau berenang di kawasan perairan pantai tersebut. Beberapa objek wisata bahari atau wisata pantai tersebut adalah sebagai berikut :

- Pantai Kuala Sipare
- Pantai Jono
- Pantai Perjuangan (Jl. *Access Road* Inalum, Desa Lalang, Kec. Medang Deras)
- Pantai Bunga (Kec. Talawi)
- Pantai Sejarah (Desa Perupuk, Kec. Lima Puluh)

b) Wisata di Pulau-pulau Kecil

Kabupaten Batu Bara juga memiliki pulau-pulau kecil yang berada di luar dari daratan utama kabupaten walaupun tidak merupakan pulau terluar di Indonesia akan tetapi posisi dari pulau ini sudah berada dekat dengan garis batas atau perbatasan antar negara. Pulau tersebut adalah Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang. Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang adalah 2 pulau yang berada di tengah lautan dan berjarak cukup jauh dari garis pantai utama Kabupaten Batu Bara. Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang sudah menjadi sebuah destinasi wisata dan dikelola secara resmi oleh kabupaten. Untuk menuju pulau ini, harus menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Tiram. Kedua pulau ini berada di wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Tiram dan memiliki view yang cukup indah karena berada di tengah lautan luas. Pulau Pandang dan Pulau Salah Nama adalah ikon dari pariwisata Kabupaten Batu Bara dan sudah banyak dikenal terutama oleh wisatawan domestik di Sumatera Utara. Selain Pulau Salah Nama dan Pulau Pandang, ada juga yang dikenal dengan nama Pulau Si Angsa Dua. Kekurangan dari objek-objek wisata ini adalah kurangnya promosi dan sekaligus kurang dalam hal pengelolaan sehingga masih kurang menarik minat wisatawan manca negara, hanya terbatas turis atau wisatawan lokal.

c) Wisata Budaya

Objek wisata budaya yang terdapat di Kabupaten Batu Bara adalah Istana Lima Laras. Istana ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan melayu yang ada di Batu Bara yang berada di daerah pesisir. Letak istana tersebut berada di Kecamatan Tanjung Tiram. Posisi dari Istana Lima Laras sangat strategis untuk dikunjungi karena Kabupaten Batubara telah membuka jalur pelayaran dari Port Klang Malaysia ke Batubara langsung melalui pelabuhan Tanjung Tiram di Kabupaten Batubara atau tidak lagi melalui pelabuhan Bagan Asahan di Tanjung Balai Asahan. Perjalanan dari Malaysia hanya menempuh jarak kurang lebih 3,5 jam perjalanan.

Keseluruhan potensi wisata di Kabupaten Batu Bara ini dapat dikatakan masih kurang memberikan kontribusi terhadap PAD kabupaten dikarenakan kurangnya pengelolaan dan kurangnya promosi, bahkan untuk skala Provinsi Sumatera Utara juga masih kurang terkenal padahal masyarakat banyak yang tertarik pada wisata-wisata yang masih bersifat tradisional atau asli dan ini dapat menjadi sebuah keunikan dari potensi wisata di Kabupaten Batu Bara.

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung Penyediaan Pangan

Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Batu bara Tahun 2025-2029, Daya dukung penyediaan pangan menggambarkan surplus-defisit penyediaan pangan oleh alam di Kabupaten Batu Bara terhadap kebutuhan seluruh penduduk Kabupaten menggunakan penghitungan Kalori, dimana kebutuhan kalori manusia per hari sebesar 2.100 Kkal. Kebutuhan pangan tersebut disediakan oleh sumber daya alam Kabupaten Batu Bara berupa komoditi pangan, yaitu : padi/beras (sawah dan ladang), jagung, kacang tanah, kacang ijo, ketela pohon, umbi-umbian (ubi kayu, ketela rambat, kacang tanahkacang kedelai, dan kacang hijau), telur, unggas ternak, dan ikan yang menghasilkan kalori. Kecamatan yang memiliki penyediaan pangan tertinggi terdapat di Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Air Putih dan Kecamatan Datuk Lima Puluh.

Ketersediaan Penyediaan Pangan

Sumber kalori pangan dari berbagai komoditi pangan : padi sawah sebesar 157.472,71 ton, jagungsebanyak 3.684,83 ton, ubi kayu sebanyak 14.766m ton, ubi jalar sebanyak 407.88 ton, kacang tanah sebanyak 21,42 ton, kacang kedelai sebanyak 9,09 ton dan kacang hijau 10.05 ton.

Konversi padi sawah ke beras dihitung menggunakan nilai GKP (Gabah Kering Panen) ke GKG (Gabah Kering Giling) sebesar 85,74% dan rasio GKG ke Beras sebesar 63,68%. Berdasarkan Tabel Komposisi Pangan Indonesia

Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, nilai kalori beras giling mentah per 100 gr adalah 357 kkal. Terdapat juga produksi telur ayam sebanyak 320,49 ton, telur ayam kampung 189,60 ton, dan telur itik 20,9 ton. Tidak hanya menghasilkan telur, unggas juga dapat dimanfaatkan dagingnya menjadi sumber kalori, pada tahun 2022 produksi daging ayam 2.557 ton, ayam kampung sebanyak 165,81 ton, dan itik sebanyak 40,23 ton. Selain unggas, sumber kalori pangan hewani lainnya adalah ternak yaitu: sapi, kerbau, kambing, dan babi yang total produksi dagingnya hampir mencapai 350 ton per tahun 2022. Sumber pangan hewani juga didapatkan di perairan darat berupa ikan darat yang produksinya mencapai lebih dari 2.000 ton.

**Sumber Kalori Pangan dari Komoditi Hewani (Daging dan Telur)
Wilayah Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2022**

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Sumber kalori pangan terdiri dari berbagai komoditi hewani bersumber dari telur ayam, telur ayam kampung, telur itik, daging unggas (broiler, petelur, ayam kampung, itik), daging ternak (sapi, Kerbau, kambing, babi), dan daging ikan darat (budidaya ikan darat). Komoditi pangan seluruhnya diproduksi di seluruh kecamatan

Tabel 2.8
Ketersediaan Pangan Wilayah Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2022

No	Kecamatan	Suplai Kalori Pangan
1	Sei Balai	44.979.022.106,58
2	Tanjung Tiram	355.834.480,00
3	Nibung Hangus	12.943.947.917,41
4	Talawi	9.205.622.876,80
5	Datuk Tanah Datar	21.368.328.890,56
6	Lima Puluh	3.893.422.109,36
7	Lima Puluh Pesisir	32.454.058.320,54
8	Datuk Lima Puluh	43.759.716.843,58
9	Air Putih	69.918.263.391,71
10	Sei Suka	31.149.455.935,78
11	Laut Tador	2.865.370.350,00
12	Medang Deras	72.104.701.000,09
Kab. Batu Bara		344.997.744.222,43

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Diperkirakan ketersediaan kalori pangan sebesar sekitar 344,99 Milyar Kkal/tahun, yang terbesar berasal dari Kecamatan Medang deras, dan Kecamatan Air Putih.

Kebutuhan Pangan

Daya dukung pangan dengan melakukan Perkiraan kebutuhan kalori di atas menggunakan standar kebutuhan kalori pangan sebesar 2100 KKalori perkapita dan melihat pemenuhannya oleh ketersediaan kalori pangan. Perkiraan kebutuhan kalori pangan Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022 sebesar 324,63 milyar kkal/tahun

Tabel 2.9
Proyeksi Kebutuhan Pangan Wilayah Kab. Batu Bara Pada Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jlh Penduduk	Kebutuhan Kalori Pangan
1	Sei Balai	30.499	23.377.483.500
2	Tanjung Tiram	36.309	27.830.848.500
3	Nibung Hangus	32.274	24.738.021.000
4	Talawi	33.075	25.351.987.500
5	Datuk Tanah Datar	27.627	21.176.095.500
6	Lima Puluh	36.629	28.076.128.500
7	Lima Puluh Pesisir	36.634	28.079.961.000
8	Datuk Lima Puluh	25.087	19.229.185.500
9	Air Putih	53.753	41.201.674.500
10	Sei Suka	34.469	26.420.488.500
11	Laut Tador	22.244	17.050.026.000
12	Medang Deras	54.920	42.096.180.000
	Batu Bara	423.520	324.628.080.000

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Daya Dukung Pangan

Tabel 2.10
Daya Dukung Pangan Wilayah Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2022

No	Kecamatan	Suplai Kalori Pangan	Surplus/Defisit	Daya Dukung
1	Sei Balai	17.811.379.821,22	21.601.538.606,58	Belum Terlampaui
2	Tanjung Tiram	355.834.480,00	-27.475.014.020,00	Terlampaui
3	Nibung Hangus	7.432.237.946,45	-11.794.073.082,59	Terlampaui
4	Talawi	4.213.792.706,34	-16.146.364.623,20	Terlampaui
5	Datuk Tanah Datar	9.834.907.186,59	192.233.390,56	Belum Terlampaui
6	Lima Puluh	2.933.219.759,10	-24.182.706.390,64	Terlampaui
7	Lima Puluh Pesisir	12.820.471.567,76	4.374.097.320,54	Belum Terlampaui
8	Datuk Lima Puluh	24.433.415.169,09	24.530.531.343,58	Belum Terlampaui
9	Air Putih	27.162.035.327,46	28.716.588.891,71	Belum Terlampaui
10	Sei Suka	12.522.958.132,36	4.728.967.435,78	Belum Terlampaui
11	Laut Tador	2.802.879.672,61	-14.184.655.650,00	Terlampaui
12	Medang Deras	27.502.531.541,49	30.008.521.000,09	Belum Terlampaui
	Kab. Batu Bara	149.825.663.310,46	20.369.664.222,43	Belum Terlampaui

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung dengan mempertimbangkan suplai kalori pangan pada tahun 2022 dengan kebutuhan kalori pangan penduduk pada tahun yang sama. Daya dukung pangan secara keseluruhan kabupaten Belum Terlampaui, dengan kondisi surplus sebesar 20,37 milyar kkal. Kondisi daya dukung pangan belum terlampaui terdapat di 7 (tujuh) kecamatan, dengan surplus terbesar di Kecamatan Medang Deras yang memiliki surplus sebesar 30,01 miliar kkal.

Proyeksi Daya Dukung Pangan

Dengan memperhitungkan penambahan jumlah penduduk dan perubahan guna lahan, ketersediaan/suplai kalori pangan berdasarkan jumlah komoditi pangan dan hewani penghasil kalori pangan di Kabupaten Batu Bara masih belum terlampaui sejak tahun 2025 hingga tahun 2029 dengan surplus yang meningkat. Pada tahun 2025 terdapat surplus sebanyak dari 29,84 miliar kkal meningkat menjadi 40,74 miliar kkal pada tahun 2029. Peningkatan daya dukung pangan terjadi karena peningkatan lahan ladang yang juga memiliki produktivitas kalori tinggi. Selain itu lahan tambak juga mengalami penambahan lahan berdasarkan arahan rencana pola ruang RTRW. Meskipun terjadi penurunan lahan sawah dan perkebunan, namun peningkatan kalori dari ladang dan tambak cukup untuk meningkatkan daya dukung pangan di Kabupaten Batu Bara.

Tabel 2.11

Proyeksi Perubahan Lahan Pertanian (Sawah, Holtikultura dan Tambak) Penghasil Kalori Pangan dan Proyeksi Daya Dukung Pangan Wilayah Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2025-2029

Penggunaan Lahan (Ha)	2022	2045	Perubahan /tahun	2025	2026	2027	2028	2029
Sawah	12.547,0	10.876,2	-73	12.329,03	12.256,39	12.183,75	12.111,11	12.038,47
Ladang	555,4	4.431,3	169	1.060,92	1.229,44	1.397,96	1.566,47	1.734,99
Perkebunan	64.157,9	36.783,2	-1.190	60.587,27	59.397,07	58.206,87	57.016,66	55.826,46
Tambak/Perikanan	546,2	663,0	5	561,42	566,50	571,58	576,65	581,73
Produksi Kalori Pangan (kkal/tahun)	344.997.744.222,43							
Sawah (Beras)	306.944.638.262,43							
Ladang (Nabati dan Ternak Kecil)	34.689.974.260,00							
Perkebunan (Ternak Besar)	856.108.800,00							
Tambak (Ikan)	2.507.022.900,00							
Produktivitas Kalori Pangan (Kkal/ha/tahun)								
Sawah (Beras)	24.463.664,6							
Ladang (Nabati dan Ternak Kecil)	62.463.037,5							
Perkebunan (Ternak Besar)	13.343,8							
Tambak (Ikan)	4.590.026,6							
Proyeksi Ketersediaan Kalori Pangan				371.267.140.791,80	380.023.606.314,93	388.780.071.838,05	397.536.537.361,18	406.293.002.884,30
Sawah (Beras)				301.613.373.353,51	299.836.285.050,54	298.059.196.747,57	296.282.108.444,59	294.505.020.141,62
Ladang (Nabati dan Ternak Kecil)				66.268.367.981,73	76.794.499.222,30	87.320.630.462,88	97.846.761.703,45	108.372.892.944,03
Perkebunan (Ternak Besar)				808.463.375,65	792.581.567,53	776.699.759,41	760.817.951,30	744.936.143,18
Tambak (Ikan)				2.576.936.080,92	2.600.240.474,56	2.623.544.868,20	2.646.849.261,84	2.670.153.655,48
Jumlah Pdddk				445.443	453.099	460.894	468.829	476.907
Kebutuhan Kalori Pangan (2100 kkal/kapita/hari)				341.431.702.603	347.300.455.342	353.274.916.537	359.357.078.562	365.548.973.034
Surplus/Defisit Kalori Pangan				29.835.438.188	32.723.150.973	35.505.155.301	38.179.458.799	40.744.029.850
Daya Dukung Pangan				BELUM TERLAMPAUI	BELUM TERLAMPAUI	BELUM TERLAMPAUI	BELUM TERLAMPAUI	BELUM TERLAMPAUI

KLHSRPJMDKABUPATENBATUBARA2025-2029

Dengan mempertimbangkan pertumbuhan jumlah penduduk dan perubahan guna lahan diproyeksikan daya dukung pangan Kabupaten Batu Bara secara keseluruhan telah terlampaui sejak tahun 2025 hingga tahun 2029, dengan jumlah defisit yang terus menurun dari tahun 2025 sebesar 161,12 miliar kkal dan pada tahun 2029 menjadi 144,59 miliar kkal

b. Daya Dukung Penyediaan Air

Sumber daya air yang tersedia di suatu wilayah dapat berupa sumber air tanah dan air permukaan. Ketersediaan air tanah yang dimiliki suatu wilayah adalah air tanah pada akuifer bebas dengan jumlah sebesar kemampuan lahan pada wilayah tersebut menyerap air hujan. Untuk menjaga kelestarian sumberdaya air, air tanah dalam yang merupakan air pada akuifer tertekan tidak diperhitungkan dalam penghitungan ketersediaan air, karena air tanah dalam dikategorikan sebagai non-renewable resources (sumberdaya tidak terbarukan). Sementara sumber air permukaan dapat bersumber dari air sungai, air danau, situ, bendungan yang ada di wilayah tersebut dan atau dipasok/dialirkan dari luar wilayah. Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (supply air) dan kebutuhan air (demand air) terdapat dihitung melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan potensi mata air yang dibandingkan dengan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Melalui perhitungan berikut:

$$DDA = SA - DA$$

dimana :DDA adalah Daya Dukung Air, SA Ketersediaan Air, dan DA adalah Kebutuhan Air

b.1 Ketersediaan Air

Potensi jasa penyediaan air bersih bagi Kabupaten Batu Bara dapat terbagi atas: air permukaan maupun air tanah. Karena tidak diperoleh data air tanah, daya dukung penyediaan air permukaan di wilayah Kabupaten Batu Bara dihitung dari limpasan air hujan.

Penghitungan debit air limpasan akan menggunakan Metoda Rasional. Penghitungan limpasan air hujan menggunakan metoda rasional. Debit

limpasan yang dimaksud adalah debit limpasan air hujan dan debit limpasan domestik. Debit limpasan air hujan mempertimbangkan beberapa parameter, yaitu : koefisien limpasan, intensitas hujan, dan luas area tangkap. Koefisien limpasan merupakan penjumlahan pembobotan dari parameter permukaan.

Perhitungan debit rencana menggunakan rumus berikut :

$$SA = 10 \times C \times I \times A$$

dimana : SA = ketersediaan air (m³/tahun)
 C = koefisien pengaliran/limpasan air tertimbang
 I = intensitas curah hujan (mm/tahun)
 A = luas daerah tangkapan hujan (Ha)

Koefisien limpasan air tertimbang (C) merupakan koefisien laju run off surface yang dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan. Perhitungan koefisien limpasan air tertimbang (I) menggunakan rumus berikut :

$$C = \frac{\sum(C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

Tabel 2.12
Koefisien Limpasan Air Permukaan Kabupaten Batu Bara

Jenis Penutup Lahan	Luas (ha)	Koef	Luas * Koef
Air Danau	14,49	0,05	0,72
Air Empang	13,41	0,05	0,67
Air Sungai	990,26	0,05	49,51
Air Waduk	6,80	0,05	0,34
Bangunan Industri	213,39	0,5	106,69
Hamparan Pasir Pantai	6,32	0,3	1,89
Hutan Bakau Rapat	503,75	0,05	25,19
Hutan Bakau Sedang	859,00	0,05	42,95
Hutan Campuran Sedang	20,18	0,05	1,01
Ladang	555,37	0,2	111,07
Perkebunan Karet	3.758,85	0,4	1.503,54
Perkebunan Kelapa Sawit	60.399,03	0,4	24.159,61
Permukiman	6.020,57	0,4	2.408,23
Rawa	40,09	0,05	2,00
Sawah Irigasi	12.546,96	0,15	1.882,04
Semak Belukar	2.107,75	0,07	147,54
Tambak Ikan	532,78	0,05	26,64
Total Luas * Koef	88.589,00		30.469,67

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Dengan demikian koefisien limpasan tertimbang (ct): $30.469,67/88.589 = 0,34$.

Total Limpasan = $10 \times ct \times \text{luas wilayah} \times \text{curah hujan}$

Dengan curah hujan sebesar 1.825 mm/tahun, maka total limpasan = 556.071.420,77 m³/tahun

Ketersediaan air (limpasan air permukaan) per tahun di wilayah Kabupaten Batu Bara, sebesar 556.071.420,77 m³/tahun, yang terbesar pada Kecamatan Nibung Hangus sebesar 90.799.736,72 m³/tahun dan paling sedikit di Kecamatan Tanjung Tiram sebesar 5.235.016,50 m³/tahun.

Dengan debit Sungai dari DAS Bah Bolon minimum sebesar 30,4 m³/detik atau **958.694.400,00 m³/tahun**, dengan asumsi 20% dimanfaatkan sebagai air baku air bersih, sehingga ketersediaan air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara sebesar **191.738.880,00 m³/tahun**.

Tabel 2.13
Ketersediaan Air Limpasan per Kecamatan Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2022

No	Kecamatan	Ketersediaan Air Limpasan (m ³ /tahun)
1	Kec. Air Putih	39.700.729,92
2	Kec. Datuk Lima Puluh	33.862.230,63
3	Kec. Datuk Tanah Datar	34.151.468,54
4	Kec. Laut Tador	58.812.478,28
5	Kec. Lima Puluh	73.684.583,10
6	Kec. Lima Puluh Pesisir	47.222.084,53
7	Kec. Medang Deras	41.689.196,41
8	Kec. Nibung Hangus	90.799.736,72
9	Kec. Sei Balai	54.937.677,96
10	Kec. Sei Suka	45.260.371,75
11	Kec. Talawi	30.715.846,44
12	Kec. Tanjung Tiram	5.235.016,50
	Total	556.071.420,77

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

b.2 Kebutuhan Air

Berdasarkan Buku Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daerah (Kemen LHK, Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor PDLKWS, 2019), menjelaskan

bahwa standar kebutuhan air hidup layak bagi rumah tangga (domestik) dan non domestik disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.14
Standar Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik

No	Jenis Kebutuhan Air	Debit
1	Rumah Tangga	43,2 m ³ /kapita/tahun
2	Sawah Irigasi	10.368 m ³ /ha/tahun
3	Sawah Tadah Hujan	5.184 m ³ /ha/tahun
4	Sawad Pasang Surut	5.184 m ³ /ha/tahun
5	Ladang	7.776 m ³ /ha/tahun
6	Perkebunan	11.664 m ³ /ha/tahun
7	Kebun Campuran	7.776 m ³ /ha/tahun
8	Tanaman Campuran	7.776 m ³ /ha/tahun
9	Lahan terbangun	5 m ³ /ha/hari 30 % kebutuhan domestik
10	Kawasan Industri	0,4 liter/ha/detik
12	Bandar Udara	10 liter/ha/detik
13	Pelabuhan Laut	50 liter/ha/detik

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Kebutuhan air dengan penjumlahan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik,

$$DA = DAd + DAnd$$

Keterangan : DAd : kebutuhan air domestik (m³ /tahun)

DAnd : kebutuhan air non domestik (m³ /tahun)

Dengan proyeksi jumlah penduduk 2025-20245 yang telah dijelaskan sebelumnya, Kebutuhan air dengan penjumlahan kebutuhan domestik dan kebutuhan non domestik, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.15
Kebutuhan Air Penggunaan Lahan Kabupaten Batu Bara Pada Tahun 2022

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Standar (m ³ /ha/tahun)	Kebutuhan Air GL (m ³ /thn)
Air Danau	14,49	-	-
Air Empang	13,41	10.368,00	139.050,19
Air Sungai	990,26	-	-
Air Waduk	6,80	-	-
Bangunan Industri	213,39	12.614,40	2.691.734,27

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Standar (m3/ha/tahun)	Kebutuhan Air GL (m3/thn)
Hamparan Pasir Pantai	6,32	-	-
Hutan Bakau Rapat	503,75	-	-
Hutan Bakau Sedang	859,00	-	-
Hutan Campuran Sedang	20,18	-	-
Ladang	555,37	7.776,00	4.318.541,82
Perkebunan Karet	3.758,85	11.664,00	43.843.263,69
Perkebunan Kelapa Sawit	60.399,03	11.664,00	704.494.267,32
Permukiman	6.020,57	1.825,00	10.987.540,53
Rawa	40,09	-	-
Sawah Irigasi	12.546,96	10.368,00	130.086.888,53
Semak Belukar	2.107,75	-	-
Tambak Ikan	532,78	10.368,00	5.523.839,31
Total	88.589,00		902.085.125,66

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Kebutuhan air bersih untuk penggunaan lahan di Kabupaten Batu Bara membutuhkan air bersih sebesar **902.085.125,66** m3/tahun.

Tabel 2.16
Kebutuhan Air Bersih Per Kecamatan Wilayah Kabupaten Batu Bara
Pada Tahun 2022

Kecamatan	Kebutuhan Air GL (m3/thn)
Kec. Air Putih	75.345.135,69
Kec. Datuk Lima Puluh	57.469.695,22
Kec. Datuk Tanah Datar	53.474.160,58
Kec. Laut Tador	89.321.598,32
Kec. Lima Puluh	111.716.576,68
Kec. Lima Puluh Pesisir	81.357.495,36
Kec. Medang Deras	71.252.593,25
Kec. Nibung Hangus	142.642.671,97
Kec. Sei Balai	92.879.072,22
Kec. Sei Suka	71.146.626,39
Kec. Talawi	48.773.288,19
Kec. Tanjung Tiram	6.706.211,78
Kab. Batu Bara	902.085.126

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Berdasarkan sebaran penggunaan lahan kebutuhan air bersih terbesar dibutuhkan untuk Kecamatan Nibung Hangus dan paling kecil sedikit di Kecamatan Tanjung Tiram.

Kebutuhan air total ditentukan juga oleh jumlah penduduk di masing-masing kecamatan sehingga kebutuhan air total di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022 sebesar. 938.677.254 m³ Kebutuhan air domestik ditentukan oleh kebutuhan air per kapita sebesar 86,4 m³/tahun per kapita.

Tabel 2.17
Kebutuhan Air Bersih Total Per Kecamatan Wilayah Kabupaten Batu Bara
Pada Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah penduduk	Kebutuhan air domestik (m ³ /thn)	Kebutuhan Air GL (m ³ /thn)	Kebutuhan air Total (m ³ /thn)
Kec. Air Putih	53.753	4.644.259	75.345.135,69	79.989.395
Kec. Datuk Lima Puluh	25.087	2.167.517	57.469.695,22	59.637.212
Kec. Datuk Tanah Datar	27.627	2.386.973	53.474.160,58	55.861.133
Kec. Laut Tador	22.244	1.921.882	89.321.598,32	91.243.480
Kec. Lima Puluh	36.629	3.164.746	111.716.576,68	114.881.322
Kec. Lima Puluh Pesisir	36.634	3.165.178	81.357.495,36	84.522.673
Kec. Medang Deras	54.920	4.745.088	71.252.593,25	75.997.681
Kec. Nibung Hangus	32.274	2.788.474	142.642.671,97	145.431.146
Kec. Sei Balai	30.499	2.635.114	92.879.072,22	95.514.186
Kec. Sei Suka	34.469	2.978.122	71.146.626,39	74.124.748
Kec. Talawi	33.075	2.857.680	48.773.288,19	51.630.968
Kec. Tanjung Tiram	36.309	3.137.098	6.706.211,78	9.843.309
Kab. Batu Bara	423.520	36.592.128	902.085.126	938.677.254

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

b.3 Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Berdasarkan suplai air dari limpasan air hujan, daya dukung penyediaan air bersih bagi keseluruhan Kabupaten Batu Bara **Telah Terlampaui** dengan total-382.605.832,88 m³/tahun .

Tabel 2.18
Daya Dukung Penyediaan Air Bersih Domestik Kabupaten Batu Bara
Tahun 2022b (suplai air limpasan)

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m3/tahun)	Surplus/Defisit	Daya Dukung
Kec. Air Putih	39.700.729,92	79.989.395	-40.288.665	Terlampau
Kec. Datuk Lima Puluh	33.862.230,63	59.637.212	-25.774.981	Terlampau
Kec. Datuk Tanah Datar	34.151.468,54	55.861.133	-21.709.665	Terlampau
Kec. Laut Tador	58.812.478,28	91.243.480	-32.431.002	Terlampau
Kec. Lima Puluh	73.684.583,10	114.881.322	-41.196.739	Terlampau
Kec. Lima Puluh Pesisir	47.222.084,53	84.522.673	-37.300.588	Terlampau
Kec. Medang Deras	41.689.196,41	75.997.681	-34.308.485	Terlampau
Kec. Nibung Hangus	90.799.736,72	145.431.146	-54.631.409	Terlampau
Kec. Sei Balai	54.937.677,96	95.514.186	-40.576.508	Terlampau
Kec. Sei Suka	45.260.371,75	74.124.748	-28.864.376	Terlampau
Kec. Talawi	30.715.846,44	51.630.968	-20.915.122	Terlampau
Kec. Tanjung Tiram	5.235.016,50	9.843.309	-4.608.293	Terlampau
Kab. Batu Bara	556.071.420,77	938.677.253,66	-382.605.832,88	Terlampau

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Defisit terbesar di Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Air Putih, dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir. Dengan memasukkan debit aliran sungai dari DAS Bah Bolon sebagai air baku, sebesar 191.738.880,00 m3/tahun, maka status daya dukung air bersih **Telah Terlampaui**, dengan total defisit keseluruhan kabupaten sebesar **190.866.952,88 m3/tahun**.

b.4 Proyeksi Penyediaan Air Bersih

Untuk proyeksi daya dukung air bersih tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kebutuhan air domestik akibat pertumbuhan penduduk juga mempertimbangkan proyeksi perubahan lahan. Berikut perubahan penggunaan lahan pada tahun 2025-2029, berdasarkan peruntukan lahan pada tahun 2022 dan pola ruang pada tahun 2045.

Tabel 2.19
Proyeksi Perubahan Guna Lahan dan Jumlah Penduduk
Tahun 2025-2029 (m3/tahun)

Penggunaan Lahan	2022	2045	Perubahan /tahun (Ha)	2025	2026	2027	2028	2029
Hutan	20,18	1.533,05	65,78	217,51	283,29	349,06	414,84	480,62
Kawasan Perkebunan	64.157,88	36.783,22	- 1.190,20	60.587,27	59.397,07	58.206,87	57.016,66	55.826,46
Kawasan Permukiman	6.020,57	19.953,15	605,76	7.837,86	8.443,63	9.049,39	9.655,16	10.260,92
Kawasan Industri	213,39	12.600,84	538,59	1.829,14	2.367,73	2.906,31	3.444,90	3.983,48
Sawah	12.546,96	10.876,20	- 72,64	12.329,03	12.256,39	12.183,75	12.111,11	12.038,47
Ladang	555,37	4.431,28	168,52	1.060,92	1.229,44	1.397,96	1.566,47	1.734,99
Tambak/Perikanan	546,19	662,96	5,08	561,42	566,50	571,58	576,65	581,73
Hutan Bakau/Mangrove	1.402,85	145,62	- 54,66	1.238,86	1.184,20	1.129,54	1.074,88	1.020,21
Badan Air	1.011,55	482,98	- 22,98	942,61	919,63	896,64	873,66	850,68
Hamparan Pasir Pantai	6,32	-	- 0,27	5,49	5,22	4,94	4,67	4,39
Vegetasi lain	2.107,75	1.119,71	- 42,96	1.978,87	1.935,91	1.892,96	1.850,00	1.807,04
Total	88.589,00	88.589,00		88.589,00	88.589,00	88.589,00	88.589,00	88.589,00
Jumlah Pdddk				445.443	453.099	460.894	468.829	476.907

KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Tabel 2.20
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Batu Bara
Tahun 2025 - 2029

Penggunaan lahan	2025		2026		2027		2028		2029	
	Air Limpasan (c*A)	Kebutuhan GL (d*A)	Air Limpasan (c*A)	Kebutuhan GL (d*A)	Air Limpasan (c*A)	Kebutuhan GL (d*A)	Air Limpasan (c*A)	Kebutuhan GL (d*A)	Air Limpasan (c*A)	Kebutuhan GL (d*A)
Hutan	10,88	-	14,16	-	17,45	-	20,74	-	24,03	-
Kawasan Perkebunan	24.234,91	706.689.951,60	23.758,83	692.807.425,14	23.282,75	678.924.898,67	22.806,67	665.042.372,20	22.330,58	651.159.845,74
Kawasan Permukiman	3.135,15	14.304.099,44	3.377,45	15.409.619,08	3.619,76	16.515.138,71	3.862,06	17.620.658,35	4.104,37	18.726.177,99
Kawasan Industri	914,57	23.073.520,55	1.183,86	29.867.449,31	1.453,16	36.661.378,07	1.722,45	43.455.306,83	1.991,74	50.249.235,60
Sawah	1.849,36	127.827.433,31	1.838,46	127.074.281,57	1.827,56	126.321.129,83	1.816,67	125.567.978,10	1.805,77	124.814.826,36
Ladang	212,18	8.249.724,16	245,89	9.560.118,27	279,59	10.870.512,39	313,29	12.180.906,50	347,00	13.491.300,61
Tambak/Perikanan	28,07	5.820.810,13	28,32	5.873.450,33	28,58	5.926.090,54	28,83	5.978.730,75	29,09	6.031.370,96
Hutan Bakau/Mangrove	61,94	-	59,21	-	56,48	-	53,74	-	51,01	-
Badan Air	47,13	-	45,98	-	44,83	-	43,68	-	42,53	-
Hampan pasir	1,65	-	1,57	-	1,48	-	1,40	-	1,32	-
Vegetasi lain	138,52	-	135,51	-	132,51	-	129,50	-	126,49	-
Koef tertimbang	0,35		0,35		0,35		0,35		0,35	
Sedia Air Limpasan (10*Koef. *A*Curah Hujan)	559.076.946,15		560.078.787,94		561.080.629,73		562.082.471,52		563.084.313,31	
Air Baku Sungai	191.738.880,00		191.738.880,00		191.738.880,00		191.738.880,00		191.738.880,00	
Pasokan Air Total	750.815.826,15		751.817.667,94		752.819.509,73		753.821.351,52		754.823.193,31	
Kebutuhan GL		885.965.539,19		880.592.343,71		875.219.148,22		869.845.952,73		864.472.757,24
Jlh Penduduk		445.442,53		453.099,09		460.893,56		468.828,54		476.906,68
Kebutuhan Domestik		38.486.234,97		39.147.761,70		40.506.786,15		40.506.786,15		41.204.737,47
Kebutuhan Air Total		924.451.774,16		919.740.105,40		915.725.934,37		910.352.738,89		905.677.494,71
Surplus-Defisit		-173.635.948,02		-167.922.437,47		-162.906.424,64		-156.531.387,37		-150.854.301,40
Daya Dukung		Terlampau		Terlampau		Terlampau		Terlampau		Terlampau

Dari perhitungan proyeksi daya dukung penyediaan air di atas, diperlihatkan bahwa kondisi daya dukung penyediaan air di Kabupaten Bara Telah Terlampaui sejak tahun 2025 hingga 2029. Pada tahun 2025 defisit sebesar 173,64 juta m³/tahun, namun semakin menurun defisitnya pada tahun 2029 menjadi 150,85 juta m³/tahun.

Selain daya dukung di atas, beberapa aspek dalam kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 ini juga mengkaji beban pencemaran, kondisi lingkungan hidup, dan resiko lingkungan hidup.

Beban dan resiko lingkungan hidup diantaranya :

a. Beban Pencemaran

1) Persampahan

Persampahan merupakan penyebab risiko pencemaran lingkungan. Diperkirakan setiap orang penduduk menghasilkan 0,4 kg sampah per hari. Timbulan sampah akan terus meningkat sejak tahun 2025 sebesar 178,18 ton/hari, pada tahun 2029 menjadi 190,76 ton/hari. Sampah di Kabupaten Batu Bara, terdiri dari sampah domestik dan sampah industri.

Timbulan sampah terbesar terdapat Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Air Putih. Dengan kapasitas angkutan sampah sebesar 60 ton per hari, kapasitas angkutan mencapai 33,67% dari total volume sampah dan mengecil pada tahun 2029 menjadi 31,45%.

Luas lahan TPA kabupaten seluas 4 Ha dengan ketinggian timbulan sampah di TPA dibatasi sampai 8 m, sehingga volume tampung TPA sebesar 320.000 m³. Dengan mengasumsikan TPA mulai diisi dengan timbulan sampah mulai tahun 2025, maka timbulan sampah di Kabupaten Batu Bara akan meningkat pada tahun 2025 sebesar 65.700 m³, terus meningkat hingga pada tahun 2029 menjadi 328.500 ton per hari m³, melebihi kapasitas tampung TPA, dengan kekurangan volume 8.500 m³. Beberapa arah kebijakan penanganan sampah mencakup penambahan kapasitas angkut, pengelolaan pengangkutan, pengurangan, pemilahan dan penanganan sampah di sumber sampah dan pasar; dan pengolahan sampah industri.

2) Lumpur Tinja

Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Cara Perencanaan IPLT No. CT/AL/Re-TC/001/98, setiap manusia menghasilkan lumpur tinja sebanyak 0,5 liter per hari atau 0,1825 m³ per tahun, produksi lumpur tinja di Kabupaten Batu Bara sebesar 81.293 m³/tahun (2025) menjadi 87.035 m³/tahun (2029).

3) Air Limbah Domestik

Bahan pencemar pada air limbah domestik yang berasal dari berbagai kegiatan industri, pertanian, rumah tangga di daratan akhirnya dapat menimbulkan dampak negatif bukan saja pada perairan sungai, tetapi juga perairan pesisir dan lautan. Sumber pencemaran perairan pesisir dan sungai di Kabupaten Batu Bara berasal dari kegiatan industri, kegiatan domestik, dan pertanian/perkebunan.

Dengan standar volume air limbah domestik standar dari Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 dihasilkan dari air bersih dan volume air limbah domestik adalah 80% air bersih. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Menurut Pedoman Penentuan Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah kebutuhan total air bersih domestik adalah 86,4 m³/kapita/tahun. Maka standar produksi air limbah domestik adalah 69,12 m³/kapita/tahun pada kawasan perumahan. Volume air limbah domestik di Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2025 akan sebesar 30.788.988 m³ dan pada tahun 2029 meningkat menjadi 31.430.377 m³/tahun.

b. Kondisi Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup (IKLH) di Kabupaten Batu Bara masih memerlukan perhatian walau memiliki indeks yang mengalami peningkatan, dalam komponen indeks kualitas air (IKA) di Kabupaten Bara masih dalam kategori Cemar Sedang, indeks kualitas udara dalam kategori yang kategori baik dan indeks kualitas lahan (IKL) masih berada pada kategori kurang.

c. Resiko Bencana Alam

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu

potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara menunjukkan nilai yang tinggi, yaitu : 143,2 (2023). Nilai tersebut masih jauh dari target nasional yang ada dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 77,96. Untuk memperkecil nilai risiko bencana dan mencapai target nasional diperlukan usaha yang besar dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, di wilayah Kabupaten Batu Bara terdapat dua jenis bencana alam yang berpengaruh atau memiliki risiko tinggi, yaitu : bencana banjir dan bencana cuaca ekstrim. Risiko tinggi pada kedua kerawanan bencana tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara.

Rawan banjir risiko tinggi seluas 40.596,33 Ha, terluas terdapat di Kecamatan Nibung Hangus seluas 11.311,18 Ha. Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka juga memiliki risiko yang cukup luas di atas 4.000 Ha per kecamatan.

Rawan cuaca ekstrim risiko tinggi meliputi wilayah seluas 57.561,93 Ha, terluas terdapat di Kecamatan Medang Deras sebesar 8.047,48 Ha luas wilayahnya. Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, dan Kecamatan Air Putih juga memiliki wilayah risiko tinggi cuaca ekstrim yang cukup luas, lebih dari 7.000 Ha di masing-masing kecamatan.

4 Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, Rumah Tangga, dan Individu secara berkelanjutan. Target pencapaian angka ketersediaan pangan perkapita

pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan. Secara garis besar, skor PPH ketersediaan pangan Kabupaten Batu Bara berada pada angka di atas 80. Skor PPH Ketersediaan tersebut perlu lebih ditingkatkan dari tahun ke tahun. Angka Skor PPH Ketersediaan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.21
Gambaran Umum Kinerja Urusan Pangan
di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Skor PPH Ketersediaan	%	91	89,73	87,27	87,27	81,1

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Tabel 2.22
Produksi Tanaman Pangan (Padi dan Palawija)
Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	166.054,13	160.909,46	157,472.84	131.573,52	138.476,24
2	Jagung	4.089,16	1.759,56	3,994.18	821,08	3.279,57
3	Ubi Kayu	13.745,70	15.519,80	13,746.34	375,00	13.957,94
4	Ubi Jalar	32,87	21,70	320.67	203,00	-
5	Kacang Kedelai	4,22	0,34	8.35	8,00	-
6	Kacang Tanah	3,58	0,59	20.13	10,60	0,93
7	Kacang Hijau	8,18	10,84	10.65	12,70	2,79

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2.23
Produksi Daging Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging Sapi	267,95	244,65	282,16	306,425	271,91
2	Daging Kambing	22,15	17,74	27,61	21,002	27,34
3	Daging Domba	38,28	31,86	54,45	47,407	53,44
Jumlah		330,56	328,38	1.232.29	374,834	352.69

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

b. Penggunaan Listrik

Listrik termasuk dalam kelompok sumber daya yang sangat berkontribusi besar bagi globalisasi dunia dan berperan sebagai: Meningkatkan interaksi atau hubungan timbal balik antar negara, mencukupi kebutuhan manusia, menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Tabel 2.24
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik pada PT. PLN
di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Uraian	2024
Daya Terpasang (KW)	219.889.650
Produksi Listrik (KWh)	48.533.515
Listrik Terjual (KWh)	37.624.296
Dipakai Sendiri (KWh)	259.037
Susut/Hilang (KWh)	2.296.049

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara, 2024

c. Ketahanan Air

Di sektor ketahanan air, beberapa kondisi seperti kondisi irigasi yang dapat mendorong kemandirian pangan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.25
Persentase luas jaringan irigasi Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase luas jaringan irigasi dalam keadaan baik	%	42,86	42,86	46,14	57,88	87,30

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Batu Bara

d. Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Tabel berikut ini menunjukkan jumlah air bersih yang disalurkan ke setiap kecamatan tahun 2024. Kecamatan dengan distribusi air terbesar adalah Kecamatan Talawi dengan aliran distribusi sebesar 205.521 m³.

Tabel 2.26
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (M ³)	Nilai (Rp)
1.	Sei Balai	729	79.893	340.134.800
2.	Tanjung Tiram	205	200.522	1.486.891.762
3.	Nibung Hangus	-	-	-
4.	Talawi	1.393	205.521	856.104.800
5.	Datuk Tanah Datar	-	-	-
6.	Lima Puluh	205	4.211	170.634.850
7.	Lima Puluh Pesisir	357	17.028	103.831.225
8.	Datuk Lima Puluh	-	-	-
9.	Air Putih	616	72.491	336.639.995
10.	Sei Suka	-	-	-
11.	Laut Tador	-	-	-
12.	Medang Deras	1016	150.129	559.569.640
TOTAL		6.206	764.508	3.853.807.072

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi lingkungan hidup (IKLH) di Kabupaten Batu bara masih memerlukan perhatian walau memiliki indeks yang mengalami peningkatan, dalam komponen indeks kualitas air (IKA) di Kabupaten Bara, masih dalam kategori Cemar Sedang, dari komponens indeks kuliata udara dalam kategori yang kategori baik, sedangkan komponen indek kualitas lahan (IKL) masih kategori kurang, dan bahkan pada tahun 2022 sempat masuk dalam kategori sangat kurang.

Tabel 2.27
Perkembangan Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Batu Bara 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
IKA	-	55	50
IKU	80,86	83,19	84,38
IKL	23,37	23,37	24,24
IKLH	37,87	59,49	58,28

Lingkungan Hidup berkualitas juga didukung oleh Pelayanan Persampahan Kebersihan, Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup melalui Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan serta penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai. Berikut beberapa kondisi pendukung lingkungan hidup berkualitas.

Tabel 2.28
Kondisi Pendukung Lingkungan Hidup Berkualitas Kabupaten Batu Bara
Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Pengelolaan Persampahan	Kecamatan	12	12	12	12	12
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air	%	83.33	100	100	100	100
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara	%	100	100	100	100	100
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%		76.64	87.79	88.23	88.73

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Persampahan merupakan penyebab risiko pencemaran lingkungan. Diperkirakan setiap orang penduduk menghasilkan 0,4 kg sampah per hari. Timbulan sampah akan terus meningkat sejak tahun 2025 sebesar 178,18 ton/hari, pada tahun 2029 menjadi 190,76 ton/hari. Sampah di Kabupaten Batu Bara, terdiri dari sampah domestik dan sampah industri. Proyeksi timbulan sampah domestik bergantung pada proyeksi jumlah penduduk tahun 2025-2029.

Tabel 2.29
Proyeksi Total Timbulan Sampah di Kabupaten Batu Bara
2025-2029

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Sei Balai	12,85	13,08	13,31	13,55	13,79
2	Tanjung Tiram	14,98	15,14	15,30	15,46	15,63
3	Nibung Hangus	13,64	13,89	14,15	14,41	14,68

No	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
4	Talawi	14,02	14,29	14,57	14,86	15,15
5	Datuk Tanah Datar	11,55	11,72	11,90	12,08	12,26
6	Lima Puluh	15,34	15,58	15,82	16,07	16,32
7	Lima Puluh Pesisir	15,81	16,22	16,64	17,07	17,51
8	Datuk Lima Puluh	10,48	10,64	10,80	10,96	11,12
9	Air Putih	22,72	23,14	23,58	24,02	24,47
10	Sei Suka	14,36	14,55	14,75	14,95	15,16
11	Laut Tador	9,24	9,36	9,48	9,61	9,73
12	Medang Deras	23,19	23,62	24,05	24,49	24,94
	Total (Ton/hari)	178,18	181,24	184,36	187,53	190,76
	Total Vol (m3/hari)	534,53	543,72	553,07	562,59	572,29
	Total Vol (m3/tahun)	195.103,83	198.457,40	201.871,38	205.346,90	208.885,13

Timbunan sampah terbesar terdapat Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Air Putih. Dengan kapasitas angkutan sampah sebesar 60 ton per hari, kapasitas angkutan mencapai 33,67% dari total volume sampah dan mengecil pada tahun 2029 menjadi 31,45%.

Tabel 2.30
Proyeksi Kapasitas TPA di Kabupaten Batu Bara 2025-2029

Beban Persampahan	2025	2026	2027	2028	2029
Total Vol (m3/hari)	534,53	543,72	553,07	562,59	572,29
Total Vol (m3/tahun)	195.103,83	198.457,40	201.871,38	205.346,90	208.885,13
Kapasitas Angkut Sampah/tahun (60 ton/hari)	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
Persentase Angkut	33,67%	33,11%	32,55%	31,99%	31,45%
Kumulatif (m3)	65.700,00	131.400,00	197.100,00	262.800,00	328.500,00
Vol Tampung TPA (Luas = 4 Ha; Tinggi = 8 m)	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
<i>Remaining Capacity</i> (m3)	254.300,00	188.600,00	122.900,00	57.200,00	-8.500,00

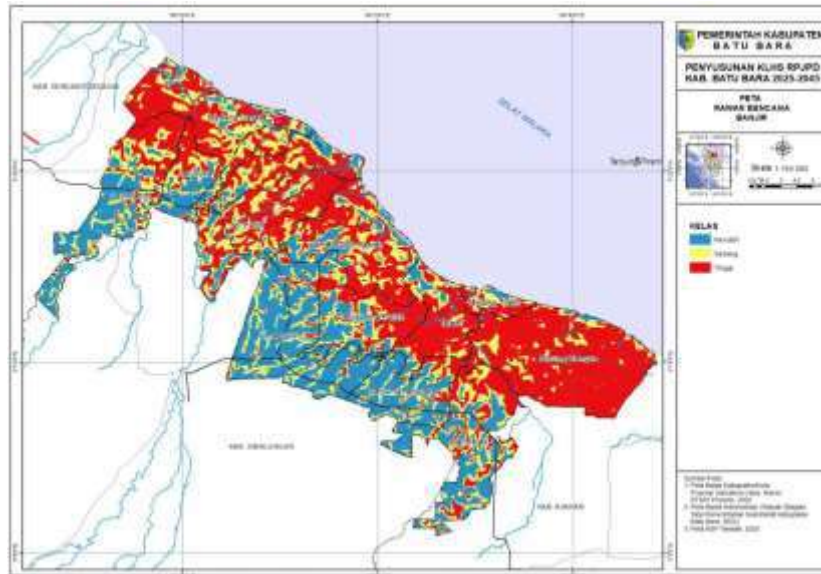
Luas lahan TPA kabupaten seluas 4 Ha dengan ketinggian timbunan sampah di TPA dibatasi sampai 8 m, sehingga volume tampung TPA sebesar 320.000 m³. Dengan mengasumsikan TPA mulai diisi dengan timbunan sampah mulai tahun 2025, maka timbunan sampah di Kabupaten Batu Bara akan meningkat pada tahun 2025 sebesar 65.700 m³, terus meningkat hingga pada tahun 2029 menjadi 328.500 ton per hari m³, melebihi kapasitas tampung TPA, dengan kekurangan volume 8.500 m³. Beberapa arah kebijakan penanganan sampah mencakup penambahan kapasitas angkut, pengelolaan pengangkutan, pengurangan, pemilahan dan penanganan sampah di sumber sampah dan pasar; dan pengolahan sampah industri.

6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan bahwa Kabupaten Batu Bara menunjukkan nilai yang tinggi, yaitu : 143,2 (2022). Nilai tersebut masih jauh dari target nasional yang ada dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu 118. Untuk memperkecil nilai risiko bencana dan mencapai target nasional diperlukan usaha yang besar dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, di wilayah Kabupaten Batu Bara terdapat dua jenis bencana alam yang berpengaruh atau memiliki risiko tinggi, yaitu : bencana banjir dan bencana cuaca ekstrim. Risiko tinggi pada kedua kerawanan bencana tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Batu Bara.

Gambar
Peta Rawan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Batu Bara

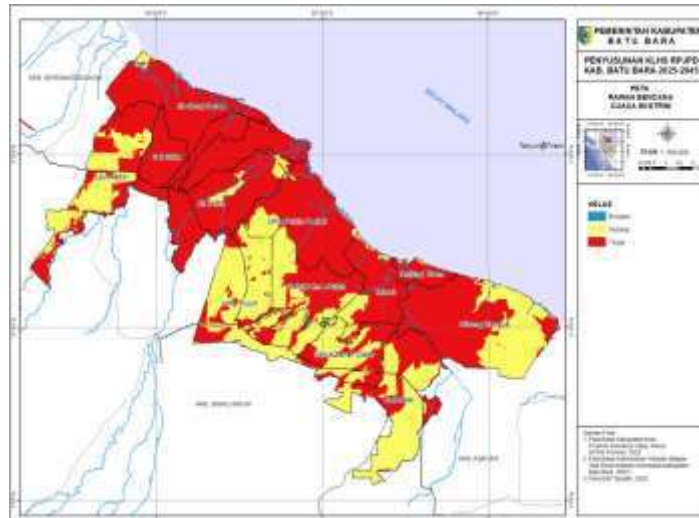


Rawan banjir risiko tinggi seluas **40.596,33 Ha**, terluas terdapat di **Kecamatan Nibung Hangus** seluas 11.311,18 Ha. Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, dan Kecamatan Sei Suka juga memiliki risiko yang cukup luas di atas 4.000 Ha per kecamatan.

Tabel 2.31
Sebaran Rawan Bencana Alam Banjir di Kabupaten Batu Bara

No	Kecamatan	Wilayah Risiko (Ha)			Total
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Datuk Lima Puluh	1.887,31	1.569,82	2.487,32	5.944,44
2	Datuk Tanah Datar	3.017,53	1.211,43	683,29	4.912,25
3	Laut Tador	3.568,74	2.387,66	2.293,83	8.250,23
4	Lima Puluh	7.482,05	2.228,03	543,99	10.254,07
5	Lima Puluh Pesisir	1.369,02	2.380,88	4.315,44	8.065,35
6	Medang Deras	793,30	2.741,74	4.808,35	8.343,39
7	Nibung Hangus	118,24	1.334,87	11.311,18	12.764,29
8	Sei Balai	3.594,19	2.486,73	2.437,16	8.518,09
9	Sei Suka	704,60	2.673,65	4.727,52	8.105,77
10	Talawi	569,72	1.052,27	3.175,45	4.797,45
11	Tanjung Tiram	146,48	396,31	770,79	1.313,58
12	Air Putih	1.955,79	2.313,65	3.028,78	7.298,24
	Kabupaten Batu Bara	25.215,60	22.777,07	40.596,33	88.589,00

Gambar
Peta Rawan Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Batu Bara



Rawan cuaca ekstrim risiko tinggi meliputi wilayah seluas **57.561,93 Ha**, terluas terdapat di **Kecamatan Medang Deras** sebesar 8.047,48 Ha luas wilayahnya. Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, dan Kecamatan Air Putih juga memiliki wilayah risiko tinggi cuaca ekstrim yang cukup luas, lebih dari 7.000 Ha di masing- masing kecamatan.

7. Demografi

a. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data BPS Kabupaten Batu Bara, jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara tahun 2020 adalah sebanyak 410.678 jiwa, pada tahun 2021 bertambah menjadi sebanyak 413.171 jiwa, tahun 2022 bertambah menjadi 416.367 jiwa, di tahun 2023 penduduk Kabupaten Batu Bara sebanyak 430.533 jiwa dan di tahun 2024 penduduk Kabupaten Batu Bara bertambah sebanyak 437.360 jiwa.

Jumlah penduduk pada suatu daerah akan mempengaruhi atau berdampak pada kebutuhan akan pangan, lahan, dan lain sebagainya, tetapi penduduk juga dapat menjadi potensi sumberdaya manusia dalam produktifitas .

Rincian jumlah penduduk Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020-2024 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara
Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lima Puluh	29.541	35.812	36.061	31.021	37.712
2.	Lima Puluh Pesisir	35.662	35.155	35.449	36.673	38.481
3.	Datuk Lima Puluh	31.206	24.544	24.698	32.855	25.792
4.	Talawi	31.912	32.123	32.388	33.706	34.325
5.	Datuk Tanah Datar	26.903	27.030	27.202	28.025	28.409
6.	Tanjung Tiram	35.623	35.826	36.051	37.180	37.016
7.	Nibung Hangus	34.921	31.381	31.609	37.559	33.423
8.	Sei Suka	24.432	33.813	34.035	25.446	35.536
9.	Laut Tador	51.959	21.843	21.975	54.728	22.782
10.	Medang Deras	33.648	53.549	54.069	34.922	56.852
11.	Air Putih	21.747	52.394	52.920	22.520	55.682
12.	Sei Balai	53.124	29.701	29.910	55.898	31.530
Batu Bara		410.678	413.171	416.367	430.533	437.360

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

b. Distribusi/Persebaran Penduduk

Distribusi persebaran penduduk Kabupaten Batu Bara dengan kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tanjung Tiram, dengan dan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Laut Tador, Kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan sebuah kondisi dimana ada potensi berbagai permasalahan di dalamnya, seperti permukiman yang padat dan kumuh, sanitasi yang buruk dan tingkat keamanan yang rendah atau rawan kriminalitas. Kecamatan Tanjung Tiram adalah sebuah kecamatan yang berada di kawasan pantai Kabupaten Batu Bara. Kecamatan Tanjung Tiram memiliki pelabuhan perikanan yang menjadi tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan dan mendaratkan ikan hasil tangkapan sekaligus menjadi lokasi untuk bongkar muat hasil tangkapan nelayan. Pelabuhan Perikanan Tanjung Tiram ini merupakan satu satunya pelabuhan perikanan di Kabupaten Batu Bara dan ini menyebabkan kawasan ini menjadi sangat padat penduduk karena nelayan banyak terkonsentrasi di tempat ini

Tabel 2.33
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Batu Bara 2024

KECAMATAN	PERSENTASE PENDUDUK					KEPADATAN PENDUDUK PER Km2				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh	8,27	8.67	7.18	8,64	8,62	360	362	422	361,67	366,85
Lima Puluh Pesisir	8,5	8.51	8.66	8,72	8,80	473	476	415	464,55	475,96
Datuk Lima Puluh	5,95	5.94	7.59	5,91	8,62	367	368	289	427,02	366,85
Talawi	7,77	7.77	7.78	7,83	7,85	742	747	379	700,89	713,77
Datuk Tanah Datar	6,55	6.54	6.53	6,51	6,50	575	578	319	569,15	576,95
Tanjung Tiram	8,68	8.67	8.66	8,53	8,46	812	816	422	2784,59	2.810,63
Nibung Hangus	7,6	7.6	8.51	7,63	7,64	240	242	370	256,78	261,22
Sei Suka	8,19	8.18	5.93	8,11	8,08	430	432	399	475,19	481,10
Laut Tador	5,3	5.29	12.71	5,23	5,21	233	234	257	272,28	275,44
Medang Deras	12,9	12.96	8.17	12,98	13,00	811	818	633	670,80	682,25
Air Putih	12,7	12.68	5.28	12,71	12,73	719	725	620	673,41	685,15
Sei Balai	7,19	7.19	12.99	7,21	7,21	319	321	350	363,29	369,25
BATU BARA	100	100	100	100	100	454	510	470	484,90	492,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

c. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Batu Bara tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4 Tahun	23.275	22.144	45.419
5-9 Tahun	22.835	21.446	44.281
10-14 Tahun	18.175	17.190	35.365
15-19 Tahun	17.012	15.714	32.726
20-24 Tahun	16.373	16.292	32.665
25-29 Tahun	18.245	18.251	36.496
30-34 Tahun	18.699	17.826	36.525
35-39 Tahun	16.091	16.081	32.172
40-44 Tahun	14.923	14.912	29.835
45-49 Tahun	13.263	13.390	26.653
50-54 Tahun	11.445	11.769	23.214
55-59 Tahun	9.667	10.396	20.063
60-64 Tahun	7.877	8.535	16.412

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
65-69 Tahun	5.935	6.199	12.134
70-74 Tahun	3.764	4.103	7.867
75+	2.386	3.147	5.533
Total	219.965	217.395	437.360

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Penduduk Kabupaten Baru Bara mayoritas beragama Islam, yaitu sebanyak 374.449 jiwa. Agama lain yang dianut penduduk Kabupaten Batu Bara adalah Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.

Tabel 2.35
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut
Di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Kecamatan	Agama yang Dianut					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya
Sei Balai	28.709	2.689	83	2	8	4
Tanjung Tiram	40.746	54	1	-	112	-
Nibung Hangus	33.539	2.122	103	1	1	2
Talawi	33.248	2.559	848	-	25	-
Datuk Tanah Datar	28.219	2.094	147	-	52	5
Lima Puluh	37.117	2.594	296	-	65	8
Lima Puluh Pesisir	39.132	1.324	418	-	1	5
Datuk Lima Puluh	25.097	2.689	421	-	3	1
Air Putih	44.421	10.066	3.257	6	499	182
Sei Suka	32.027	4.768	4.768	15	91	-
Laut Tador	21.193	2.525	2.525	-	22	2
Medang Deras	51.933	7.634	7.634	-	210	24
Batu Bara	415.381	41.118	7.441	24	1089	233

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Tabel 2.36
Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

No.	Kecamatan	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-Rata
1	Sei Balai	1,82%	1,78%	1,71%	1,77%
2	Tanjung Tiram	1,11%	1,07%	1,00%	1,06%
3	Nibung Hangus	1,91%	,87%	1,80%	1,86%

No.	Kecamatan	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Rata-Rata
4	Talawi	2,02%	1,97%	1,91%	1,97%
5	Datuk Tanah Datar	1,55%	1,50%	1,44%	1,50%
6	Lima Puluh	1,61%	1,57%	1,50%	1,56%
7	Lima Puluh Pesisir	2,64%	2,59%	2,52%	2,59%
8	Datuk Lima Puluh	1,54%	1,50%	1,43%	1,49%
9	Air Putih	1,92%	1,88%	1,81%	1,87%
10	Sei Suka	1,43%	1,38%	1,31%	1,37%
11	Laut Tador	1,35%	1,30%	1,24%	1,30%
12	Medang Deras	1,89%	1,84%	1,78%	1,84%
Batu Bara		1,76%	1,72%	1,66%	1,71%

e. Proyeksi Kependudukan

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 Angka pertumbuhan penduduk rata-rata di Kabupaten Batu Bara pada adalah sebesar 1,71%. Proyeksi pertumbuhan penduduk dari Tahun 2025 sampai dengan 2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Proyeksi Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 -2029

Kecamatan	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
Sei Balai	32.129	32.698	33.277	33.866	34.466
Tanjung Tiram	37.456	37.854	38.256	38.662	39.073
Nibung Hangus	34.088	34.721	35.367	36.024	36.694
Talawi	35.045	35.734	36.437	37.154	37.884
Datuk Tanah Datar	28.871	29.304	29.743	30.189	30.641
Lima Puluh	38.351	38.950	39.559	40.177	40.805
Lima Puluh Pesisir	39.526	40.548	41.597	42.672	43.776
Datuk Lima Puluh	26.210	26.601	26.998	27.400	27.809
Air Putih	56.797	57.861	58.944	60.048	61.173
Sei Suka	35.888	36.380	36.880	37.386	37.900
Laut Tador	23.108	23.408	23.711	24.019	24.330
Medang Deras	57.973	59.039	60.125	61.231	62.357
Batu Bara	445.443	453.099	460.894	468.829	476.907

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Batu Bara mempunyai potensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat nya. Dalam Aspek ini akan digambarkan secara umum Aspek Kesejahteraan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan social yang adaptif, beragama, maslahat, berkebudayaan maju, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi misalnya, Kabupaten Batu Bara memiliki kontribusi besar dari Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat setiap tahun. Pada indikator kesejahteraan lain seperti kemiskinan juga memperlihatkan trend yang baik di lima tahun terakhir, dengan penurunan angka kemiskinan di tiap tahunnya. Demikian juga dengan Indeks Gini yang selalu terjaga di angka 2, yang menunjukkan kabupaten batu bara memiliki ketimpangan rendah dalam lima tahun terakhir. Untuk Indikator IPM cenderung mengalami peningkatan di tiap tahunnya dan Tingkat Pengangguran terbuka mengalami penurunan setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

Disisi Kesehatan, Pendidikan, secara garis besar angka indikator seperti usia harapan hidup, rata rata lama sekolah, juga memperlihatkan trend yang positif dengan meningkat setiap tahun. Dari sisi perlindungan social, agama, budaya, dan kesejahteraan social lainnya juga dilakukan berbagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi pada masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Akan tetapi, hal tersebut juga harus diimbangi dengan pemerataan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan dalam keberhasilan pembangunan. Pada bagian ini akan menguraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Batu Bara.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan Nilai Tambah Bruto dari kegiatan perekonomian di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Data PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dan laju pertumbuhan Kabupaten Batu Bara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Batu Bara 2020-2024

Tahun	Harga Konstan Tahun 2010 (Miliar Rp)	Harga Berlaku (Miliar Rp)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 (%)	Laju Pertumbuhan PDRB ADHB (%)
2020	23.923,64	34.987,64	-0,31	2.69
2021	24 486,06	37.197,71	2,35	5.94
2022	25.482,00	40.866,72	4,07	8.98
2023	26.522,00	43.775,00	4,08	6.64
2024	27.614,17	47.317,58	4,12	7.49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batu Bara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020 sebesar Rp34.987,64 milyar, tahun 2021 sebesar Rp. 37.197,71 milyar, tahun 2022 sebesar Rp. 40.866,72 milyar, tahun 2023 sebesar Rp. 43.775,00 milyar dan tahun 2024 47.317,58 milyar.

Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Batu Bara pada tahun tahun 2020 sebesar Rp23.923,64 milyar, dan tahun 2021 sebesar Rp. 24 486,06 milyar, tahun 2022 sebesar Rp. 40.866,72 milyar, dan tahun 2023 sebesar Rp. 43.775,00 milyar. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 Kabupaten Batu Bara pada tahun 2020 sebesar - 0,31%, tahun 2021 sebesar 2,35%, tahun 2022 sebesar 4,07%, tahun 2023 sebesar 4,08% dan tahun 2024 4,12 %.

1. Struktur PDRB

Perkembangan beberapa Agregat PDRB di Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Batu Bara, Tahun 2020- 2024

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.827,21	19,51	7.533	20,25	8.615	21,08	9.588,97	21,9	10.667,33	22,54
2	Pertambangan dan Penggalian	48,51	0,14	49,68	0,13	53,25	0,13	56,47	0,13	57,75	0,12
3	Industri Pengolahan	15.961,45	45,62	17.007,75	45,72	18613,59	45,55	18.613,59	42,5	21.073,41	44,53
4	Listrik dan Gas	17,63	0,05	18,33	0,05	19,36	0,04	20,23	0,47	21,29	0,04
5	Air, Sampah, Limbah	10,95	0,03	11,31	0,03	11,42	0,03	11,81	0,02	12,48	0,02
6	Konstruksi	2.497,86	7,14	2.548,25	6,85	2715,29	6,64	2.866,25	6,55	2.882,67	6,10
7	Perdagangan; Reparasi	6.282,87	17,96	6.653,31	17,89	7281,47	17,82	8042,38	18,37	8.587,15	18,15
8	Transportasi Pergudangan	1.186,70	3,39	1.194,48	3,21	1297,43	3,17	1.392,97	3,18	1.445,73	3,05
9	Akomodasi, Makan Minum	395,27	1,13	395,69	1,06	417,47	1,02	456,33	1,04	490,11	1,03
10	Informasi dan Komunikasi	170,92	0,49	186,88	0,50	199,43	1,02	213,22	0,48	224,38	0,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	101,85	0,29	108,13	0,29	113,31	0,28	120,68	0,27	127,22	0,27
12	Real Estate	461,28	1,32	465,75	1,25	484,92	1,19	501,52	1,14	515,55	1,09
13	Jasa Perusahaan	39,08	0,11	39,74	0,11	42,15	0,10	46,05	0,10	47,89	0,10
14	Administrasi Pemerintahan	687,44	1,96	683,85	1,84	684,21	1,67	701,5	1,60	796,96	1,68
15	Jasa Pendidikan	153,05	0,44	155,12	0,42	160,16	0,39	167,04	0,38	176,72	0,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111,33	0,32	111,24	0,30	119,06	0,29	130,17	0,30	141,92	0,30
17	Jasa lainnya	34,23	0,1	35,18	0,09	39,2	0,10	44,94	0,10	49,03	0,10
	Total	34 987,64	100	37.197,71	100	40.866,72	100	43.775,00	100	47.317,58	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara (Data Diolah)

Pada tahun 2020-2024, struktur ekonomi Kabupaten Batu Bara masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan. Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, ditahun 2024 kontribusi sektor industri sebesar 44,53%, sektor pertanian sebesar 22,54%, serta sektor perdagangan sebesar 18,15%.

Posisi strategis Kabupaten Batu Bara yang ditunjang dengan ketersediaan aksesibilitas yang baik (pelabuhan, jalan trans Sumatera) berimplikasi pada berkembangnya sektor industri dan perdagangan. Di samping itu, Kabupaten Batu Bara juga memiliki potensi lahan yang baik untuk pertanian. Hal tersebut menjadi faktor tingginya kontribusi sektor industri, perdagangan, dan pertanian terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara.

Apabila ditinjau berdasarkan indikator agregrat, nilai PDRB Kabupaten Batu Bara secara harga berlaku dan konstan, menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu pendapatan regional perkapita atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan.

Tabel 2.40
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) ADHK 2010 di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 - 2024

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5 382,26	19,5	5640,46	23,04	5992,67	23.52	6182,03	23.31	6.182,03	22,39
2	Pertambangan dan Penggalan	34,27	0,14	34,46	0,14	36,05	0.14	37,37	0.28	37,37	0,13
3	Industri Pengolahan	10.841,09	45,6	10.994,56	44,90	11287,58	44.30	11.760,46	44.34	12.432,53	45,02
4	Listrik dan Gas	15,69	0,05	16,22	0,07	16,79	0.07	17,24	0.07	18,04	0,06
5	Air, Sampah, Limbah	7,04	0,03	7,20	0,03	7,23	0.03	7,38	0.03	7,54	0,03
6	Konstruksi	1 506,39	7,14	1507,12	6,16	1520,68	5.97	1.563,74	5.90	1.557,16	5,63
7	Perdagangan; Reparasi	3 917,03	18	4058,01	16,57	4322,78	16.96	4578,69	17.26	4.768,03	17,26
8	Transportasi Pergudangan	804,22	3,39	799,63	3,27	831,34	3.26	845,79	3.19	863,05	3,12
9	Akomodasi, Makan Minum	267,24	1,13	267,17	1,09	278,89	1.09	299,67	1.13	316,81	1,14

No	Sektor	2020		2021		2022		2023		2024	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	
10	Informasi dan Komunikasi	159,13	0,49	170,33	0,70	178,09	0,70	188,91	0,71	199,49	0,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	70,06	0,29	72,09	0,29	75,02	0,29	79,72	0,30	83,05	0,30
12	Real Estate	273,23	1,32	273,99	1,12	281,01	1,10	289,17	1,09	295,78	1,07
13	Jasa Perusahaan	21,52	0,11	21,45	0,09	22,24	0,09	23,32	0,09	23,83	0,08
14	Administrasi Pemerintahan	421,47	1,96	419,47	1,71	419,13	1,64	424,98	1,60	469,92	1,70
15	Jasa Pendidikan	112,15	0,44	113,28	0,46	116,7	0,46	120,71	0,46	124,81	0,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,93	0,32	69,93	0,29	73,05	0,29	77,81	0,29	83,22	0,30
17	Jasa lainnya	20,92	0,1	21,37	0,09	22,96	0,09	25,70	0,10	27,73	0,10
	Total	23 923,64	100	24486,06	100	25482,21	100	26522,68	100	27.614,17	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Posisi strategis Kabupaten Batu Bara yang ditunjang dengan ketersediaan aksesibilitas yang baik (pelabuhan, jalan trans Sumatera) berimplikasi pada berkembangnya sektor industri dan perdagangan. Di samping itu, Kabupaten Batu Bara juga memiliki potensi lahan yang baik untuk pertanian. Hal tersebut menjadi faktor tingginya kontribusi sektor industri, perdagangan, dan pertanian terhadap PDRB Kabupaten Batu Bara.

Apabila ditinjau berdasarkan indikator agregrat, nilai PDRB Kabupaten Batu Bara secara harga berlaku dan konstan, menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, nilai PDRB perkapita juga mengalami pertumbuhan secara positif. Hal tersebut menunjukkan seiring pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi juga terhadap produktivitas ekonomi daerah yang semakin meningkat.

Struktur perekonomian Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan sebesar 44,54 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,54 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,15 persen. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya, dari ketiga lapangan usaha utama tersebut, hanya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang mengalami penurunan kontribusi.

Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 85,23 persen terhadap total ekonomi Kabupaten Batu Bara

Pada tahun 2024, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 10,57 persen; diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 7,92 serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,95 persen. Pada tahun 2024, terdapat lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Konstruksi sebesar 0,42 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Industri Pengolahan serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan di Kabupaten Batu Bara tumbuh masing-masing sebesar 5,71 persen dan 2,00 persen.

Tabel 2.41
Perkembangan Beberapa Agregat PDRB dan
Pendapatan Perkapita di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB atas Dasar Harga Berlaku	34 987,64	37 197,71	40.866,72	43 775	47 318
2	PDRB atas Dasar Harga Konstan	23 923,64	24 486,06	25.482,21	26 522	27 616
3	Pendapatan Regional Perkapita atas Dasar Harga Berlaku	83.283,48	90 029,83	98.150,71	101 676 287	108,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, ekonomi Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 tumbuh sebesar 4,12 persen. Pada tahun 2024, seluruh komponen PDRB Pengeluaran tumbuh positif. Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 8,56 persen; diikuti oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 5,45 persen. Selama dua tahun terakhir komponen PK-LNPRT menjadi komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi. Komponen yang juga memiliki peran penting pada ekonomi Kabupaten Batu Bara yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

tumbuh sebesar 4,51 persen. Kemudian, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami perlambatan yang cukup dalam dibandingkan sebelumnya yaitu hanya tumbuh 0,96 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Batu Bara menurut Pengeluaran tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup hampir separuh dari PDRB Kabupaten Batu Bara, yaitu sebesar 40,37 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap ekonomi Kabupaten Batu Bara secara berturut-turut adalah Net Ekspor antarwilayah sebesar 34,52 persen; Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 18,56 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 4,62 persen. Walaupun Pengeluaran Konsumsi LNPRT memiliki pertumbuhan terbesar, namun kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Batu Bara hanya sebesar 0,81 persen.

Tabel 2.42
Struktur Ekonomi Kabupaten Batu Bara menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2022 - 2024

Komponen	Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,61	5,26	4,51	39,28	40,54	40,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,85	7,10	8,56	0,74	0,79	0,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,16	3,21	5,45	4,65	4,63	4,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,56	5,04	0,96	18,96	19,67	18,56
5. Perubahan Inventori	-	-	-	2,39	2,71	1,13
6. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	33,97	31,67	34,52
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4,07	4,08	4,12	100,00	100,00	100,00

b. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan adanya pemerataan ekonomi. Indeks Gini merupakan satu di antara indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Indeks Gini bernilai 0 (nol) berarti terjadi pemerataan sempurna, sementara 1 (satu)

berarti ketimpangan sempurna. Standar penilaian ketimpangan Indeks Gini ditentukan dengan kriteria berikut ini.

- Indeks Gini < 0.4 dikategorikan terjadi ketimpangan pendapatan rendah
- $0.4 < \text{Indeks Gini} < 0.5$ dikategorikan terjadi ketimpangan pendapatan sedang
- Indeks Gini > 0.5 dikategorikan terjadi ketimpangan pendapatan tinggi.

Pada tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Batu Bara 0,25, masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 0,311 dan nasional sebesar 0,376–0,378. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Batu Bara mengalami fluktuatif. Indeks Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Batu Bara, Provinsi, Nasional
Tahun 2020 - 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Gini Kab. Batu Bara	0,259	0.230	0.243	0.255	0,258
Indeks Gini Prov. umum	0,311	0.314	0.312	0.309	0,297
Indeks Gini Nasional	0,376	0,384	0,381	0,388	0,379

Sumber : BPS Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, dan Kab Batu Bara

Melalui Tabel diatas dapat dilihat Indeks GINI dikabupaten Batu Bara dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang selalu berada di bawah 0,3, yang berarti memiliki ketimpangan yang rendah. tren ini menunjukkan bahwa semua lapisan masyarakat diupayakan menikmati hasil pembangunan secara merata. Faktor-faktor seperti akses yang tidak merata terhadap pendidikan, pekerjaan, dan peluang ekonomi lainnya dapat menjadi penyebab utama meningkatnya ketimpangan ini.

Penurunan ketimpangan ini dapat diatributkan pada berbagai faktor seperti peningkatan akses terhadap lapangan kerja formal, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada pemerataan kesejahteraan. Program sosial yang lebih terarah dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan juga dapat turut berkontribusi dalam mempengaruhi angka ketimpangan ini. Dengan upaya

yang berkelanjutan, diharapkan ketimpangan pendapatan dapat terus ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan kesejahteraan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi. Pemerintah bersama masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata

c. Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemiskinan pada suatu daerah. Garis kemiskinan ini diukur berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk dikatakan miskin apabila penduduk tersebut memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2020 hingga 2024 garis kemiskinan pada Kabupaten Batu Bara terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batu Bara cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dapat dipaparkan pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Data Kemiskinan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)	Penduduk Miskin	
			Jumlah (Ribuan jiwa)	Persentase
1	2020	452.393	49,78	11,88
2	2021	477.564	52,59	12,38
3	2022	508.524	49,39	11,53
4	2023	556.529	49,18	11,38
5	2024	591.201	47,66	10,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM

Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 adalah 73,14. IPM Kabupaten Batu Bara cenderung meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, jumlah peningkatan IPM Kabupaten Batu Bara relatif kecil dan belum mampu menyamai IPM Provinsi Sumatera Utara. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Batu Bara dan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.45
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Batu Bara dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Kabupaten Batu Bara	68,36	68,58	69,51	72,56	73,14
IPM Provinsi Sumatera Utara	71,77	72,00	72,71	75,13	75,76

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Dari sisi pembentuk IPM Kabupaten Batu Bara sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, terlihat bahwa Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Demikian halnya harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Tabel 2.46
Capaian Komponen IPM kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Komponen	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,06	8,07	8,26	8,50	8,51
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,63	12,64	12,93	13,11	13,12
Usia Harapan Hidup	Tahun	66,96	71,86	72,29	72,63	72,97
Pengeluaran Perkapita	Juta Rupiah	938.251	958.399	1.109.844	1.129.351	1.188.646
IPM		68,36	68,58	69,51	72,56	73,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Penduduk usia 15 tahun keatas menurut angkatan kerja dan bukan angkatan

kerja serta jenis kelamin di Kabupaten Batu Bara, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	139.787	85.775	225.562
	1. Bekerja	132.474	80.119	212.593
	2. Pengangguran Terbuka	7.313	5.656	12.969
2	Bukan Angkatan Kerja	16.365	71.315	87.680
	1. Sekolah	7.473	8265	15.738
	2. Mengurus Rumah Tangga	5.097	60.112	65.209
	3. Lainnya	3.795	2938	6.733
Jumlah		156.152	157.090	313.242
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				5,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Usia harapan hidup di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 adalah 72,97 tahun. Usia harapan hidup Kabupaten Batu Bara meningkat dalam rentang waktu tahun 2020-2024, menunjukkan adanya peningkatan kehidupan di Kabupaten Batu Bara.

Tabel 2.48
Usia Harapan Hidup Kabupaten Batu Bara

Tahun	2020 (Tahun)	2021 (Tahun)	2022 (Tahun)	2023 (Tahun)	2024 (Tahun)
Usia Harapan Hidup	66,96	71,86	72,29	72,63	72,97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

b. Prevalensi Stunting

Pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas. Semua masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat, agar sebagian besar permasalahan kesehatan masyarakat dapat diatasi. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, maka hal tersebut telah diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan baik dari sisi sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan pelayanan kesehatan dan kebijakan. Beberapa pelayanan kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah adanya fasilitas kesehatan, dokter dan tenaga medis.

Tabel 2.49
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Batu Bara

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Balita Stunting	%	7,45	7,45	16,97	8,09	5,31

c. Indikator lain di bidang kesehatan

Selain usia harapan hidup dan prevalensi stunting, pada indicator Kesehatan untuk Semua antara lain sebagai berikut

Tabel 2.50
Indikator Kesehatan untuk Semua Kab. Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan	%	69	69	67	94,11	91,4
Presentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Nasional (JKN)	%	78	78	86,6	95,07	97,18
Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	%	n.a	n.a	83,59	86,16	86,04
Angka kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	81	81	18,6	86,46	64,16
Angka Kematian Neonatal (AKN)	1000 KH	3,1	3,1	0,72	3,70	2,18
Angka Kematian Bayi (AKB)	1000 KH	3,2	3,2	0,72	4,45	2,43
Angka Kematian Anak Balita (AKABA)	1000 KH	0	0	0	0,24	0
Prevalensi Balita Stunting	%	7,45	7,45	16,97	8,09	5,31
Presentase penemuan kasus TBC yang diobati sesuai standar	%	39,4	39,4	51,40	40,28	45,81

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence)	/ 1.000 pddk	1,22	1,22	1,68	1,53	1,53
Angka Kesakitan DBD	/100.000 pddk	9,9	9,9	49,91	37,59	55,43
Presentase Desa/Kelurahan UCI	%	92	92	88,7	92,05	13,91
Presentase Desa/Kelurahan Stop BABS	%	28,47	28,47	38,41	40,39	43,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Pada tahun 2024, angka melek huruf Kabupaten Batu Bara telah mencapai 99. Hal ini menunjukkan bahwa sudah hampir seluruh masyarakat Kabupaten Batu Bara memiliki kemampuan membaca.

Tabel 2.51
Angka Melek Huruf Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 - 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf	99,98	99,98	99,98	99,98	99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 adalah 8,51 tahun, artinya RLS di Kabupaten Batu Bara masih di bawa 9 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batu Bara memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020-2024 yang menunjukkan kecenderungan yang positif. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Rata - rata Lama Sekolah (tahun)	8,06	8,07	8,26	8,50	8,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

c. Harapan Lama Sekolah

Berikut ini perkembangan Angka Harapan Sekolah di Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024:

Tabel 2.53
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batu Bara
Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,63	12,64	12,93	13,11	13,12

Secara garis besar angka harapan lama sekolah di Kabupaten Batu Bara meningkat dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 sebesar 12,63 dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 13,12.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Sosial

Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Batu Bara terdiri dari balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas nara pidana, korban penyalahgunaan napza, keluarga fakir miskin, keluarga rumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, komunitas adat terpencil, korban bencana alam, korban bencana sosial/pengungsi, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV AIDS (ODHA) dan keluarga rentan. Selain itu, indikator kinerja urusan sosial dapat dilihat melalui Penguatan PSKS dan pemberian bantuan bagi korban bencana. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.54
Indikator Perlindungan Sosial yang Adaptif Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Jiwa	90	150	200	66	270
Persentase Angka Kemiskinan	%	11,88	12,38	11,53	11,38	10,94

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Kebudayaan

Kebudayaan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat dari Kelompok Seni dan Budaya yang Masih Melestarikan Nilai Budaya Lokal dan Situs cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Batu Bara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.55
Situs cagar budaya dilestarikan Kab. Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Situs cagar budaya yang dilestarikan	%	23.02	49	49	40	50

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara

Kabupaten Batu Bara memiliki kekayaan adat dan istiadat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, sehingga terdapat banyak benda, situs maupun kawasan cagar budaya yang dimiliki, hal itu terlihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.56
Daftar Nama dan Lokasi Benda Cagar Budaya Kab. Batu Bara Tahun 2024

No	Nama Situs/Benda Cagar Budaya	Lokasi
1	Istana Niat Lima Laras	Desa Lima Laras Tg. Tiram
2	Makam Raja Lima Laras	Desa Bandar Rahmat Tg. Tiram
3	Kubu Meriam Pantai Bunga	Desa Lima Laras Tg. Tiram
4	Bukit Kerang	Desa Sei Semujur
5	Makam China	Dusun VIII Desa Sei Semujur
6	Keramat Whisnu	Dusun I Desa Sei Semujur

No	Nama Situs/Benda Cagar Budaya	Lokasi
7	Kubu Meriam Batu Bara	Desa Sei Suka
8	Meriam Kuala Indah	Terletak pada Dataran Muara Kuala Indah
9	Tugu Juang	Bandar Tinggi Sei Suka
10	Masjid Jamik Indrapura	Kelurahan Indrapura
11	Makam Kerajaan Indrapura	Kelurahan Indrapura
12	Istana Kerajaan Indrapura	Kelurahan Indrapura
13	Meriam Nenas Siam	Dusun V Desa Nenassiam
14	Makam Tuan Syech Mhd. Zein	Berada di Belakang Masjid Al- Mualim
15	Makam Kedatukan Lima Puluh/ Makam Wan Alang	Dusun III Simpang Dolok Lima Puluh
16	Kubah Batu Bara	Dusun III Kuala Gunung Dsn V Simpang Dolok
17	Meriam Simpang Dolok	Dusun III Simp. Dolok di Makam Wan Alang
18	Sumur Bor Simpang Dolok	Desa Simpang Dolok
19	Kantor Camat Simpang Dolok	Desa Simpang Dolok
20	Bangker Jepang	Dusun VI Desa Perupuk
21	Masjid Wan Syahroni/ Makam Wan Syahroni	Dusun III Padang Genting
22	Masjid Datuk Pangunso	Dusun I Masjid Lama
23	Meriam Datuk Pangunso	Dusun III Masjid Lama

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) aktif menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio Akseptor KB aktif di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2024 terhadap Pasangan Usia Subur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.57
Rasio Akseptor KB Aktif di Kabupaten Batu Bara Tahun 2021 - 2024

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Akseptor KB Aktif	46.596	28.352	32.252	31.818
2	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	72.854	59.063	59.374	59.369
3	Rasio Akseptor KB Aktif	63,96	48,00	54,32	54,10

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dapat dilihat pada angka capaian penilaian Kabupaten Layak Anak, Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan, Ratio Kekerasan Terhadap Anak, dan Persentase Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.58
Gambaran Umum Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Indikator Capaian Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak	%	35	23	54	50,23	82,10
Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	2.95	-	3,49	5,72	75,55
Ratio Kekerasan Terhadap Anak	%	24.43	5,86	24,59	23,45	48,57
Persentase Layanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Batu Bara

Secara garis besar, aspek kesejahteraan masyarakat mengalami tren positif dari tahun 2020 sampai tahun 2024, tetapi aspek ini masih perlu dioptimalkan dimasa yang akan datang. Jika dibandingkan dengan angka provinsi Sumatera Utara, beberapa indikator seperti kemiskinan, IPM, dan lain sebagainya masih berada di bawah angka-angka provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat menjadi perhatian dimasa yang akan datang.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif untuk menghasilkan barang dan jasa bagi golongan tidak produktif. Berdasarkan penghitungan ini, rasio ketergantungan penduduk tahun 2020 sebesar 50,33, pada tahun 2021 sebesar 52,23, di tahun

2022 sebesar 51,05 dan di tahun 2023 sebesar 52,02 . Hal ini berarti per 100 penduduk usia produktif harus menanggung 52,02 penduduk usia tidak produktif.

Tabel 2.59
Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Ketergantungan	50,33	52,23	51,05	52,02	52,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Perindustrian

Gambaran umum kinerja urusan Perindustrian dapat dilihat dari indikator kinerja Kontribusi sektor Perindustrian dalam PDRB, dan Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten Batu Bara. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.60
Indikator Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Kab. Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	45,6	45,72	45,55	44,35	44,54
Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	3,98	5,65	3,65	8,10	11,85

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan

b. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya.

Tabel 2.61
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin di Kab. Batu Bara Tahun 2024

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	139.787	85.775	225.562
	3. Bekerja	132.474	80.119	212.593
	4. Pengangguran Terbuka	7.313	5.656	12.969
2	Bukan Angkatan Kerja	16.365	71.315	87.680
	4. Sekolah	7.473	8265	15.738
	5. Mengurus Rumah Tangga	5.097	60.112	65.209
	6. Lainnya	3.795	2938	6.733
Jumlah		156.152	157.090	313.242
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				72,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Kesempatan Kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	52.800	16.187	68.987
2	Manufaktur	27.284	11.067	38.351
3	Jasa-jasa	52.390	52.865	105.255
Jumlah		132.474	80.119	212.593

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Keterangan: 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan

2. Manufaktur: Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, dan Air, Bangunan

3. Jasa: Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel, Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

c. Pengeluaran Konsumsi RT

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Tabel 2.63
Angka Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Tahun 2020– 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi RT (miliar rupiah)	14.297	14.801	16.053,16	17.746,68	19.100,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara (Data Diolah)

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

a. Pertanian

Kabupaten Batu Bara telah dikenal sebagai lumbung padi di Sumatera Utara, sehingga peningkatan produksi ini dapat membantu meningkatkan ekonomi, dan ketahanan pangan di Sumatera Utara. Ketercapaian kinerja urusan pertanian dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator seperti jumlah produksi komoditas, serta luasan areal persawahan.

Tabel 2.64
Gambaran Umum Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kontribusi sektor pertanian dalam PDRB (Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura)	%	3.9	4	3,61	n/a	n/a
Jumlah produksi tanaman pangan (Padi)	KU/Ha	166,054.13	160.909,46	157,472.84	131.573,52	57,76
Jumlah produksi tanaman pangan (Jagung)	KU/Ha	4,089.16	1.759,56	3,994.18	821,08	51,6
Jumlah produksi hortikultura (Cabe, Bawang Merah)	KU/Ha	10,195	15.654,80	16.271,23	14.092,10	167.596,57
		322	213,25	102,52	44,00	1.583,10
Produksi daging (ton)	Ton	328.38	276.51	364,22	374,86	352,682
- Sapi	Ton	267.95	244.65	282,16	306,43	271,91
- Kambing	Ton	22.15	17.74	27,61	21,02	27,336
- Domba	Ton	38.28	31.86	54,45	47,41	53,436
Produksi Telur	Ton	389.09	569.85	370,54	608,90	489,291
Produksi perkebunan Kelapa	Ton	52,530	54.070	52.131	52.050	49.200
Produksi perkebunan Kelapa Sawit	Ton	190,213	180.092	172.636	172.636	190.950

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan

Sub sektor peternakan juga menjadi satu diantara sub sektor unggulan di Kabupaten Batu Bara. Peternakan di Kabupaten Batu Bara menerapkan pola ternak yang memanfaatkan perkebunan kelapa sawit. Komoditas peternakan di Kabupaten Batu Bara telah mampu memenuhi kebutuhan di Sumatera Utara, bahkan juga telah dipasarkan di provinsi lain seperti Riau, Sumatera Selatan.

Tabel 2.65
Produksi Daging Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2024

No	Komoditi	Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging Sapi	267,95	244,65	282,16	306,425	271,91
2	Daging Kambing	22,15	17,74	27,61	21,002	27,34
3	Daging Domba	38,28	31,86	54,45	47,407	53,44
Jumlah		330,56	328,38	1.232,29	374,834	352,69

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batu Bara

b. Perikanan

Kabupaten Batu Bara memiliki potensi hasil laut yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi.

Tabel 2.66
Data Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB	%	3.33	3.36	3,03	3,00	n/a
Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Tangkap	%	11.20	27,93	12,52	16,90	-12,99
Persentase Peningkatan volume Produksi Perikanan Budidaya	%	9.45	19,06	15,46	20,81	11,49
Persentase Peningkatan volume Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	%	11.60	23,53	11,97	14,83	27,56

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara

Tabel 2.67
Produksi Perikanan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan	15.937,44	25.235,48	27.499,57	29.050,60	31.807,38
2	Cumi/Gurita/Sotong	10.940.85	9.876,39	10.835,95	13.486,43	3.700,93
3	Udang	2.524.81	1.909,38	2.572,31	3.637,84	2.656,21

No	Jenis Ikan	Produksi Ikan (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
4	Teri	1.402,67	1.080,82	1.346,89	11.267,05	8.309,08
5	Rajungan/Kepiting	2.244,28	1.065,10	1.658,45	1.125,72	1852,96
6	Kerang-Kerangan	1.241,41	1.040,98	1.329,82	3.848,32	3.543,53
	Jumlah	33.050,04	40.208,15	45.242,99	62.415,96	51.870.10

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara

Tidak semua daerah di wilayah Kabupaten Batu Bara yang mempunyai potensi produksi ikan yang tinggi, tercatat ada beberapa kecamatan yang merupakan penghasil ikan seperti Kecamatan Medang Deras, Sei Suka, Lima Puluh Pesisir, Talawi, Tanjung Tiram dan Nibung Hangus.

Selain ikan yang dihasilkan dari laut, ada juga ikan yang dihasilkan dari sungai dan Budidaya yang berada hampir diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Batu Bara dengan Produksi di tahun 2024 sebanyak 31.807,38 Ton /tahun untuk ikan yang dihasilkan laut dan sebanyak 3.120,05 ton/tahun untuk ikan yang dihasilkan dari Budidaya yang sebahagian besar berada di kecamatan Medang Deras.

Tabel 2.68
Produksi Ikan Per Kecamatan di Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

No	Kecamatan	Laut (Ton)	Budidaya (Ton)
1	Sei Balai		93,57
2	Tanjung Tiram	23.344,77	96,64
3	Nibung Hangus	5.274,69	119,36
4	Talawi	5.941,11	288,61
5	Datuk Tanah Datar		40,71
6	Lima Puluh		358,96
7	Lima Puluh Pesisir	4.146,29	674,15
8	Datuk Lima Puluh		73,12
9	Air Putih		446,05
10	Sei Suka	2.941,00	93,57
11	Laut Tador		147,45
12	Medang Deras	10.222,22	682,50
Jumlah		51.870.10	3.120,05

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara

2.3.4 Transformasi Digital

a. Indeks Masyarakat Digital

IMDI merupakan pengukuran keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam menggunakan teknologi digital. Berikut angka IMDI Kabupaten Batu Bara Tahun 2022-2024.

Tabel 2.69
Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Batu Bara Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Masyarakat Digital	33.08 (Rendah)	41.05 (Cukup)	37.63 (Cukup)

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

a. Nilai Eksport dan Import

Nilai ekport untuk di Kabupaten batu Bara dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 dengan jumlah ekport dengan 1.219.043 Ton dengan nilai \$1.158.789,29 dan nilai ekport paling rendah pada tahun 2021 dengan \$1.638.696 dengan jumlah 1.546.654 Ton.

Tabel 2.70
Jumlah Nilai Eksport dan Import Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

Tahun	Eksport		Import	
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (\$)
2024	1.219.043	1.158.789,29	643.644,12	332.695,69
2023	1 840 248	1 411 061	502 277	282 073
2022	1 785 594	2 007 813	447 954	338 121
2021	1 546 654	1 638 696	449 085	260 551
2020	1 628 539	1 104 299	447 182	172 619

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

2.3.6 Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

a. Kondisi Jaringan Jalan

Apabila dilihat dari kondisi jaringan jalan maka jenis permukaan pada jaringan jalan Kab. Batu bara didominasi oleh hotmix, yang dapat dilihat pada tabel

berikut yang memperlihatkan jenis permukaan jalan pada Kab. Batu Bara pada rentang waktu 2020-2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan jaringan jalan dari yang sebelumnya memiliki lapisan batu menjadi lapisan hotmix.

Jenis permukaan jaringan jalan Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.71
Jenis Permukaan Jaringan Jalan Kab. Batu Bara Tahun 2020-2024

No	Jenis Permukaan	2020 (km)	2021 (km)	2022 (km)	2023 (km)	2024 (Km)
1	Rigid	86.499	85.456	86,025	82,308	85,308
2	Hotmix	387.872	422,746	426,766	359,33	367,252
3	Aspal	-	-	-	14,41	14,41
4	Kerikil	140.026	108,288	103,699	157,58	146,316
5	Tanah	24.682	22,589	22,589	25,443	25,793
Jumlah		639.079	639.079	639.079	639,079	639,079

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara

b. Perumahan

Secara umum kondisi hunian perumahan di Kabupaten Batu Bara secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.72
Kondisi Hunian Perumahan Kabupaten Batu Bara Tahun 2021-2024

Uraian	Satuan	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	%	100	100	100	100
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6.80	9.11	8.91	7.03

Sumber : Dinas Perkim LH Kabupaten Batu Bara

c. Desa Membangun

Indeks Desa Membangun untuk Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan dari Tahun 2023 ke 2024 dari 0,6968 di Tahun 2022 menjadi 0,6968 di Tahun 2023 atau meningkat 0,0110. Meskipun masih pada satu Status Klasifikasi Desa yaitu Desa Berkembang.

Tabel 2.73
Nilai Indeks Desa Membangun Kab. Batu Bara Tahun 2020 - 2024

No	Tahun	Nilai IDM	Status
1	2020	0,6563	Desa Berkembang
2	2021	0,6761	Desa Berkembang
3	2022	0,6858	Desa Berkembang
4	2023	0,6968	Desa Berkembang
5	2024	0,7093	Desa Maju

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Klasifikasi : 1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
 2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
 3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
 4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
 5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

a. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah. Inflasi dihitung berdasarkan persentase perubahan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan inflasi pada Kabupaten Batu Bara merujuk pada inflasi di Kota Pematang Siantar. Data inflasi Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, nasional, dan Kota Pematangsiantar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Perkembangan Inflasi Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, Nasional, dan Kota Pematang Siantar Tahun 2020 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Inflasi Nasional	1,68	0,57	5,51	2,61	1,57
2	Inflasi Sumatera Utara	1.96	0,46	6,12	2,25	1,59
3	Inflasi Pematang Siantar (Rujukan Kabupaten Batu Bara)	2,78	0,85	6,16	2,30	3,03

Sumber : BPS Kabupaten Batu Bara

Secara garis besar, aspek daya saing daerah menunjukkan tren positif setiap tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Aspek daya saing daerah ini perlu dioptimalkan dimasa yang akan datang.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks SPBE

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Batu Bara Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.75
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Cukup	1,96 (Cukup)	2,18 (Cukup)	2,34 (Cukup)	2,67 (Baik)

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

a. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari persentase penanganan potensi konflik, Jumlah Ormas, IKM, dan Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.76
Uraian Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan potensi konflik agar tidak menjadi konflik	%	100	100	100	100	100
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terdaftar yang dibina dan terverifikasi	Ormas	119	131	159	168	168
Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup rekomendasi penelitian,	Indeks	85	85,14	84,63	90,57	92,69

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Surat Keterangan bagi Ormas						
Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100
Persentase Penegakan Perda dan Perbup	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Batu Bara

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Daing Daerah

IDSD merupakan alat yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengukur daya saing suatu daerah. Komponen IDSD 2024 Lingkungan penguat, Sumber daya manusia (SDM), Pasar, Ekosistem inovasi.

Tabel 2.77
Skor Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2024

Uraian	2024
Indeks Daya Daing Daerah	3,79

Secara garis besar, aspek pelayanan umum menunjukkan tren positif setiap tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Aspek pelayanan umum ini perlu dioptimalkan dimasa yang akan datang.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Secara garis besar, evaluasi kinerja periode RPJMD lima tahun sebelumnya telah dilaporkan melalui dokumen Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024.

Pada periode sebelumnya terdapat 8 misi pembangunan, pencapaian Indikator Kinerja Utama periode sebelumnya rata-rata capaian kinerja periode sebelumnya 94,53% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Khusus di tahun 2024 evaluasi mempedomani rencana pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026. Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintah ini dapat dilihat

pada lampiran 1. Beberapa Permasalahan dan faktor Penentu keberhasilan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan isu strategis dan permasalahan daerah.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

2.5.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran keuangan daerah merupakan suatu aspek penting untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan suatu daerah dalam suatu periode waktu tertentu. Capaian kinerja keuangan pada periode tersebut menjadi data dasar atau *baseline data* yang dibutuhkan untuk memprediksi kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan pada periode selanjutnya. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah, telah menetapkan seperangkat aturan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Perangkat peraturan dimaksud ditetapkan dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, adil, patut, dan bermanfaat.

Untuk mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah maka perlu terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi keuangan daerah periode sebelumnya baik dari sisi kebijakan yang melandasi pengelolaannya maupun kinerja pencapaiannya. Hasil analisis kinerja keuangan tahun 2020-2024 akan menjadi pertimbangan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mendanai rencana pembangunan melalui pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan

dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja keuangan Kabupaten Batu Bara periode tahun 2020-2024 dapat dianalisis melalui data Laporan Realisasi APBD Kabupaten Batu Bara dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara apat memenuhi kriteria teknis penghitungan rata-rata pertumbuhan dalam periode tersebut.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pembahasan kinerja pelaksanaan APBD ini akan diuraikan tentang perkembangan pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

1. Pendapatan

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan. Gambaran tentang Target serta realisasi pendapatan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.78
Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Batu Bara 2020-2024

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Capaian Pendapatan Daerah (%)
2020	1.183.503.012.670,00	1.179.674.498.386,82	99,68
2021	1.142.087.078.240,00	1.168.634.296.933,83	102,32
2022	1.185.019.396.981,00	1.143.905.508.894,44	96,53
2023	1.357.992.618.836,00	1.265.396.513.884,55	93,18
2024	1.341.271.360.672,00	1.315.878.509.380,63	98,11
Pertumbuhan	2.87 %	2,58%	

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara selama periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat rata-rata 2.58% dari sepanjang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp.1,17 triliun, kemudian menjadi 1,16 triliun di tahun 2021, dan menjadi 1,14 triliun di tahun 2022, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp.1,26 triliun pada tahun 2023, dan 1,31 triliun di tahun 2024. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan daerah pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.179.674.498.386,82 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.183.503.012.670,00 atau 99,68%, tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 1.168.634.296.933,83 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.142.087.078.240,00 atau 102,32 %, tahun 2022 angka realisasi sebesar 1.143.905.508.894,44 dari target pendapatan sebesar 1.185.019.396.981,00 atau 96,53%. Pada tahun 2023 angka realisasi sebesar 1.265.396.513.884,55 dari target pendapatan sebesar 1.357.992.618.836,00 atau 93,17%. Pada tahun 2024 angka realisasi sebesar 1.315.878.509.380,63 dari target pendapatan sebesar 1.341.271.360.672,00 atau 98,11%. Untuk uraian Realisasi Pendapatan Kabupaten Batu Bara dapat dilihat Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Batu Bara
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 (Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENDAPATAN DAERAH	1.179.674.498.386,82	1.168.634.296.933,83	1.143.905.508.894,44	1.265.396.513.884,55	1,315,878,509,380.63
Pendapatan Asli Daerah	166.023.316.040,82	174.549.720.180,83	132.677.602.294,44	149.917.985.464,70	186,070,957,003.63
Pajak Daerah	131.625.816.659,65	136.156.629.487,00	96.769.934.519,00	103.583.794.382,92	152,413,420,441.28
Retribusi Daerah	3.609.657.746,65	3.486.303.326,00	5.249.827.438,00	4.969.664.859,00	5,566,201,632.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.001.255.642,00	1.957.553.811,00	4.948.141.668,00	4.869.513.273,00	5,056,090,285.19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	28.786.585.992,52	32.949.233.556,83	25.709.698.669,44	36.495.012.949,78	23,035,244,645.16
PENDAPATAN TRANSFER	836.666.258.759,00	939.499.316.753,00	1.007.901.893.743,00	1.115.271.678.419,85	1,112,878,056,387.00
DANA PERIMBANGAN	724,768,437,219.00	751.658.942.491,00	795.509.056.828,00	883.142.565.320,00	899,544,388,754.00
DANA TRANSFER UMUM	589.218.945.764,00	602.716.616.150,00	597.248.236.716,00	625,714,194,265,00	653,398,649,791.00
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.291.543.764,00	47.204.139.150,00	43.619.173.140,00	40.695.373.265,00	39,075,320,000.00
Dana Alokasi Umum	565.927.402.000,00	555.512.477.000,00	553.629.063.576,00	585.018.821.000,00	614,323,329,791.00
DANA TRANSFER KHUSUS	135.549.491.455,00	148.942.326.341,00	198.260.820.112,00	257.428.371.055,00	246,145,738,963.00

URAIAN	REALISASI				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dana Alokasi Khusus	135.549.491.455,00	148.942.326.341,00	198.260.820.112,00	257.428.371.055,00	246,145,738,963.00
DANA INTENSIF DAERAH	63.026.300.000,00	10.193.399.000,00	12.773.325.000,00	-	
DANA DESA		120.541.368.033,00	117.193.572.000,00	135.959.571.000,00	136,017,878,000.00
INSENTIF FISKAL					12,708,969,000.00
TRANSFER ANTAR DAERAH	48.871.521.540,00	57.105.607.229,00	82.425.939.915,00	96.169.542.099,85	64,606,820,633.00
Pendapatan Bagi Hasil	48.871.521.540,00	57.105.607.229,00	65.215.065.354,00	72.305.607.229,00	64,606,820,633.00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			17.210.874.561,00	23.863.934.870,85	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	288.882.745.127,00	54.585.260.000,00	3.326.012.857,00	7,650,000.00	16,929,495,990.00

Sumber: BPKAD Kab. Batu Bara, 2024

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi PAD menunjukkan fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Ditahun 2020 Realisasi PAD sebesar Rp166.023.316.040,82 ditahun 2021 PAD meningkat menjadi Rp174.549.720.180,83, dalam kurun waktu ini peningkatan paling utama di pengaruhi oleh pendapatan pajak daerah, yang disebabkan adanya peningkatan pendapatan dari BPHTB dan pembayaran hutang pajak penerangan Jalan. Ditahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 132.677.602.294,44 dan kembali mengalami kenaikan ditahun 2023 menjadi sebesar Rp. 149.917.985.464,70 kemudian naik kembali di tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 186,070,957,003.6 Kenaikan ini utamanya dipengaruhi oleh kenaikan Pajak penerangan Jalan, dan Realisasi PBB. Pendapatan pajak daerah menjadi kontributor terbesar dalam PAD, setiap tahunnya dibandingkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain lain PAD yang sah terhadap total PAD.

Pendapatan Transfer cenderung mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Di Tahun 2020 pendapatan transfer sebesar Rp. 836.666.258.759,00 menjadi Rp. 1,112,878,056,387.00 di Tahun 2024. Pendapatan Transfer masih mendominasi komposisi pendapatan dalam lima tahun terakhir, Tetapi PAD secara garis besar juga mengalami pertumbuhan. Untuk dapat meningkatkan Kemandirian Kapasitas Fiskal Daerah, di masa yang akan datang diharapkan daerah mampu mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan sebuah kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

Belanja daerah tentunya berkaitan dengan pendapatan daerah yang dapat diserap oleh suatu daerah. Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah,. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Tabel 2.80
Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 – 2024

Tahun	Target Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	% Realisasi Anggaran Belanja
2020	1.331.813.763.321,00	1.211.126.094.608,20	90,94%
2021	1.306.475.562.201,00	1.206.025.538.176,52	92,31%
2022	1.288.459.697.330,00	1.194.002.086.885,22	92,67 %
2023	1.433.709.332.336,00	1.305.009.939.198,13	91,02 %
2024	1.343.185.299.386,00	1.286.687.869.217,43	95,79 %

Sumber: BPKAD Kab. Batu Bara, 2024

Realisasi belanja daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 1.331.813.763.321,00 terealisasi sebesar Rp. 1.211.126.094.608,20 atau 90,94% tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp. 1.306.475.562.201,00 terealisasi sebesar Rp. 1.206.025.538.176,52 atau 92,31 %, dan tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.288.459.697.330,00. Untuk realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 1.194.002.086.885,22 atau 92,67%. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.433.709.332.336,00 terealisasi sebesar Rp. 1.305.009.939.198,13 atau 91,02 %. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 1.343.185.299.386,00 terealisasi sebesar Rp. 1.286.687.869.217,43 atau 95,79 %. Untuk Melihat Realisasi Belanja Kabupaten Batu Bara dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.81
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara
Tahun 2019 s/d Tahun 2020 (Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2019	2020
	BELANJA	1.198.238.882.008,52	1.211.126.094.608,20
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	641.122.623.470,00	715.094.043.375,00
	Belanja Pegawai	432.628.088.646,00	414.468.414.765,00
	Belanja Bunga	0,00	146.034.209,00
	Belanja Hibah	17.515.950.000,00	19.538.321.195,00
	Belanja Bantuan Sosial	3.662.000.000,00	7.240.800.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	186.504.096.565,00	181.541.228.166,00
	Belanja Tidak Terduga	812.488.259,00	74.009.349.006,00
B	BELANJA LANGSUNG	557.116.258.538,52	496.032.051.233,20
	Belanja Pegawai	17.038.357.500,00	21.380.368.656,00
	Belanja Barang dan Jasa	317.477.531.261,52	269.510.654.670,20
	Belanja Modal	222.600.369.777,00	205.141.027.907,00

Sumber: BPKAD Kab. Batu Bara, 2021

Tabel 2.82
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara 2021 s/d 2024 (Dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
BELANJA	1.206.025.538.176,52	1.194.002.086.885,22	1.305.009.939.198,13	1,286,687,869,217.43
BELANJA OPERASI	788.535.676.106,52	850.405.286.736,22	834.588.248.911,13	921,062,880,290.43
Belanja Pegawai	438.396.805.928,52	435.615.570.692,00	434.411.215.546,00	471,057,830,175.72
Belanja Barang dan Jasa	327.206.310.150,00	393.896.811.129,22	379.111.819.101,13	380,666,839,150.71
Belanja Bunga	918.063.352,00	143.326.346,00	121.429.264,00	97,541,537.00
Belanja Hibah	14.288.696.676,00	17.091.253.569,00	15.687.500.000,00	66,569,269,427.00
Belanja Bantuan Sosial	7.725.800.000,00	3.658.325.000,00	5.057.085.000,00	2,671,400,000.00
BELANJA MODAL	213.892.176.771,00	143.160.691.249,00	264.161.531.087,00	155,752,728,512.00
Belanja Modal Tanah	11.395.137.000,00	2.724.471.246,00	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.337.024.943,00	46.920.180.430,00	60.706.361.064,00	33,535,161,712.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.393.918.854,00	40.064.178.635,00	97.148.595.043,00	45,988,348,308.00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	111.931.778.404,00	44.698.681.900,00	92.503.518.409,00	66,902,356,693.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.834.317.570,00	8.753.179.038,00	13.153.056.571,00	9,102,611,799.00
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	650.000.000,00	224,250,000.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	14.029.038.914,00	11.764.503.000,00	998.500.000,00	0.00
Belanja Tidak Terduga	14.029.038.914,00	11.764.503.000,00	998.500.000,00	0.00
BELANJA TRANSFER	189.568.646.385,00	188.671.605.900,00	205.261.659.200,00	209,872,260,415.00
Belanja Bagi Hasil	11.000.952.154,00	10.611.911.600,00	5.711.500.000,00	8,447,657,615.00
Belanja Bantuan Keuangan	178.567.694.231,00	178.059.694.300,00	199.550.159.200,00	201,424,602,800.00
JUMLAH	1.206.025.538.176,52	1.194.002.086.885,22	1.304.810.739.198,13	1,286,687,869,217.43

3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah yaitu penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah akan meliputi seluruh transaksi keuangan daerah yang berfungsi untuk menutupi selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah atau biasa disebut dengan defisit anggaran.

Ditinjau berdasarkan komponennya, pembiayaan daerah meliputi:

- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- (3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembiayaan daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2019–2024, penerimaan pembiayaan daerah selain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Juga diperoleh dari Pinjaman Daerah.

Dalam aspek Pengeluaran pembiayaan, pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo penyertaan modal (investasi) pemerintah.

Tabel 2.83
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024
1	2	4	5	6	7	8
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	146.483.314.041,99	167.395.445.049,00	122.863.107.415,92	68.351.792.972,14	14,826,223,186.56
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	127.114.888.887,99	109.290.169.583,61	122.863.107.415,92	68.351.792.972,14	14,826,223,186.56
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	
6.1.4	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	
6.1.5	Penerimaan Pinjaman Daerah	19.368.425.154,00	58.105.275.465	-	-	
6.1.6	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	59.805.000,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.741.548.237,00	7.141.096.390	4.474.541.453,00	13.912.144.472,00	12,912,284,472.00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	12.912.284.472,00	12,912,284,472.00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.741.548.237,00	7.141.096.390	4.474.541.453,00	999.860.000,00	
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	

Sumber BPKAD Kab. Batu Bara

B. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi Asset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberi informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas itu dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi social bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu,serta dapat diukur dengan satuan moneter. Asset terdiri dari (1) Aset Lancar (2) Investasi Jangka Panjang (3) Aset Tetap (4) Dana cadangan (5) Aset lainnya.

Rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Batu Bara disajikan pada Tabel.

Tabel 2.84
Neraca Daerah Kabupaten Batu Bara tahun 2020-2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aset Lancar	233.076.763.372,55	159.143.895.250,24	118.607.227.720,11	80.552.934.117,26	150,516,172,659.90
Jumlah Investasi Jangka Panjang	140.902.979.333,00	143.706.783.174,00	143.298.949.076,00	143.078.183.760,79	139,033,296,318.00
Jumlah Aset Tetap	1.540.037.694.970,05	1.574.199.568.648,91	1.374.530.095.426,91	1.536.455.789.401,38	1,546,731,450,492.65
Dana Cadangan					
Jumlah Aset Lainnya	254.283.517.584,46	261.030.445.331,72	272.710.927.566,33	232.296.317.391,93	217,507,988,964.12
Jumlah Aset	2.168.300.955.260,06	2.138.080.692.404,87	1.909.147.199.789,35	1.992.383.224.671,36	2,053,788,908,434.67
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	62.558.453.224,13	11.032.943.794,84	19.119.861.150,00	63.450.260.040,48	60,055,015,795.30
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	19.368.425.154,00	77.473.700.619,00	64.561.416.147,00	51.649.131.675,00	38,736,847,203.00
Jumlah Kewajiban	81.926.878.378,13	88.506.644.413,84	83.681.277.297,00	115.099.391.715,48	98,791,862,998.30
Ekuitas	2.086.374.076.881,93	2.049.574.047.991,03	1.825.465.922.492,35	1.877.283.832.955,88	1,954,997,045,436.37
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas Dana	2.168.300.955.260,06	2.138.080.692.404,87	1.909.147.199.789,35	1.992.383.224.671,36	2,053,788,908,434.67

Berdasarkan neraca daerah, dapat dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio. Rasio Keuangan yang di hitung adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas.

Rasio Likuiditas

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memnuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan rasio lancar (current ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan Rasio cepat adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Kedua alat analisis tersebut, bertujuan sama yaitu untuk menilai kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

Current Ratio (Rasio Lancar)

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya.

Current ratio Kabupaten Batu Bara berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Ditahun 2020 Rasio ini tercatat pada angka 3,72 menjadi 14,42 pada 2021 Pada tahun 2022, current ratio menjadi 6,20, pada tahun 2023 rasio turun ke 1,26 dan di tahun 2024 menjadi 2,50.

Quick Ratio (Rasio Cepat)

Rasio ini akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya.

Quick Ratio ini terdiri dari piutang dan surat-surat berharga. Jadi semakin besar rasio, semakin baik juga posisi keuangan pemerintah daerah. Jika hasilnya mencapai 1:1 atau 100%, maka ini akan berakibat baik jika terjadi likuidasi karena akan mudah untuk membayar kewajibannya. Ditahun 2020

Rasio ini tercatat pada angka 3,43 menjadi 13,12 pada 2021 Pada tahun 2022, quick rasio menjadi 5,18, pada tahun 2023 turun ke 0,82 dan di tahun 2024 quick rasio menjadi 1,99.

Rasio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga Ratio Leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva yang dimiliki dibiayai dengan hutang

Dari data pada neraca daerah, rasio solvabilitas yang dapat dihitung adalah rasio kewajiban terhadap aset (Total Debt to Total Asset Ratio) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (Total Debt to Equity Ratio)

Rasio kewajiban terhadap ekuitas merupakan perbandingan antara hutang–hutang dan ekuitas dalam pendanaan pemerintahan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan ekuitas. Ditahun 2020 Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas sebesar 0,038 dan naik menjadi 0,048 di Tahun 2024

Rasio kewajiban terhadap aset adalah perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang terhadap jumlah seluruh aktiva yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dihitung dengan rumus total kewajiban dibagi dengan total aset Ditahun 2020 Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas sebesar 0,039 dan naik menjadi 0,050 di Tahun 2024

Tabel 2.85
Hasil Perhitungan Rasio Pada Neraca Daerah Kabupaten Batu Bara
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Current Ratio</i>	3,72	14,42	6,20	1,26	2,50
2	<i>Quick Ratio</i>	3,43	13,12	5,18	0,82	1,99
3	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0,038	0,038	0.0438	0.0578	0,048
4	Rasio kewajiban terhadap Ekuitas	0,0395	0,0395	0.0458	0.0613	0,050

Sumber: Pengolahan Data BPKAD Kab. Batu Bara

2.5.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Dengan ditetapkannya otonomi daerah, telah membuka ruang bagi daerah untuk secara otonomi melaksanakan penyelenggaraan daerah, termasuk didalamnya dalam penetapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2024 dikelompokkan ke dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

(1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah melalui upaya secara efektif dan efisien serta mendapat dukungan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada sehingga tercapai peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran setiap tahunnya. Dengan demikian tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan secara bertahap dapat ditekan menuju pembiayaan mandiri. Berbagai langkah dan upaya terus dilaksanakan guna meningkatkan pendapatan daerah dengan menempuh berbagai langkah kebijakan, antara lain dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Dalam hal ketergantungan daerah yang terlalu tinggi terhadap dana perimbangan di dalam struktur keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara menunjukkan kondisi kurangnya kemandirian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara sebagai suatu pemerintahan daerah yang otonom perlu untuk lebih meningkatkan kemandiriannya melalui upaya peningkatan dan diversifikasi sumber

pendapatan, yang tidak memiliki ketergantungan terlalu tinggi terhadap dana perimbangan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah sehingga secara bertahap porsi dana perimbangan tidak lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara terlalu dominan dalam struktur keuangan Pemerintah Daerah seperti yang terjadi pada saat ini.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi adalah suatu upaya, tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang besar dan tepat waktunya serta peningkatan sistem pembukuan sehingga memudahkan dalam hal pencairan tunggakan pajak maupun retribusi daerah.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Pemerintah Kabupaten Batu Bara setiap tahunnya berusaha mewujudkan peningkatan pendapatan daerah. Upaya pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

2) Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya adalah suatu rencana tahunan yang bersifat makro.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap OPD harus terukur yang diikuti

dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

2.5.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Batu Bara dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 yaitu belanja terbesar untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terjadi pada tahun 2024 sebesar 36,25% dari total pengeluaran.

Secara lengkap analisis proporsi Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2020-2024 disajikan dalam Tabel.

Tabel 2.86
Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Batu Bara

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
2	Tahun anggaran 2020	414.468.414.765,00	1.216.867.642.845,20	34,06%
3	Tahun anggaran 2021	438.396.805.928,52	1.213.166.634.567,00	36,13%
4	Tahun anggaran 2022	435.615.570.692,00	1.198.476.628.338,22	36,35%
5	Tahun anggaran 2023	434.411.215.546,00	1.318.722.883.670,13	32,94%
6	Tahun Anggaran 2024	471.057.830.175,72	1.299.600.153.689,43	36,25%

Sumber: Pengolahan Data BPKAD Kab. Batu Bara

2.5.4 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 2.87
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batu Bara 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.179.674.498.386,82	1.168.634.296.933,83	1.143.905.508.894,44	1.265.396.513.884,55	1,315,878,509,380.63
2	Realisasi Belanja Daerah	1.211.126.094.608,20	1.206.025.538.176,52	1.194.002.086.885,22	1.305.009.939.198,13	1,286,687,869,217.43
3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.741.548.237,00	7.141.096.390	4.474.541.453,00	13.912.144.472,00	12,912,284,472.00
	Surplus/Defisit riil	-37,193,144,458.38	-44,532,337,632.69	-54.571.119.443,78	-53,525,569,785.58	16,278,355,691.20

Sumber: Pengolahan Data BPKAD Kab. Batu Bara

Tabel 2.88
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batu Bara

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.483.314.041,99	167.395.445.048,61	122.863.107.415,92	68.351.792.972,14	14,826,223,186.56
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	127.114.888.887,99	109.290.169.583,61	122.863.107.415,92	68.291.987.972,14	14,826,223,186.56
2.	Pencairan Dana Cadangan					
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan					
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	19.368.425.154,00	58.105.275.465			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6.	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat				59.805.000	
7.	Penerimaan Piutang Daerah					

Sumber: Pengolahan Data BPKAD Kab. Batu Bara

2.5.5 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Kerangka pendanaan dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi secara umum baik dalam konteks efektifitas kinerja aparatur maupun efisiensi anggaran.

2.5.5.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan

Pada kurun waktu tahun 2026-2030 ini, proyeksi dilakukan 5 tahun mendatang sesuai ketentuan format tabel proyeksi inmendagri nomor 2 tahun 2025, kemampuan keuangan Kabupaten Batu Bara diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang ada. pendapatan daerah harus dapat dioptimalkan dan harus dilakukan efektivitas dalam belanja daerah. Dengan mempertimbangkan rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya, diperoleh proyeksi dana yang diperlukan pada setiap pos-pos anggaran yang ada. Proyeksi yang perlu direncanakan ada pada tahun 2026-2030. Untuk pembiayaan dilakukan terhadap penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dapat dilakukan dengan proyeksi silpa dan pengeluaran pembiayaan dapat diproyeksikan dengan memenuhi kebutuhan proyeksi pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan penyertaan modal daerah. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan pembiayaan bersifat indikatif yang disesuaikan kembali terhadap kondisi tiap tahun sesuai ketersediaan anggaran, pendapatan, belanja, pembiayaan yang dapat dilakukan.

Tabel 2.89
Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2030 Kabupaten Batu Bara

URAIAN	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
PENDAPATAN DAERAH	1,285,283,979,151	1,284,668,123,315	1,380,336,707,694	1,417,015,958,852	1,454,791,915,014	1,469,285,834,163
Pendapatan Asli Daerah	218,317,712,199	206,588,839,248	218,530,887,450	221,519,892,300	224,594,894,766	226,840,843,714
Pajak Daerah	184,608,858,370	177,045,850,576	188,101,609,118	190,177,735,618	192,312,473,383	194,235,598,117
Retribusi Daerah	6,313,000,000	6,502,390,000	6,697,461,700	6,898,385,551	7,105,337,118	7,176,390,489
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	5,298,987,222	5,015,598,672	5,166,066,632	5,321,048,631	5,480,680,090	5,535,486,891
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	22,096,866,607	18,025,000,000	18,565,750,000	19,122,722,500	19,696,404,175	19,893,368,217
Pendapatan Transfer	1,049,171,159,952	1,060,007,823,857	1,143,192,216,228	1,176,324,054,415	1,210,449,847,747	1,222,500,346,223
Transfer Pemerintah Pusat	977,450,713,974	1,005,219,092,200	1,086,759,822,622	1,118,198,689,000	1,150,580,721,370	1,162,032,528,582
Dana Perimbangan	846,823,537,974	874,591,916,200	952,213,831,342	979,616,317,982	1,007,840,879,221	1,017,865,288,012
Dana Transfer Umum	657,706,684,000	680,636,826,200	713,846,475,422	735,099,869,684	756,990,865,775	764,506,774,431
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39,177,204,000	40,151,461,800	41,563,095,724	42,809,988,595	44,094,288,253	44,535,231,136
Dana Alokasi Umum	618,529,480,000	640,485,364,400	672,283,379,698	692,289,881,089	712,896,577,522	719,971,543,295
Dana Transfer Khusus	189,116,853,974	193,955,090,000	238,367,355,920	244,516,448,298	250,850,013,446	253,358,513,581
Insentif Fiskal	-		-	-	-	-
Dana Desa	130,627,176,000	130,627,176,000	134,545,991,280	138,582,371,018	142,739,842,149	144,167,240,570
Transfer Antar Daerah	71.720.445.978	54,788,731,657	56,432,393,606	58,125,365,415	59,869,126,377	60,467,817,641
Pendapatan Bagi Hasil	71,327,053,451	54,788,731,657	56,432,393,606	58,125,365,415	59,869,126,377	60,467,817,641
Bantuan Keuangan	393,392,527	0	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17,795,107,000	18,071,460,210	18,613,604,016	19,172,012,137	19,747,172,501	19,944,644,226
Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17,795,107,000	18,071,460,210	18,613,604,016	19,172,012,137	19,747,172,501	19,944,644,226

Tabel 2.90
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2030 Kabupaten Batu Bara

URAIAN	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
BELANJA DAERAH	1,303,476,273,557	1,272,893,844,082	1,375,323,655,866	1,412,775,107,788	1,463,747,926,868	1,479,036,817,965
Belanja Operasi	961.754.416.291	963,737,095,855	982,814,266,155	1,016,686,799,322	1,063,438,491,821	1,074,071,896,739
Belanja Modal	116.914.255.202	88,786,162,749	160,574,323,475	162,180,066,710	163,801,867,377	168,126,445,988
Belanja Tidak Terduga	4,393,392,527	4,000,000,000	5,000,000,000	5,500,000,000	5,600,000,000	5,700,000,000
Belanja Transfer	220,414,209,537	216,370,585,478	226,935,066,235	228,408,241,756	230,907,567,670	231,138,475,237

Tabel 2.91
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2030 Kabupaten Batu Bara

URAIAN	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
PEMBIAYAAN DAERAH	18,192,294,406	-11,774,279,233	-5,013,051,829	-4,240,851,064	8,956,011,854	9,750,983,801
Penerimaan Pembiayaan	31,104,578,877	6,538,005,239	13,299,232,643	14,071,433,408	14,356,011,854	15,150,983,801
SiLPA	31,104,578,877	6,538,005,239	13,299,232,643	14,071,433,408	14,356,011,854	15,150,983,801
Pengeluaran Pembiayaan	12,912,284,472	18,312,284,472	18,312,284,472	18,312,284,472	5,400,000,000	5,400,000,000
Penyertaan Modal Daerah	-	5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12,912,284,472	12,912,284,472	12,912,284,472	12,912,284,472		

2.5.5.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan, perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja dan sisa riil perhitungan anggaran yang di capai Kabupaten Batubara dalam periode 2025-2029 serta perkiraan kondisi perekonomian yang dihadapi dimasa yang akan datang.

Dengan kapasitas riil yang tersedia sebagaimana tabel diatas maka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 2.92
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No	URAIAN	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1,285,283,979,151	1,284,668,123,315	1,380,336,707,694	1,417,015,958,852	1,454,791,915,014	1,469,285,834,163
2	Pencairan Dana Cadangan						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	31,104,578,877	6,538,005,239	13,299,232,643	14,071,433,408	14,356,011,854	15,150,983,801
4	Belanja Tidak Langsung	794,976,075,331	766,136,154,219	838,947,430,078	861,792,815,751	892,886,235,389	784,571,367,412
5	Pengeluaran Pembiayaan	12,912,284,472	18,312,284,472	18,312,284,472	18,312,284,472	5,400,000,000	5,400,000,000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	508,500,198,225	506,757,689,863	536,376,225,787	550,982,292,037	576,261,691,479	699,865,450,552

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Tantangan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Batu Bara saat ini dan kemungkinan yang akan terjadi ke depan perlu mendapat perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, maka diharapkan semua program, kebijakan, dan program yang akan dituangkan dalam RPJMD mampu menjawab dan mengatasi tantangan dan permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Penyusunan suatu perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dengan perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu poin penting dalam menyukseskan pembangunan. Analisis permasalahan pembangunan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dalam menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerahnya sehingga akan berdampak pada tepatnya berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, dimulai dengan merumuskan berbagai analisis permasalahan yang dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam penyelesaiannya. Pendalaman terhadap pokok permasalahan pada masing-masing bidang kegiatan pembangunan daerah akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis sebagai bentuk antisipasi dan upaya pengendalian permasalahan pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut harus dirumuskan secara tepat dan merupakan kesatuan permasalahan atau peluang yang dipandang dari sisi positif penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian dari identifikasi isu strategis pembangunan Kabupaten Batu Bara, baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional.

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat dalam memanfaatkan peluang yang dianggap sebagai penghambat lajunya pembangunan untuk kemudian dapat diantisipasi dengan

menjadikannya sebagai akselerator capaian pembangunan. Analisis isu-isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan sebagai pijakan penting dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara pada hakikatnya menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan dengan cita-cita pembangunan. Sedangkan isu strategis sendiri merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1.1 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, suatu permasalahan dianggap prioritas jika berhubungan dengan sasaran dan prioritas pembanguan (bersifat umum sesuai dengan sasaran dan prioritas). Permasalahan pembangunan di Kabupaten Batu Bara disajikan dalam Tabel.

Tabel 2.93
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pembangunan manusia dan pelayanan dasar		
	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pendidikan Dasar, Angka Partisipasi Kasar PAUD, Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD,	Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	1. Belum optimalnya ruang kelas / ruang guru / ruang kepala sekolah / laboratorium sekolah / perpustakaan / UKS, dan sarana prasarana lainnya
		Belum optimalnya dukungan pendidikan Pusat Kegiatan	1. Belum optimalnya dukungan pendidikan kejar paket

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs, Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan	Belajar Masyarakat	2. Belum optimalnya dukungan terhadap pendidikan informal
		Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik	1. Belum optimalnya pemberian beasiswa dan insentif kepada guru 2. Belum optimalnya pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta peserta didik
		Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan PAUD dan kesetaraan	1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan
		Koordinasi bantuan sosial pendidikan masih perlu ditingkatkan	1. Belum optimalnya penguatan database dan sinergisitas bantuan sosial pendidikan
	Belum optimalnya Indeks Literasi masyarakat	Belum optimalnya minat baca dalam mendukung literasi masyarakat	1. Belum optimalnya Perpustakaan Umum Daerah dan sarana prasarana pendukung lainnya 2. Masih kurangnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan 3. Masih kurangnya minat baca masyarakat 4. Belum optimalnya pengembangan perpustakaan Digital (e- Library) 5. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikat
	Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan	Belum optimalnya jaminan sosial kesehatan	1. Keterbatasan pembiayaan dan koordinasi tata kelola jaminan kesehatan belum optimal
		Belum maksimalnya penanganan prevalensi stunting	1. Belum optimalnya tata kelola dalam percepatan penurunan stunting 2. Belum optimalnya intervensi spesifik dan sensitif
		Belum optimalnya penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS 2. Kurangnya sarana dan prasarana sanitasi yang mendukung PHBS
		Masih tingginya angka kesakitan	1. Belum optimalnya penanganan terhadap Kesakitan Malaria 2. Belum optimalnya penanganan terhadap Kesakitan DBD 3. Belum optimalnya penanganan terhadap Kesakitan TB 4. Belum optimalnya penanganan terhadap Penyakit Tidak Menular
		Belum Optimalnya akreditasi pelayanan kesehatan	1. Belum optimalnya sarana prasarana kesehatan 2. Belum tersedianya Laboratorium Kesehatan Daerah 3. Belum adanya Kampung KB

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			berkelanjutan di tingkat Kabupaten
		Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk	1. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk 2. Masih rendahnya penggunaan KB Pasca persalianan
	Angka kemiskinan belum menurun secara optimal	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan daerah	1. Belum optimalnya pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) 2. Belum optimalnya penanganan bencana sosial 3. Belum optimalnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial 4. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana 5. Belum optimalnya peningkatan infrastruktur sosial lainnya dalam mengentaskan kemiskinan 6. Masih rendahnya indeks pembangunan gender (IPG), 7. Masih rendahnya ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 8. Belum optimalnya layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan 9. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak 10. Belum optimalnya implementasi Kabupaten layak anak
	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	Belum optimalnya infrastruktur lingkungan hidup	1. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni 2. Belum adanya Siteplan dan Masterplan Pembangunan Kawasan Kumuh 3. Belum optimalnya sarana prasarana dan utilitas pemukiman 4. Belum optimalnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan 5. Belum optimalnya penanganan sampah, limbah, sanitasi 6. Masih kurangnya ruang terbuka hijau pada daerah kota 7. Belum tersedianya dokumen status lingkungan hidup sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			lingkungan hidup 8. Belum optimalnya pengolahan persampahan 9. Belum optimalnya penanganan abrasi pantai akibat alih fungsi lahan mangrove
	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan kebencanaan	Belum optimalnya penanggulangan bencana	1. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana 2. Belum tersedianya roadmap rencana penanggulangan bencana, penetapan peta daerah rawan bencana, kajian terkait kebencanaan 3. Belum optimalnya sarana prasarana, dan kompetensi SDM penanggulangan bencana 4. belum optimalnya sarana pendukung operasional penanggulangan bencana 5. Masih terdapat kerusakan lingkungan yang berdampak pada bencana
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan		
	Belum maksimalnya peningkatan nilai PDRB sektor industri pengolahan, sektor pertanian kehutanan perikanan, sektor perdagangan dan sektor ekonomi kreatif	Belum optimalnya Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian dan pemetaan lahan pertanian berkelanjutan	1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi 2. Infrastruktur/jalan produksi pertanian yang belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya 3. Masih rendahnya mutu hasil produk pertanian dan hortikultura 4. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pertanian 5. Belum optimalnya akses perbaikan alsintan 6. Alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan pemukiman 7. Belum optimalnya jaringan irigasi dan drainase 8. Terbatasnya prasarana usaha tani
		Belum optimalnya Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	1. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 2. Belum optimalnya industri Pengolahan Hasil Produk Perikanan
		Pengembangan Nelayan Kecil Daerah	3. Masih rendahnya kesejahteraan dan Pendapatan Pelaku Usaha Sektor Perikanan 4. Masih Maraknya Penggunaan Alat Tangkap Terlarang yang merusak Ekosistem Laut
		Belum optimalnya	1. Belum optimalnya promosi peluang

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Pengembangan Iklim Investasi	- investasi 2. Tingginya biaya produksi 3. Rendahnya jumlah lahan bersertifikat 4. Masih banyaknya sengketa tanah yang belum terselesaikan 5. Kurang optimalnya kasus tanah yang ditindaklanjuti 6. Masih terjadinya konflik akibat HGU yang sudah kadaluarsa dan tidak diurus kembali
	Tingkat pengangguran belum menurun secara optimal	Belum optimalnya Link and Match Dunia Usaha dan Pencari Kerja	1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka 2. Belum optimalnya partisipasi angkatan kerja
		Belum optimalnya kesempatan kerja masyarakat dalam sektor informal	3. Belum optimalnya kompetensi tenaga kerja 4. Masih rendahnya kesempatan kerja untuk talenta muda
		Belum optimalnya kelengkapan Balai Latihan Kerja dan pemberdayaan database ketenagakerjaan	5. Belum memadainya informasi terhadap pasar kerja 6. Belum optimalnya kerjasama antara dunia usaha dalam penyediaan tenaga kerja
		Belum optimalnya kategori pelatihan dan sumber daya manusia pelatihan ketenagakerjaan	7. Belum optimalnya pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk merespon tantangan ketenagakerjaan lokal maupun nasional
	Belum optimalnya pemerataan pembangunan ekonomi daerah	Belum optimalnya sentra industri unggulan daerah	1. Masih lemahnya Daya Saing Industri Kecil Menengah 2. Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan menengah berbasis sentra dan klaster
		Belum optimalnya Sarana Distribusi Perdagangan	3. Harga barang pokok dan penting masyarakat masih diperlukan stabilisasi 4. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar rakyat
		Belum optimalnya pengetahuan, Kapasitas dan Kompetensi SDM Perkoperasian	1. Belum optimalnya pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota 2. Masih rendahnya keaktifan dan kreativitas para pelaku UMKM dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan
		Belum optimalnya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	1. Belum optimalnya pelayanan fasilitas perizinan UMKM naik Kelas 2. Belum optimalnya akses permodalan
		Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga dan Kualitas pembangunan Kepemudaan	1. Belum optimalnya jumlah atlet berprestasi 2. Belum optimalnya kegiatan dalam

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			membangun kepemudaan 3. Belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga 4. Masih rendahnya prestasi dan partisipasi masyarakat dalam berolahraga 5. belum optimalnya generasi muda yang kreatif dan mandiri
	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Belum optimalnya infrastruktur jalan	1. Masih terdapatnya jalan dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat 2. Belum optimalnya kualitas jaringan jalan 3. Belum optimalnya manajemen lalu lintas 4. Masih rendahnya komitmen dalam hal penanganan transportasi secara terintegrasi antar wilayah 5. Menurunnya kondisi fisik sistem sarana dan prasarana transportasi yang tersedia.
	Belum optimalnya pengembangan kepariwisataan	Belum optimalnya Pengelolaan pariwisata	1. Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya dan kearifan lokal 2. Belum optimalnya prasarana dan sarana penunjang pariwisata 3. Belum optimalnya sistem promosi dan pemasaran pariwisata 4. Belum Terpadunya kawasan wisata dalam tatanan integrasi ekonomi lokal
	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya kualitas riset, kajian, inovasi daerah	1. Belum optimalnya penyelenggaraan program inovasi daerah
3	Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik		
	Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan	1. kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus data-data pribadi seperti Akta Kelahiran, KK, KTP, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan KIA 2. Masih minimnya sarana dan prasarana perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 3. Sistem pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berbasis elektronik 4. Belum optimalnya fungsi pemerintah desa, kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa, badan permusyawaratan desa 5. Belum optimalnya peran LPM / Karang Taruna dan Kader Posyandu dalam Rencana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa 6. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dan penyediaan data

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			profil desa dan kelurahan 7. Belum optimalnya Inventarisasi aset dan sarana prasarana kearsipan 8. Belum optimalnya SDM arsiparis 9. Belum dimilikinya pedoman tata kerja kearsipan yang baku, 10. Belum optimalnya pengelolaan arsip
		Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1. Belum optimalnya penegakan Perda, penyelesaian konflik atau gangguan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Belum optimalnya pencegahan, penanganan bencana dan pasca bencana 3. Belum optimalnya penanganan terjadinya konflik 4. Belum optimalnya pengamanan terhadap wilayah daerah aliran sungai 5. Masih berkembangnya penyalahgunaan narkoba
	Belum optimalnya tata kelola akuntabilitas keuangan dan kinerja birokrasi	Belum optimalnya capaian indeks reformasi birokrasi (RB) instansi pemerintah dengan target predikat B	1. Belum optimalnya kurangnya pendidikan dan pelatihan (Diklat) 2. Masih ditemukan pelanggaran administrasi dan keuangan 3. Belum optimalnya sistem tindak lanjut temuan 4. Belum diterapkannya SOP pada sebagian OPD 5. Belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian 6. Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas 7. Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasi 8. Belum optimalnya penguatan SDM perencana diseluruh perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan 9. Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih belum optimal 10. Pembentukan Peraturan Daerah yang belum sepenuhnya optimal 11. Pembahasan anggaran belum sepenuhnya dioptimalkan
	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan Daerah 2. Belum optimalnya serapan pendapatan daerah

NO	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			3. Belum optimalnya kualitas laporan keuangan 4. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) belum terlaksana 5. Pengamanan dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah yang belum optimal 6. Belum optimalnya Kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
	Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya kualitas teknologi informasi	1. Belum optimalnya tata kelola keamanan informasi 2. Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Masih rendahnya tata kelola dan ekosistem e-government dalam mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan

Jika di lihat pada identifikasi permasalahan seperti yang digambarkan tabel diatas maka terdapat identifikasi akar masalah, masalah, permasalahan pokok, yang dapat dirumuskan pengelompokannya masih masing kedalam kategori yaitu : Belum optimalnya pembangunan manusia dan pelayanan dasar, Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan kategori permasalahan tersebut, juga harus dilandasi oleh Supremasi Hukum Stabilitas dan ketangguhan diplomasi dan Ketahanan sosial budaya dan ekologi

2.6.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Batu Bara disajikan pada tabel

Tabel 2.94
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Kabupaten Batu Bara

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
<i>Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</i>				
1.	Pendidikan			
1.1	Angka melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun		a. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah b. SDM (guru) tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan kompetensinya sesuai keahlian c. Motivasi anak untuk menempuh pendidikan belum optimal.	a. Tata kelola pendidikan yang baik b. Bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu c. Standarisasi guru dan sekolah d. Pembangunan sekolah berbasis kebutuhan e. Program pendidikan inovatif f. Sistem pendidikan berbasis digital g. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
1.2	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pendidikan Dasar			
1.3	Angka lulusan (AL) SD / MI / PAKET A			
1.4	Angka lulusan (AL) SMP / MTs / PAKET B			
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI			
1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs			
1.7	Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A			
1.9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B			
1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			
1.11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B			
1.12	Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD			
1.13	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs			
1.14	Rasio Ruang Kelas Baik SD/MI			
1.15	Rasio Ruang Kelas Baik SMP/MTs			
1.16	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar (SD)			
1.17	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	usia sekolah pada pendidikan menengah pertama (SMP)			
1.18	Rasio guru terhadap murid pada SD/MI			
1.19	Rasio guru terhadap murid pada SMP/MTs			
1.20	Presentase guru SD/MI yg memiliki kualifikasi D4/S1			
1.21	Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1			
1.22	Presentase guru yang memiliki kualifikasi S2			
1.23	Jumlah guru yang akan memperoleh sertifikasi profesi (komulatif)			
2.	Kesehatan			
2.1	Cakupan Kunjungan Pelayanan Kesehatan		a. Masih terbatasnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk publik; b. Masih ditemukannya kasus kematian Ibu dan Bayi. c. Masih tingginya faktor risiko lingkungan, penyediaan air bersih, rumah sehat dan hygiene sanitasi makanan dan minuman; d. Masih tingginya jumlah penduduk rentan dan beresiko tinggi kesehatan yang memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan e. Tingginya angka kesakitan dan kematian oleh karena penyakit menular f. Masih adanya kasus gizi buruk. g. Masih tingginya kasus DBD	a. Peningkatan akses dan mutu pelayanan b. Tata kelola rumah sakit yang baik c. Rasio tenaga kesehatan d. Sistem pelayanan kesehatan yang inovatif e. Sistem pelayanan administrasi berbasis digital f. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan lingkungan g. Ketersediaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional h. Penataan lingkungan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.2	Fasilitas Kesehatan Terakriditasi Utama			
2.3	Fasilitas Kesehatan Terakriditasi Madya			
2.4	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan Nasional (JKN)			
2.5	Rasio Puskesmas			
2.6	Angka Kematian Ibu (AKI)			
2.7	Angka Kematian Neonatal (AKN)			
2.8	Angka Kematian Bayi (AKB)			
2.9	Angka Kematian Anak Balita (AKABA)			
2.10	Prevalensi Balita Stunting			
2.11	Persentase Penemuan kasus TBC yang diobati sesuai standar			
2.12	Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence)			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
2.13	Angka Kesakitan DBD			
2.14	Persentase Desa/Kelurahan UCI			
2.15	Persentase Desa/Kelurahan Stop BABS			
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		a. Belum optimalnya aksesibilitas jalan di kawasan produksi, industri, dan wilayah terpencil; b. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; c. Masih lemahnya sistem manajemen pengelolaan jalan dan jembatan; d. Masih terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan pertanian; e. Masih tingginya frekuensi kejadian abrasi f. Belum optimalnya akses Air Minum Layak; g. Belum optimalnya akses sanitasi layak; a. Belum tersedianya rencana detail tata ruang; b. Belum optimalnya ketersediaan dan pemeliharaan irigasi teknis yang mendukung pertanian; c. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi infrastruktur PJU.	a. Pengelolaan alokasi dana pembangunan jalan; b. Pengawasan Mutu Pelaksanaan Pembangunan c. Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi d. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola Sumber Daya Air e. Peningkatan konservasi sumber daya air, peningkatan kesadaran masyarakat tentang resiko abrasi pantai serta mitigasi bencana. f. Peningkatan ketersediaan dan distribusi infrastruktur PJU secara merata g. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang h. Pengembangan Sistem Informasi SDA melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi i. Penyusunan dokumen pemanfaatan ruang di kawasan strategis;
3.2	Persentase jembatan dalam kondisi baik			
3.3	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman			
3.4	Jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dibangun			
3.5	Persentase panjang jaringan irigasi dalam keadaan baik			
3.6	Jumlah Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah kabupaten yang diterbitkan			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman			
4.1	s kawasan permukiman kumuh yang ditangani		a. Kawasan kumuh masih tinggi; b. Masih banyaknya masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni;	a. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) permukiman. b. Pengembangan sanitas dan lingkungan sehat
4.2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditangani			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		c. Belum memadai Pengembangan kawasan permukiman berkualitas dan berkelanjutan	c. Penyusunan Tata Ruang Revisi
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
5.1	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	a. Belum optimalnya pencegahan dan pengendalian bencana serta penjaminan fungsi sistem peringatan dini.	a. Peningkatan pembangunan sistem pengelolaan bencana dan peringatan dini;
5.2	Persentase penegakan Perda dan Perbup	b. Masih tingginya Indeks Resiko Bencana.	b. Meningkatnya upaya perbaikan kualitas lingkungan terutama di wilayah rawan abrasi;
5.3	Waktu tanggap (respons time) penanganan kebakaran	c. Belum Optimalnya Penegakan Perda. d. Belum optimalnya Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. e. Perlunya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. f. Kurangnya koordinasi khususnya dengan instansi vertikal, seperti TNI, Polri dan Kejaksaan terkait pencegahan dan penanganan konflik.	c. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah terkait ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat d. Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba; e. Meningkatnya koordinasi antar instansi vertikal seperti TNI, POLRI dan Kejaksaan;
6	Sosial		
6.1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	a. Belum optimalnya penanganan bencana sosial	a. Peningkatan penanganan bencana sosial dan PMKS;
6.2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	b. Belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial	b. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan di panti-panti;
6.3	Persentase angka kemiskinan	c. Masih belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	c. Sinergitas antar lembaga terkait dalam penanggulangan bencana;
6.4	Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS		
6.5	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	kurang dari 3 hari			
6.6	Penyebarluasan informasi pencegahan, kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana			
6.7	Tingkat penanggulangan ancaman bahaya			
6.8	Jumlah petugas yang mengerti akan pertolongan bagi bencana			
6.9	Jumlah kualitas sarana bencana daerah			
6.10	Tingkat Ancaman Bencana			
6.11	Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana			
6.12	Tingkat Kualitas Prasarana Kendaraan Penyelamatan/Evakuasi			
6.13	Lamanya waktu yang diperlukan TRC untuk Melakukan Pencarian dan Pertolongan Korban			
6.14	Jumlah Fasilitas Pasca Bencana yang terbangun			
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar				
1.	Tenaga Kerja		a. Kurangnya skill/kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global. b. Masih banyaknya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. c. Informasi terhadap Pasar kerja yang belum memadai. d. Kurangnya kerjasama antara dunia usaha dalam penyediaan tenaga kerja. e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.	a. Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; b. Peningkatan tenaga kerja yang mandiri; c. Ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja; d. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja; e. Pengembangan Kewirausahaan Mandiri f. Pengembangan Balai Latihan Kerja g. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pelatihan tingkat Provinsi dan Pusat
1.2	Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
1.3	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten			
1.6	Prosentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			f. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.	
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Persentase PPRG terimplementasi		a. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c. Rendahnya ketahanan dan kualitas keluarga menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). d. Minimnya layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. e. Terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. f. Rendahnya implementasi Kabupaten Layak anak;.	a. Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. Peningkatan penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu berbasis gender dan anak; c. Pemahaman masyarakat pada undang-undang terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak d. Sinergitas antara lembaga terkait dalam mewujudkan kabupaten layak anak. e. Tersedianya Pusat Pengembangan Anak
2.2	Persentase indikator capaian penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak			
2.3	Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan			
2.4	Ratio Kekerasan Terhadap Anak			
2.5	Persentase Layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban kekerasan			
3.	Pangan			
3.1	Persentase Energi Perkapita		a. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi. b. Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual. c. Luas lahan pertanian pangan terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif, d. Ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan.	a. Ketersediaan pasokan pangan untuk penduduk baik dari segi kuantitas dan kualitas; b. Peningkatan penyuluhan pengembangan diversifikasi pangan dan gizi; c. Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian; d. Pengoptimalan pemanfaatan lahan termasuk lahan perkarangan; e. Peningkatan sistem jaringan irigasi dalam hal pemenuhan kebutuhan air;
3.2	Persentase Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan			
3.3	Persentase Skor Pola Harapan (PPH)			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			e. Terbatasnya prasarana usaha tani yang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pangan. f. Hasil pertanian tidak dapat disimpan dalam waktu lama	
4.	Pertanahan			
4.1	Jumlah dokumen inventarisasi pertanahan		a. Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat b. Belum optimalnya kasus tanah yang ditindaklanjuti. c. Masih banyaknya sengketa tanah yang belum terselesaikan. d. Sering terjadi konflik akibat HGU yang sudah kadaluarsa tidak diurus kembali	a. Penertiban administrasi pertanahan secara rutin dan bertahap; b. Penetapan kebijakan NPSK penyelesaian sengketa tanah.
	Jumlah fasilitasi penyelesaian kasus sengketa pertanahanMilik negara, swasta dan masyarakat			
4.2	Jumlah Advis (Rekomendasi) bangunan ber-IMB			
5.	Lingkungan Hidup			
5.1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air		a. Mutu air di kawasan pantai sangat buruk b. Lingkungan masyarakat masih banyak yang kumuh. c. Penanganan sampah masih minim d. Drainase pada kawasan pemukiman tidak berfungsi e. Kurangnya ruang terbuka hijau pada daerah kota	a. Penanaman bibit tanaman teduh dan tanaman hias di perkotaan; b. Penyediaan dokumen status lingkungan hidup sebagai bahan analisis untuk penentuan kebijakan lingkungan hidup; c. Peningkatan pengendalian Lingkungan Hidup; d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau e. Penataan kota dan kawasan pantai f. Pembangunan unit pengolahan persampahan
5.2	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran udara			
5.3	Persentase Perusahaan yang memiliki izin/dokumen lingkungan hidup			
5.4	Cakupan Pengelolaan Persampahan			
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.2	Persentase Penduduk yang		a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk	a. Sosialisasi pentingnya tertibnya administrasi

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	memiliki KTP-EL		mengurus data-data pribadi (Akta kelahiran, KTP, KK, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan KIA). b. Minimnya sarana dan prasarana perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (Kamera, Server, Peralatan Database); c. Sistem pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya berbasis elektronik	kebutuhan data pribadi masyarakat; b. Peningkatan sarana dan prasarana perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; c. Pelayanan pengurusan KTP berbasis kecamatan d. Peningkatan pelayanan berbasis digital
6.3	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga			
6.4	Persentase Penduduk usia 0-18 yang memiliki Akte Kelahiran			
6.5	Persentase Penduduk Non Muslim usia > 17 tahun status kawin yang memiliki Akte Perkawinan			
6.6	Persentase Data Base Kependudukan yang valid dan update			
6.7	Jumlah OPD yang melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan			
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Indeks Desa Membangun (IDM)		a. Belum optimalnya fungsi pemerintah desa/kelurahan, kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa b. Belum optimalnya peran PKK c. Belum optimalnya peran LPM d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dan penyediaan data profil desa, kelurahan. e. Belum optimalnya pembinaan kepada PKK dan LPM.	a. Peningkatan fungsi Lembaga Desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenang; b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; c. Peningkatan Badan Usaha Milik Desa; d. Peningkatan kualitas akuntabilitas pemerintahan desa; e. Pengembangan Peran PKK dan LPM
7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pemerintah desa			
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Cakupan KB aktif		a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk b. Masih rendahnya pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	a. Penguatan program keluarga berencana b. Pengembangan Kampung KB c. Pengembangan ekonomi masyarakat

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			c. Belum optimalnya pelayanan PPKS d. Masih tingginya jumlah anak per keluarga e. Masih rendahnya cakupan penggunaan kontrasepsi dengan metode kontrasepsi jangka panjang.	d. Peningkatan peran penyuluh/pendamping keluarga berencana
9.	Perhubungan			
9.1	Persentase Kecamatan yang Dilalui Angkutan Umum		a. Belum maksimal dan meratanya fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas	a. Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan keselamatan dan lalu lintas serta pendistribusiannya secara merata
9.2	Persentase Penurunan Angka Kecelekaan		b. Belum optimalnya pengawasan operasional kendaran angkutan umum dan barang	b. Pengontrolan sistem pelayanan angkutan umum dan barang
9.3	Persentase Kendaraan Wajib Uji Kir		c. Terminal penumpang belum beroperasi secara maksimal	c. Pembangunan sarana dan prasarana terminal dan dermaga
9.4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana		d. Pengelolaan angkutan sungai yang belum baik	d. Peningkatan operasional terminal penumpang
9.5	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana		e. Jumlah dermaga yang baik masih sangat sedikit	e. Peningkatan tata kelola transportasi sungai
10.	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		a. Informasi untuk masyarakat belum optimal	a. Meningkatnya aplikasi Smart Office yang terintegrasi ke seluruh organisasi pemerintah Kabupaten Batu Bara
10.2	Penilaian keterbukaan informasi publik		b. Sistem administrasi pemerintah belum seluruhnya berbasis digital c. Masih rendahnya ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang TI. d. Jangkauan internet belum mencakup seluruh desa/kelurahan e. Penerapan media online masih belum bersifat produktif	b. Pengembangan masyarakat berbasis Teknologi Informasi c. Pengembangan e—government d. Pengembangan e-bussiness e. Pengembangan e-education
11.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
11.1	Persentase pertumbuhan aset koperasi		a. Kurangnya akses permodalan UMKM.	a. Fasilitasi Akses Permodalan UMKM

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
11.2	Persentase peningkatan SHU koperasi		b. Kurangnya Produktivitas UMKM.	b. Pelatihan Sosial Media Marketing dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
11.3	Persentase peningkatan level skala usaha mikro ke usaha kecil		c. Kurang akses pasar dan promosi terhadap produk UMKM.	c. Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM
11.4	Persentase peningkatan level skala usaha kecil ke usaha menengah		d. Belum berkembangnya Digitalisasi Koperasi dan UKM. e. Kualitas SDM yang kurang memadai dikarenakan rendahnya pendidikan dan keterampilan. f. Kurang inovasi dan kreatifitas pelaku usaha.	d. Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam berwirausaha e. Pembangunan sistem pemasaran digital f. Pembangunan pusat pemasaran terpadu g. Pembangunan Pusat Pelatihan dan Pengembangan UKM
12.	Penanaman Modal			
12.1	Nilai Investasi PMDN dan PMA		a. Rendahnya investasi baik dalam negeri maupun asing	a. Peningkatan Standar Pelayanan Administrasi. atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif
12.2	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan		b. Sistem pelayanan investasi belum optimal termasuk pengurusan perijinan c. Upaya untuk mendatangkan investasi masih rendah d. Tidak sinerginya antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi;	b. Koordinasi lintas sektor yang kaitannya dengan daya tarik berinvestasi c. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi d. Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur e. Pelayanan data dan informasi investasi ekonomi secara elektronik, lengkap dan mudah diakses f. Meningkatkan upaya menarik investasi
13.	Kepemudaan dan Olahraga			
13.1	Persentase komunitas olahraga yang aktif		a. Masih rendahnya jumlah atlet berprestasi	a. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
13.2	Jumlah jenis/ragam olahraga yang aktif dimasyarakat		b. Masih rendahnya jumlah olah raga berprestasi c. Masih rendahnya kegiatan dalam	b. Pembinaan kepada para atlet c. Pembinaan penghargaan kepada atlet

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			membangun kepemudaan d. Minimnya sarana dan prasarana olah raga e. Kurangnya koordinasi bidang keolahragaan dengan sekolah dalam mewujudkan siswa yang sehat.	berprestasi d. Penguatan sinkronisasi program bidang olah raga dan sekolah e. Peningkatan pelatihan bagi para pemuda f. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.
16.	Kebudayaan			
16.1	Persentase Kelompok Seni dan Budaya yang Masih Melestarikan Nilai Budaya Lokal		a. Belum Optimalnya pelestarian terhadap budaya dan situs budaya dan sejarah bangsa.	a. Identifikasi, Dokumentasi dan Inventarisasi Benda, Cagar Budaya dan Situs Budaya agar kelestariannya bisa terpelihara
16.2	Persentase Situs cagar budaya yang dilestarikan		b. Kurangnya pengenalan pengetahuan tentang kebudayaan dan sejarah di seluruh lapisan masyarakat. c. Banyak situs budaya dan sejarah yang tidak dikelola	b. Peningkatan komitmen antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Pengembangan dan Pembinaan Seni Budaya Daerah c. Peningkatan event budaya d. pengelolaan museum e. Peningkatan penulisan buku-buku budaya dan sejarah
17.	Perpustakaan			
17.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		a. Masih kurangnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan.	a. Pembangunan Perpustakaan umum daerah
17.3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Pemustaka)		b. Masih kurangnya minat baca masyarakat.	b. Pengembangan titik baca, pengembangan perpustakaan digital (e-Library)
17.4	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka yang Tersedia di Perpustakaan Daerah		c. Belum optimalnya pengembangan Perpustakaan Digital (e-Library)	c. Penambahan koleksi buku secara rutin yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan perpustakaan
17.5	Persentase Jumlah Perpustakaan		d. Belum optimalnya Sosialisasi dan Promosi Gerakan Literasi Nasional e. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikat	d. Penambahan pustakawan bersertifikat e. Pengembangan pustaka keliling

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
18	Arsip			
18.1	Jumlah Arsip Statis Daerah		a. Minimnya sarana dan prasarana kearsipan	a. Peningkatan sarana dan prasarana kearsipan
18.2	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan		b. Masih kurangnya SDM Arsipari. c. Belum dimilikinya pedoman tata kerja kearsipan yang diberlakukan secara baku. d. Arsip belum dikelola dengan baik dan benar	b. Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang arsip c. Pembangunan sistem kearsipan digital yang terpadu
<i>Urusan Pilihan</i>				
1.	Pariwisata			
1.1	Jumlah kunjungan wisatawan domestik		a. Belum optimalnya Pengelolaan pariwisata.	a. Pembangunan infrastruktur pariwisata
1.2	Persentase kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang aktif		b. Prasarana dan sarana penunjang pariwisata masih belum lengkap c. Minat investor pada sektor pariwisata masih rendah. d. Sistem promosi dan pemasaran pariwisata tidak dilakukan secara terpadu dan tidak terfokus pada pangsa pasar tertentu. e. Masyarakat belum siap sebagai masyarakat wisata	b. Peningkatan penataan objek wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk menarik wisatawan c. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata dengan melibatkan masyarakat swasta dan pemerintahan d. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan disekitar lokasi wisata e. Peningkatan sarana Promosi (pembuatan brosur), event dan pameran yang berguna mengundang wisatawan baik lokal dan mancanegara f. Pengusulan Perda Pariwisata
2.	Pertanian			
2.1	Persentase pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB (Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura)		a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi.	a. Penguatan peran kelembagaan Pertanian
2.2	Jumlah produksi tanaman pangan		b. Belum optimalnya kelembagaan petani.	b. Pelatihan bimbingan bidang Pertanian dalam hal peningkatan produksi secara efisiensi melalui teknologi yang sesuai

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
2.3	- Padi - Jagung Jumlah produksi hortikultura - Cabe - Bawang Merah - Semangka		c. Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal. d. Infrastruktur/ jalan produksi pertanian yang belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. e. Budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas utama/konvensional. f. Masih rendahnya Mutu hasil produk pertanian g. Rantai pemasaran yang panjang;. h. Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi. i. Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil. j. Masih rendahnya kualitas dan SDM pertanian.	c. Peningkatan pembangunan infrastruktur/jalan daerah Produksi Pertanian d. Peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi yang melayani sentra-sentra Produksi Pertanian demi meningkatkan kualitas dan kuantitas Produksi Pertanian e. Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian guna menciptakan benih unggul menuju kualitas dan produktifitas hasil pertanian yang tinggi. f. Peningkatan peran penyuluh pertanian g. Pendirian industri pengolahan hasil pertanian h. Pembangunan cold storage i. Penerapan intensifikasi
3.	Petenakan dan Perkebunan			
3.1	- Jumlah produksi daging ternak (sapi,kambing, domba) - Jumlah produksi telur			
3.2	Jumlah Produksi perkebunan (kelapa sawit, kelapa)			
3.3	Jumlah petani perkebunan yang menerapkan inovasi perkebunan			
3.4	Jumlah peternak yang menerapkan inovasi peternakan			
3.5	Persentase kontribusi sektor peternakan dalam			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	PDRB			
3.6	Persentase kontribusi sektor perkebunan dalam PDRB			
4.	Perikanan			
4.1	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan dalam PDRB		a. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	a. Kesiambungan sumber daya ikan
4.2	Persentase peningkatan volume produksi perikanan tangkap		b. Belum optimalnya industri pengolahan perikanan	b. Peningkatan sarana dan prasarana bidang perikanan
4.3	Persentase peningkatan volume produksi perikanan budidaya		c. Belum optimalnya pengawasan UU fishing; d. Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah.	c. Pengembangan atau inovasi pnerapan teknologi kelautan dan perikanan secara pasif dan efektif
4.4	Persentase peningkatan volume produksi pengolahan hasil perikanan		e. Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan.	d. SDM kelautan dan perikanan yang handal dan kompeten
4.5			f. Kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil	e. Pasar yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik f. Dukungan investasi dari para pelaku usaha g. Regulasi Pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan. h. Pengembangan Industri Pengolahan Ikan
<i>Urusan Penunjang</i>				
1.	Perencanaan Pembangunan			
	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		a. Belum konsistennya antara perencanaan dan penganggaran.	a. Sinkronisasi perencanaan
	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan		b. Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan	b. Penerepan e-planning c. Penyusunan data base daerah d. Peningkatan kompetensi tenaga perencana e. Peningkatan koordinasi antar lintas perangkat daerah f. Peningkatan keikursertaan masyarakat
	Persentase kajian / penelitian yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			c. Program dan kegiatan belum sepenuhnya selaras dengan permasalahan yang ada d. Kompetensi SDM bidang perencanaan masih ada yang lemah	dalam perencanaan
2.	Keuangan			
2.1	Persentase RANPERDA & RANPERBUP tentang APBD/PAPBD yang ditetapkan tepat waktu		a. Masih rendahnya pendapatan asli daerah pada Pendapatan Daerah yang disebabkan belum optimalnya serapan pendapatan daerah dari potensi yang ada.	a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah b. Peningkatan kapasitas SDM Keuangan. c. Peningkatan tariff pajak dan retribusi daerah d. Penggunaan teknologi informasi dalam pajak.
2.2	Opini BPK			
2.3	Persentase legalisasi aset		b. Perlu ditingkatkan kualitas laporan keuangan terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara.	e. Peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD. f. Penerapan sistem pengutipan pajak dan retribusi berbasis digital
2.4	Persentase aset dalam kondisi baik			
2.5	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor		c. Kualitas laporan keuangan yang belum optimal	
2.6	Persentase kontribusi pajak daerah terhadap PAD			
2.7	Persentase kontribusi retribusi terhadap PAD			
2.8	Persentase masyarakat sadar pajak			
3.	Kepegawaian			
3.1	Persentase hasil survey/kuisisioner kepuasan pelayanan kepegawaian		a. Masih kurangnya profesionalisme sebagian ASN dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	a. Peningkatan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government. b. Pelatihan bersertifikat, berkala, dan berjenjang kepada ASN c. Penerapan sistem pelatihan berbasis digital
3.2	Indeks Profesionalitas ASN		b. Sistem pelayanan pada umumnya masih manual c. Kualitas pelayanan publik masih lemah d. Kompetensi ASN dalam administrasi pada umumnya masih lemah e. Belum seluruhnya ASN menguasai Teknologi Informasi dan Komputer	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah		Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
			f. Kinerja sebagai ASN masih rendah g. Lemahnya penerapan dan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government.	
4.	Inspektorat			
4.1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti		a. Masih ditemukan pelanggaran administrasi dan keuangan	a. Standar Operasional Pemeriksaan b. Penerapan sistem pengawasan berbasis elektronik
4.2	Persentase penurunan temuan		b. Masih lemahnya sistem tindak lanjut temuan	c. Peningkatan SDM Pemeriksa dan Pengawas
4.3	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai B		c. Belum diterapkannya SOP pada sebagian OPD d. Sistem pengawasan dan pengendalian yang masih lemah e. Masih terbatasnya SDM pemeriksa/pengawas.	
5.	Sekretariat Dewan			
5.1	Persentase Prolegda yang disepakati bersama eksekutif		a. Proses integrasi dan sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan masih mengalami kendala b. Pembentukan Peraturan Daerah yang belum sepenuhnya berjalan tepat waktu c. Pembahasan anggaran belum sepenuhnya berdasarkan Rencana Lima Tahunan	a. Peningkatan koordinasi antara eksekutif dan legislatif b. Penerapan e-planning

2.6.2 Isu–Isu Strategis Pembangunan

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa mendatang. Suatu hal yang masih belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi permasalahan daerah pada suatu saat. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang akan datang.

Mengingat permasalahan pembangunan sangat banyak dan kompleks seperti diuraikan di atas, maka untuk menentukan isu strategis terlebih dahulu perlu diidentifikasi isu global/internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini. Adapun isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut

A. Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka Menengah Kabupaten Batu Bara ialah sebagai berikut:

a. Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi pengembangan ekonomi di Kabupaten Batu Bara terutama dalam hal pengembangan sektor perkebunan dan industri yang berorientasi ekspor. Krisis ekonomi global juga dapat memperlambat investasi sektor ekonomi di Kabupaten Batu Bara termasuk investasi untuk pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan Laporan World Economic Situation and Prospects 2024 dari PBB, prospek ekonomi global masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat dari 2,7 persen pada 2023 menjadi 2,4 persen pada 2024, yang berada di bawah tingkat pertumbuhan pra-pandemi sebesar 3,0 persen. Faktor utama yang memperlambat pertumbuhan ini mencakup suku bunga yang masih tinggi, meningkatnya ketegangan geopolitik, perdagangan internasional yang lesu, serta bencana iklim yang semakin sering terjadi.

Isu ekonomi global yang menurut PBB perlu menjadi perhatian di akhir 2024, yaitu: (1) Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global; (2) Ketidakstabilan Geopolitik dan Dampaknya pada Ekonomi; (3) Perubahan Iklim dan

Dampaknya pada Ekonomi; (4) Kesenjangan Ekonomi dan Sosial; (5) Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Ekonomi.

Dalam konteks Sumatera Utara, kondisi ekonomi global yang melemah dapat berdampak pada sektor ekspor utama seperti perkebunan dan industri berbasis ekspor. Penurunan permintaan global dan biaya pinjaman yang lebih tinggi bisa memperlambat investasi di daerah ini, termasuk dalam sektor infrastruktur. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dapat berdampak pada daya saing produk ekspor dari Sumatera Utara akibat fluktuasi harga komoditas dan kebijakan perdagangan internasional yang lebih ketat.

b. Pariwisata Global (Sustainable Tourism)

Menurut laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata global telah pulih hampir 90% dari tingkat sebelum pandemic pada akhir tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, tercatat sekitar 1,4 miliar wisatawan internasional, meningkat 11% dibandingkan tahun 2023, atau bertambah sekitar 140 juta perjalanan wisata. Pemulihan ini didorong oleh permintaan pasca-pandemi yang kuat, meningkatnya konektivitas udara, serta kebijakan visa yang lebih longgar di banyak negara. Beberapa wilayah bahkan melampaui tingkat wisata sebelum pandemi. Timur Tengah mencatat peningkatan sebesar 32% dibandingkan tahun 2019, sementara Afrika tumbuh 7% lebih tinggi dari tingkat sebelum pandemi. Eropa mengalami sedikit kenaikan (1% di atas 2019), sedangkan Amerika telah pulih hingga 97%. Di Asia dan Pasifik, pemulihan mencapai 87% dari tingkat sebelum pandemi, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 66% pada akhir 2023. Peningkatan ini juga tercermin dalam pendapatan pariwisata global, yang mencapai rekor USD 1,9 triliun, sekitar 3% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Laporan juga menyebutkan bahwa belanja wisatawan tumbuh lebih cepat dibandingkan jumlah kunjungan, yang berdampak positif terhadap ekonomi lokal dan sector usaha kecil di berbagai negara.

c. Demografi Global

Menurut data World Population Prospects (2024) Populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 8,2 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat

hingga 10,2 miliar jiwa pada tahun 2080. Hal ini menjadi tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin Panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2045 tumbuh menjadi 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir. Di sisi lain terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Selain itu bertambahnya penduduk lanjut usia dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

d. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi Global

Menurut laporan World Urbanization Prospects, The 2018 Revision yang dirilis PBB memproyeksikan bahwa populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Diperkirakan bahwa dalam periode 2015-2050, setengah dari pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan terkonsentrasi di sembilan negara: India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia dan Uganda. Pada tahun 2018 diperkirakan 55% penduduk dunia tinggal di perkotaan dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 68% di tahun 2050.

Di beberapa negara jumlah penduduk usia kerja semakin meningkat dan perlu direspons dengan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, dan promosi peluang kerja produktif dan pekerjaan layak. Pertumbuhan penduduk di atas usia 65 tahun diperkirakan juga semakin meningkat di seluruh dunia dan negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan layanan kesehatan, sistem perawatan jangka panjang, serta meningkatkan keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pensiun.

Urbanisasi juga kemungkinan terjadi dengan berkembangnya Kawasan perkotaan baru yang tumbuh akibat adanya pusat kegiatan ekonomi baru.

e. Disrupsi Teknologi

Disrupsi teknologi telah dirasakan secara global dan terjadi dengan mengganggu pasar dan industri yang ada karena mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model bisnis baru, dan mendisrupsi model bisnis tradisional. Disrupsi teknologi dapat menjadi tantangan bagi usaha dan industri yang telah berjalan, namun menjadi peluang baru terciptanya wirausaha dan startup. Bangkitnya e-commerce yang bahkan memiliki jangkauan pasar dunia mengganggu perdagangan konvensional dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cara baru.

Perkembangan teknologi blockchain juga mendisrupsi sistem keuangan yang mengakibatkan terbentuknya sistem transaksi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan yang dirasakan di seluruh dunia. Inovasi dan disrupsi memiliki dampak kompleks yang perlu dipahami untuk menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi baru. Inovasi dan disrupsi teknologi yang terjadi secara global berdampak pada perkembangan Provinsi Sumatera Utara di berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya dalam sektor ekonomi tetapi juga mobilitas penduduk dan akses pelayanan publik.

f. Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran tersebut dapat terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim. Sebagai langkah dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang berjalan semakin cepat, Intergovernmental Negotiating

Committee/INC yang kemudian pada tahun 1992 INC mengadopsi sebuah kerangka hukum yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang

berpartisipasi didalamnya dengan tujuan akhir yaitu Common but Differentiated Responsibilities Principle. Dalam keikutsertaannya, Indonesia telah meratifikasi perjanjian paris (Paris Agreement) dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim, pada tataran nasional dengan keikutsertaan Paris Agreement akan mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menjadi ramah lingkungan serta adaptif terhadap dampak perubahan iklim, ribuan ilmuwan dan pengawas pemerintah sepakat untuk membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C. Namun, kebijakan yang ada saat ini menunjukkan kenaikan suhu sebesar 3°C pada akhir abad ini.

Emisi yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari seluruh belahan dunia dan berdampak pada semua orang, namun beberapa negara menghasilkan lebih banyak emisi dibandingkan negara lain. Tujuh negara penghasil emisi terbesar (Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Federasi Rusia, dan Brasil) menyumbang sekitar setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca global pada tahun 2020. Beberapa kerangka dan perjanjian global telah dimiliki dengan tiga kategori tindakan yang harus dilakukan, yaitu: pengurangan emisi; adaptasi terhadap dampak iklim; dan pendanaan untuk penyesuaian yang diperlukan.

g. Sumber Energi Alternatif

Pemanfaatan sumber energi alternatif menjadi inti tantangan perubahan iklim yang dihadapi dunia. Untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim, berdasarkan paris agreement yang diretifikasi melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Indonesia berkomitmen untuk ambil bagian mengatasi dampak perubahan iklim global dengan melakukan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% bila dilakukan dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan dunia internasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil perlu diakhiri karena telah menyumbang hingga lebih dari 75% emisi GRK dan 90% emisi karbon

dioksida. Investasi pada sumber energi alternatif yang bersih, mudah diakses, terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan menjadi tantangan ke depan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah berupaya mempercepat pengembangan energi alternatif salah satunya melalui kebijakan yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik dan kebijakan yang relevan lainnya.

h. Geopolitik dan Geoekonomi di Samudera Hindia

Samudera Hindia sangat penting bagi nasib geopolitik dan ekonomi negara-negara pesisir dan kekuatan di luarnya. Samudera Hindia menjadi jalur pelayaran kapal kontainer, penumpang, dan angkutan laut untuk melintasi rute perdagangan yang membentang di seluruh dunia mulai dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Sebagai tempat bertemunya kekuatan-kekuatan besar di dunia, Samudera Hindia adalah salah satu kawasan perdagangan dan geopolitik paling berharga di dunia dengan lebih dari 80% minyak dunia melewati perairan Samudera Hindia.

Hal ini tidak hanya menjadi titik tumpu persaingan strategis antar negara, seperti Tiongkok-India, namun juga merupakan serangkaian peluang ekonomi dan pembangunan yang berharga. Berdasarkan hal tersebut, dilaksanakan "Declaration of The Indian Ocean Rim Association on the Principles for Peaceful, Productive and Sustainable Use of The Indian Ocean and Its Resources" tahun 2013 yang memuat tentang kerja sama keselamatan dan keamanan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen risiko bencana, kerja sama akademik dan sains teknologi, serta pertukaran pariwisata dan budaya.

B. Isu Nasional

Isu nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Batu Bara ialah sebagai berikut:

a. Bonus Demografi

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020- 2035, dimana tingkat

kelahiran mengalami penurunan sehingga mengakibatkan persentase penduduk usia 0-14 tahun dan rasio ketergantungan menurun.

Hal ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan bonus demografi untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Di sisi lain penduduk usia produktif yang dominan dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk yang memiliki daya beli cukup tinggi dan dapat membeli produk-produk berkualitas (*consuming class*). Masyarakat ini perlu diimbangi dengan pemenuhan sisi produksi dan investasi di dalam negeri agar pasar domestik tetap dapat dikuasai. Bonus demografi juga diperkirakan akan terjadi di Sumatera Utara dengan hasil proyeksi penduduk di tahun 2029 yang menunjukkan adanya peningkatan penduduk usia kerja.

b. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung

Daya dukung sumber daya alam di Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta hektar dari tahun 2025 hingga 2026. Daya dukung ketersediaan air juga diperkirakan mengalami tren menuju kelangkaan di sejumlah wilayah di Indonesia dan di tahun 2029 di sebagian wilayah Sumatera diperkirakan berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan diperkirakan juga akan semakin menurun dengan meningkatnya alih fungsi lahan dan penurunan kualitas lahan dan air.

Daya dukung keanekaragaman hayati diproyeksikan akan menurun seiring dengan hilangnya habitat, peningkatan pencemaran perubahan iklim, dan persebaran jenis asing invasif (JAI). Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Di sisi lain daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral di Indonesia cukup besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun dan mengakibatkan krisis air bersih dengan setidaknya 82% dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar. Daya tampung kualitas udara juga telah melampaui standar mutu dengan peningkatan konsentrasi polutan setiap tahunnya. Daya tampung lingkungan laut juga mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan ruang laut. Daya tampung lahan juga mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas.

Sumatera Utara yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan ekonomi yang memicu pembangunan fisik secara masif ke depan perlu dilakukan dengan tetap memperhitungkan kondisi lingkungan hidup Sumatera Utara.

Pertumbuhan penduduk ke depannya juga akan memicu peningkatan kebutuhan air dan energi yang perlu dikelola secara optimal.

c. Pembangunan IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dilakukan untuk mengurangi ketimpangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang-Undang IKN Nomor 3 Tahun 2022 pembangunan fisik Ibu Kota Nusantara telah dimulai. Pemindahan ibu kota negara ini tidak hanya memindahkan aktivitas pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi (superhub) ekonomi.

Pembangunan IKN diharapkan menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kehidupan yang layak dan modern. Pembangunan IKN sebagai superhub ekonomi melalui pengembangan klaster ekonomi yang berdaya saing dan inovatif perlu menjadi pertimbangan ke depan terutama juga untuk menciptakan konektivitas

logistik dan rantai pasok ekonomi secara nasional. IKN yang direncanakan akan menjadi superhub dengan klaster ekonomi baru akan mempengaruhi pengembangan ekonomi di Sumatera Utara karena perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok yang saat ini terjadi antara Sumatera dan Jawa.

d. Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal ke depannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi.

Penguatan fondasi infrastruktur dasar riset dan inovasi masih menghadapi tantangan pada pemerataan distribusi kuantitas dan kualitas peneliti/periset, serta masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama inovasi berbasis sains dan teknologi yang bersifat applied dan evidence based.

Perluasan kemitraan ekosistem riset dan inovasi juga masih belum optimal, terutama pada kolaborasi stakeholders dalam meningkatkan difusi dan inkubasi teknologi inovasi yang dapat direplikasi dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan klaster dan teknologi inovasi berbasis produk unggulan daerah.

e. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
Kontribusi industri pengolahan terhadap PDB semakin menurun akibat terjadinya pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas factor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga terus melambat dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 yang disebabkan banyak faktor, misalnya regenerasi petani dan nelayan, kurangnya keterampilan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kelembagaan ekonomi petani dan nelayan, serta berkurangnya daya dukung lahan pertanian.

f. Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pemanfaatan potensi pariwisata sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan terus mengukuhkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi baru, menjadikannya barometer terdepan dalam arena

ekonomi kreatif global. Dengan mengangkat kekayaan budaya, seni, dan kearifan lokal, serta mendorong kreativitas talenta Sumatera Utara, kita membuka peluang untuk memberikan nilai tambah yang tinggi secara global.

g. Optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi laut

Indonesia memiliki potensi ekonomi laut yang tinggi, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of Communication (SLoC) dan ALKI menyebabkan kontribusi PDB kemaritiman masih berada di kisaran 7,60%. Selain itu, masih juga terdapat tantangan degradasi lingkungan laut, tingginya kegiatan ilegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF), dan belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.

h. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu tahun 2010-2022 masih relatif tertinggal, dengan nilai US\$7.274,9 per pekerja dan berada di bawah rata-rata pekerja di kawasan ASEAN. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dihadapkan dengan rendahnya kualitas SDM, yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan SMP ke bawah. Tantangan lainnya ialah ketidaksesuaian keahlian (mismatch) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi pasar tenaga kerja yang belum baik, dan pasar kerja Indonesia yang belum mampu merespons perubahan cepat jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

C. Isu Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi dan dirumuskan berdasarkan Isu Global, Isu Nasional, Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan permasalahan yang dihadapi Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun

2024 serta tantangan yang mungkin dihadapi 5 (lima) tahun yang akan datang, isu strategis Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka panjang (2025–2029) diuraikan sebagai berikut:

a. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness / ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu.

Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

b. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi focus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan local agar

manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

c. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik,

penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl).

Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara. Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.

Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di

Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T.

Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi deficit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi.

Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan.

Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan

ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

d. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

e. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan

menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan.

Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau. Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan

pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera. Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

f. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistic berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur

kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

g. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

D. Isu KLHS RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029

a. Isu Berdasarkan Karakter Wilayah

Isu Berdasarkan Karakter Wilayah Kabupaten Batu Bara pada RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95
Isu Berdasarkan Karakter Wilayah Kabupaten Batu Bara 2025-2029

NO	ISU	PERMASALAHAN
1	Keterbatasan lahan pengembangan	- Degradasi pantai dan hilangnya mangrove mempersempit ruang hidup ekonomi dan fisik bagi nelayan yang menekan meningkatnya masyarakat miskin - Hilangnya lahan bervegetasi, meluas lahan perkebunan menekan tingkat beberapa tingkat jasa lingkungan (IKL), yaitu :: ekosistem dengan dengan jasa lingkungan tinggi (subur, ketersediaan air, pengurai limbah, pengatur iklim)

NO	ISU	PERMASALAHAN
		• Pengambilan air tanah yang sulit terkendali untuk memenuhi kebutuhan air bersih domestik, jasa dan industri, dan paling besar di wilayah pesisir berbahaya terjadi intrusi air laut dan berpotensi penurunan tanah • Wilayah pantai memiliki elevasi rendah dan datar sehingga kerap menajai lahan yang terjadi genangan banjir
2	Guna lahan Perkebunan Sawit yang sangat luas dan dampak monokulturnya	Dominasi lahan perkebunan sawit seluas 68 % dari seluruh wilayah : dampak monokultur dan keterbatasan lahan • keanekaragaman hayati yang rendah, • erosi tanah pada kemiringan lereng di atas datar, • kapasitas penyimpanan air kecil dan siklus air terganggu, • kualitas tanah mudah merosot, • penguasaan HGU yang luas menjadi batasan pengembangan guna lahan lain (pengembangan permukiman)
3	Perekonomian dominan industri dan perkebunan sebagai ekonomi eksklusif	• industri pengolahan terkait pengolahan hasil perkebunan • realiasi pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung dan dilengkapi pergudangan • faktanya penyerapan tenaga kerja formal masih rendah dan membutuhkan skill memadai
4	Pariwisata pantai sudah terbatas	• Kegiatan pariwisata masih berorientasi pada keindahan/estetika pemandangan alam pantai/laut, yang terancam oleh kondisi fisik tanah Berlumpur dan mangrove yang hilang mengurangi estetika alam, dan ancaman abrasi
5	Potensi dan ancamann KEHATI dan Ekosistem penting (mangrove)	• Tanaman perkebunan monokultur • kawasan mangrove/hutan bakau semakin berkurang menyebabkan abrasi dan ancaman intrusi air laut • Potensi jasa lingkungan pendukung KEHATI rendah/sangat rendah (81% dari luas wilayah kabupaten)

NO	ISU	PERMASALAHAN
6	Tekanan daya dukung penyediaan air dan penyediaan pangan semakin langka	• Daya dukung pangan sudah defisit, juga daya dukung air bersih sudah defisit dan diproyeksikan tetap defisit hingga 2045. Sehingga membutuhkan ketahanan pangan melalui ketersediaan lahan pangan yang subur dan ketersediaan pasokan air bersih, Ancaman berasal dari masih terjadinya konversi lahan pertanian menjadi perkebunan. • Sisi ketersediaan air masih tertanggung oleh kondisi dan kualitas air dari dari hulu, dan pencemaran pencemaran limbah dan sampah yang tidak tertangani dan erosi mengurangi debit dan kualitas pasokan air.
7	Rawan bencana alam dan kerentanan terhadap perubahan iklim	• potensi banjir dipengaruhi kondisi lairan air permukaan dan air sungai yang melimpah dari wilayah hulu (Kabupaten Simalungun), dan kondisi jaringan drainase pada kawasan tengah kabupaten • rawan bencana cuaca ekstrim • jasa lingkungan yang rendah pengaturan iklim rendah/sangat rendah pada kawasan dataran tengah ke arah pantai
8	Pencemaran dan kualitas air semakin meningkat	Pencemaran air oleh sampah dan limbah yang tidak tertangani berdampak pada keberlanjutan pasokan air (debit dan kualitas) air bersih untuk domestik maupun jaringan irigasi.
9	Kemampuan penanganan sampah masih kurang	Sampah yang tidak tertangani masih cukup besar di berbagai tempat
10	Tambang galian C	Tambang galian C (izin dan non izin), tidak terawasi karena perizinan pertambangan dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, kondisi di lapangan memperlihatkan terjadinya pencemaran
11	Kemampuan keuangan daerah dan peran pihak lain	Kemampuan keuangan daerah yang rendah (tidak mandiri, ruang fiskal kecil dan belanja modal kecil)
		Peran pihak lain masih terbatas berupa CSR (perusahaan, TNI/Polri)

b. Isu-Isu terhadap Pencapaian Indikator TPB

Isu-isu strategis terhadap pencapaian indikator-indikator TPB yang memerlukan upaya tambahan hingga tahun 2045, sehingga dirumuskan Isu Strategis, sebagai berikut :

1. Kemiskinan, ruang hidup nelayan yang semakin terbatas dan desa yang terancam bencana alam dan perubahan iklim, yaitu: belum optimalnya pengentasan/pemberdayaan masyarakat miskin, kerentanan terhadap akses layanan dasar dan perlindungan dari bencana alam serta belum maksimalnya upaya pengentasan desa-desa nelayan di pesisir, yang mencakup. Kemiskinan masih menjadi masalah utama, terutama di kalangan masyarakat nelayan yang semakin terbatas ruang hidupnya karena degradasi lingkungan pesisir dan abrasi pantai. Desa-desa yang berada di pesisir juga terancam akibat perubahan iklim, abrasi, dan berkurangnya sumber daya alam seperti hutan mangrove. Memerlukan upaya perlindungan bagi nelayan, seperti pemulihan ekosistem pesisir, pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat pesisir, serta perbaikan tata ruang desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan desa.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan/gizi, kesehatan dan pendidikan serta dukungan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas. Tingkat pendapatan, kesadaran dan pengetahuan keluarga dalam hal pemberian kesehatan dan pendidikan keluarga masih terbatas, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, akses terhadap pangan berkualitas dan nutrisi yang cukup juga menjadi masalah bagi banyak keluarga. Diperlukan peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan melalui infrastruktur yang lebih baik dan distribusi tenaga medis dan guru yang merata. Selain itu, program pangan bergizi yang didukung oleh sektor pertanian lokal dapat memperbaiki kualitas hidup keluarga.
3. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif dan berkelanjutan serta dukungan sarana dan prasarana terbatas, yaitu: nilai tambah ekonomi dan tingkat upah dan manufaktur belum meningkat, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan upah terbatas, terbatasnya daya tarik pariwisata pantai/pesisir menurun oleh abrasi dan kondisi tanah lumpur, keterbatasan lahan pengembangan ekonomi masyarakat semakin terbatas oleh batasan HGU dan kawasan hutan lindung (mangrove), tekanan keberlanjutan pertumbuhan serta daya oleh daya dukung air yang terlampaui dan jasa lingkungan yang remenurun (indeks kualitas lahan rendah. Pertumbuhan ekonomi (industri dan perkebunan) belum mampu menciptakan manfaat yang luas bagi

seluruh lapisan masyarakat. Sektor-sektor seperti perkebunan, industri, dan pariwisata belum inklusif, dengan banyak tenaga kerja yang belum terserap. Perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, misalnya dengan pengembangan UKM dan peningkatan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pasar, jalan, dan fasilitas umum.

4. Perwujudan permukiman perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan, aman, tangguh, dan inklusif yaitu: belum terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang nyaman, didukung kemampuan penanganan sanitasi, limbah dan persampahan yang baik, dan tangguh menghadapi bencana alam. Permukiman di Kabupaten Batu Bara, baik di perkotaan maupun perdesaan, sering kali menghadapi masalah sanitasi, akses air bersih, dan pengelolaan sampah. Selain itu, banyak permukiman yang rentan terhadap bencana seperti banjir. Dibutuhkan pembangunan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang merata, serta program pembangunan permukiman yang tangguh menghadapi bencana, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.
5. Pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan lahan secara terpadu, yaitu : penyediaan air bersih bagi domestik, industri, pertanian di seluruh wilayah yang masih menggunakan air bawah tanah yang dikonervasi, perlindungan terhadap termasuk bencana banjir/genangan dari aliran hulu DAS, daya rusak ombak laut yang meyebabkan abrasi pantai. Perlu juga melindungi dengan membatasi alih fungsi lahan pertanian yang untuk kebutuhan pangan daerah, dan perlu memanfaatkan lahan-lahan pesisir menjadi lahan pertanian secara produktif dan terpadu bagi masyarakat
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan, yaitu : belum meningkatnya kapasitas dan kapabilitas pemerintah kabupaten yang berkaitan dengan penanganan kententeraman masyarakat, peran gender, serta ketertiban masyarakat dan swasata, dan birokrasi yang lebih bersih, dan pola kemitraan swasta dan masyarakat belum optimal. Kualitas tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan kehidupan sosial dan ekonomi yang tentram dan kondusif. Hal ini

mencakup upaya meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintahan perlu mengadopsi teknologi modern dan pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat meningkatkan efisiensi dan keberhasilan pembangunan.

D. Isu Strategis Kabupaten Batu Bara

Sebagai implementasi, maka isu-isu strategis diatas dapat dikaitkan dengan kewenangan daerah dalam menelaah isu-isu strategis daerah khususnya Kabupaten Batu Bara. Dimana analisis isu-isu strategis tersebut merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara. Karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Batu Bara di masa yang akan datang. Hal-hal dan kondisi yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Batu Bara.

Dalam merumuskan isu-isu strategis hal utama yang ditelaah adalah keterkaitan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih yang bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu- isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan dan analisis lingkungan eksternal juga harus mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang yang berpotensi muncul dalam dua puluh tahun mendatang. Serta adanya antisipasi dari berbagai ancaman yang muncul dari berbagai periode dua puluh tahun mendatang. Suatu Isu Strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Secara Garis Besar Isu strategis Kabupaten Batu Bara adalah Belum Optimalnya Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar, Belum Optimalnya Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Industrialisasi, Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

Belum Optimalnya Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar mencakup pada isu dan permasalahan kesehatan, pendidikan, literasi, kesejahteraan social, pemenuhan hak perempuan, dan anak kualitas pemukiman, sumberdaya air, lahan, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, peningkatan perilaku hidup bersih, sehat dan olah raga, sosial, budaya.

Sumber daya manusia di Kabupaten Batu Bara dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kualitas yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Artinya, dengan kualitas SDM yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Seperti yang diketahui pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Jika dibandingkan angka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah angka provinsi dan nasional. Untuk itu perlu peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan nilai indeks pembangunan manusia di Kabupaten Batu Bara. Selain pembangunan

manusia, berdasarkan pengarusutamaan permasalahan perlu dilakukan peningkatan pada pelayanan dasar lainnya.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi perlu dioptimalkan sektor- sektor perekonomian yang ada di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten Batu Bara cenderung meningkat dari tahun ke tahun walaupun pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19 sebesar -0,31 dan berangsur membaik dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 2,35 dan tahun 2022 sebesar 4,07. Jika dibandingkan Angka pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi sebesar. Maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara masih berada di bawah angka provinsi dan nasional, pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan di masa yang akan datang.

Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Batu Bara didukung oleh kontribusi 3 sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat memperhatikan 3 sektor tersebut sebagai pembentuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batu Bara.

Sektor perekonomian juga dapat berpengaruh terhadap terbukanya kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan angka pengangguran terbuka dan menurunkan angka kemiskinan.

Batu Bara Mempunyai Kawasan Industri Kuala Tanjung yang harus didorong perkembangannya untuk peningkatan investasi, dan perekonomian, Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah Kabupaten Batu Bara, diperlukan Kebijakan, dan dukungan Program kegiatan dari tingkat pusat dan provinsi sesuai dengan kewenangannya terhadap Kawasan Industri. Jika diperlukan Upaya pengembangan Kawasan Industri ini perlu mendapat perhatian khusus baik dari sisi alokasi pendanaan khusus untuk kawasan Industri, Kebijakan, dan lain sebagainya. Perkembangan dan pembangunan sektor industri merupakan bagian yang penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah dalam peningkatan nilai tambah. Kesiapan Infrastruktur, Utilitas, Sumberdaya Manusia, Regulasi yang terpadu baik ditingkat daerah, provinsi maupun pusat sangat penting untuk dilakukan.

Isu strategis belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dan industrialisasi mencakup antara lain : Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi, Angka kemiskinan belum menurun secara optimal, Belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran, Pemerataan pendapatan (penurunan kesenjangan), Belum optimalnya dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana, konektivitas wilayah, Digitalisasi ekonomi, Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan potensi wilayah, Belum optimalnya peningkatan daya saing, inovasi, nilai tambah ekonomi dan industrialisasi yang berkelanjutan, Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi, koperasi, pemuda dan UMKM, Belum optimalnya mitigasi, pencegahan, dan penanganan penanggulangan bencana

Dalam melakukan proses tata kelola pemerintahan yang baik, tidak sekadar melakukan perubahan dalam aspek teknis semata. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan yang baik juga harus dipahami bagaimana masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah sehingga mampu menyelenggarakan pemerintahan yang tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Isu strategis dalam tata kelola pemerintahan mencakup peningkatan indeks reformasi birokrasi. Beberapa indikator lainnya dalam isu strategis ini adalah peningkatan akuntabilitas, tata kelola keuangan, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, pengawasan, kepegawaian dan lain sebagainya.

Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance melalui reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinergi. Implementasi good governance, memerlukan upaya yang sungguh-sungguh berkaitan dengan penataan organisasi dan tata kerja; pemantapan sistem manajemen; serta peningkatan kompetensi SDM aparatur. Pengembangan sumber daya manusia di OPD yang terdapat di Kabupaten Batu Bara masih banyak yang belum mendapatkan sertifikasi seperti kurangnya sertifikat pelatihan.

Kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Hal tersebut dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Kabupaten yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Kabupaten Batu Bara mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu. Kesadaran Masyarakat Batu Bara akan pelaporan pajak masih belum optimal dalam mematuhi peraturan Daerah.

Peran birokrasi lebih difokuskan sebagai motivator dan fasilitator bagi tumbuh dan berkembangnya swakarsa dan swadaya serta meningkatkan produktivitas kegiatan pelayanan aparatur dan masyarakat. Peningkatan profesionalisme aparatur harus optimal didukung dengan integritas yang tinggi dan memiliki karakteristik seperti memiliki komitmen untuk mewujudkan good governance, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan kreatif, inovatif dan terampil serta dapat memaksimalkan efisiensi, kualitas dan produktivitas kerja.

Berdasarkan permasalahan maka isu-isu strategis di Kabupaten Batu Bara sebagai berikut :

1) Belum optimalnya Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar

Isu strategis belum optimalnya pembangunan manusia dan pelayanan dasar mencakup beberapa isu yang ada pada urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan pemenuhan layanan dasar lainnya. Dalam isu strategis ini secara garis besar meliputi isu seperti :

- Belum optimalnya kualitas kesehatan
- Belum optimalnya kualitas pendidikan dan literasi
- Belum optimalnya kesejahteraan sosial
- Belum optimalnya pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak
- Belum optimalnya kualitas pemukiman, sumber daya air, lahan, dan lingkungan yang berkelanjutan

- Perwujudan masyarakat aman, harmonis, dan kondusif
- Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pangan/gizi
- Belum optimalnya peningkatan perilaku hidup bersih, sehat dan olahraga
- Belum optimalnya peningkatan sosial dan budaya.

2) Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dan industrialisasi

Isu strategis belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dan industrialisasi mencakup antara lain :

- Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi
- Angka kemiskinan belum menurun secara optimal
- Belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran
- Pemerataan pendapatan (penurunan kesenjangan)
- Belum optimalnya dukungan infrastruktur, sarana dan prasarana, konektivitas wilayah
- Digitalisasi ekonomi
- Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan potensi wilayah
- Belum optimalnya peningkatan daya saing, inovasi, nilai tambah ekonomi dan industrialisasi yang berkelanjutan
- Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi, koperasi, pemuda dan UMKM
- Belum optimalnya mitigasi, pencegahan, dan penanganan penanggulangan bencana

3) Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Isu strategis Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel mencakup antara lain :

- Belum optimalnya peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
- Belum optimalnya peningkatan reformasi birokrasi
- Belum optimalnya peningkatan kualitas aparatur sipil negara

- Belum optimalnya peningkatan kualitas sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan
- Belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja pemerintahan
- Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, tata kelola pembangunan daerah
- Belum optimalnya pengawasan pemerintahan daerah

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara 2025-2029 merupakan kondisi yang dicita-citakan dan ingin dicapai Kabupaten Batu Bara pada akhir periode kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih.

Visi sebagai berikut:

**“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang:
Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif,
Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia”**

3.1.2 Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 7 misi pembangunan Kabupaten Batu Bara sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi
5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.
6. Mendorong Inovasi dan Kreatifitas di Segala Bidang Pembangunan

untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.

7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

Visi dan Misi yang akan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara juga harus sejalan dan berpedoman kepada Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di tingkat Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara

Visi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 Adalah:

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Adapun Misi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang dalam asta cita Tahun 2025-2029 Adalah:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swaembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritime industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi politik, hokum, birokrasi serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang Harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang disusun secara simultan dengan RPJMD Kabupaten Batu Bara Visi Provinsi Sumatera Utara 2045 adalah

“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Misi 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Membangun Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang sehat, cerdas, berkarakter, berkualitas, berdaya saing berdasarkan ideology Pancasila melalui penguatan peran pemuda, perempuan, penyandang disabilitas dan pengarusutamaan gender.

Misi 2 Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah Memperkuat stabilitas makro ekonomi daerah dilakukan melalui pengembangan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan lapangan kerja melalui peningkatan iptek, inovasi, pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan internasional dalam menjadikan Sumatera Utara sebagai pusat bioindustri dan pariwisata bertaraf global.

Misi 3 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Membangun tata kelola Pemerintahan yang lebih berkualitas melalui kerjasama pemangku kepentingan dan pelayanan publik yang berintegritas, lincah, dinamis, responsif dan kolaboratif serta menjunjung tinggi supremasi hukum

Misi 4 Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik

dan Ramah Lingkungan Melanjutkan kesinambungan pembangunan pusat dan daerah melalui pengembangan dan penataan Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan dalam mendukung prioritas pembangunan, investasi dan pengembangan potensi daerah untuk mewujudkan peningkatan produktivitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah.

Misi 5 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, harmonis dengan lingkungan dan alam serta toleransi antar umat beragama dalam rangka menjaga nilai-nilai demokrasi, mendukung pemberantasan narkoba dan menurunkan angka kriminalitas

Tabel 3.1
Sinkronisasi Misi Nasional dan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029

Misi Nasional	Misi Kabupaten Batu Bara
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat Sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Birokrasi Serta Memperkuat Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, Dan Berintegritas Tinggi Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swaaembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang Diberikan Masyarakat uUntuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Indstri Kreatif serta Mengembangkan Agro Maritime Industry di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Mendorong Inovasi dan Kreatifitas di Segala Bidang Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.

Misi Nasional	Misi Kabupaten Batu Bara
Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industry Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Didalam Negeri.	
Memperkuat Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olah Raga, Ksetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas	Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.
Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemeberantasan Kemiskinan	
Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.	Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif

3.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran tiap misi disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029

**VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN BATU BARA YANG:
BERORIENTASI PELAYANAN, AMANAH, HARMONIS, AKUNTABEL, GIAT, INOVATIF, DAN ADIL UNTUK BATU BARA YANG BAHAGIA**

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.02	85.91	86.79	87.68	88.56
	1.1	Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	73.50	76	78.50	81
	1.2	Meningkatnya Kualitas Standar pelayanan Publik	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	93.5	94	94.5	95	95.5
	1.3	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE	Indeks	2.87	3	3.17	3.27	3.57
Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.	2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan PDRB	Nilai	4.46	4.50	4.54	4.58	4.61
	2.1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	44.49	44.65	44.81	44.96	45.12
	2.2	Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	Nilai Kontribusi Akomodasi dan penyediaan makan minum	Persen	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20
	2.3	Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Pesern	18.50	18.61	18.73	18.84	18.95
	2.4	Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	Persen	3.62	4.87	6.12	7.37	8.62

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	2.5	Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan	persen	22.84	23.42	23.49	23.57	23.64
	2.6	Meningkatnya Masyarakat Digital	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	45.60	47.28	48.97	50.65	52.33
	2.7	Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Persen	3.86	3.92	3.99	4.05	4.11
	2.8	Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto	Pembentukan Produk Modal Tetap Bruto	Persen	19.76	19.81	19.85	19.90	19.94
	2.9	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0.297	0.310	0.322	0.335	0.347
	2.10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Point	75.00	77.50	80.00	82.50	85.00
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif	3. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara		Indeks Harmoni Indonesia (Kabupaten Batu Bara)	Indeks	6	6	6,5	6,5	7
	3.1	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara	Indeks Harmoni Indonesia (Kabupaten Batu Bara)	Indeks	6	6	6,5	6,5	7
Mewujudkan Tata Pemerintahan	4. Meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67.50	69.45	71.08	71.95	72.05

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi	4.1	Meningkatnya indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	83	83.50	84	84.50	85
	4.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	100	100	100	100	100
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	71.12	818.26	825.26	832.26	81.92
	4.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	67,50	69.45	71.08	71.95	72,05
Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.	5. Menurunya Tingkat Pengangguran terbuka		Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks	5.75	5.59	5.43	5.27	5.12
	5.1	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	77	78.06	79.13	80.19	81.25
	5.2	Meningkatnya Kelestarian Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Pesen	50	52.81	55.63	58.44	61.25
Mendorong Inovasi dan Kreatifitas disegala bidang pembangunan untuk meningkatkan daya saing Daerah	6. Meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah		Indeks Daya saing Daerah	Indeks	3,09	3.12	3.14	3.17	3.19
	6.1	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45.28	46.27	47.26	48.24	49.23
Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah	7.1 Menurunnya Tingkat Kesenjangan		Indeks Gini	Nilai	0.240	0.232	0.224	0.217	0.209
	7.1.1	Menurunnya Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen	10.68	10.50	10.34	10.16	9.99
	7.1.2	Meningkatnya Kualitas	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7435	0.7441	0.7447	0.7452	0.7458

Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat		Pembangunan Desa							
	7.1.3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57:57.5	57.6:58	58.10:58.50	58.51:59	59,10:59.50
	7.1.4	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32
	7.1.5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72.40	72.91	73.42	73.92	74.43
	7.1.6	Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.45	78.544	78.62	78.715	78.80
	7.1.7	Menurunnya Kualitas Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	141.51	140.65	139.79	138.923	138.06
	7.2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.50	74.13	74.75	75.38	76
	7.2.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.30	73.64	73.98	74.31	74.65
	7.2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8.68	8.76	8.83	8.91	9
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.17	13.22	13.30	13.38	13.47
	7.2.3	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	75.50	78	78.50	79.00	80.00

Tabel 3.3
Penyelarasan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029		
	(Sasaran Per Provinsi)								
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,46	4,61-7,00
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB per Kapita (Rp juta)	78,4	115,3	PDRB per Kapita (Rp juta)	109,314	143,1
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,15	4,15
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	10,68-10,50	9,99-7,50
5	Rasio Gini	0,303 -0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,303 -0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini (poin)	0,254-0,244	0,229-0,224
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia/IPM (poin)	73,50-74,53	76,00-80,10
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq))	115.814,73	166.937,34
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,40	74,43
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75-5,50	5,12-3,50

3.2 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang berisikan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan sasaran yang ada. Strategi adalah langkah-langkah atau cara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagaimana terdapat dalam tabel 3.4

Tabel 3.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029

Visi: MEWUJUDKAN KABUPATEN BATU BARA YANG: BERORIENTASI PELAYANAN, AMANAH, HARMONIS, AKUNTABEL, GIAT, INOVATIF, DAN ADIL UNTUK BATU BARA YANG BAHAGIA

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kepuasan masyarakat	1. Meningkatnya indeks Profesionalitas ASN	Optimalisasi tata kelola pemerintah daerah dan kualitas sumberdaya ASN	• Penerapan system merit, manajemen talenta dan karir ASN • Pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN • Penataan P3K Penuh Waktu Paruh Waktu • Pelayanan Kepegawaian dengan teknologi Informasi
		2. Meningkatnya Kepatuhan Standar pelayanan Publik	Pemenuhan dan Peningkatan standar pelayanan publik	• Pembangunan Mal Pelayanan Publik • Percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui Penguatan proses bisnis layanan pemerintah, penyusunan dan pelaksanaan SPBE • Penegakan regulasi Perizinan
		3. Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Peningkatan Layanan Pemerinah Berbasis Elektronik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	• Peningkatan respon terhadap laporan masyarakat melalui Call Centre Pengaduan Masyarakat • Integrasi Pelayanan dalam MPP • Peningkatan Sistem Digitalisasi Pemerintahan • Peningkatan Jaringan Internet • Peningkatan Indeks SPBE • Quick Respon (Call Center)
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan	Peningkatan Nilai Tambah produk industri pengolahan	• Pendampingan kelompok tani untuk memperoleh produk yang tersertifikasi dan memenuhi standar • Pengembangan varietas unggul lokal Kab. Batu Bara

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Peningkatan industri tenun , songket, Wastra • Pengelolaan Hama dan Penyakit terpadu, ketersediaan cadangan pangan • Menjaga Ketersediaan Stock Pangan Sektor Peternakan • Stabilisasi harga komoditas cabai di tingkat petani • Peningkatan penguatan BUMD dalam mendukung sektor industri pengolahan
		2. Meningkatnya Kontribusi Akomodasi dan Penyediaan Makan minum	• Peningkatan Tata Kelola Akomodasi dan Penyediaan makan minum, Pariwisata	• Peningkatan Kawasan Wisata Terpadu Dalam Tatanan Integrasi Ekonomi Lokal • Peningkatan tata kelola destinasi dan industri pariwisata • Penyediaan atraksi, amenities, dan aksesibilitas yang berdaya saing • Peningkatkan keterampilan SDM pariwisata • Pembangunan, pengembangan lokasi wisata Perkemahan Laut Tador • Pengembangan Ekonomi Kreatif Pariwisata • Peningkatan penguatan BUMD dalam mendukung sektor pariwisata, kontribusi akomodasi penyediaan makan minum
		3. Meningkatnya Kontribusi perdagangan dalam PDRB	• Peningkatan Nilai Tambah Perdagangan	• Revitalisasi pasar rakyat yang berkualitas, aman nyaman dan bersih, pembangunan pengembangan pasar induk • Mengendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting (Bapakting), Pupuk bersubsidi, dan lain sebagainya • Peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual • Pembangunan, pengembangan pasar pusat bisnis modern • Penguatan sinergi/koordinasi tim pengendalian inflasi daerah

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Pengembangan Ekonomi Kreatif Perdagangan • Peningkatan penguatan BUMD dalam mendukung sektor perdagangan
		4. Meningkatnya Level Skala Usaha Mikro	• Peningkatan Kualitas UMKM	• Optimalisasi Produktivitas Rumah Produksi Bersama • Peningkatan Kualitas Wastra, Tenun, Songket, Penguatan Dekranasda • Pengembangan platform digital pemasaran usaha, Penyediaan Inkubator bisnis, Perluasan Akses Inovasi kreasi produk yang berdaya saing • Peningkatan legalitas, permodalan dan SDM pelaku UKM • Peningkatan akses pembiayaan dan pemasaran, penerapan teknologi dan kemitraan usaha. • Membentuk umkm unggulan di tiap desa (1 desa 1 UMKM) • Peningkatan kualitas DEKRANASDA • Pengembangan Ekonomi Kreatif UMKM • Peningkatan penguatan BUMD dalam mendukung sektor UMKM
			• Peningkatan Kualitas Koperasi	• Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan koperasi • Meningkatkan kesehatan koperasi KSP/USP dan Peningkatan volume usaha koperasi • Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan Pemahaman, Pengetahuan Perkoperasian
		5. Meningkatnya Rasio PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan perikanan	• Peningkatan kualitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas	• Pengembangan industrialisasi produk unggul pertanian, perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan • Peningkatan sarana prasarana pertanian, (sarana produksi, prasarana pengairan, jalan, alat mesin pertanian dan prasarana pendukung lainnya berbasis implementasi inovasi technology yang adaptif dan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				berkelanjutan. • Perluasan informasi pasar, informasi technology, transfer knowledge melalui pelatihan petani dalam pengelolaan pertanian, seperti pengolahan pupuk organik, perbengkelan alat mesin pertanian, technology tanam, manajemen keuangan dan lain sebagainya • Dukungan, pendampingan terhadap akses pembiayaan petani, Pasar, dan asuransi pertanian, • Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas Balai Penyuluh , Pertanian, Peningkatan Kompetensi penyuluh, fasilitasi tenaga penyuluh untuk mengikuti Pelatihan • Optimalisasi produktifitas RPB • petani binaan (melibatkan CSR) • Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan dan mandiri • Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya melalui Pemanfaatan Lahan Lahan Potensial, Lahan Pekarangan, Penyediaan Benih yang berkualitas serta penjaminan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya • Peningkatan Kapasitas Produksi dan nilai pada komoditas unggulan perikanan • Perluasan informasi pasar, informasi technology, transfer knowledge melalui pelatihan dalam pengelolaan perikanan • Dukungan, pendampingan terhadap akses pembiayaan nelayan, Pasar, dan asuransi perikanan • Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas penyuluh perikanan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Peningkatan Infrastruktur, sarana prasarana perikanan berbasis implementasi technology dan berkelanjutan dalam meningkatkan nilai tambah daya saing produk perikanan • Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan serta Melakukan Pengawasan Perizinan Kapal Nelayan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak berwenang • Pengendalian Hama dan penyakit pada perikanan budidaya dan Ketersediaan Stock Pangan Sektor Perikanan • Peningkatan performa ternak unggulan, Pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyediaan pakan ternak, Optimalisasi pasar hewan • Pembangunan dan Pengawasan Rumah Potong Hewan (RPH) • Pengawasan pemotongan hewan di luar RPH • Peningkatan pengawasan produk hewan, Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan • Peningkatan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan • Pengembangan teknologi tepat guna. • Peningkatan penguatan BUMD dalam mendukung sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
		6. Meningkatnya Masyarakat Digital	• Peningkatan kualitas digitalisasi masyarakat untuk	• Peningkatan SDM keamanan informasi assessment security • Penambahan SDM dan peningkatan kemampuan SDM TI • Peningkatan infrastruktur TI, internet di ruang publik untuk mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan
		7. Meningkatnya Kontribusi Sektor transportasi dan	• Peningkatan Nilai Tambah transportasi pergudangan	• Bus Bahagia • Pengaturan Lalu lintas

Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
		pergudangan dalam PDRB			• Pengujian Kendaraan Bermotor • Batu Bara Terang • Peningkatan Sarana dan Prasarana jalan • Peningkatan penguatan BUMD dalam mendukung sektor transportasi, pergudangan
		8. Meningkatnya Produk Modal Tetap Bruto	• Peningkatan Penanaman investasi	Kualitas modal,	• Peningkatan Layanan, Promosi, Investasi pada sektor potensi Ekonomi produktif • Penyediaan peta potensi berbasis digital, dan kajian peluang investasi • Peningkatan Monitoring Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal • Peningkatan Infrastruktur sarana dan prasarana Perizinan dan Penanaman Modal • Peningkatan Kompetensi SDM, Sosialisasi layanan digital terhadap masyarakat dan pelaku usaha
		9. Meningkatnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	• Optimalisasi Kapasitas Fiskal terhadap PDRB	Rasio Daerah	• Insentififikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah • Peningkatan Sarana dan Prasarana dan sistem informasi , digitalisasi perpajakan daerah • Penegakan regulasi pajak daerah • Optimalisasi PAD (Pajak Daerah)
		10. Meningkatnya kualitas layana infrastruktur	• Peningkatan infrastruktur	layanan	• Pengembangan fasilitasi peningkatan kualitas rumah • Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman • Fasilitasi penanganan permukiman kumuh • Peningkatan sarana prasarana dan utilitas pemukiman

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Penyediaan Siteplan dan Masterplan Pembangunan Kawasan Kumuh • Pembangunan pengembangan permukiman dan pusat bisnis • Peningkatan Akses Infrastruktur jalan pada kawasan strategis, pusat pusat produksi dan akses ke pelabuhan kuala tanjung melalui Pembangunan jalan • Optimalisasi pemeliharaan rutin jalan • rehabilitasi jalan yang rusak, rekonstruksi jalan. • Dukungan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan lingkar • Pembangunan pengembangan sarana air minum, air bersih • Pembangunan pengembangan sanitasi • Pembangunan pengembangan drainase • Peningkatan tata kelola tanah, bangunan gedung dan lain sebagainya • Penyediaan, pengelolaan tata ruang kabupaten
3	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara	1. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat Harmonis di Kabupaten Batu Bara	Penguatan Stabilisasi Sosial Kemasyarakatan	• Penegakan Perda, penyelesaian konflik atau gangguan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM • Peningkatan Sarana Prasarana Penanganan Gangguan Ketertiban Umum • Pembinaan Pemuda Pelopor, Pendampingan dan Bantuan Sosial Kepemudaan • Peningkatan Kualitas Olah Raga • Penguatan kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme, terorisme serta penyalahgunaan Narkotika, Penyelenggaraan Kampung Bersih Narkoba. • Fasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan • Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental • Fasilitasi Pembinaan Purna Paskibraka menjadi Duta Pancasila Purna Paskibraka, Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan memberikan diklat PIP di pengarusamaan Pancasila • Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa • Penguatan integritas partai politik melalui penerapan Sistem Integritas Partai Politik Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik • Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan, peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan, penguatan jaminan beragama dan resolusi konflik sosial keagamaan, pengembangan dana sosial keagamaan produktif
			• Peningkatan Kolaborasi	• Peningkatan Kolaborasi Kerjasama Pentahelix antara pemerintah, swasta, akademis, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media yang implementatif, inovatif, produktif. • Implementasi Kerja sama antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat yang terintegrasi dan berkelanjutan • Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Musrenbang, Konsultasi Publik, Forum diskusi dan lain sebagai nya, serta peningkatan akuntabilitas terhadap public.
4	Meningkatnya indeks Reformasi	1. Meningkatnya indeks Reformasi Hukum	• Peningkatan Reformasi Hukum	• Penyediaan prosedur penyusunan kebijakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai akuntabilitas kinerja, evaluasi secara berkala atas

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Birokrasi			kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan secara berkala dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan perbaikan sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik • Penguatan tata kelola regulasi melalui penyempurnaan proses bisnis pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM bidang regulasi.
		2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	• Peningkatan Tata Kelola Keuangan Daerah	• Penguatan kualitas belanja negara; serta perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainable • Peningkatan SDM sektor pendapatan daerah • Peningkatan Kapasitas Auditor
		3. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	• Peningkatan Tata kelola Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	• Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, . Pembinaan SAKIP terhadap OPD, Adanya reward dan punishment terhadap pencapaian nilai AKIP, pengembangan model percontohan dimana salah satu OPD dijadikan model percontohan penerapan AKIP yang baik • Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik melalui pengukuran opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peningkatan Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah • Asistensi SAKIP • Pendampingan saber Pungli • MCP KPK

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5	Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	1. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	- Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja - Penerapan pola hubungan kerja yang adaptif terhadap pasar kerja yang fleksibel - Peningkatan harmonitas hubungan dengan Serikat Pekerja (SP) / Serikat Butuh (SB) yang lebih berkualitas - Revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas, fasilitas BLK - Penguatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan Tripartit - Perluasan kesempatan kerja untuk talenta muda - Optimalisasi pelatihan kerja dan kompetensi kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja. - Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk merespon tantangan ketenagakerjaan lokal maupun nasional - memperkuat dan memperluas akses layanan pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan sistem informasi pasar kerja
		2. Meningkatnya Kelestarian Budaya	Ketahanan budaya	- Perlindungan dan pelestarian situs warisan budaya - Pengembangan kebudayaan, malui pembinaan seni budaya, Penyelenggaraan Event tradisi budaya
6	Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah	1. Meningkatnya Inovasi Daerah	Peningkatan riset, Kajian, Inovasi	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri • Penyusunan Perencanaan Riset Daerah, Peningkatan Pelaksanaan Riset, Kajian Kelitbangan, Inovasi dan Kolaborasi • Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Peneliti riset daerah • Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah
7.1	Menurunnya Tingkat Kesenjangan	1. Menurunnya Kemiskinan	• Pengurangan beban pengeluaran, bantuan sosial dan jaminan sosial	• Pemberian alat bantu untuk disabilitas • PKH Plus untuk 1.000 • Pemberian bantuan dan binaan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat • pendampingan penyaluran bantuan sosial yang bersumber dari kemensos • Pembinaan Karang Taruna • Pemberian Bantuan Sembako pada Korban bencana • Penanganan Mister X • Tambahan BKKS Pencapaaian UHC Non Cut Off • Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten, PBI Provinsi dan Pusat, dan peningkatan dan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk alokasi CSR berupa bantuan BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan disekitar perusahaan. • Pemberian Jaminan Sosial Ktenagakerjaan kepada pekerja, terutama pekerja rentan, dan peningkatan dan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk alokasi BPJS ketenagakerjaan.

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	• Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa	• Peningkatan SDM Aparatur Melalui Pendidikan Pelatihan • Penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan Perempuan, Pemuda, Penyandang disabilitas, anak dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan, Melalui Keterlibatan, Pelatihan, Peningkatan Kompetensi, dan lain sebagainya • Pembinaan kepada Pengurus LPM / Karang Taruna dan Kader Posyandu • Peningkatan Kapasitas (Bimtek) kepada Pengurus LPM / Karang Taruna dan Kader Posyandu • Peneyediaan Operasional dan Insentif Pengurus LKD • Melakukan Pembinaan kepada Pengurus TP PKK • melaksanakan Penguatan Kapasitas Anggota BPD • Melakukan Penguatan Kapasitas Kepala Desa • Melakukan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa • melakukan audit untuk BUMDes • Peningkatan kualitas dan konektivitas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa • Pembinaan serta koordinasi OPD terkait, sosialisasi Tim pendataan aset desa • Pembinaan ke Bumdes yang tidak aktif • Insentif Bilal Mayit dan Penggali Kubur • Pembinaan administrasi dan pendampingan desa oleh kecamatan
		3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	• Peningkatan Kualitas Pembangunan Keluarga	• Peningkatan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan • Peningkatan implementasi Kabupaten layak anak

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Menurunnya Ketimpangan Gender	• Penurunan Ketimpangan Gender	• Penguatan Tata Kelola, Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan inklusi social Pembangunan • Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
		5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	• Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	• Peningkatan Pelestarian Alam, Pencegahan Ancaman Dampak Lingkungan, Pengawasan Lingkungan, pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan • Penyusunan dan Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis • Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dari hulu ke hilir hingga sampai ke masyarakat yang aman, berkelanjutan • Optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum • Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan kualitas air minum • Penguatan Tata Ruang, Review Tata Ruang, Penysusunan Detail Tata Ruang, dan Penyusunan Materi teknis • penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan, • Pembinaan perubahan perilaku masyarakat untuk pengurangan dan pemilahan sampah di sumber, • Pengelolaan persampahan secara terpadu • pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah dan terjadwal • integrasi dan kolaborasi mitra reuse, reduce, recycle (3R) persampahan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6. Meningkatnya Kualitas Ketahanan Pangan Pangan	• Ketahanan Pangan	• Pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi pangan • Peningkatan kualitas konsumsi, pengelolaan pangan dan gizi didukung melalui kegiatan-kegiatan panganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal. • peningkatan keamanan pangan melalui ketersediaan infrastruktur dan sarana-prasarana pengawasan pengujian pangan • Penguatan Data Pangan dan stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai • Bantuan Sosial, Pemberdayaan Pangan Keluarga • Peningkatan Pengelolaan Produksi dan Pengolahan Daya Saing Produk Perikanan • Gerakan Masyarakat Makan Ikan
		7. Menurunnya Resiko Bencana	• Peningkatan kualitas penanganan resiko bencana	• Pengelolaan risiko bencana daya rusak air melalui penyempurnaan sistem infrastruktur pengendalian banjir • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS. • Peyediaan SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten • Peningkatan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana seperti : pelatihan, pendidikan dalam situasi darurat dan pasca bencana, pendidikan dalam Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Evakuasi, pendidikan penghitungan kerugian bencana, pelatihan dalam bidang logistik bencana • Peningkatan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Penyediaan dokumen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana • Peningkatan deteksi dini, dan penanganan Kedaruratan Bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana, • Pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi • Pelatihan Mitigasi Bencana • Peningkatan Sarana dan Prasarana Damkar • Pemeliharaan dan Penambahan Titik Hydran di tiap Kecamatan
7.2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	• Peningkatan Kualitas Pelayanan, Akses, Infrastruktur Kesehatan dan Pola Hidup sehat	• Penguatan fungsi puskesmas untuk promotif dan preventif • peningkatan kualitas tata kelola kesehatan • penguatan pola hidup bersih dan sehat • Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk penanganan desa stop BABS • Optimalisasi Penyediaan dan pemeliharaan sarana air minum, sarana sanitasi, ruang terbuka hijau, IPLT dan fasilitas komunal pendukung kesehatan lainnya. • Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, melalui peningkatan Sarana, Prasarana, di puskesmas, pustu, rumah sakit sesuai standar • Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan • Pembangunan RSUD Terpadu, Peningkatan Akreditasi Rumah Sakit • peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk percepatan penurunan kematian ibu, neonatal, bayi, dan balita dengan, memperkuat deteksi dini, manajemen risiko, dan sistem rujukan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				terencana • Peningkatan upaya kesehatan jiwa yang responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, penyehatan lingkungan • penguatan tata kelola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) • Pemenuhan sarana dan prasarana mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, pembudayaan olahraga di masyarakat, inovasi promosi perubahan perilaku; serta mendorong pola konsumsi dan penyediaan akses pada pilihan pangan, beragam, bergizi, seimbang, dan aman, • Pengendalian obat dan makanan. • Peningkatan Kerja sama lintas sektor untuk pelaksanaan imunisasi dasar lengkap • Meningkatkan cakupan standar pelayanan minimal, Peningkatan Akreditasi Puskesmas • Penerapan puskesmas menjadi PPK BLUD, Penguatan UPT PSC • Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah • Pemberian Intensif tenaga kesehatan • Peningkatan Kualitas dan pemerataan Kompetensi Sumberdaya Manusia pelayanan kesehatan • Rekrutmen pemenuhan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan • Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Nutrisi dan Gizi, • Peningkatan Pengetahuan dan Perilaku • Peningkatan Kapasitas Lingkungan • Pemberian ASI Eksklusif dan Susu Pertumbuhan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				• Penggunaan Metode, Sistem Penilaian, Aplikasi Stunting, dan Promosi Kesehatan • Peningkatan dan Perawatan Kesehatan, Pencegahan dan Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah • Peningkatan kondisi gizi masyarakat, Pemenuhan Pangan, Pemberian Protein.dan lain sebagainya. • Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit dengan perluasan testing dan tracing, pencegahan dan penuntasan pengobatan, serta rekayasa lingkungan dan biologis • Meningkatkan Keluarga Berencana (KB) Pasca persalinan melalui penyuluhan, advokasi dan sosialisasi lintas program tentang kampung KB • Peningkatan pelibatan lintas sektor dan swasta dalam tata kelola pembangunan kesehatan • Puskesmas Rawat Inap disetiap Kecamatan • Menggalakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) • Bea siswa Tenaga Kesehatan Untuk Melanjutkan Ke jejang Pendidikan Spesialis
		2. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	• Peningkatan Kualitas Pelayanan, Akses, Infrastruktur Pendidikan	• Peningkatan sarana dan prasarana, mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pemerataan kualitas, akses pelayanan pendidikan dengan pemenuhan Infrastruktur , Sumber Daya Pendidikan • Penyaluran Bantuan Pendidikan, Bea siswa, Insentif bagi Siswa

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi • Peningkatan cakupan standar pelayanan minimal Pendidikan, Peningkatan literasi penduduk, pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, Penguatan sistem tata kelola pendidikan, penguatan manajemen, kepemimpinan lembaga pendidikan, penyediaan sistem informasi data pendidikan, penguatan sistem penjaminan mutu, • Penguatan Pendidikan Non Formal, Peningkatan pendidikan keterampilan, Dukungan sumberdaya pada pendidikan vokasi. • Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas • Pemerataan dan distribusi pemenuhan Guru dan Tenaga pendidikan • Penyaluran Bantuan Pendidikan, Insentif bagi Guru dan Tenaga Pendidik • Kerja sama ketersediaan layanan pendidikan jarak jauh • Pembentukan SKB • Penerbitan Sertifikasi Pendidik • Bantuan CSR terhadap sekolah • Penetapan Kurikulum Muatan Lokal • Bea siswa Mahasiswa S1 di perguruan tinggi terbaik • Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual, pengembangan inovasi pembelajaran dengan

Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (Pedagogy, Technology, and Content Knowledge/PTCK), penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan Talenta, karakter dan budi pekerti, peningkatan kualitas pendidikan agama, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)
		3. Meningkatnya Literasi Masyarakat	• Peningkatan Pembangunan Literasi Masyarakat	• Perpustakaan digital di tiap desa dengan standard nasional • Penguatan pendidikan Karakter dan Pengembangan literasi dan numerasi

3.2.2 Pentahapan Pembangunan RPJMD

Pentahapan Pembangunan RPJMD adalah pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan dan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029. Pentahapan ini akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Tahun Pertama (2025)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya penguatan pelayanan dasar seperti pemenuhan Jaminan Sosial Kesehatan berupa pemenuhan Universal Health Coverage Non Cut Off, Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan penguatan layanan dasar lainnya, Pemberian Insentif Bantuan Sosial kepada pekerja rentan, Peningkatan Pelayanan Publik seperti mendirikan Mall Pelayanan Publik, Digitalisasi Perpustakaan Desa, Penyediaan Call centre sebagai quick respon pemerintah, peningkatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya. Melakukan Konsolidasi Data Base pembangunan, pemetaan dan pendataan kondisi Batu Bara meliputi potensi dan peluang yang dimiliki, Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Penataan Birokrasi, Peningkatan nilai tambah ekonomi, kesempatan kerja berusaha, penguatan pengelolaan budaya, penegakan supremasi hukum, wawasan kebangsaan, kerja sama, social kemasyarakatan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

b. Tahun Kedua (2026)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua difokuskan pada peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan nilai tambah ekonomi, kesempatan kerja berusaha Peningkatan tata kelola birokrasi, peningkatan pengelolaan kebudayaan, peningkatan penegakan supremasi hukum,wawasan kebangsaan, kerja sama, sosial kemasyarakatan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan..

c. Tahun Ketiga (2027)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga difokuskan untuk percepatan pembangunan, melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dan berfokus pada percepatan pengembangan peluang dan potensi yang dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja dan berusaha.

d. Tahun Keempat (2028)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada upaya Pemantapan pencapaian pembangunan yang mencakup pelayanan dasar, peningkatan ekonomi, peningkatan tata kelola birokrasi, pelayanan publik, ekologi lingkungan berkelanjutan, budaya, sosial kemasyarakatan, pemantapan supremasi hukum, wawasan kebangsaan, kerja sama, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

e. Tahun Kelima (2029)

Pembangunan tahun kelima merupakan perwujudan Visi Misi pemerintah dalam Lima Tahun dengan tetap melakukan pengoptimalan terhadap pencapaian pembangunan.

Pentahapan pembangunan Kabupaten Batu Bara dalam kurun waktu 5 tahun kedepan disajikan dalam Tabel 3.4.

Tabel 3.5
Pentahapan Pembangunan RPJMD

2025	2026	2027	2028	2029
Penguatan pelayanan dasar Pelayanan Publik Konsolidasi Data Base pembangunan, pemetaan dan pendataan kondisi Batu Bara meliputi potensi dan peluang yang dimiliki, Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Penataan Birokrasi, Peningkatan nilai tambah ekonomi, kesempatan kerja, berusaha, penguatan pengelolaan budaya, penegakan supremasi hukum, wawasan kebangsaan kerja sama, social kemasyarakatan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan nilai tambah ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, Peningkatan tata kelola birokrasi, peningkatan pengelolaan kebudayaan, peningkatan penegakan supremasi hukum, wawasan kebangsaan, kerja sama, sosial kemasyarakatan, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Percepatan pembangunan, melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dan berfokus pada percepatan pengembangan peluang dan potensi yang dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pemantapan pencapaian pembangunan yang mencakup pelayanan dasar, peningkatan ekonomi, peningkatan tata kelola birokrasi, pelayanan publik, ekologi lingkungan berkelanjutan, budaya, sosial kemasyarakatan, pemantapan supremasi hukum, wawasan kebangsaan, kerja sama, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat	Perwujudan Visi Misi pemerintah dalam Lima Tahun dengan tetap melakukan pengoptimalan terhadap pencapaian pembangunan.

3.2.3 Pengembangan Wilayah

Kabupaten Batu Bara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Selain itu, di Kabupaten Batu Bara juga dikembangkan proyek-proyek strategis nasional yang berpotensi meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Batu Bara. Berikut adalah potensi-potensi pengembangan wilayah Kabupaten Batu Bara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bara :

1. Pengembangan potensi Kawasan hutan produksi berupa hutan produksi terbatas di Kabupaten Batu Bara dengan luas lebih kurang 1.695 (seribu

enam ratus sembilan puluh lima) hektar, berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram.

2. Pengembangan potensi pertanian dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan perkebunan dengan luas lebih kurang 40.669 (empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kabupaten Batu Bara terdiri dari 12 kecamatan lima diantaranya merupakan kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Talawi dan Kecamatan Tanjung Tiram dengan total luas wilayah 740,08 km² atau 81,78% dari luas Kabupaten Batu Bara. Panjang garis pantai 62,80 km. Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dari hulu ke hilir diantaranya ialah kawasan perkebunan, daerah aliran sungai (DAS), estuarine, hutan bakau, pantai, padang lamun, pulau-pulau kecil dan terumbu karang. Kandungan potensi sumberdaya alam wilayah pesisir di Kabupaten Batu Bara yang tidak kalah penting memiliki nilai ekonomi tinggi ialah perikanan, antara lain ikan, udang, kerang-kerangan serta biota laut lainnya. Kemudian pada kawasan daratan kecamatan Kabupaten Batu Bara juga memiliki potensi perikanan air tawar seperti kolam, perikanan air payau seperti tambak ikan dan udang, perikanan perairan umum seperti sungai, rawa, empang dan genangan air lainnya yang dapat dikembangkan budidaya keramba apung dan Keramba Jaring Apung (KJA).
4. Selain kawasan industri, potensi pengembangan wilayah dapat dilakukan pada kawasan pariwisata dengan luas lebih kurang 101 (seratus satu) hektar berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Talawi, Kecamatan Laut Tador, dan Kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara memiliki beberapa potensi pariwisata yang didominasi oleh wisata bahari. Potensi kepariwisataan terutama daya tarik wisata alam berupa wisata pesisir pantai dan bahari. Untuk

wisata bahari, terdapat pulau-pulau kecil yaitu Pulau Salah Namo dan Pulau Pandang. Sedangkan untuk wisata pantai, sepanjang pesisir timur yang berhadapan dengan Selat Malaka, terdapat beberapa daya tarik wisata berupa pantai, diantaranya Pantai Bunga, Pantai Alam Datuk, Pantai Perjuangan/Pantai Jono, Pantai Bunga Laut Indah dan Waduk Indah. Selain wisata bahari dan pesisir, Kabupaten Batu Bara juga memiliki wisata alam yaitu Danau Laut Tador di Kecamatan Sei Suka. Kabupaten Batu Bara juga memiliki daya tarik wisata budaya, yaitu Istana Niat Lima Laras, Komplek Makam Raja Lima Laras, Kubah Datuk Bara, Meriam Bogak, Meriam Nanasiam, Kompleks Masjid Padang Genting, Meriam Simpang Dolok, Sumur Bor Simpang Dolok, Situs Pemakaman Masjid Lamo, Kompleks Makam Wan Alang, Benteng Jepang, Meriam Datuk Simuangsa, Istana Indra Pura, Masjid Indra Pura, Kompleks Makam Raja Indra Putra dan Bukit Kerang.

5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menetapkan adanya proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas yaitu Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung, Pembangunan kawasan industri prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus yaitu Kawasan Industri Kuala Tanjung, serta Proyek Pembangunan Smelter yaitu Pembangunan Smelter Kuala Tanjung. Pengembangan pelabuhan di Kuala Tanjung menjadi Pelabuhan Hub internasional sebagai pintu masuk ke wilayah barat Indonesia. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2015, pengembangan pelabuhan akan meningkatkan volume arus peti kemas hingga 12,4 juta TEUs pada tahun 2039. Peningkatan volume arus peti kemas ini berasal dari permintaan yang berasal dari KEK Sei Mangkei dan diasumsikan bahwa pelabuhan akan memperoleh tambahan permintaan dari empat pelabuhan kompetitor yaitu Port of Singapore, Port of Tanjung Pelepas, Port Klang dan Pelabuhan Penang. Dengan Hub Internasional diharapkan Indonesia dapat menikmati permintaan pelabuhan yang selama ini dinikmati oleh Singapura dan Malaysia. Untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung

tersebut, direncanakan pula Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota rute Tebing Tinggi-Kuala Tanjung dalam rangka mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera. Jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tebing Tinggi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung, dan jaringan jalan bebas hambatan Tebing Tinggi-Kuala Tanjung.

Dalam pelaksanaan strategi arah kebijakan pembangunan, penentuan lokasi akan diselaraskan dengan Kawasan kawasan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai berikut:

1. Kawasan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan sumber daya air.

Kawasan hutan produksi berupa hutan produksi terbatas dengan luas lebih kurang 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) hektar, berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram.

Kawasan hutan produksi berupa hutan produksi terbatas dengan luas lebih kurang 1.695 (seribu enam ratus sembilan puluh lima) hektar, berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Talawi, dan Kecamatan Tanjung Tiram dengan luas lebih kurang 40.669 (empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang merupakan bagian dari kawasan tanaman pangan dengan luas lebih 12.061 (dua belas ribu enam

puluh satu) berada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kecamatan Laut Tador, Kecamatan Nibung Hangus, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Talawi.

Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan budidaya dan sarana penunjang perikanan. Kawasan perikanan budidaya dengan luas lebih kurang 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar berada di Kecamatan Medang Deras, Sei Suka, Lima Puluh, Talawi, Sei Balai, Datuk Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Nibung Hangus, dan Air Putih.

Sarana penunjang perikanan kawasan agromarinepolitan pantai timur, tempat Pelelangan Ikan (TPI) tersebar di Pantai Timur, meliputi:

- TPI Lalang di Kecamatan Medang Deras;
- TPI Pajak Kerang di Kecamatan Lima puluh Pesisir;
- TPI Pangkalan Dodek di Kecamatan Medang Deras;
- TPI Perupuk di Kecamatan Lima Puluh Pesisir; dan
- TPI Tanjung Tiram di Kecamatan Tanjung Tiram.

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas lebih kurang 13.932 (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua) hektar

Kawasan pariwisata dengan luas lebih kurang 101 (seratus satu) hektar berada di:

- Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Medang Deras, Kecamatan Talawi, Kecamatan Laut Tador, dan Kecamatan Lima Puluh.

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Kawasan permukiman perkotaan meliputi:

- kawasan permukiman perkotaan di daratan, dengan luas lebih kurang 11.309 (sebelas ribu tiga ratus sembilan) hektar berada di Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka, Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Laut Tador; dan

- kawasan permukiman perkotaan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut Kawasan reklamasi perairan/kawasan permukiman perkotaan dengan luas kurang lebih 3.796 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) hektar yang berada pulau 3 reklamasi perairan di pantai utara Sumatera.

Kawasan permukiman pedesaan, dengan luas lebih kurang 6.865 (enam ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar berada di Kecamatan Air Putih, Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Laut Tador, Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Medang Deras, Nibung Hangus, Sei Balai, Sei Suka, Talawi, dan Tanjung Tiram.

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas lebih kurang 91 (sembilan puluh satu) hektar meliputi:

- kawasan terpadu kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kecamatan Lima Puluh;
- Lembaga Permasyarakatan di Kecamatan Talawi;
- Kantor Kepolisian Resort (Polres) berada di Kecamatan Lima Puluh;
- Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan;
- Kantor Kepolisian Resort (Polres) Pelabuhan berada di Kecamatan Sei Suka;
- Kantor Kepolisian Perairan di Kecamatan Tanjung Tiram;
- Batalyon Infanteri 126 Kala Cakti di Kecamatan Sei Balai;
- Batalyon Infanteri 127 KIPAN-A di Kecamatan Laut Tador;
- Komando Rayon Militer (Koramil), meliputi Koramil – 01/Medang Deras berada di Kecamatan Medang Deras, Koramil – 02/Indrapura berada di Kecamatan Indrapura, Koramil – 03/Lima Puluh berada di Kecamatan Lima Puluh, Koramil – 04/Tanjung Tiram berada di Kecamatan Tanjung Tiram, Koramil – 05/ Labuhan Ruku berada di Kecamatan Talawi; dan
- Pangkalan Angkatan Laut di Kecamatan Sei Suka.

Kawasan sumber daya air dengan luas lebih kurang 534 (lima ratus tiga puluh empat) hektar adalah sungai yang tersebar di seluruh kecamatan.

2. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Penetapan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu penyebab adanya bencana alam ancaman longsor, gelombang pasang dan banjir. Potensi kawasan lindung di kabupaten Batu Bara ada di sekitar kawasan bibir pantai yang merupakan ekosistem mangrove ataupun hutan mangrove diantaranya Kecamatan Tanjung Tiram, Talawi, Lima Puluh, dan Medang Deras.

Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG), kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Penetapan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan.

3.2.3 Arah Kebijakan

Dalam Rangka Pencapaian Visi Misi Tujuan Sasaran, yang diselenggarakan dengan strategi disusun arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat:
 - Penerapan system merit, manajemen talenta dan karir ASN
 - Pelatihan dan peningkatan kompetensi ASN
 - Optimalisasi Pendistribusian dan Penempatan Pegawai sesuai Kebutuhan formasi berdasarkan Analisa Jabatan dan Beban Kerja
 - Optimalisasi Pelayanan Kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat berbasis Teknologi Informasi

- Pembangunan Mal Pelayanan Publik
 - Peningkatan respon terhadap laporan masyarakat melalui Call Centre Pengaduan Masyarakat (QUICK RESPON)
 - Penyediaan anjungan DUKCAPIL mandiri (ADM)
 - Peningkatan Sarana dan Prasana Pelayanan Dukcapil
 - Penyediaan Bus Batu Bara gratis dan aman (BUS BAHAGIA)
 - Penataan lalu lintas di pusat aktivitas masyarakat
 - Peningkatan Kendaraan layak jalan
 - Percepatan digitalisasi pelayanan publik melalui Penguatan proses bisnis layanan pemerintah, penyusunan dan pelaksanaan SPBE
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang Diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, melalui:
- Optimalisasi produktivitas Rumah Produksi Bersama (RPB)
 - Peningkatan tata kelola destinasi dan industri pariwisata
 - Pembangunan pasar induk kabupaten Batu Bara
 - Revitalisasi pasar rakyat yang berkualitas, aman nyaman dan bersih
 - Pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok
 - Peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual
 - Peningkatan Kompetensi SDM, Sosialisasi layanan digital terhadap masyarakat dan pelaku usaha
 - Peningkatan Layanan, Promosi, Investasi pada sektor potensi Ekonomi produktif
 - Penyediaan peta potensi berbasis digital, dan kajian peluang investasi
 - Peningkatan Kualitas Wastra, Tenun, Songket, Penguatan Dekranasda
 - Pembentukan UMKM unggulan di tiap desa
 - Peningkatan legalitas, permodalan dan SDM pelaku UKM
 - Pengembangan platform digital pemasaran usaha, Penyediaan Inkubator bisnis,
 - Perluasan Akses Inovasi kreasi produk yang berdaya saing
 - Peningkatan sarana prasarana pertanian, (sarana produksi, prasarana pengairan, jalan, alat mesin pertanian dan prasarana pendukung lainnya

berbasis implementasi inovasi technology yang adaptif dan berkelanjutan.

- Pengembangan Hilirisasi produk unggul pertanian, perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan
- Pengelolaan Hama dan Penyakit terpadu, ketersediaan cadangan pangan
- Perluasan informasi pasar, informasi technology, transfer knowledge melalui pelatihan petani dalam pengelolaan pertanian,
- Dukungan, pendampingan terhadap akses pembiayaan petani, Pasar, dan asuransi pertanian
- Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas Balai Penyuluh , Peningkatan Kompetensi penyuluh
- Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan dan mandiri
- Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya melalui Pemanfaatan Lahan Lahan Potensial, Lahan Pekarangan, Penyediaan Benih yang berkualitas serta penjaminan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya
- Peningkatan Kapasitas Produksi dan nilai pada komoditas unggulan perikanan
- Perluasan informasi pasar, informasi technology, transfer knowledge melalui pelatihan dalam pengelolaan perikanan
- Dukungan, pendampingan terhadap akses pembiayaan nelayan, Pasar, dan asuransi perikanan
- Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas penyuluh perikanan
- Peningkatan Infrastruktur, sarana prasarana perikanan berbasis implementasi technology dan berkelanjutan dalam meningkatkan nilai tambah daya saing produk perikanan
- Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan serta Melakukan Pengawasan Perizinan Kapal Nelayan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak berwenang
- Pengendalian Hama dan penyakit pada perikanan budidaya dan Ketersediaan Stock Pangan Sektor Perikanan

- Peningkatan performa ternak unggulan, Pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyediaan pakan ternak, Optimalisasi pasar hewan
- Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)
- Pengawasan pemotongan hewan di luar RPH
- Peningkatan pengawasan produk hewan, Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan
- Peningkatan infrastruktur TI, internet di ruang publik
- Peningkatan Akses Infrastruktur jalan pada kawasan strategis, pusat pusat produksi dan akses ke pelabuhan kuala tanjung
- Pembangunan jalan, Optimalisasi pemeliharaan rutin jalan; rehabilitasi jalan yang rusak, rekonstruksi jalan.
- Peningkatan Monitoring Kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal
- Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan dan mandiri
- Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya melalui Pemanfaatan Lahan Lahan Potensial, Lahan Pekarangan, Penyediaan Benih yang berkualitas serta penjaminan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya
- Peningkatan Kapasitas Produksi dan nilai pada komoditas unggulan perikanan
- Perluasan informasi pasar, informasi technology, transfer knowledge melalui pelatihan dalam pengelolaan perikanan
- Dukungan, pendampingan terhadap akses pembiayaan nelayan, Pasar, dan asuransi perikanan
- Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kualitas penyuluh perikanan
- Peningkatan Infrastruktur, sarana prasarana perikanan berbasis implementasi technology dan berkelanjutan dalam meningkatkan nilai tambah daya saing produk perikanan
- Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan serta Melakukan Pengawasan Perizinan Kapal Nelayan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak berwenang
- Pengendalian Hama dan penyakit pada perikanan budidaya dan Ketersediaan Stock Pangan Sektor Perikanan

- Peningkatan performa ternak unggulan, Pemanfaatan sumber daya lokal dalam penyediaan pakan ternak, Optimalisasi pasar hewan
 - Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH)
 - Pengawasan pemotongan hewan di luar RPH
 - Peningkatan pengawasan produk hewan, Pencegahan dan pengendalian penyakit hewan
 - Peningkatan infrastruktur TI, internet di ruang publik
 - Peningkatan Akses Infrastruktur jalan pada kawasan strategis, pusat pusat produksi dan akses ke pelabuhan kuala tanjung
 - Pembangunan jalan, Optimalisasi pemeliharaan rutin jalan; rehabilitasi jalan yang rusak, rekonstruksi jalan.
 - Pengembangan fasilitas peningkatan kualitas rumah
 - Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman
 - Penanganan permukiman kumuh
 - Peningkatan sarana prasarana dan utilitas pemukiman
 - Insentififikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana dan sistem informasi , digitalisasi perpajakan daerah
 - Peningkatan SDM sektor pendapatan daerah
 - penguatan kualitas belanja negara; serta perluasan pembiayaan publik inovatif, prudent, dan sustainable.
 - Penguatan sinergi/koordinasi tim pengendalian inflasi daerah
 - Pelaksanaan Operasi Pasar
3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif :
- Penegakan Perda, penyelesaian konflik atau gangguan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM
 - Peningkatan Sarana Prasarana Penanganan Gangguan Ketertiban Umum (penambahan, revitalisasi titik hydrat, penambahan Mobil Pemadam kebakaran, serta peralatan pendukung lainnya)

- Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan, peningkatan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan, penguatan jaminan beragama dan resolusi konflik sosial keagamaan, pengembangan dana sosial keagamaan produktif
 - Pembinaan Pemuda Pelopor, Pendampingan dan Bantuan Sosial Kepemudaan
 - Penguatan kepada masyarakat tentang bahaya radikalisme, terorisme serta penyalahgunaan Narkotika, Penyelenggaraan Kampung Bersih Narkoba.
 - Fasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - Fasilitasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
 - Fasilitasi Pembinaan Purna Paskibraka menjadi Duta Pancasila Purna Paskibraka, Pembinaan Lanjutan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila dengan memberikan diklat PIP di pengarustamaan Pancasila
 - Pembinaan Ideologi Pancasila, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa
 - Peningkatan Kolaborasi Kerjasama Pentahelix antara pemerintah, swasta, akademis, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media yang implementatif, inovatif, produktif.
 - Implementasi Kerja sama antar pemerintah daerah, provinsi dan pusat yang terintegrasi dan berkelanjutan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melalui Keterlibatan dalam Penyelenggaraan Musrenbang, Konsultasi Publik, Forum diskusi dan lain sebagainya, serta peningkatan akuntabilitas terhadap public.
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi :
- Penyusunan kebijakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, evaluasi secara berkala atas kebijakan untuk menilai efektivitas kebijakan secara berkala

- Penguatan tata kelola regulasi melalui penyempurnaan proses bisnis pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM bidang regulasi.
 - Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, . Pembinaan SAKIP terhadap OPD
 - Penguatan pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik melalui pengukuran opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peningkatan Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
 - Penguatan integritas partai politik melalui penerapan Sistem Integritas Partai Politik Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat berbasis Religius, Berbudaya, dan Berkarakter Kuat sebagai Fondasi Pembangunan Daerah, melalui :
- Perlindungan dan pelestarian situs warisan budaya
 - Pengembangan kebudayaan, malui pembinaan seni budaya, Penyelenggaraan Event tradisi budaya
 - Optimalisasi pelatihan kerja dan kompetensi kerja yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja.
 - Meningkatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk merespon tantangan ketenagakerjaan lokal maupun nasional
 - Revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas fasilitas BLK
 - Memperkuat dan memperluas akses layanan pasar melalui peningkatan sistem informasi pasar kerja
 - Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja
 - Perluasan kesempatan kerja untuk talenta muda
 - Peningkatan harmonitas hubungan dengan Serikat Pekerja (SP) / Serikat Butuh (SB) yang lebih berkualitas

- Penguatan Lembaga Kerjasama (LKS)
 - Penerapan pola hubungan kerja yang adaptif terhadap pasar kerja yang fleksibel.
6. Mendorong Inovasi dan Kreativitas di Segala Bidang Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah:
- Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
 - Penyusunan Perencanaan Riset Daerah, Peningkatan Pelaksanaan Riset, Kajian Kelitbangan, Inovasi dan Kolaborasi
 - Penyediaan dan Peningkatan Kompetensi Peneliti riset daerah
 - Penyelenggaraan Lomba Inovasi Daerah
7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat:
- Pemenuhan UHC non Cut Off melalui Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten, PBI Provinsi dan Pusat, dan peningkatan kerjasama dengan perusahaan swasta untuk alokasi CSR berupa bantuan BPJS bagi masyarakat yang membutuhkan
 - Pemberian Intensif dan BPJS Ketenaga kerjaan
 - Peningkatan pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
 - Penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat serta penyaluran bantuan sosial yang adaptif
 - Peningkatan penanganan bencana sosial
 - Optimalisasi Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial

- Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
- Peningkatan infrastruktur sosial lainnya dalam mengentaskan kemiskinan
- Inklusi sosial untuk kesejahteraan disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, mencakup penjangkauan pendataan kelompok rentan, serta akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan.
- Perluasan cakupan kepesertaan kepada pekerja informal, kelompok miskin dan rentan, lanjut usia, disabilitas, dan perempuan melalui penguatan literasi jaminan sosial secara massif serta penjangkauan aktif
- Penguatan Kapasitas Kepala Desa ,Perangkat Desa , Pembinaan kepada Pengurus LPM / Karang Taruna dan Kader Posyandu , Pembinaan kepada Pengurus TP PKK , Penguatan Kapasitas Anggota BPD , Bumdes
- Pengembangan teknologi tepat guna.
- Peningkatan kualitas dan konektivitas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa
- Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga menuju kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
- Peningkatan layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- Peningkatan implementasi Kabupaten layak anak
- Penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan Perempuan, Pemuda, Penyandang disabilitas, anak dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan, Melalui Keterlibatan, Pelatihan, Peningkatan Kompetensi, dan lain sebagainya.
- Penguatan Tata Kelola, Peningkatan indeks pembangunan gender (IPG) dan inklusi social Pembangunan
- Peningkatan Pelestarian Alam, Pencegahan Ancaman Dampak Lingkungan, Pengawasan Lingkungan, pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan
- penyediaan, optimalisasi, rehabilitasi, pengoperasian dan pemeliharaan, serta pengawasan infrastruktur persampahan,
- Pembinaan perubahan perilaku masyarakat untuk pengurangan dan pemilahan sampah di sumber,

- pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah dan terjadwal
- integrasi dan kolaborasi mitra reuse, reduce, recycle (3R) persampahan
- Penyusunan dan Implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- Pengembangan kawasan-kawasan sentra produksi pangan
- Peningkatan kualitas konsumsi, pengelolaan pangan dan gizi didukung melalui kegiatan-kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal.
- peningkatan keamanan pangan melalui ketersediaan infrastruktur dan sarana-prasarana pengawasan pengujian pangan
- Penguatan Data Pangan dan stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai
- Bantuan Sosial, Pemberdayaan Pangan Keluarga
- Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Sistem Penyediaan Air yang aman, berkelanjutan
- Optimalisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum
- Penguatan Tata Ruang, Review Tata Ruang, Penysusunan Detail Tata Ruang, dan Penyusunan Materi teknis
- Peningkatan Desa Tangguh Bencana
- Pengelolaan risiko bencana daya rusak air melalui penyempurnaan sistem infrastruktur pengendalian banjir
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS.
- Peyediaan SOP dan kebijakan penanganan bencana tingkat Kabupaten
- Peningkatan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana seperti : pelatihan, pendidikan dalam situasi darurat dan pasca bencana, pendidikan dalam Pencarian dan Penyelamatan (SAR) dan Evakuasi, pendidikan penghitungan kerugian bencana, pelatihan dalam bidang logistik bencana
- Peningkatan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana
- Penyediaan dokumen penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana
- Peningkatan deteksi dini, dan penanganan Kedaruratan Bencana

- Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana,
- pemenuhan kebutuhan pemulihan pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi
- Penguatan fungsi puskesmas untuk promotif dan preventif, peningkatan kualitas tata kelola kesehatan, penguatan pola hidup bersih dan sehat, Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk penanganan desa stop BABS, ,Optimalisasi Penyediaan dan pemeliharaan sarana air minum, sarana sanitasi, ruang terbuka hijau, IPLT dan fasilitas komunal pendukung kesehatan lainnya.
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, melalui peningkatan Sarana, Prasarana, di puskesmas, pustu, rumah sakit sesuai standar, Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, , peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk percepatan penurunan kematian ibu, neonatal, bayi, dan balita dengan, memperkuat deteksi dini, manajemen risiko, dan sistem rujukan terencana
- Peningkatan upaya kesehatan jiwa yang responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, penyehatan lingkungan, penguatan tata kelola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);Pemenuhan sarana dan prasarana mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, pembudayaan olahraga di masyarakat, inovasi promosi perubahan perilaku; Pengendalian obat dan makanan. Peningkatan Kerja sama lintas sektor untuk pelaksanaan imunisasi dasar lengkap
- Meningkatkan cakupan standar pelayanan minimal, Peningkatan Akreditasi Puskesmas, Penerapan puskesmas menjadi PPK BLUD, Penguatan UPT PSC, Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah
- Peningkatan Kualitas dan pemerataan Kompetensi Sumberdaya Manusia pelayanan kesehatan, Pemberian Intensif tenaga kesehatan
- Penanganan Stunting Melalui Peningkatan Nutrisi dan Gizi, Peningkatan Pengetahuan dan Perilaku, Peningkatan Kapasitas Lingkungan, , Pemberian ASI Eksklusif dan Susu Pertumbuhan, Penggunaan Metode, Sistem Penilaian, Aplikasi Stunting, dan Promosi Kesehatan, Peningkatan dan Perawatan Kesehatan, Pencegahan dan Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah,

- Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit dengan perluasan testing dan tracing, pencegahan dan penuntasan pengobatan, serta rekayasa lingkungan dan biologis
- Peningkatan Keluarga Berencana (KB) Pasca persalinan melalui penyuluhan, advokasi dan sosialisasi lintas program tentang kampung KB
- Peningkatan pelibatan lintas sektor dan swasta dalam tata kelola pembangunan kesehatan
- Peningkatan sarana dan prasarana, mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pemerataan kualitas, akses pelayanan pendidikan dengan pemenuhan Infrastruktur , Sumber Daya Pendidikan
- Penyaluran Bantuan Pendidikan, Bea siswa, Insentif bagi Siswa masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
- Peningkatan cakupan standar pelayanan minimal Pendidikan, Peningkatan literasi penduduk, pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah, Penguatan sistem tata kelola pendidikan, penguatan manajemen, kepemimpinan lembaga pendidikan, penyediaan sistem informasi data pendidikan, penguatan sistem penjaminan mutu,
- Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penerapan kurikulum yang berfokus pada kompetensi esensial, adaptif, dan kontekstual, pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (Pedagogy, Technology, and Content Knowledge/PTCK), penciptaan ekosistem satuan pendidikan yang mendukung penguatan Talenta, karakter dan budi pekerti, peningkatan kualitas pendidikan agama, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik- Integratif (PAUD-HI)
- Penguatan Pendidikan Non Formal, Peningkatan pendidikan keterampilan, Dukungan sumberdaya pada pendidikan vokasi.
- Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas guru untuk pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas
- Pemerataan dan distribusi pemenuhan Guru dan Tenaga pendidikan

- Penyaluran Bantuan Pendidikan, Insentif bagi Guru dan Tenaga Pendidik

3.2.4 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Batu Bara

Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 diselaraskan dengan sasaran Pokok Pembangunan pada RPJPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2045. Prioritas Pembangunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pembangunan manusia dan pelayanan dasar, yang mencakup Kesehatan, Pendidikan, perlindungan sosial
2. Menciptakan Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan dengan menerapkan ekonomi hijau, peningkatan Iptek, riset, Inovasi dan transformasi digital, Pembangunan kawasan industri, hilirisasi, serta peningkatan partisipasi Angkatan kerja
3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan reformi birokrasi, regulasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif, kerja sama kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat melalui pemerintahan desa
4. Supremasi Hukum Stabilitas dan ketangguhan diplomasi dengan mewujudkan masyarakat demokratis, menciptakan lingkungan aman dengan penguatan trantibmumlinmas, meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, dan ideologi Pancasila, peningkatan peran kepemudaan, serta mewujudkan stabilitas daerah
5. Ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan mewujudkan Kabupaten Batu bara yang berkebudayaan maju, agamis, dan berketahanan ekologi, dengan melestarikan kebudayaan dan kearifan local, penguatan Pendidikan agama, meningkatkan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif, menciptakan lingkungan hidup berkualitas, mandiri pangan, ketersediaan air bersih dan meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Adapun Program Prioritas pada RPJMD Kabupaten Batu Bara tahun

2025-2029 antara lain sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat:
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
 - Program pengelolaan aplikasi informatika
 - Program penyelenggaraan statistik sektoral
 - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pencatatan Sipil
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang Diberikan Masyarakat untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
 - Program Pengembangan UMKM
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
 - Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
 - Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Program Pemasaran Pariwisata
 - Program Pengembangan Kebudayaan
 - Program Pembinaan Sejarah
 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Program Pengelolaan Permuseuman
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Penguatan Badan Hukum Koperasi
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- Program Penyuluhan Pertanian
- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Pengelolaan Perikanan Tangkap
- Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
- Program pengelolaan aplikasi informatika
- Program Kawasan Permukiman
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Program Pelayanan Penanaman Modal
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif

- Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
 - Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi
- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Program Perekonomian Dan Pembangunan
 - Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Program Kepegawaian Daerah
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat berbasis Religius, Berbudaya, dan Berkarakter Kuat sebagai Fondasi Pembangunan Daerah
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Program Hubungan Industrial
 - Program Pengembangan Kebudayaan
 - Program Pembinaan Sejarah
 - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Program Pengelolaan Permuseuman
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Program Perlindungan Khusus Anak
 - Program Perlindungan Perempuan
 - Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
6. Mendorong Inovasi dan Kreativitas di Segala Bidang Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah
- Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Dasar
 - Program Pembinaan Perpustakaan
 - Program Rehabilitasi Sosial
 - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
 - Program Pemberdayaan Sosial
 - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Program Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Program Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- Program Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
- Program Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Program Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Pengembangan Kawasan Permukiman
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Penataan Bangunan Gedung
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Program Kawasan Permukiman
- Program Pengelolaan Persampahan
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Program Penanggulangan Bencana
- Persentase Penanganan Persampahan
- Persentase Pemenuhan Pemukiman Serta Pemukiman Kumuh

Program Prioritas Unggulan (PHTC *Quick Win*)

1. Melakukan Pembangunan Berbasis Desa

2. Mall Pelayanan Publik (MPP) Untuk Mengintegrasikan Seluruh Layanan Masyarakat Dalam Satu Atap
3. Menyediakan Pasar Tradisional Di Setiap Kecamatan Plus Pasar Induk Di Ibu Kota Kabupaten
4. Penyediaan Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Plus
5. Penyediaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan melalui BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk Pekerja Rentan
6. Menyiapkan Puskesmas Rawat Inap Fungsional Di setiap Kecamatan
7. Penyediaan PKH Plus (Pemberian PKH Bersumber Dari APBD Bagi Yang Belum Mendapatkan PKH KEMENSOS RI)
8. Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Keluarga Miskin Berprestasi.
9. Peningkatan Produktifitas, Kualitas Hidup Nelayan Dan Petani.
10. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya Dan Berprestasi.
11. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka pencapaian visi Pembangunan Daerah. Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi.

Seluruh program Perangkat beserta indikator kinerja, pagu indikatif kinerja, pagu indikatif target, berdasarkan bidang urusan dapat dilihat pada Lampiran 2. Selain seluruh program daerah yang disajikan pada lampiran 2, diinventarisasi juga dukungan program perangkat daerah terhadap kegiatan utama dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Dukungan program ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
1	• Perluasan layanan pendidikan anak usia dini • Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas • Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah • Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul • Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja • Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pamarfaatan Iptek dan Inovasi	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	• Penyediaan Beasiswa Bagi Mahasiswa Keluarga Miskin Berprestasi • Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan • Program Pembinaan Perpustakaan
2		Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	• Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi • Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
			• Program Rehabilitasi Sosial • Program Pemberdayaan Sosial • Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
3	• Penurunan Kematian Ibu dan Anak • Pencegahan dan Penurunan Stunting • Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis • Penuntasan TBC • Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses • Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	• Penyediaan Jaminan Kesehatan Universal Health Coverage (UHC) Plus • Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Menyiapkan Puskesmas Rawat Inap Fungsional Disetiap Kecamatan • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
4	• Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital • Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah	• Menyediakan Pasar Tradisional Di Setiap Kecamatan Plus Pasar Induk Di Ibu Kota Kabupaten • Melakukan Pembangunan Berbasis Desa

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
			• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting • Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen • Program Pengembangan Ekspor • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional • Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi • Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM
5	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	• Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Peningkatan Produktifitas, Kualitas Hidup

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
	• Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) • Pengembangan Pangan Hewani • Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati • Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan • Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan • Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit • Pengembangan Hilirisasi Kelapa • Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut • Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut		Nelayan Dan Petani. • Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) • Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
6	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan lainnya • Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food) • Pengembangan Pangan Hewani • Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati • Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan • Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan • Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal	• Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
	• Pengembangan Hilirisasi Kelapa • Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut		• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pembinaan Sejarah • Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengelolaan Permuseuman
7	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	• Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pembinaan Sejarah • Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengelolaan Permuseuman
8	Pengembangan KEK Sei Mangkei	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional • Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
			• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penataan Bangunan Gedung • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
9	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	• Penyediaan PKH Plus (Pemberian PKH Bersumber Dari APBD Bagi Yang Belum Mendapatkan PKH KEMENSOS RI) • Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
			• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
10		Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	• Mall Pelayanan Publik (MPP) Untuk Mengintegrasikan Seluruh Layanan Masyarakat Dalam Satu Atap • Program Penyelenggaraan Pengawasan • Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi • Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat • Program Perekonomian Dan Pembangunan • Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah • Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah • Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
11	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat	• Mall Pelayanan Publik (MPP) Untuk Mengintegrasikan Seluruh Layanan Masyarakat Dalam Satu Atap • Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Program Pengelolaan Informasi

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
			Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan • Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
12	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	• Melakukan Pembangunan Berbasis Desa • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Penyelenggaraan Penataan Ruang • Program Pengembangan Perumahan • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
13		Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Program Penyelenggaraan Jalan • Program Pengembangan Jasa Konstruksi • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting • Program Pengembangan Ekspor
14	• Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir • Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	• Program Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Bencana • Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi tahun 2025-2029	RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	Program Daerah	Program Daerah
	(KPU per Provinsi)		
	- Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemroajaan - Residu di TPA/LUR		- Program Pemberdayaan Sosial - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
15	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
16	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	- Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran - Program Penanggulangan Bencana
17	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	- Melakukan Pembangunan Berbasis Desa - Program Administrasi Pemerintahan Desa - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Dukungan Kabupaten Batu Bara Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 dapat dilihat pada Lampiran 3.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk Tahun 2025-2029, yang secara rinci dijelaskan pada Tabel 4.1 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, dan Tabel 4.2 tentang Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.02	85.91	86.79	87.68	88.56	
2	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	73.50	76	78.50	81	
3	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	93.5	94	94.5	95	95.5	
4	Indeks SPBE	Indeks	2.87	3	3.17	3.27	3.57	
5	Pertumbuhan PDRB	Nilai	4.46	4.50	4.54	4.58	4.61	
6	Nilai Kontribusi Industri Pengolahan	Persen	44.49	44.65	44.81	44.96	45.12	
7	Nilai Kontribusi Akomodasi dan penyediaan makan minum	Persen	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	
8	Nilai Kontribusi Sektor perdagangan dalam PDRB	Persen	18.50	18.61	18.73	18.84	18.95	
9	Persentase Peningkatan Level Skla Usaha Mikro	Persen	3.62	4.87	6.12	7.37	8.62	
10	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan Perikanan	persen	22.84	23.42	23.49	23.57	23.64	
11	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	45.60	47.28	48.97	50.65	52.33	
13	Kontribusi sektor transportasi dan pergudangan dalam PDRB	Persen	3.86	3.92	3.99	4.05	4.11	
14	Nilai Produk Modal Tetap Bruto	Persen	19.76	19.81	19.85	19.90	19.94	
15	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0.297	0.310	0.322	0.335	0.347	
18	Persentase Konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	
19	Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67.50	69.45	71.08	71.95	72.05	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
22	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	83	83.50	84	84.50	85	
23	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	100	100	100	100	100	
24	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	811.26	818.26	825.26	832.26	839.26	
25	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	67.50	69.45	71.08	71.95	72.05	
26	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks	5.75	5.59	5.43	5.27	5.12	
28	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	77	78.06	79.13	80.19	81.25	
29	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	50	52.81	55.63	58.44	61.25	
30	Indeks Daya saing Daerah	Indeks	3.09	3.12	3.14	3.17	3.19	
31	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	45.28	46.27	47.26	48.24	49.23	
32	Indeks Gini	Nilai	0.240	0.232	0.224	0.217	0.209	
35	Tingkat Kemiskinan	Persen	10.68	10.50	10.34	10.16	9,99	
36	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7435	0.7441	0.7447	0.7452	0.7458	
37	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	57:57.5	57.6:58	58.10:58.50	58.51:59	59.10:59.50	
38	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	
39	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72.40	72.91	73.42	73.92	74.43	
40	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78.45	78.544	78.62	78.715	78.80	
42	Indeks Resiko Bencana	Indeks	141.51	140.65	139.79	138.923	138.06	
43	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73.50	74.13	74.75	75.38	76	
44	Usia Harapan Hidup	Tahun	73.30	73.64	73.98	74.31	74.65	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	
45	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8.68	8.76	8.83	8.91	9	
46	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.17	13.22	13.30	13.38	13.47	
47	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	75.50	78	78.50	79.00	80.00	

Tabel 4.3 Penyeragaman Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan RPJPN dan RPJMD Provinsi Sumatera utara

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73.30	74.65
Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:		
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	15.60	12.85
b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	4.62	1.86
Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	147	123.50
a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	90			
b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90			

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	98.50
Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:		
a) Persentase kabupaten/kota			a) Persentase kabupaten/kota					
yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
- Literasi membaca	6,06 –12,12	27.27-30.30	- Literasi membaca	6,06 –12,12	27.27-30.30	a) Indeks Literasi	62.42	65.86
- Numerasi	00,00 – 3,03	6.06 - 9.09	- Numerasi	00,00 – 3,03	6.06 - 9.09			
b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
- Literasi membaca	35,99–38,49	41.53-44.03	- Literasi membaca	35,99–38,49	41.53-44.03			
- Numerasi	33,70–36,20	37.70 - 40.20	- Numerasi	33,70–36,20	37.70 - 40.20			
c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	10.83 - 10.84	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	10.83 - 10.84	b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.38	8.68

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	13.86 - 13.87	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	13.86 - 13.87	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.07	13.47
						APK SD	114	119
						APK SMP	107.16	109.66
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 - 11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 - 11,40			
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77	81.25
Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	10.68	9.99
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kabupaten (%)	38.81	51.61
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	100	100

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
						Terlantar, dan Gelandangan, Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti yang ditangani sesuai standar		
a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4,-15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4,-15,1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan (%)	44.49	45.12
b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PERikanan	5,2	7,8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan PERikanan	5,2	7,8			
Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata:		
a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a) Kontribusi akomodasi dan penyediaan makan minum	1.06	1.10
b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	Tingkat kunjungan wisatawan	47	58.75
Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	5,45	5,43	Kontribusi jasa perdagangan	18.50	18.95

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(%)*			(%)*			dalam PDRB		
Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	3.62	8.62
c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	Pertumbuhan Aset Koperasi (%)	4.50	5
Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5.75	5.12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	77	81.25
Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK		
Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Indeks Inovasi Daerah	45.28	49.23
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	Rasio PDRB sektor pertanian,	21.34	21.64

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
						kehutanan dan perikanan (%)		
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Masyarakat Digital	45.60	52,33
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19.76	19.94
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		
Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Indeks Desa Membangun	0.7435	0.7458
Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	Proporsi Rumah Layak Huni (%)	93.54	95.04
Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	Persentase Desa Mandiri (%)	15.35	35.35
Indeks Materi Hukum			Indeks Materi Hukum					
Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum	83	85
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan	2.87	3.57

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
Elektronik			Elektronik			Berbasis Elektronik		
Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	93.5	95.5
Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Reformasi Birokrasi	67.50	72.05
						Indeks Profesionalitas ASN	71	81
						Opini BPK	100	100
						Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	67.50	72.05
						Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	811.26	839.26
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Persentase gangguan ketertiban umum yang ditangani	100	100
Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.297	0.347

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	2.54	2.44
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Persentase cagar budaya yang terlestarikan	50	61.25
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Persentase Konflik SARA yang ditangani dan diselesaikan	100	100
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	57.50	59.50
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.37	0.32
Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup		
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72.40	74.43
b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00%	15%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00%	15%	b) Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	89	91.75
c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah	72.60	139.18
- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	16,00%	28%	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	16,00%	28%	- Timbunan Sampah Terangkut / Terolah	52	55

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
Pengolahan Sampah (%)			Pengolahan Sampah (%)					
- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	5	25
Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi			a) Ketahanan Energi		
- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	385 - 1.007	485 - 1.007
b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48	b) Skor Pola Pangan Harapan	88.27	90.77
c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air			c) Ketahanan Air		
Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)			Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)			Kebutuhan air rata-rata liter/detik		
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	40,95	53	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	40,95	53	Persentase penduduk yang mendapat Akses Air	15,03	50.03

RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kab/Kota tahun 2025-2029		
(Sasaran per Provinsi)								
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
(%)			(%)			Minum yang aman		
Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	141.51	138.06
Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.40	74.43
a. Kumulatif	10,06%	12,92%	a. Kumulatif	10,06%	12,92%			
b. Tahunan	19,04%	25,38%	b. Tahunan	19,04%	25,38%			

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.45	78.54	78.62	78.71	78.80	
Skor Pola Pangan Harapan	Angka	82.00	82.50	83.00	83.50	84.00	
Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	385 - 1.007	410 - 1.007	435 - 1.007	460 - 1.007	485 - 1.007	
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	91.45	91.54	91.57	91.81	91.90	
Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	15.03	17.22	19.41	21.59	23.78	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	72.40	72.91	73.42	73.92	74.43	
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Melalui Spald Terhadap Rumah Tangga Diseluruh Kabupaten	Persen	88.82	88.85	88.88	88.91	88.93	
Timbunan Sampah Terangkut / Terolah	Persen	52	52.75	53.50	54.25	55	
Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik	Persen	88.50	89.00	93.00	95.00	95.50	
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	%	72.60	89.24	105.89	122.54	139.18	
Indeks Risiko Bencana	Angka	141.51	140.65	139.79	138.92	138.06	
Persentase desa tangguh bencana	%	18	19	20	21	22	
Persentase Pelayanan Penanganan Darurat Bencana Terhadap Kejadiaan Bencana	%	100	100	100	100	100	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase pemenuhan kebutuhan dan penanganan infrastruktur pasca bencana	%	100	100	100	100	100	
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	
Kepadatan Penduduk	Orang/km ²	502.24	511.89	521.53	531.18	540.83	
Persentase Konektivitas Darat	%	58.27	60.92	63.57	66.22	68.87	
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	57.35	60.32	65.45	70.55	72.92	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.46	4.50	4.54	4.58	4.61	
Tingkat Kemiskinan	%	10.68	10.50	10.34	10.16	9.99	
PDRB Per Kapita	Rp Juta	62.097,80	63.063,91	64.030,01	64.996,12	65.962,22	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.75	5.59	5.43	5.27	5.12	
Indeks Gini	Angka	0.240	0.232	0.224	0.217	0.209	
Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73.50	74.13	74.75	75.37	76	
Usia Harapan Hidup	Tahun	73.30	73.64	73.98	74.31	74.65	
Prevalensi Stunting	Persentase	14	13,5	13	12,5	12	
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	189	122	109	97	86	
Angka Kematian Balita (AKB)	per 1.000 KH	16,85	12,62	11,63	10,97	10,46	
Angka Keberhasilan pengobatan TB (%)	Persentase	90	91	92	93	94	
Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	83,99	84	85	90	93	
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase	97,18	98,6	98,7	98,8	98,9	
Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	-	36	45	55	65	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase Puskesmas dengan akreditasi Paripurna	puskesmas	8	8	8	8	12	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan	Persentase	89,93	90,1	90,2	90,3	90,4	
Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Persentase	45,14	45,19	45,24	45,29	45,34	
Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persentase	87	92	100	100	100	
Persentase Desa/Kelurahan mencapai target STBM	persen	43,04%	50,58%	63,22%	75,87%	88,52%	
Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	15,9	15,01	14,2	13,95	13,5	
Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	66,7	67,3	68	69	70	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr	Persentase	46,2	47,7	49,2	50,1	50,5	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	20,5	19,7	19	18,9	18,56	
Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Indeks	60,53	60,7	61	63	65	
Persentase Desa/Kelurahan mencapai target STBM	persen	43,04%	50,58%	63,22%	75,87%	88,52%	
Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	15,9	15,01	14,2	13,95	13,5	
Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	66,7	67,3	68	69	70	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr	Persentase	46,2	47,7	49,2	50,1	50,5	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	20,5	19,7	19	18,9	18,56	
Indeks Pembangunan Keluarga (ibangga)	Indeks	60,53	60,7	61	63	65	
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.68	8.76	8.83	8.91	9	
Angka Kemampuan Literasi SD	Nilai	64.79	70.10	75.41	80.72	86.03	
Angka Kemampuan Literasi SMP	Nilai	59.42	65.19	70.95	76.72	82.49	
Angka Kemampuan Numerasi SD	Nilai	65.23	70.51	75.79	81.07	86.35	
Angka Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	61.04	66.04	71.04	76.04	81.04	
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.17	13.22	13.30	13.38	13.47	
Angka melek Huruf pada Usia 15 - 24 Tahun	%	100	100	100	100	100	
Angka lulusan (AL) SD/MI/PAKET A	%	100	100	100	100	100	
Angka lulusan (AL) SMP/MTs/PAKET B	%	100	100	100	100	100	
Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	43	43,50	44	44,50	50,00	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	116	117	118	119	120	
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	%	108	108,50	109	109,50	110	
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	104	104,05	104,10	104,11	104,12	
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	90,50	90,55	91,00	92	93	
Angka melanjutkan sekolah dari non formal ke SD	%	100	100	100	100	100	
Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	
Presentase guru SMP/MTs yang memiliki kualifikasi D4/S1	%	100	100	100	100	100	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	75.50	78	78.50	79.00	80.00	
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	
Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	38.81	42.01	45.21	48.41	51.60	
Persentase Konflik sosial yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	
Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	50	52.81	55.63	58.44	61.25	
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	
Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	57:57.5	57.6:58	58.10:58.50	58.51:59	59.10:59.50	
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	6.60	8.20	9.79	11.38	12.98	
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	8.48	9.95	11.43	12.91	14.38	
Persentase penduduk wajib KTP-el yang melakukan perekaman data kependudukan	%	100	100	100	100	100	
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100	100	100	100	100	
Persentase penduduk usia 0-18 yang memiliki akta kelahiran	%	98	98	99	99	99	
Persentase penduduk non muslim usia > 17 th yang memiliki akta perkawinan	%	65	65	70	70	70	
Jumlah Capaian Nilai Indikator Kabupaten Layak Anak	Nilai	750	800	800	850	850	
Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	persen	100	100	100	100	100	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
(PMKS) yang Mandiri yang ditangani							
Ratio Kekerasan Terhadap Perempuan	%	2.09	1,90	1,80	1,70	1,60	
Ratio Kekerasan Terhadap Anak	%	31.85	29	26	22	20	
ASPEK DAYA SAING DAERAH							
Angka Ketergantungan	%	53.06	53.60	54.15	54.69	55.24	
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	44.49	44.65	44.81	44.96	45.12	
Nilai Kontribusi Akomodasi dan penyediaan makan minum	%	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	20.18	19.91	19.64	19.37	19.10	
Persentase Koperasi Berkualitas Berdasarkan SHU Koperasi	%	4.50	4.63	4.75	4.88	5.00	
Persentase Peningkatan Level Skala Usaha Mikro	%	3.62	4.87	6.12	7.37	8.62	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77	78.06	79.12	80.19	81.25	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59.49	60.74	61.99	63.24	64.49	
Indeks Inovasi Daerah	Angka	45.28	46.27	47.26	48.24	49.23	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	19.76	19.81	19.85	19.90	19.94	
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	75	77	79	83	85	
Proporsi Rumah Layak Huni	%	93.54	93.92	94.29	94.67	95.04	
Persentase Desa Mandiri	%	15.35	20.35	25.35	30.35	35.35	
Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2.55	2.60	2.66	2.72	2.78	
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.297	0.310	0.322	0.335	0.347	
Tingkat Inflasi	%	2.54	2.52	2.49	2.47	2.44	
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	62.25	63.50	64.75	66.16	67.57	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	65.74	67.37	68.99	71.84	74.69	
Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	%	100	100	100	100	100	
Peningkatan Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rupiah	500 Milyar	560 Milyar	630 Milyar	720 Milyar	825 Milyar	
Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB	%	5	8	10	13	15	
Persentase Peningkatan Volume Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Produksi Hasil Pengolahan Perikanan)	%	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00	
Kontribusi Sub Sektor Peternakan pada PDRB	%	320	330	340	350	350	
Produksi Daging Sapi	Ton	63	68	74	78	81	
Produksi Daging Domba	Ton	33	35	38	41	45	
Kontribusi Sektor Pertanian (Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	%	18.69	18.71	18.76	18.81	18.86	
Jumlah Produksi Padi	Ton	138,500	138,500	139,000	139,500	140,000	
Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	16,700	16,800	16,900	17,000	17,100	
Jumlah Produksi Kelapa	Ton	49,200	49,500	49,800	50,000	52,000	
Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	190,950	191,000	191,500	192,000	192,500	
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah	Persen	35	37	40	45	50	
Persentase Masyarakat Sadar Pajak	Persen	90	91	92	93	95	
Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100	100	
Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	Persen	85	86	87	88	90	
Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	Persen	5	5	5	5	5	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
persentase cabang olah raga yang aktif di masyarakat	%	62	67	70	72	75	
Jumlah cagar budaya yang terlestarikan	unit	1	2	3	4	5	
Jumlah kunjungan wisatawan	Org	65,000	70,000	73,000	77,000	80,000	
Persentase Sarana dan Prasarana Utilitas Kawasan Permukiman	%	0.15	0.17	0.2	0.25	0.28	
Persentase Rumah Layak Huni	%	97	93	93	93	93	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	71	71	71	71	71	
Pesentase Sampah Terkelola	%	48	48	49	49	49	
Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	80.20	80.30	80.40	80.50	80.60	
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Indeks Reformasi Hukum	Angka	83	83.50	84	84.50	85	
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2.87	3	3.17	3.27	3.57	
Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	93.5	94	94.5	95	95.5	
Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	
Persentase Gangguan ketertiban umum ditangani	%	100	100	100	100	100	
Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.09	3.12	3.14	3.17	3.19	
Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
Persentase Identifikasi/Analisa Produk Hukum Daerah	%	100	100	100	100	100	
Nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan	Nilai	9.92	9.93	9.94	9.95	9.96	
Level Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.50	87.00	88.00	89.00	89.00	

Indikator	Satuan	Target Tahun					Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	
IKM Sekretariat Daerah	Indeks	86.50	87.00	88.00	89.00	90.00	
Persentase Prolegda yang disepakati Bersama Eksekutif	%	100	100	100	100	100	
Persentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	92	92	94	95	95	
Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	%	90	92	93	95	97	
Tingkat maturitas SPIP	Nilai	3 (3,15)	3 (3,15)	3 (3,20)	3 (3,25)	3 (3,25)	
Level Kapabilitas APIP	Level	3 (3,10)	3 (3,10)	3 (3,15)	3 (3,2)	3 (3,2)	
Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	21.71	22.51	23.41	24.4	25.62	
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor	%	95	96	97	98	100	
Persentase masyarakat sadar Pajak	%	90	91	92	93	95	
Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	%	85	86	87	88	90	
Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	%	5	5	5	5	5	
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.02	85.91	86.79	87.68	88.56	
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	73.50	76	78.50	81	

BAB V

PENUTUP

5.1 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Periode 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Batu Bara untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD ini berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2025 – 2029 yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Batu Bara Periode 2025 – 2045 serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Periode 2025 – 2029 dan RPJMN 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Periode 2025 – 2029 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan RAPBD serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Menyadari keberadaan RPJMD yang sangat strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah maka perlu adanya kesinambungan pembangunan. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum.

. Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, RPJMD, beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

1) RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.

2) Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional.

3) Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.

4) Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP. RKP Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

KAIDAH PELAKSANAAN

RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik pemerintah daerah, swasta, organisasi kemasyarakatan dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing.

RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 memiliki konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya serta pemanfaatannya secara efisien dan efektif. Perencanaan yang berkualitas berorientasi pada hasil (result oriented government) secara berkelanjutan dan memberikan pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah maupun nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi, perlu didukung penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas terutama dalam penentuan prioritas pembangunan daerah sampai level proyek/output serta dilaksanakan secara kolaborasi semua pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut bisa dilakukan dengan

berbagai stakeholder seperti dengan masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah pusat, provinsi, daerah lain melalui partisipasi pembangunan, mulai dari perencanaan pembangunan melalui musrenbang, forum grup diskusi, dan lain sebagainya, pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder dimaksud dalam bentuk partisipasi pengerjaan kegiatan pembangunan, program padat karya, partisipasi pendanaan melalui CSR, penelitian pengembangan, sharing knowledge, pendampingan, pelatihan, dan lain sebagainya.

Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Batu Bara berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Batu Bara menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran program RKPD Kabupaten Batu Bara.

Indikator RPJMD Kabupaten Batu Bara harus dapat dijabarkan pada Renstra Perangkat Daerah. Indikator RPJMD Kabupaten Batu Bara diselaraskan dengan indikator RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional sesuai dengan karakteristik kewilayahan masing-masing.

Skema Pendanaan dan Penganggaran Pencapaian sasaran pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Batu Bara, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah serta nonpemerintah secara inovatif, integratif dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain itu dapat memanfaatkan sumber pendanaan dari pinjaman, hibah dan sumber lainnya.

Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif. Pengendalian

dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pengendalian pembangunan perlu didukung tatanan regulasi untuk mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik untuk mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.

Mekanisme Perubahan

Dalam keadaan kahar (*force majeure*) meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan, RPJMD Kabupaten Batu Bara 2025-2029 dapat dimutakhirkan/disesuaikan melalui Perubahan RPJMD. Selain itu Perubahan RPJMD dapat dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan Penyesuaian Kebijakan dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua guna mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Batu Bara “Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang: Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia”, dan terus melanjutkan pembangunan di berbagai bidang.

Lima Puluh, 19 Agustus 2025

BUPATI BATU BARA,

TTD

BAHARUDDIN SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


DEDE IRFAN, SH

NIP. 198409192011011009

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 - 2023

NO.	Periodesasi/Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan	
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
PERIODESASI : 2019 – 2023											
VISI : Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri Yang Sejahtera, Mandiri, Dan Berbudaya											
1.	Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi.	1.1.	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Kab. Batu Bara	Nilai RB	n/a	B	B	100	Belum optimalnya peningkatan capaian pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi Masih rendahnya pendapatan asli daerah pada Pendapatan Daerah yang disebabkan belum optimalnya	Komitmen Kepala Daerah dan seluruh OPD Perkembangan teknologi informasi Regulasi yang mendukung terciptanya reformasi birokrasi Keterbukaan pendampingan	Sangat Tinggi
		1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	disclaimer	WTP	WDP	100	serapan pendapatan daerah dari potensi yang ada. Perlu ditingkatkan kualitas laporan keuangan	dan koordinasi ke pemerintah provinsi dan pusat	Tinggi
		1.1.2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik	Nilai IKM	n/a	80%	84,8%	106			Sangat Tinggi

NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									terutama terkait dengan inventaris aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Kualitas laporan keuangan yang belum optimal		
		1.2	Terwujudnya Peningkatan Investasi	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		53,5 Triliyun	51,76 Triliyun	96,74	Rendahnya investasi baik dalam negeri maupun asing	Peningkatan Standar Pelayanan Administrasi.	Sangat Tinggi
		1.2.1	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)		53,5 Triliyun	51,76 Triliyun	96,74	Sistem pelayanan investasi belum optimal termasuk pengurusan perijinan. Upaya untuk mendatangkan investasi masih rendah. Tidak sinerginya antara pemerintah,	atau Perizinan yang cepat, mudah dan tepat waktu, serta kondusif Perkembangan teknologi informasi untuk mendukung Pelayanan data dan	Sangat Tinggi

NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi;	informasi investasi ekonomi secara elektronik, lengkap dan mudah diakses Regulasi yang mendukung terciptanya peningkatan investasi Peningkatan dan Pembenahan Infrastruktur Koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan investasi	
2.	Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan	2.1	Terciptanya Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Wilayah untuk Mendukung Perumbuhan industri	Indeks infrastruktur	n/a				Pengelolaan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan jalan.	Pengelolaan alokasi dana pembangunan dan pemeliharaan	-

NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	perekonomian masyarakat		dan Ekonomi Masyarakat							an jalan; Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada permukiman Kumuh. Pengembangan sanitasi, air bersih dan lingkungan sehat Penyusunan Dokumen Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Pengawasan Mutu dan Pelaksanaan Pembangunan	
		2.1.1	Meningkatkan Kualitas Jaringan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	33,62	80	78,28	97,85			Sangat Tinggi
		2.1.2	Meningkatkan Infrastruktur Permukiman	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	n/a	5,50	5	90,9			Sangat Tinggi
		2.2	Terkendalinya Penataan Ruang dan Penciptaan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Industri	Persentase terselenggara nya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan industri	n/a	100	100	100			Sangat Tinggi
		2.2.1	Terkendalinya Pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persentase terselenggara nya pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan	n/a	100	100	100			Sangat Tinggi

NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
				industri						sesuai Tata Ruang	
3.	Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya	3.1	Terwujudnya Peningkatan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan ekonomi (PDRB)	4,47	2,80-4,80	4,07	100	Belum optimalnya pemanfaatan hasil pertanian yang memiliki nilai tambah ekonomi. Belum optimalnya kelembagaan petani. Teknologi yang tersedia belum teraplikasi secara maksimal. Infrastruktur/ jalan produksi pertanian yang belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Budidaya tanaman masih terbatas pada komoditas	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan	Sangat Tinggi
		3.1.1	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase kemiskinan	13,64	11,28	11,53	97,83			Sangat Tinggi
		3.1.2	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD terhadap pendapatan		16,00	11,60	72,5			Sedang
4.	Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batu Bara	3.1.3	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian, perternakan, dan perikanan	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB		27	23,52	87,11			Tinggi
		3.1.4	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		49,56	45,55	91,91			Sangat Tinggi
5.	Meningkatkan pemasaran hasil industri pertanian dan perikanan	3.1.5	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap		20,96	17,82	85,02			Tinggi



NO.	Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang			PDRB					utama/konvensional. Masih rendahnya Mutu hasil produk pertanian Rantai pemasaran yang panjang Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sumber daya air berupa irigasi Masih tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan	infrastruktur pelayanan dasar. Optimalisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Peningkatan pembangunan sarana prasarana dalam rangka mendukung Produksi dan peningkatan nilai tambah produk Pertanian dan perikanan Pelatihan, bimbingan, pendampingan, pembinaan	



NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									lahan petani yang relatif kecil Masih rendahnya kualitas dan SDM pertanian Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budidaya Belum optimalnya industri pengolahan perikanan Belum optimalnya pengawasan UU fishing Daya Saing Produk Perikanan Masih Rendah Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih	bidang Pertanian dalam hal peningkatan produksi secara efisiensi melalui teknologi yang sesuai Penguatan kelembagaan dan peningkatan peran penyuluh pertanian dan perikanan Penelitian dan Pengembangan bidang Pertanian dan Perikanan Peningkatan sarana dan prasarana industri dan perdagangan	



NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									jauh dari harapan nelayan Kesadaran masyarakat terhadap potensi perikanan dan kelautan yang masih kecil Belum optimalnya sentra industri unggulan daerah Belum optimalnya Sarana Distribusi Perdagangan.	n Pembinaan, pendampingan, pelatihan pelaku industri dan perdagangan Ketersediaan sentra industri unggulan daerah	
		3.2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka		5	6,21	80,52	Kurangnya skill/kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan dunia usaha dan persaingan ekonomi global Masih	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja yang berkualitas, produktif dan berdaya saing; Peningkatan tenaga	Tinggi
		3.2.1	Terciptanya Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja		69,70	73,50	105,45			Sangat Tinggi



NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									banyaknya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Informasi terhadap Pasar kerja yang belum memadai. Kurangnya kerjasama antara dunia usaha dalam penyediaan tenaga kerja. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.	kerja yang mandiri; Ketersediaan sistem informasi dan perencanaan tenaga kerja; Peningkatan kerjasama dengan perusahaan terkait penyediaan tenaga kerja dan keselamatan kerja; Pengembangan Kewirausahaan Mandiri Pengembangan Balai Latihan Kerja Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga	



NO.	Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
										Pelatihan tingkat Provinsi dan Pusat	
6.	Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batu Bara	6.1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks daya saing daerah		3,75	n/a		Belum optimalnya inovasi daerah.	Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah Berbasis Riset Dan Kajian, Inovasi Dan Teknologi Perencanaan Pelaksanaan Kolaborasi Pentahelix (Pemda, Swasta, Dunia Usaha, Akademisi dan Pers/Media Penyelenggaraan lomba inovasi daerah	
		6.1.1	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks inovasi daerah		40 (Inovatif)					



NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat	7.1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks pembangunan manusia		70,63	69,51	98,41	Masih terbatasnya akses layanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk publik;	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit yang baik	Sangat Tinggi
		7.1.1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia harapan hidup		71	67,55	95,14	Masih ditemukannya kasus kematian Ibu dan Bayi.	Ketercukupan Rasio tenaga kesehatan	Sangat Tinggi
		7.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah		9	8,26	91,78	Masih tingginya faktor risiko lingkungan, penyediaan air bersih, rumah sehat dan hygiene sanitasi makanan dan minuman; Masih tingginya jumlah penduduk rentan dan beresiko tinggi kesehatan yang	Sistem pelayanan administrasi berbasis digital Ketersediaan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional Penataan lingkungan dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Sangat Tinggi



NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									memerlukan jaminan pemeliharaan kesehatan Tingginya angka kesakitan dan kematian oleh karena penyakit menular Masih adanya kasus gizi buruk. Masih tingginya kasus DBD Adanya pandemi Covid-19 Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sekolah SDM (guru) tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan kompetensinya	Promosi Kesehatan dalam rangka pencegahan penyakit Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan Tata kelola pendidikan yang baik Bantuan pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu Standarisasi guru dan sekolah Pembangunan sekolah berbasis kebutuhan Program pendidikan inovatif Sistem pendidikan	

NO.	Periodesasi/Visi/Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									a sesuai keahlian Motivasi anak untuk menempuh pendidikan belum optimal.	berbasis digital Peningkatan akses, sarana dan prasarana pendidikan Dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) nonformal	
8.	Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batu Bara	8.1	Terwujudnya Pemerintahan Desa Yang Baik	Indeks desa membangun		0,7432	0,6858	92,28	Belum optimalnya fungsi pemerintah desa/kelurahan, kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Belum optimalnya peran PKK Belum optimalnya peran LPM	Peningkatan fungsi Lembaga Desa sesuai kedudukan, tugas dan wewenang; Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; Peningkatan Badan Usaha Milik Desa; Peningkatan kualitas	Sangat Tinggi
		8.1.1	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks desa membangun		0,7432	0,6858	92,28			Sangat Tinggi

NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran		Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
									Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
									Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dan penyediaan data profil desa, kelurahan. Belum optimalnya pembinaan kepada PKK dan LPM.	akuntabilitas pemerintahan desa; Pengembangan Peran PKK dan LPM	
		8.2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	Indeks gini		0,254	0,243	95,67	Kurangnya akses permodalan UMKM. Kurangnya Produktivitas UMKM. Kurang akses pasar dan promosi terhadap produk UMKM.	Fasilitasi akses permodalan UMKM Pelatihan sosial media marketing dan pemanfaatan teknologi informasi	Sangat Tinggi
		8.2.1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase pertumbuhan aset koperasi	n/a	10	n/a		Belum berkembang	Peningkatan Kualitas Produk dan Peningkatan Akses Pasar bagi UMKM	
		8.2.2	Meningkatnya persentase wirausaha pemula	Persentase jumlah wirausaha pemula	n/a	4,05	n/a				
		8.2.3	Meningkatnya	Persentase	n/a	11,85	n/a				

NO.	Periodesasi/Visi/M isi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Tahun 2019	Target Capaian pada Tahun 2023	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja RPJMD		Keterangan
								Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		persentase UMKM yang memiliki legalitas	umkm yang memiliki legalitas					nya Digitalisasi Koperasi dan UKM. Kualitas SDM yang kurang memadai dikarenakan rendahnya pendidikan dan keterampilan. Kurang inovasi dan kreatifitas pelaku usaha.	Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Motivasi, Kreatifitas dalam berwirausaha Pembangunan sistem pemasaran digital Pembangunan pusat pemasaran terpadu Pembangunan Pusat Pelatihan dan Pengembangan UKM	
Rata-rata Capaian Kinerja Periode .. (%) = 94,53										
Predikat Kinerja. = Sangat Tinggi										
Rata-rata Capaian Kinerja RPJMD = 95,01										
Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Periode Berikutnya										

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,93	72,97	100,05	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,60	8,51	98,95%	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25	13,12	99,02%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	N/A	N/A	
		Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (70,00)	62,83	89,76%	Tinggi
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86	86,28	100,33%	Sangat Tinggi
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Kemiskinan	Persen	11,03	10,94	100,82%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan	Persen	13,98	14,14	101,14%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perternakan, Dan Perikanan	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	Persen	23	22,54	98,00%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perindustrian	Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	Persen	46,50	44,54	95,78%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	18,00	18,15	100,83%	Sangat Tinggi
10	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,8-5,5	5,75	98,23%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PREDIKAT
11	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	55,0 (Inovatif)	47,01	85,47%	Tinggi
12	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	80	68,91	86,14%	Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Jaringan Jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	81,48 /60	59,48	99,13%	Sangat Tinggi
14	Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN PMA)	Rupiah	54 Triliun	52.884.243.6 10.119	97,93%	Sangat Tinggi
15	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Industri	Persen	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,00	59,86	84,31%	Tinggi
17	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7176	0,7093	98,84%	Sangat Tinggi
18	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pemerataan Pembangunan Ekonomi	Indeks Gini	Indeks	0,240	0,23	104,17%	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah Tahun 2020

Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2020
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	87.94
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93.82
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	69.58
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100.00
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	66.67
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	99.49
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94.57
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99.13
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73.48
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84.03
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	9.76
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	76.14
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100.00
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100.00
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	100.00
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	100.00
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	77.45
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	13.31
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100.00

Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2020
Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100.00
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	72.03
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	7.28
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	15.38
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8.21
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100.00
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.00
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100.00
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	31,603.00
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4,828.00
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	18.50
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	12.17
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100.00
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	27.04
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	43.44
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.03
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2.93
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	99.79
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100.00
Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	33.14

Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2020
Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100.00
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	3.33
Tersedianya tanah untuk masyarakat	100.00
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	84.21
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	7.80
Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	0.60
Perekaman KTP Elektronik	97.44
Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	4.06
Kepemilikan akta kelahiran	61.63
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	4.65
Persentase pengentasan desa tertinggal	63.16
Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1.90
TFR (Angka Kelahiran Total)	2.78
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	63.19
Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	30.17
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.10
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100.00
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	9.90
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	57.66
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	34.15
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	20.51
Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	3.76
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.52
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1.94

Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2020
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00
Tingkat keamanan informasi pemerintah	100.00
Terlestarikannya Cagar Budaya	24.00
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51.61
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.45
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	29.91
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	33,058.55
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(62.10)
Tingkat Hunian Akomodasi	47.19
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0.09
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0.04
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	57.46
Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	78.67
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100.00
Persentase kinerja realisasi pupuk	28.23
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	13.28
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	3.97
Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15.23
Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.00
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.00
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	41.43
Opini Laporan Keuangan	WTP
Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	73.81
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	28.63

Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2020
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	78.71
Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50.39
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100.00
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100.00
Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	25.00

Tabel 2.78
Indikator Kinerja Kunci Setiap Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021-2024

FOKUS	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2021	2022	2023	2024
PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	78.07	70.45	84.46	92.45
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	79.00	84.08	92.23	99.82
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	49.22	70.14	92.21	95.24
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	52.69	76.83	91.54	87.65
KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.87	0.97	1.63	1.24
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	66.67	75.00	80.00	100.00
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	91.63	100.00	85.95	91.54
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	92.85	98.16	94.99	100.00
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95.77	100.00	98.65	99.27
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90.51	73.22	86.70	94.62
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	77.87	85.20	99.80	63.94

FOKUS	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2021	2022	2023	2024
	kesehatan sesuai standar				
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0.37	6.04	80.00	8.75
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	44.55	90.00	90.47	74.95
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.98	4.67	100.00	100.00
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.22	31.08	100.00	96.40
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	59.00	49.50	100.00	87.25
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	8.65	47.95	100.00	98.68
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	43.00	42.88	100.00	100.00
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	100.00	100.00	100.00	100.00
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	100.00	100.00	100.00	100.00
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	77.45	77.45	70.05	64.39
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78.85	85.29	85.91	86.23
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76.64	87.79	88.23	88.73
	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	100.00	100.00	100.00	100.00

FOKUS	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2021	2022	2023	2024
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	77.46	78.28	80.82	59.48
	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100.00	83.43	100.00	78.02
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100.00	100.00	100.00	100.00
PERUMAHAN	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	11.79	63.08	0.55	0.67
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6.80	9.11	8.91	7.03
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100.00	100.00	100.00	70.12
TRANTIBUMLINMAS	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100.00	77.54	78.95	91.97
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100.00	1.09	1.95	72.22
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00	100.00	100.00	100.00
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	18.87	16.86	11.37	12.38
SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	11.07	19.54	76.72	100.00
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100.00	100.00	100.00	100.00
KETENAGAKERJAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100.00	100.00	100.00	100.00

FOKUS	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2021	2022	2023	2024
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	100.00	5.42	10.57	4.60
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0.12	0.12	125,487,587.35	129,892,188
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	43.22	7.07	50.00	8.42
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	60.00	72.02	80.83	78.18
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	100.00	3.35	11.69	8.21
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0.00	100.00	100.00	100.00
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	2.27	5.72	3.69
PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	40.44	2.42	70.80	35.60
PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	100.00	100.00	100.00	100.00
LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72.42	70.42	58.28	59.86
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kabupaten/kota	6.01	17.65	47.62	55.95
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	99.87	98.67	99.56	99.69
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	18.92	12.21	19.04	25.62
	Kepemilikan akta kelahiran	98.05	97.58	97.19	97.08
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	47.62	65.79	60.53	29.63
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	42.86	50.00	75.00	100.00

FOKUS	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2021	2022	2023	2024
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	TFR (Angka Kelahiran Total)	1.90	1.90	2.55	2.20
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	64.01	48.02	49.83	58.88
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-	32.83	15.48	13.68
PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas	0.37	0.41	0.75	0.69
KOMINFO	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	30.95	100.00	100.00	100.00
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	17.82	3.68	67.50	71.43
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.48	83.35	100.00	100.00
KOPERASI DAN UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	10.53	16.98	60.00	59.09
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	21.26	83.55	67.15	20.45
PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	69.45	-3.53	-37.14	- 32.54
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.23	0.30	0.50	5.01
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.57	2.66	2.73	7.00
	Peningkatan Prestasi Olahraga	-	0.00	5.00	7.00
STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00	100.00	100.00	100.00
PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	1.00	0.00	-	39.69
BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	30.43	27.78	33.33	100.00
PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	53.11	52.67	53.02	54.41

FOKUS	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	14.45	60.30	53.95	74.04
KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	30.71	30.80	50.00	50.28
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	16.67	16.67	16.67	50.00
KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	120.56	99.48	116.25	104.61
PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	3,818.71	15.82	366.14	15.64
	Tingkat Hunian Akomodasi	47.19	0.15	4.14	22.07
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0.01	0.01	1.04	1.04
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0.06	0.10	0.07	3.36
PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5.68	5.94	598.41	626.59
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	42.10	-73.81	75.00	- 43.44
ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten/kota	100.00	100.00	100.00	100.00
PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100.00	100.00	100.00	100.00
	Persentase kinerja realisasi pupuk	43.07	33.76	85.29	59.20
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	42.08	73.46	76.56	65.99
PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	5.64	3.65	8.81	11.85
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0.30	50.00	67.73	98.38

FOKUS	Indikator Kinerja Kunci (Outcome)	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	6.00	2.88	60.00	100.00
PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	11.86	12.34	11.03	12.02
	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0.47	11.60	11.85	14.14
	Mauritas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	2.00	3.00	3.00	3.00
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2.00	3.00	3.00	3.00
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	63.48	69.47	62.35	66.20
	Opini Laporan Keuangan	10.00	10.00	5.00	5.00
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	53.97	72.79	96.59	82.29
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	43.55	14.01	25.53	13.60
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	- 54.79	-18.97	178.66	18.76
KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	74.24	87.98	88.24	87.60
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4.77	16.87	18.12	27.12
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	96.00	20.60	14.78	8.52
MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	0.92	6.83	2.99	2.40
	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0.91	5.17	2.97	2.01
	Assets Management	4.00	4.00	4.00	3.00
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	12.16	5.23	1.16	2.38
TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100.00	100.00	100.00	95.79
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100.00	100.00	100.00	100.00

LAMPIRAN 2

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,25)	287,063,187,581	BB (71,55)	282,188,858,917	BB (73,55)	304,944,568,500	BB (75,55)	313,248,514,045	BB (77,55)	324,550,520,432	BB (77,55)	327,940,450,618	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS)	96,50 %	91,473,123,684	97,50 %	84,812,137,348	98,00%	91,651,388,104	98,50%	94,147,147,053	99%	97,543,976,119	99%	98,562,822,949	Dinas Pendidikan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.Persentase peningkatan Indeks pemerataan guru	10%	540,000,000	10%	540,000,000	10%	583,545,600	10%	599,436,130	10%	621,063,786	10%	627,550,797	Dinas Pendidikan
							-		-		-		-	Dinas Pendidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Angka Kematian Ibu (AKI) 2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	47/100,000 KH 14 %	92,744,975,562	45/100,000 KH 13,5 %	104,470,404,597	43/100,000 KH 13 %	112,894,898,024	40/100,000 KH 12,5 %	115,969,138,992	38/100,000 KH 12 %	120,153,305,527	38/100,000 KH 12 %	121,408,306,803	Dinas Kesehatan PPKB
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	20%	11,763,290,302	20%	1,407,702,000	20%	1,521,219,089	20%	1,562,643,406	20%	1,619,023,580	20%	1,635,934,282	Dinas Kesehatan PPKB
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farnasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	20%	375,662,150	20%	450,209,150	20%	486,514,016	20%	499,762,279	20%	517,793,702	20%	523,202,057	Dinas Kesehatan PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100%	105,458,000	100%	26,503,000	100%	28,640,202	100%	29,420,103	100%	30,481,581	100%	30,799,961	Dinas Kesehatan PPKB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	A (80)	97,040,952,881	A (81)	96,251,560,185	A (82)	104,013,285,998	A (83)	106,845,671,789	A (84)	110,700,663,627	A (84)	111,856,932,059	Dinas Kesehatan PPKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR) 2. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate ASFR 15-19)	2,3 point 20 point	242,760,000	2,3 point 20 point	301,760,000	2,5 point 20 point	326,093,926	2,7 point 20 point	334,973,790	2,8 point 20 point	347,059,644	2,8 point 20 point	350,684,682	Dinas Kesehatan PPKB
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi modern/Modern Contraceptive (mCPR)	62,41 point	4,257,828,000	63,41 point	4,002,178,900	64,41 point	4,324,914,606	65,41 point	4,442,686,356	67,41 point	4,602,978,480	67,41 point	4,651,056,590	Dinas Kesehatan PPKB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	20%	2,114,200,000	20%	2,310,849,100	20%	2,497,195,971	20%	2,565,197,115	20%	2,657,749,427	20%	2,685,509,620	Dinas Kesehatan PPKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	74,00 (BB)	11,932,151,013	74,50 (BB)	12,754,739,702	75,00 (BB)	13,783,281,912	75,50 (BB)	14,158,614,461	76,00 (BB)	14,669,457,271	76,50 (BB)	14,822,679,752	Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	20%	3,547,601,529	20%	11,244,726,148	20%	12,151,500,865	20%	12,482,398,385	20%	12,932,763,318	20%	13,067,846,031	Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyuluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	85.30%	657,922,910	86,3 %	6,830,000,000	88.30%	7,380,771,200	89.30%	7,581,756,981	90.30%	7,855,306,772	90.30%	7,937,355,452	Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	20%	9,600,000	20%	230,000,000	20%	248,547,200	20%	255,315,389	20%	264,527,168	20%	267,290,154	Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase peningkatan Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	20%	1,027,043,557	20%	1,704,996,404	20%	1,842,487,314	20%	1,892,660,086	20%	1,960,947,262	20%	1,981,429,356	Dinas PUTR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	20%	10,803,934,764	20%	1,650,000,000	20%	1,783,056,000	20%	1,831,610,398	20%	1,897,694,901	20%	1,917,516,324	Dinas PUTR
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANYA			130,000,000				-		-		-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan	60%	39,785,933,664	62%	28,809,938,771	65%	31,133,172,233	68%	31,980,959,647	71%	33,134,832,671	71%	33,480,925,998	Dinas PUTR
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase peningkatan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	20%	5,732,956	20%	360,000,000	20%	389,030,400	20%	399,624,087	20%	414,042,524	20%	418,367,198	Dinas PUTR
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah kabupaten	100%	404,531,244	100%	881,537,500	100%	952,624,684	100%	978,565,607	100%	1,013,872,254	100%	1,024,462,150	Dinas PUTR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		776,142,000	100%	1,066,000,000	100%	1,151,962,240	100%	1,183,331,324	100%	1,226,025,918	100%	1,238,831,759	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Pelaksanaan Penataan Bangunan Gedung		372,340,000	100%	357,450,000	100%	386,274,768	100%	396,793,416	100%	411,109,723	100%	415,403,764	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penyelenggaraan Jalan		2,503,040,000	100%	2,759,198,000	100%	2,981,699,727	100%	3,062,894,392	100%	3,173,403,622	100%	3,206,549,822	Dinas Perkim LH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Kasus Sengketa Tanah Garapan dalam Kabupaten			100%	47,000,000	100%	50,790,080	100%	52,173,145	100%	54,055,552	100%	54,620,162	Dinas PUTR
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					50,000,000		54,032,000		55,503,345		57,505,906		58,106,555	Dinas PUTR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
							-		-		-		-	

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target 4	Rp 5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %	241,970,500	100 %	162,460,000	100 %	175,560,774	100 %	180,341,470	100 %	186,848,190	100 %	188,799,819	Dinas Perkim LH
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani sesuai program	100%	476,628,600	100%	1,155,001,000	100%	1,248,140,281	100%	1,282,128,389	100%	1,328,387,581	100%	1,342,262,589	Dinas Perkim LH
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun sesuai program	100%	1,071,422,360	100 %	895,860,000	100 %	968,102,150	100 %	994,464,540	100 %	1,030,344,821	100 %	1,041,106,772	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) sesuai program	100 %	199,932,000	100 %	212,246,000	100 %	229,361,517	100 %	235,607,261	100 %	244,107,971	100 %	246,657,679	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,00)	7,411,968,171	BB (71,01)	7,657,152,526	BB (72,01)	8,274,625,306	BB (75,01)	8,499,951,627	BB (77,01)	8,806,629,882	BB (77,01)	8,898,615,131	Dinas Perkim LH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							-		-		-		-	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara	60 87	282,248,000	62 89	316,750,000	64 90	342,292,720	66 91	351,613,693	68 92	364,299,915	68 92	368,105,028	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan RTH	20%	188,110,000	20%	313,450,000	20%	338,726,608	20%	347,950,472	20%	360,504,525	20%	364,269,995	Dinas Perkim LH
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH	100 %	53,480,000	100 %	30,820,000	100 %	33,305,325	100 %	34,212,262	100 %	35,446,641	100 %	35,816,881	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	1,680,304,000	100 %	899,999,165	100 %	972,575,098	100 %	999,059,290	100 %	1,035,105,349	100 %	1,045,917,025	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100 %	88,187,500	100 %	99,999,875	100 %	108,063,865	100 %	111,006,552	100 %	115,011,668	100 %	116,212,965	Dinas Perkim LH
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks kinerja pengelolaan sampah	12 Kecamatan	9,587,233,244	12 Kecamatan	9,033,610,000	12 Kecamatan	9,762,080,310	12 Kecamatan	10,027,911,519	12 Kecamatan	10,389,718,567	12 Kecamatan	10,498,239,177	Dinas Perkim LH
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							-		-		-		-	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	100 %	583,152,140	100 %	1,034,279,850	100 %	1,117,684,177	100 %	1,148,119,835	100 %	1,189,543,999	100 %	1,201,968,786	BPBD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penanganan tanggap darurat bencana	BB (73,00)	4,498,221,763	BB (75,00)	4,662,392,667	BB (76,00)	5,038,368,012	BB (77,00)	5,175,567,811	A (80,00)	5,362,302,298	A (80,00)	5,418,311,545	BPBD
PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	322,489,700	100 %	612,409,700	100 %	661,794,418	100 %	679,815,742	100 %	704,343,494	100 %	711,700,362	Satpol PP
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	1,925,676,300	100 %	336,427,472	100 %	363,556,983	100 %	373,457,004	100 %	386,931,332	100 %	390,972,830	Satpol PP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B (67,00)	10,655,754,958	B (69,00)	11,024,936,445	BB (73,00)	11,913,987,320	BB (75,00)	12,238,417,109	BB (77,00)	12,679,979,198	BB (77,00)	12,812,421,581	Satpol PP
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							-		-		-		-	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan terhadap kelompok sasaran yang direncanakan	100 %	1,059,697,472	100 %	1,156,335,672	100 %	1,249,582,581	100 %	1,283,609,964	100 %	1,329,922,611	100 %	1,343,813,653	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pendidikan politik pada kader partai politik pada kader partai politik	20%	2,362,486,000	20%	2,559,840,000	20%	2,766,265,498	20%	2,841,593,673	20%	2,944,118,373	20%	2,974,869,690	Badan Kesbangpol
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	80 %	120,350,000	82%	228,080,000	84%	246,472,371	86%	253,184,060	88%	262,318,941	88%	265,058,863	Badan Kesbangpol
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan sesuai program	100 %	527,865,100	100 %	350,645,400	100 %	378,921,445	100 %	389,239,855	100 %	403,283,629	100 %	407,495,926	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100 %	6,003,071,500	100 %	3,878,182,000	100 %	4,190,918,596	100 %	4,305,041,501	100 %	4,460,367,398	100 %	4,506,955,936	Badan Kesbangpol
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (74,00)	3,363,298,481	BB (76,00)	3,522,325,203	BB (77,00)	3,806,365,507	BB (78,00)	3,910,016,647	A (80,00)	4,051,090,047	A (80,00)	4,093,403,683	Badan Kesbangpol
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							-		-		-		-	

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial/DS dan NAPZA sesuai program 2. Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar 3. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial sesuai program	100%	338,000,000	100%	601,471,000	100%	649,973,621	100%	667,673,053	100%	691,762,697	100%	698,988,158	Dinas Sosial PPPA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlarant yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya sesuai program	100%	7,830,738,220	100%	3,190,633,000	100%	3,447,925,645	100%	3,541,816,108	100%	3,669,604,834	100%	3,707,933,856	Dinas Sosial PPPA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	20%		20%	1,479,435,000	20%	1,598,736,638	20%	1,642,271,836	20%	1,701,525,004	20%	1,719,297,432	Dinas Sosial PPPA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana 2. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 % 100 %	325,359,922	100 % 100 %	888,695,000	100 % 100 %	960,359,365	100 % 100 %	986,510,911	100 % 100 %	1,022,104,224	100 % 100 %	1,032,780,103	Dinas Sosial PPPA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (72,00)	5,185,725,475	BB (73,00)	6,210,823,423	BB (74,00)	6,711,664,224	BB (75,00)	6,894,429,552	BB (77,00)	7,143,180,571	BB (77,00)	7,217,791,092	Dinas Sosial PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							-		-		-		-	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52.6	488,766,000	54.6	613,515,940	56.60	662,989,865	58.60	681,043,742	60.60	705,615,801	60.60	712,985,958	Dinas Sosial PPPA
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	100	215,057,352	20%	261,410,200	20%	282,490,319	20%	290,182,812	20%	300,652,608	20%	303,792,925	Dinas Sosial PPPA
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	20%	258,153,000	20%	438,700,950	20%	474,077,795	20%	486,987,407	20%	504,557,913	20%	509,828,020	Dinas Sosial PPPA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							-		-		-		-	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					194,000,000		209,644,160		215,352,980		223,122,916		225,453,434	Disnakerperindag
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	20%	3,564,819,400	20%	3,500,000,000	20%	3,782,240,000	20%	3,885,234,177	20%	4,025,413,427	20%	4,067,458,870	Disnakerperindag
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	20%	14,170,000	20%	69,900,000	20%	75,536,736	20%	77,593,677	20%	80,393,257	20%	81,232,964	Disnakerperindag
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pekerja pada perusahaan yang sesuai standar hak dan kewajiban	100%	871,538,400	100%	809,490,000	100%	874,767,274	100%	898,588,061	100%	931,009,118	100%	940,733,509	Disnakerperindag
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (75,00)	5,316,988,376	BB (77,00)	5,546,146,165	BB (78,00)	5,993,387,392	BB (79,00)	6,156,593,324	A (81,00)	6,378,723,211	A (81,00)	6,445,348,975	Disnakerperindag
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	20%	100,000,000	20%	121,060,000	20%	130,822,278	20%	134,384,700	20%	139,233,300	20%	140,687,592	Disnakerperindag
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase konsumen pelayanan perizinan dan pendaftaran_perusahaan yang ditangani	100%		100%	9,750,000	100%	10,536,240	100%	10,823,152	100%	11,213,652	100%	11,330,778	Disnakerperindag
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	54,940,000	100%	82,725,000	100%	89,395,944	100%	91,830,285	100%	95,143,522	100%	96,137,296	Disnakerperindag
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Cakupan pelayanan pengembangan ekspor yang ditangani	100%	300,000,000	100%	129,200,000	100%	139,618,688	100%	143,420,644	100%	148,595,261	100%	150,147,339	Disnakerperindag
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penanganan pengaduan konsumen yang ditangani	100%	31,050,000	100%	42,000,000	100%	45,386,880	100%	46,622,810	100%	48,304,961	100%	48,809,506	Disnakerperindag
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							-		-		-		-	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase kesesuaian investasi sektor industri dan kawasan industri	100%	113,575,000	100%	20,650,000	100%	22,315,216	100%	22,922,882	100%	23,749,939	100%	23,998,007	Disnakerperindag
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin sesuai standar	100%		100%	7,500,000	100%	8,104,800	100%	8,325,502	100%	8,625,886	100%	8,715,983	Disnakerperindag
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase pengelolaan sistem infomasi industri sesuai standar	100%		100%	7,500,000	100%	8,104,800	100%	8,325,502	100%	8,625,886	100%	8,715,983	Disnakerperindag
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							-		-		-		-	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital 2. Persentase kepemilikan kartu identitas anak	100 % 70 %	33,813,673	100 % 72 %	121,843,613	100 % 74 %	131,669,082	100 % 76 %	135,254,563	100 % 78 %	140,134,547	100 % 78 %	141,598,253	Dinas Dukcapil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 % 100 % 100 % 100 %	537,303,894	100 % 100 % 100 % 100 %	45,803,894	100 % 100 % 100 % 100 %	49,497,520	100 % 100 % 100 % 100 %	50,845,387	100 % 100 % 100 % 100 %	52,679,889	100 % 100 % 100 % 100 %	53,230,130	Dinas Dukcapil

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target 4	Rp 5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100%	1,003,960,250	100%	1,399,418,093	100%	1,512,267,168	100%	1,553,447,715	100%	1,609,496,109	100%	1,626,307,296	Dinas Dukcapil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	25,000,000	100%	43,750,000	100%	47,278,000	100%	48,565,427	100%	50,317,668	100%	50,843,236	Dinas Dukcapil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	B(70)	6,211,485,775	BB (71)	6,409,769,796	BB (72)	6,926,653,632	BB (75)	7,115,273,337	BB (77)	7,371,992,399	BB (77)	7,448,992,860	Dinas Dukcapil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							-		-		-		-	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	100 %	4,128,803,521	100 %	4,162,701,144	100 %	4,498,381,364	100 %	4,620,876,787	100 %	4,787,598,022	100 %	4,837,604,483	Dinas PMD
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	100 %	3,498,780,000	100 %	3,607,057,960	100 %	3,897,931,114	100 %	4,004,075,676	100 %	4,148,542,726	100 %	4,191,874,255	Dinas PMD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (74,00)	3,519,750,495	BB (76,00)	3,958,088,448	BB (77,00)	4,277,268,700	BB (78,00)	4,393,743,004	BB (78,00)	4,552,269,252	BB (78,00)	4,599,817,704	Dinas PMD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	80%	13,155,400,879	82%	11,756,879,400	84%	12,704,954,155	86%	13,050,922,761	88%	13,521,800,055	88%	13,663,035,256	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas laut		72,400,000		90,000,000		97,257,600		99,906,022		103,510,631		104,591,800	Dinas Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,00)	7,222,688,024	BB (72,00)	7,930,449,351	BB (73,00)	8,569,960,787	BB (75,00)	8,803,329,389	BB (77,00)	9,120,953,513	BB (77,00)	9,216,221,873	Dinas Perhubungan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							-		-		-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	83%	2,526,042,550	85%	2,287,261,000	86%	2,471,705,727	87%	2,539,012,746	89%	2,630,620,326	89%	2,658,097,155	Dinas Kominfo
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Baik (2,67)	865,993,600	Baik (2,70)	756,575,600	Baik (2,72)	817,585,856	Baik (2,74)	839,849,537	Baik (2,76)	870,151,308	Baik (2,76)	879,240,039	Dinas Kominfo
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (71,00)	8,212,370,725	BB (73,00)	5,791,000,355	BB (75,00)	6,257,986,624	BB (77,00)	6,428,397,857	BB (79,00)	6,660,334,452	BB (79,00)	6,729,901,645	Dinas Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							-		-		-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik		51,500,000		74,970,000		81,015,581		83,221,716		86,224,356		87,124,969	Dinas Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 %	56,625,000	100 %	274,127,500	100 %	296,233,142	100 %	304,299,866	100 %	315,279,005	100 %	318,572,095	Dinas Kominfo
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							-		-		-		-	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	10%	23,600,000	10%	50,000,000	10%	54,032,000	10%	55,503,345	10%	57,505,906	10%	58,106,555	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan Koperasi aktif	20%	57,766,000	20%	57,766,000	20%	62,424,250	20%	64,124,125	100%	66,437,723	100%	67,131,665	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan SDM Pengelola Koperasi	20%		20%	70,000,000	20%	75,644,800	20%	77,704,684	20%	80,508,269	20%	81,349,177	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan volume usaha Koperasi (SHU)	10%	397,500,000	10%	84,000,000	10%	90,773,760	10%	93,245,620	10%	96,609,922	10%	97,619,013	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase usaha kecil yang bertansformasi dari informal ke formal 2. Petumbuhan wirausaha	10 % 7 %	5,293,455,000	11,8 % 7 %	5,443,455,000	12,8 % 7 %	5,882,415,211	13,8 % 7 %	6,042,599,260	15,8 % 7 %	6,260,616,241	15,8 % 7 %	6,326,008,378	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi peningkatan UKM menjalin kemitraan dan ekspor	10%	1,890,040,000	10%	600,240,000	10%	648,643,354	10%	666,306,561	10%	690,346,901	10%	697,557,575	Dinas Koperasi dan UKM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (75,00)	4,908,802,953	BB (77,00)	4,874,412,238	BB (78,00)	5,267,484,841	BB (79,00)	5,410,923,721	A (81,00)	5,606,149,848	A (81,00)	5,664,706,084	Dinas Koperasi dan UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							-		-		-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi total terhadap target investasi	100%	108,684,000	100%	150,000,000	100%	162,096,000	100%	166,510,036	100%	172,517,718	100%	174,319,666	DPM PTSP
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan promosi penanaman modal		2,232,252,600	100 %	233,800,000	100 %	252,653,632		259,533,643		268,897,617		271,706,253	DPM PTSP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 %	155,800,000	100 %	55,800,000	100 %	60,299,712	100 %	61,941,733	100 %	64,176,591	100 %	64,846,916	DPM PTSP
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	100 %	249,080,000	100 %	603,737,981	100 %	652,423,412	100 %	670,189,554	100 %	694,369,993	100 %	701,622,687	DPM PTSP
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,00)	5,129,904,464	BB (71,00)	4,789,174,862	BB (73,00)	5,175,373,923	BB (75,00)	5,316,304,530	BB (77,00)	5,508,116,798	BB (77,00)	5,565,649,078	DPM PTSP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							-		-		-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio peningkatan Wirausaha Pemuda	10%	595,412,140	10%	1,208,725,000	10%	1,306,196,584	10%	1,341,765,623	10%	1,390,176,527	10%	1,404,696,921	Disporabudpar
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase peningkatan atlet yang masuk pelatnas	10%	2,091,781,604	10%	2,273,550,000	10%	2,456,889,072	10%	2,523,792,618	10%	2,614,851,056	10%	2,642,163,175	Disporabudpar

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target 4	Rp 5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					264,000,000		285,288,960		293,057,664		303,631,184		306,802,612	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,98)	3,731,762,436	BB (71,98)	4,474,419,340	BB (72,98)	4,835,236,516	BB (73,98)	4,966,904,841	BB (75,98)	5,146,110,768	BB (75,98)	5,199,861,895	Disporabudpar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	10%	400,072,620	10%	272,047,800	10%	293,985,735	10%	301,991,260	10%	312,887,105	10%	316,155,211	Disporabudpar
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	persentase peningkatan partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	10%		10%	155,140,000	10%	167,650,490	10%	172,215,780	10%	178,429,325	10%	180,293,020	Disporabudpar
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase warisan budaya yang dilestarikan	52%	345,222,700	54 %	205,400,000	56%	221,963,456	58%	228,007,743	60%	236,234,262	60%	238,701,729	Disporabudpar
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan ke museum	10%		10%	45,460,000	10%	49,125,894	10%	50,463,642	10%	52,284,370	10%	52,830,480	Disporabudpar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							-		-		-		-	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	10%	257,063,000	10%	346,463,600	10%	374,402,425	10%	384,597,777	10%	398,474,065	10%	402,636,127	Disporabudpar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							-		-		-		-	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	54	2,279,501,005	56.00	1,867,053,598	58.00	2,017,612,800	60.00	2,072,554,414	62.00	2,147,332,178	62.00	2,169,761,062	Dinas Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)			57.00 Nilai 75.00 Indeks	78,655,000		84,997,739		87,312,313		90,462,541		91,407,422	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (78,20)	2,679,161,037	BB (79,20)	2,917,571,114	A (80,20)	3,152,844,049	A (81,20)	3,238,699,145	A (82,20)	3,355,551,410	A (82,20)	3,390,600,145	Dinas Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip	100 %	69,254,098	100 %	213,363,000	100 %	230,568,592	100 %	236,847,206	100 %	245,392,653	100 %	247,955,779	Dinas Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (74,00)	7,943,796,997	BB (76,00)	8,023,170,618	BB (78,00)	8,670,159,097	BB (78,00)	8,906,256,199	A (80,00)	9,227,593,923	A (80,00)	9,323,976,141	Dinas Perikanan dan Peternakan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan Tangkap	53000 Ton	2,101,810,000	55000 Ton	2,287,044,950	57000 Ton	2,471,472,255	60000 Ton	2,538,772,916	63000 Ton	2,630,371,843	63000 Ton	2,657,846,076	Dinas Perikanan dan Peternakan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	3700 Ton	688,003,472	3900 Ton	1,488,771,900	4100 Ton	1,608,826,466	4300 Ton	1,652,636,420	4500Ton	1,712,263,542	4500Ton	1,730,148,134	Dinas Perikanan dan Peternakan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					149,976,000		162,070,065		166,483,395		172,490,115		174,291,775	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan Angka konsumsi ikan	10%	213,220,000	10%	485,000,000	10%	524,110,400	10%	538,382,450	10%	557,807,289	10%	563,633,586	Dinas Perikanan dan Peternakan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	10%	7,616,003	10%	249,735,000	10%	269,873,630	10%	277,222,559	10%	287,224,749	10%	290,224,812	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	persentase peningkatan diversifikasi pangan			10%	411,714,000	10%	444,914,617	10%	457,030,087	10%	473,519,732	10%	478,465,646	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					39,122,000		42,276,798		43,428,038		44,994,921		45,464,893	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan produksi tanaman pangan 2. Peningkatan produksi hortikultura 3. Peningkatan produksi komoditas peternakan	10 % 10 % 10 %	250,855,500	10 % 10 % 10 %	860,000,000	10 % 10 % 10 %	929,350,400	10 % 10 % 10 %	954,657,541	10 % 10 % 10 %	989,101,585	10 % 10 % 10 %	999,432,751	Dinas Perikanan dan Peternakan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PMHS)	100 %	637,782,564	100 %	540,000,000	100 %	583,545,600	100 %	599,436,130	100 %	621,063,786	100 %	627,550,797	Dinas Perikanan dan Peternakan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	100 %	160,000,000	100 %	386,460,000	100 %	417,624,134	100 %	428,996,457	100 %	444,474,649	100 %	449,117,187	Dinas Perikanan dan Peternakan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan produksi tanaman pangan 2. Peningkatan produksi hortikultura 3. Peningkatan produksi komoditas peternakan	10 % 10 % 10 %	1,341,187,589	10 % 10 % 10 %	963,672,200	10 % 10 % 10 %	1,041,382,726	10 % 10 % 10 %	1,069,740,619	10 % 10 % 10 %	1,108,336,861	10 % 10 % 10 %	1,119,913,439	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan Prasarana Pertanian	10%	2,317,309,951	10%	1,808,635,300	10%	1,954,483,651	10%	2,007,706,195	10%	2,080,144,234	10%	2,101,871,341	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan bencana pertanian	100%		100%	77,200,000	10%	83,425,408	10%	85,697,165	10%	88,789,119	10%	89,716,521	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	60%	1,002,837,100	65 %	382,577,000	70%	413,428,009	75%	424,686,067	77%	440,008,741	77%	444,604,632	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (72,94)	16,224,578,058	BB (73,94)	16,526,901,650	BB (75,94)	17,859,630,999	BB (77,94)	18,345,966,611	A (80,00)	19,007,889,086	A (80,00)	19,206,426,488	Dinas Pertanian dan Perkebunan
SEKRETARIAT DAERAH							-		-		-		-	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	8,656,637,406	100%	9,396,456,504	100%	10,154,186,756		10,430,695,416		10,807,034,907		10,919,914,386	Sekretariat Daerah
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	100%	1,934,655,521	100%	2,986,328,450	100%	3,227,145,976		3,315,024,388		3,434,630,468		3,470,505,183	Sekretariat Daerah

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target 4	Rp 5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (71,40)	48,401,521,128	BB (72,40)	46,528,170,050	BB (73,40)	50,280,201,683	BB (75,40)	51,649,381,855	BB (77,40)	53,512,891,552	BB (77,40)	54,071,833,704	Sekretariat Daerah
SEKRETARIAT DPRD							-		-		-		-	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	100 %	25,507,658,200	100 %	26,015,180,000	100 %	28,113,044,115	100 %	28,878,590,420	100 %	29,920,529,962	100 %	30,233,049,897	Sekretariat DPRD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB(75,00)	30,881,537,576	BB (75,00)	32,094,015,776	BB (77,00)	34,682,077,208	BB (79,00)	35,626,504,853	A (81,00)	36,911,909,148	A (81,00)	37,297,454,039	Sekretariat DPRD
PERENCANAAN							-		-		-		-	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 % 100 %	959,501,031	100 % 100 %	1,726,193,800	100 % 100 %	1,865,174,265	100 % 100 %	1,915,978,274	100% 100 %	1,984,999,962	100% 100 %	2,005,777,287	Bappellitbangda
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perekonomian dan SDA	100 %	472,089,027	100 %	1,067,613,950	100 %	1,153,706,339	100 %	1,185,122,916	100 %	1,227,882,151	100 %	1,240,707,380	Bappellitbangda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (72,00)	6,906,100,460	BB (75,00)	7,964,477,642	A (80,00)	8,606,733,119	A (82,00)	8,841,103,069	A (84,00)	9,160,090,067	A (84,00)	9,255,767,208	Bappellitbangda
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang lemanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	100%	413,005,000	100%	2,155,112,000	100%	2,328,900,232	100%	2,392,318,514	100%	2,478,633,366	100%	2,504,522,691	Bappellitbangda
KEUANGAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	13.50%	2,204,068,782	15.5 %	3,373,093,165	16.50%	3,645,099,398	17.50%	3,744,359,100	18.50%	3,879,455,576	18.50%	3,919,976,489	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (74,50)	20,260,619,711	BB (75,50)	14,881,055,482	BB (76,50)	16,081,063,796	BB (78,50)	16,518,967,244	A (80,00)	17,114,971,582	A (80,00)	17,293,737,461	Badan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase pemenuhan alokasi keuangan sesuai mandatory 2. Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 % 100 %	226,732,198,184	100 % 100 %	222,215,453,478	100 % 100 %	240,134,907,646	100 % 100 %	246,674,021,317	100 % 100 %	255,574,020,006	100 % 100 %	258,243,490,645	BKAD
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILK DAERAH	Persentase penambahan nilai aset tetap	5%	931,480,240	5%	931,416,240	5%	1,006,525,646	5%	1,033,934,345	5%	1,071,238,697	5%	1,082,427,785	BKAD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (72,50)	21,541,126,875	BB (73,50)	9,805,022,976	BB (74,50)	10,595,700,029	BB (77,50)	10,884,231,536	A (80,00)	11,276,934,610	A (80,00)	11,394,722,192	BKAD
KEPEGAWAIAN							-		-		-		-	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100%	1,278,046,627	100%	1,039,216,300	100%	1,123,018,702	100%	1,153,599,625		1,195,221,499		1,207,705,588	BKPSDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (74,00)	4,243,832,754	BB (75,00)	4,596,053,860	BB (77,00)	4,966,679,643	BB (77,00)	5,101,927,297	A (80,00)	5,286,004,833	A (80,00)	5,341,217,154	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, dan fungsional sesuai standar	100 %	52,850,000	100 %	208,590,000	100 %	225,410,698	100 %	231,548,856	100 %	239,903,139	100 %	242,408,927	BKPSDM
INSPEKTORAT DAERAH							-		-		-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	90%	674,540,000	92 %	1,384,000,000	94%	1,495,605,760	96%	1,536,332,600	98%	1,591,763,481	98%	1,608,389,450	Inspektorat Daerah
PROGRAM PERUMUSAN KEBUJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (3,10) Level 3 (3)	403,254,000	Level 3 (3,15) Level 3 (3,1)	771,000,000	Level 3 (3,35) Level 3 (3,3)	833,173,440	Level 3 (3,65) Level 3 (3,6)	855,861,586	Level 4 (4) Level 4 (4)	886,741,072	Level 4 (4) Level 4 (4)	896,003,082	Inspektorat Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (76,00)	7,948,232,642	BB (78,00)	8,315,271,293	A (80,00)	8,985,814,770	A (82,00)	9,230,507,492	A (84,00)	9,563,544,202	A (84,00)	9,663,435,422	Inspektorat Daerah
KECAMATAN							-		-		-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	7,500,000	100 %	1,410,000	100 %	1,523,702	100 %	1,565,194	100 %	1,621,667	100 %	1,638,605	Kecamatan Lima Puluh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100 %	262,295,000	100 %	272,055,000	100 %	293,993,515	100 %	301,999,253	100 %	312,895,386	100 %	316,163,578	Kecamatan Lima Puluh
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	100 %	5,500,000	100 %	21,840,000	100 %	23,601,178	100 %	24,243,861	100 %	25,118,580	100 %	25,380,943	Kecamatan Lima Puluh
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	71,050,000	100 %	77,990,000	100 %	84,279,114	100 %	86,574,118	100 %	89,697,712	100 %	90,634,605	Kecamatan Lima Puluh
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100 %	4,535,000	100 %	2,075,000	100 %	2,242,328	100 %	2,303,389	100 %	2,386,495	100 %	2,411,422	Kecamatan Lima Puluh
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	BB (76,00)	2,974,762,682	BB (77,00)	3,058,851,506	BB (78,00)	3,305,517,291	BB (79,00)	3,395,529,833	A (80,00)	3,518,040,549	A (80,00)	3,554,786,483	Kecamatan Lima Puluh
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	15,000,000	100 %	17,999,750	100 %	19,451,250	100 %	19,980,927	100 %	20,701,839	100 %	20,918,069	Kecamatan Talawi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	243,003,835	100 %	243,656,215	100 %	47,176,652	100 %	48,461,320	100 %	50,209,804	100 %	50,734,245	Kecamatan Talawi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	16,200,000	100 %	19,380,000	100 %	20,942,803	100 %	21,513,097	100 %	22,289,289	100 %	22,522,101	Kecamatan Talawi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	140,413,900	100 %	133,686,471	100 %	144,466,948	100 %	148,400,927	100 %	153,755,233	100 %	155,361,206	Kecamatan Talawi

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target 4	Rp 5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (75,00)	2,929,946,289	BB (76,00)	3,146,045,419	BB (77,00)	3,399,742,522	BB (78,00)	3,492,320,910	A (80,00)	3,618,323,849	A (80,00)	3,656,117,241	Kecamatan Talawi
PROGRAM PENYELENGGARAAN EMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	20,260,944	100 %	30,000,000	100 %	32,419,200	100 %	33,302,007	100 %	34,503,544	100 %	34,863,933	Kecamatan Tanjung Tiram
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	412,927,500	100 %	480,000,000	100 %	518,707,200	100 %	532,832,116	100 %	552,056,698	100 %	557,822,931	Kecamatan Tanjung Tiram
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	12,600,000	100 %	38,510,000	100 %	41,615,446	100 %	42,748,677	100 %	44,291,049	100 %	44,753,669	Kecamatan Tanjung Tiram
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	87,651,450	100 %	150,000,000	100 %	162,096,000	100 %	166,510,036	100 %	172,517,718	100 %	174,319,666	Kecamatan Tanjung Tiram
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	100 %	3,786,141,922	100 %	4,065,204,213	100 %	4,393,022,281	100 %	4,512,648,670	100 %	4,675,465,034	100 %	4,724,300,267	Kecamatan Tanjung Tiram
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	427,887,500	100 %	437,887,500	100 %	473,198,748	100 %	486,084,423	100 %	503,622,349	100 %	508,882,685	Kecamatan Air Putih
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	14,580,000	100 %	19,980,000	100 %	21,591,187	100 %	22,179,137	100 %	22,979,360	100 %	23,219,379	Kecamatan Air Putih
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	118,300,815	100 %	147,605,000	100 %	159,507,867	100 %	163,851,426	100 %	169,763,185	100 %	171,536,362	Kecamatan Air Putih
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,55)	4,412,517,258	BB (71,25)	4,534,125,790	BB (73,25)	4,899,757,694	BB (75,25)	5,033,182,995	BB (77,25)	5,214,780,238	BB (77,25)	5,269,248,618	Kecamatan Air Putih
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	221877873	100 %	250,554,020	100 %	270,758,696	100 %	278,131,726	100 %	288,166,719	100 %	291,176,620	Kecamatan Sei Suka
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	9900000	100 %	19,799,890	100 %	21,396,553	100 %	21,979,203	100 %	22,772,212	100 %	23,010,068	Kecamatan Sei Suka
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	89,615,000	100 %	87,019,000	100 %	94,036,212	100 %	96,596,912	100 %	100,082,129	100 %	101,127,487	Kecamatan Sei Suka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	NILAI PENCAPAIAN TARGET PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80	15,000,000	83	1526560	85.00	1,649,662	87.00	1,694,584	85.00	1,755,724	85.00	1,774,063	Kecamatan Sei Suka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB(74,87)	3,831,904,078	BB (74,87)	4,231,294,353	BB (75,87)	4,572,505,930	BB (77,87)	4,697,019,839	A 80	4,866,488,314	A 80	4,917,318,785	Kecamatan Sei Suka
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	20,011,500	100 %	15,000,000	100 %	16,209,600	100 %	16,651,004	100 %	17,251,772	100 %	17,431,967	Kecamatan Medang Deras
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	648,500,000	100 %	650,000,000	100 %	702,416,000	100 %	721,543,490	100 %	747,576,779	100 %	755,385,219	Kecamatan Medang Deras
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	10 desa	37,800,000	10 desa	43,200,000	10 desa	46,683,648	10 desa	47,954,890	10 desa	49,685,103	10 desa	50,204,064	Kecamatan Medang Deras
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	80,010,500	100 %	100,000,000	100 %	108,064,000	100 %	111,006,691	100 %	115,011,812	100 %	116,213,111	Kecamatan Medang Deras
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100 %		100 %		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Kecamatan Medang Deras
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,20)	4,711,829,081	BB (70,50)	4,930,350,843	BB (73,50)	5,327,934,335	BB (75,50)	5,473,019,315	BB (77,50)	5,670,485,852	BB (77,50)	5,729,714,076	Kecamatan Medang Deras
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	15,000,000	100 %	18,000,000	100 %	19,451,520	100 %	19,981,204	100 %	20,702,126	100 %	20,918,360	Kecamatan Sei Balai
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	25,010,000	100 %	49,160,000	100 %	53,124,262	100 %	54,570,889	100 %	56,539,807	100 %	57,130,365	Kecamatan Sei Balai
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	9,350,000	100 %	16,100,000	100 %	17,398,304	100 %	17,872,077	100 %	18,516,902	100 %	18,710,311	Kecamatan Sei Balai
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	101,336,500	100 %	112,951,273	100 %	122,059,664	100 %	125,383,470	100 %	129,907,306	100 %	131,264,188	Kecamatan Sei Balai
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100 %		100 %		100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Kecamatan Sei Balai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (72,55)	2,724,867,680	BB (72,75)	2,796,686,530	BB (73,75)	3,022,211,332	BB (75,75)	3,104,509,169	BB (77,75)	3,216,519,859	BB (77,75)	3,250,116,409	Kecamatan Sei Balai
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	15,000,000	100 %	8,000,000	100 %	8,645,120	100 %	8,880,535	100 %	9,200,945	100 %	9,297,049	Kecamatan Lima Puluh Pesisir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	35,595,000	100 %	46,915,000	100 %	50,698,226	100 %	52,078,789	100 %	53,957,792	100 %	54,521,381	Kecamatan Lima Puluh Pesisir
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	7,500,000	100 %	14,100,000	100 %	15,237,024	100 %	15,651,943	100 %	16,216,666	100 %	16,386,049	Kecamatan Lima Puluh Pesisir
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	122,590,000	100 %	108,965,793	100 %	117,752,795	100 %	120,959,321	100 %	125,323,533	100 %	126,632,537	Kecamatan Lima Puluh Pesisir
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100 %	7,850,000	100 %	5,900,000	100 %	6,375,776	100 %	6,549,395	100 %	6,785,697	100 %	6,856,574	Kecamatan Lima Puluh Pesisir
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	74,00 (BB)	1,643,289,810	75,00 (BB)	1,737,283,280	76,00 (BB)	1,877,377,804	78,00 (BB)	1,928,500,679	80,00 (A)	1,998,080,983	80,00 (A)	2,018,950,939	Kecamatan Lima Puluh Pesisir
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	15,000,000	100 %	18,808,550	100 %	20,325,271	100 %	20,878,749	100 %	21,632,054	100 %	21,858,001	Kecamatan Datuk Lima Puluh
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	37,955,000	100 %	5,610,000	100 %	6,062,390	100 %	6,227,475	100 %	6,452,163	100 %	6,519,556	Kecamatan Datuk Lima Puluh
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Desa Yang Kondisinya aman dan kondusif	10 desa	6,750,000	10 desa	14,550,000	10 desa	15,723,312	10 desa	16,151,474	10 desa	16,734,219	10 desa	16,909,008	Kecamatan Datuk Lima Puluh
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	132,296,000	100 %	120,637,000	100 %	130,365,168	100 %	133,915,142	100 %	138,746,800	100 %	140,196,010	Kecamatan Datuk Lima Puluh
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100 %	11,076,500	100 %	10,130,000	100 %	10,946,883	100 %	11,244,978	100 %	11,650,697	100 %	11,772,388	Kecamatan Datuk Lima Puluh

NAMA PROGRAM	INDIKATOR	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		Target 4	Rp 5	Target 6	Rp 7	Target 8	Rp 9	Target 10	Rp 11	Target 12	Rp 13	Target 14	Rp 15	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (70,75)	1,701,491,325	BB (71,75)	1,784,237,122	BB (73,75)	1,928,118,004	BB (75,75)	1,980,622,585	BB (77,75)	2,052,083,448	BB (77,75)	2,073,517,459	Kecamatan Datuk Lima Puluh
PROGRAM PENYELENGGARAAN EMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	16,310,000	100 %	16,310,000	100 %	17,625,238	100 %	18,105,191	100 %	18,758,427	100 %	18,954,358	Kecamatan Datuk Tanah Datar
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	14,535,500	100 %	38,684,500	100 %	41,804,018	100 %	42,942,383	100 %	44,491,744	100 %	44,956,461	Kecamatan Datuk Tanah Datar
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	5,400,000	100 %	14,530,000	100 %	15,701,699	100 %	16,129,272	100 %	16,711,216	100 %	16,885,765	Kecamatan Datuk Tanah Datar
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	89,631,080	100 %	95,074,053	100 %	102,740,825	100 %	105,538,560	100 %	109,346,391	100 %	110,488,514	Kecamatan Datuk Tanah Datar
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100 %	5,730,000	100 %	5,730,000	100 %	6,192,067	100 %	6,360,683	100 %	6,590,177	100 %	6,659,011	Kecamatan Datuk Tanah Datar
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (74,50)	2,282,597,543	BB (75,50)	2,292,418,930	BB (77,50)	2,477,279,593	BB (78,50)	2,544,738,393	A (80)	2,636,552,554	A (80)	2,664,091,346	Kecamatan Datuk Tanah Datar
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	15,000,000	100 %	5,000,000	100 %	5,403,200	100 %	5,550,335	100 %	5,750,591	100 %	5,810,656	Kecamatan Nibung Hangus
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa Dalam Pembangunan	100 %	29,173,837	100 %	44,484,850	100 %	48,072,108	100 %	49,381,160	100 %	51,162,832	100 %	51,697,228	Kecamatan Nibung Hangus
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa Yang Kondisinya Aman Dan Kondusif	100 %	21,600,000	100 %	24,600,000	100 %	26,583,744	100 %	27,307,646	100 %	28,292,906	100 %	28,588,425	Kecamatan Nibung Hangus
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Urusan Pemerintahan Umum	100 %	97,852,370	100 %	103,239,600	100 %	111,564,841	100 %	114,602,864	100 %	118,737,735	100 %	119,977,950	Kecamatan Nibung Hangus
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PELAKSANAAN PEROGRAM PEMBINAAN DAN PENGWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %		100 %	5,000,000.00	100 %	5,403,200	100 %	5,550,335	100 %	5,750,591	100 %	5,810,656	Kecamatan Nibung Hangus
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (72,00)	1,795,353,955	BB (73,00)	1,855,350,528	BB (74,00)	2,004,965,995	BB (75,00)	2,059,563,224	BB (77,00)	2,133,872,265	BB (77,00)	2,156,160,560	Kecamatan Nibung Hangus
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	100 %	15,800,000	100 %	4,020,000	100 %	4,344,173	100 %	4,462,469	100 %	4,623,475	100 %	4,671,767	Kecamatan Laut Tador
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	21,225,000	100 %	35,300,000	100 %	38,146,592	100 %	39,185,362	100 %	40,599,170	100 %	41,023,228	Kecamatan Laut Tador
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan kondusif	100 %	6,750,000	100 %	14,910,000	100 %	16,112,342	100 %	16,551,098	100 %	17,148,261	100 %	17,327,375	Kecamatan Laut Tador
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	100 %	111,560,000	100 %	74,129,120	100 %	80,106,892	100 %	82,288,283	100 %	85,257,244	100 %	86,147,756	Kecamatan Laut Tador
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Partisipasi Masyarakat/ Desa dalam Pembangunan	100 %	4,475,000	100 %	7,990,000	100 %	8,634,314	100 %	8,869,435	100 %	9,189,444	100 %	9,285,428	Kecamatan Laut Tador
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB (73,50)	2,001,972,158	BB (75,50)	2,108,800,777	BB (76,50)	2,278,854,472	BB (77,50)	2,340,909,958	A (80)	2,425,369,989	A (80)	2,450,702,979	Kecamatan Laut Tador

LAMPIRAN 3

Tabel I Dukungan Kabupaten/Kota Terhadap PHTC Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029) 33 Kabupaten/Kota	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjutkan SLTA - Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjutkan kepada jenjang SLTA
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur			
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC) MoU 33 Kabupaten/Kota Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	1. Dinas Sosial (Pembinaan kepada Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya), 2. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan Provsu) 3. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%. - Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya - Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan kab/kota)
	2026	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota			
	2030	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		- Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus • 33 Kabupaten/Kota			
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	1. Pembentukan Tim Khusus Kestabilan Harga di semua level. 2. Pelatihan teknis tim dan sosialisasi Perda terkait mekanisme HET. 3. Pilot project diversifikasi produk turunan cabai merah (uji resep, branding awal). 4. Pembangunan 10 unit Solar Dryer Dome di 2 kabupaten (Kab. Batu Bara 5 unit, Kab. Karo 5 unit). 5. Skema kemitraan dengan BUMD potensial untuk proses penyerapan, pengolahan, distribusi dan proses bisnis skema BUMD mulai dari pengumpulan, pembelian sampai distribusi penjualan. 6. Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani.	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha) - Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih) - PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan) - BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun) - Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah) - Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	Disperindag kab/kota : Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal Dinas Pertanian kab/kota : Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani Dinas Koperasi kab/kota : Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD <i>Total Solar Dry Dome: 70</i>
	2026	1. Pemetaan lokasi gudang dan kebutuhan digitalisasi pencatatan pasokan. 2. Pengadaan dan renovasi gudang serta pelatihan pencatatan digital. 3. Uji coba pencatatan digital hasil panen di wilayah percontohan. 4. Pelatihan pengolahan dan pengemasan produk turunan cabai merah. 5. Pembangunan 30 unit <i>Solar Dryer Dome</i> (Kab. Batu Bara 12 unit, Kab. Simalungun 3 unit dan Kab. Deli Serdang 3 unit) 6. Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani 7. MOU antara BUMD dengan kelompok petani 8. Penyerapan produksi oleh BUMD 9. Tahapan pengolahan dan distribusi 10. Peningkatan kapasitas petani terhadap pengguna SDD			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi 1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung 2. Penyusunan roadmap dan desain awal sistem Layanan digital. Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.	Dinas Kominfo	DPMPSTP Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Bapenda Disperindag ESDM BPSDM Biro Adpem	1. Penyiapan kebijakan/regulasi di tingkat Provinsi/Pemda kab/kota. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
				BUMD: PDAM, Bank Sumut	3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi
		Identifikasi Penetapan Lokasi 1. Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pemetaan Lokasi Strategis. 4. Koordinasi kepada <i>Stakeholder</i> dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif. Lokasi kegiatan: - 33 kabupaten/kota			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi . 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota 4. Penentuan lokasi
		tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2027	Pengembangan dan penambahan 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Integrasi Sistem (Layanan). 3. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 4. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota 4. Penentuan lokasi
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet 1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Penggunaan: - 25 Kab			2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota 4. Penentuan lokasi
		tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat. 4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi Kegiatan: • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota. 3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota 4. Penentuan lokasi
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 25 Kab			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan
	2030	Evaluasi dan Monitoring 1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi. 2. Pelatihan penggunaan Aplikasi. 3. Sosialisasi penggunaan aplikasi kepada masyarakat.			1. Penyiapan dan penguatan infrastruktur digital. 2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur Lokasi kegiatan: - 33 kab/kota			3. Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota. 4. Penentuan lokasi
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet. 2. Pemasangan Titik akses Wifi. 3. Sosialisasi Penggunaan. 4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring. Lokasi Perluasan Area Layanan: - 33 kab/kota			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota. 2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.
5. a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas. 2. Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
	2026	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.			
	2027	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak Barat serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m			
	2028	1. Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2. Penyusunan Leger jalan. 3. Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Toba, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana : Kab. Langkat 4. Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Pakpak Bharat			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m			
	2029	tidak ada			
	2030	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED) 2.Penyusunan Leger jalan 3.Pelaksanaan penanganan Jalan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat 4.Pelaksanaan penanganan Jembatan Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Serdang Bedagai Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai serta target: jalan 126,20 km & jembatan 51 m			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemetaan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (<i>smart irrigation</i>) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.
	2026	Peningkatan jaringan irigasi sekunder di Kab. Batu Bara, Kab. Padanglawas Utara, dan Kab. Simalungun; target 6.776 Ha. Kab. Batu Bara - DI.Cinta Maju/Cinta Damai, Kab. Batu Bara- DI. Purwodadi, Kota P.Siantar/Simalungun-. DI. Rambung Merah, Kab. Batu Bara- DI.Simodong, Kab. Batu Bara- DI.Tanjung Muda, Kab. Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Kab. Karo- DI.Parit Lompaten, Kab. Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Serdang Bedagai- DI. Pekan Kemis			
	2027	Akselerasi cakupan layanan target 3.175 Ha. Kab. Langkat - D.I Secanggang, Kab. Mandailing Natal- DI. Terusan, Kab. Padang Lawas- DI. Balakka Sitongkon, Padang Lawas- DI.Sigorbus, Kab.Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Simalungun- DI.Raja Maligas, Kab. Simalungun- DI.Javaconisasi, Kab. Dairi- D.I Buluh Duri, Kab. Toba- D.I Hinalang, Kab. Tapanuli Utara- D.I Aek Sigeaon, Kab. Tapanuli Utara- D.I Hasak I dan II, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Samosir- D.I Tele Harian Boho, Kab. Humbang Hasundutan- D.I Parmiahahan/Hutapaung, Kab. Nias- D.I			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
		Gido Zebua, Kab. Simalungun- D.I Bah Tongguran I, Kab. Simalungun- DI Raja Hombang/ Tongah Mangaraja, Kab. Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Padang Lawas Utara- D.I Napa Tanjung Beringin, Kab. Labuhanbatu- D.I.R Cinta Makmur, Kab. Asahan- D.I.Serbangan, Kab. Batu Bara- D.I.Simodong, Kab. Padang Lawas Utara- D.I.Padang Garugur, Kab. Labuhanbatu- D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat, Kab. Mandailing Natal- D.I. Terusan, Kab. Deli Serdang-D.I. Namorambe, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus			
	2028	Penguatan jaringan teknis Kab. Batu Bara-(D.I.Simodong, D.I. Purwodadi,DI. Sei Balai,DI. Suka Makmur,DI. Sijambi), Kab. Simalungun-DI. Bah Horas Hulu/Tongah, Kab. Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Kab. Padang Lawas - DI.Sigorbus, Kab. Labuhanbatu- (D.I.R Cinta Makmur,D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Langkat- D.I.R Gebang,Kab. Tapanuli Tengah- D.I Pandurungan/Sitandiang, Kab. Karo- DI.Parit Lompaten, Kab. Toba- DI.Hinalang, Kab. Tapanuli Utara- DI.Sigeaon, Kab. Tapanuli Utara- (DI.Simok Mok,D.I Aek Sarulla), Kab. Deli Serdang- D.I Medan Krio, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus, Kab. Dairi- D.I. Buluh Duri, Kab. Mandaling Natal-D.I. Siulang Aling,Kab. Tapanuli Tengah- D.I Badiri Lopian			
	2029	Penyempurnaan konektivitas saluran Kab. Batu Bara- D.I.Simodong, Kab. Tapanuli Selatan- D.I.Sipirok Komplek, Kab. Labuhanbatu- (D.I.R Cinta Makmur, D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kab. Tapanuli Utara- DI.Simok Mok, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus, Kab. Dairi-D.I. Buluh Duri, Kab. Mandailing Natal- D.I. Siulang-Aling, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Pandurungan/Sitandiang, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Badiri Lopian, Kab. Toba- D.I Sijambur , Kab. Simalungun-D.I. Naga Sompah, Kab. Karo- DI.Parit Lompaten			
	2030	tidak ada			
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan	2025	1. Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya 2. Survei Lokasi di setiap kab/kota 3. Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) 4. Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah 5. Launching Pembangunan 15.000 unit rumah bagi MBR dan ASN 6. Pembangunan Fisik setiap Tahun	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang,Jalan, dan Keciaptakaryaan (sanitasi dan air minum), BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi Biro Pemotha (memfasilitasi kerja sama antar	Bupati/Wali Kota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by address) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah		7. Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pematangsiantar dan Kota Padangsidimpuan		Pemerintah Daerah) Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum memilik rumah Dinas Kominfo untuk publikasi Media	wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota 4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat,
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	1. Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya 2. Survei Lokasi di setiap kab/kota 3. Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) 4. Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah 5. Pembangunan Fisik setiap Tahun 6. Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Kab. Humbang Hasundutan dan Kab. Toba			
	2030	tidak ada			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
					memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan. Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum memilik rumah
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2025	tidak ada	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi) Diskominfo (Publikasi),	1. Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota 2. Edukasi dan Sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa. 3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE
	2026	1. Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25 kabupaten/kota (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba 2. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba 3. Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. 4. Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2027	1. Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan 2. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba 3. Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2028	1. Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan 2. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba. 3. Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			
	2029	1. Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan 2. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba. 3. Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
	2030	1. Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan. 2. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba 3. Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)			

Tabel II Dukungan terhadap Program Prioritas/Proyek Strategis Daerah (PSD)
RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA
			UTAMA	PENDUKUNG	
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL					
1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.
		tidak ada			
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK - 2028, Karo/SLB - 2029)	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	• Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan • Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah • Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang berprestasi dan direkomendasikan masuk ke dalam sekolah unggulan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030				
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	2025	Pendataan valid rehab ruang kelas tahun 2026-2029 •Provinsi Sumatera Utara (Dokumen Aprasial)	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	• Pelaksanaan Fisik Tahap III - 190 Ruang Kelas (2028) di 28 kab/kota Medan, Binjai, Langkat, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Dairi, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhanbatu, Labura, Labusel, Simalungun,			

		Pematangsiantar, Samosir, Toba, Humbahas, Taput, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Padangsidempuan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padangsidempuan, Padang Lawas			
	2029	Monitoring, Evaluasi & Pemutakhiran Data (2029)			
	2030				
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	2025	tidak ada	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan. Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.
	2026	Pembangunan RKB (mendesak) Tahap II (2026) sebanyak 80 RKB di 19 kab/kota Langkat, Binjai, Medan, Dairi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Padangsidempuan, Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 4 unit USB			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	-			
5. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	2025	1.Penyusunan regulasi teknis, Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/488/KPTS/2025 mengenai Tim Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sumatera Utara, Penyusunan DED (tematik bioindustri dan pariwisata), MoU kerja sama pemagangan dan rekrutmen tenaga kerja lokal (Kek Sei Mangke, KIM, Inalum dan Kuala Tanjung) Mou yang telah dilaksanakan antara Pemrov dan Kek Sei Mangke rekrutmen tenaga kerja 12.000 tahun 2027 2.Melakukan pemetaan data jenis pelatihan dan peralatan melalui dokumen Rencana Tenga kerja Daerah (RTKD) dan MOU rekrutmen tenaga kerja (Kim Inalum dan Kuala Tanjung) akan di laksanakan di akhir tahun 2025-2030	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut: - Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK. - Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal. - Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten. 2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah

		Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun		program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan. Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut: • Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja. • Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program <i>pelatihan BLK</i>. • Mengintegrasikan teaching factory di SMK dengan fasilitas pelatihan <i>BLK untuk</i> menciptakan ekosistem pelatihan dual system. • Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK. • Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan. Dinas Koperasi dan UMKM: • Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM • Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh • Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta	
	2026	1. Optimalisasi sarana prasarana dan pengadaan peralatan BLK 2. Revitalisasi BLK 3. Peningkatan Kompetensi SDM Instruktur dan Pengelola 4. Launching New BLK tematik 5. Perluasan jaringan kerja sama rekrutmen tenaga kerja, magang. Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun			
	2027	1. Penyesuaian Kurikulum Berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) berdasarkan tematik bioindustri dan pariwisata, Pelatihan & Sertifikasi Profesi, hal ini dilakukan dengan kerja sama pemprov dan balai besar pelatihan vokasi dan produktivitas (BBPVP) 2. Peningkatan kualitas/modernisasi/ <i>upgrading</i> Sarana dan Prasarana Pelatihan tematik bioindustri dan pariwisata 3. Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan Sektor Ekonomi Kreatif akan bekerjasama sama dengan KADIN 4. Pelaksanaan pelatihan di BLK dengan jumlah 1000 peserta/tahun dan setelah dilaksanakan pelatihan akan di Sertifikasi Profesi lalu rekrutmen ke perusahaan yang telah di laksanakan MoU Dilokasi UPTD BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun			
	2028	1. <i>Upgrade</i> Peningkatan kualitas/modernisasi/ <i>upgrading</i> Sarana dan Prasarana Pelatihan sesuai pemetaan Rencana Tenga kerja Daerah (RTKD) (diharapkan dukungan pembiayaan melalui dana CSR) 2. Peningkatan kualitas SDM Pelatih berkejasama dengan balai besar pelatihan			

		vokasi dan produktivitas (BBPVP) sesuai kebutuhan industri dunia kerja 3. Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan BLK yang di industri (KEK Sei Mangke, Inalum dan Kuala Tanjung) 4. Digitalisasi basis data penyerapan tenaga kerja BLK sebelum dan sesudah pelatihan		pelatihan BLK yang ingin berwirausaha • Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK, • Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui <i>E-commerce</i> dan platform digital UMKM.	
	2029-2030	1. Pelatihan 1000 peserta/tahun daan melakukan sertifikasi profesi dari hasil pelatihan di BLK Dinas Ketenagakerjaan di Kab. Simalungun akan di jadikan karyawan di perusahaan sesuai dengan MoU yang telah disepakati bersama. 2. <i>Upgrade</i> peningkatan kualitas/modernisasi/<i>upgrading</i> Sarana dan Prasarana Pelatihan sesuai pemetaan Rencana Tenga kerja Daerah (RTKD) (diharapkan dukungan pembiayaan melalui dana CSR) 3. Monitoring dan evaluasi penyerapan lulusan BLK yang di industri (KEK Sei Mangke, Inalum dan Kuala Tanjung)		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: • Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta platform pemasaran digital. • Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. • Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. • Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif. Dinas Sosial:	

				• Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial. • Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja. • Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial. • Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri. Badan Kepegawaiaan Daerah: • BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan. • Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan.	
--	--	--	--	--	--

				• BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan. • Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI					
1. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	2025	1. Inisiasi dan konsolidasi melalui rapat koordinasi tahun 2025 2. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2025 • Provinsi Sumatera Utara	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	• Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar Sumut untuk cabor sepak bola dan voli • Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya
	2026	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2026 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2026 • Provinsi Sumatera Utara			
	2027	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2027 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2027 • Provinsi Sumatera Utara			
	2028	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2028			

		2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2028 • Provinsi Sumatera Utara			
	2029	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2029 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2029 • Provinsi Sumatera Utara			
	2030	1. Pelaksanaan Liga Olahraga Pelajar 2030 2. Penguatan Pembinaan & Kemitraan Tahun 2030 3. Penguatan Legacy & Keberlanjutan Tahun 2030 • Provinsi Sumatera Utara			
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	2025	Inisiasi konsolidasi melalui pertemuan koordinasi Tahun 2025 • Kota Medan dan Kab Deli Serdang	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa) Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	NPC kab/kota dan Dispora kab/kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di kab/kota
	2026	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2026 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2026-2027 • Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2027	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2027 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2027-2028 • Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2028	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2028 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2028-2029 • Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			

	2029	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2029 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2029-2030 • Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
	2030	1. Pelaksanaan Pekan paralimpik pelajar daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Cabang Olahraga para atletik tahun 2030 2. Perluasan Partisipasi & Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2030 • Kota Medan dan Kab. Deli Serdang			
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU					
1. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	2025	Penyusunan Kajian dan Bisnis Proses Platform e-Health Integration System Tahun 2025 Pembangunan Aplikasi Tahun 2025 <i>Launching Aplikasi Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web, Server dan Publikasi Kegiatan)	- Penyediaan data kepesertaan JKN kab/kota - Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat kab/kota
	2026	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2026 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota			
	2027	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2027 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2028 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			

	2029	Edukasi penggunaan Aplikasi ke Masyarakat Tahun 2029 Pengembangan Aplikasi <i>Sumut e-Health Integration System</i> Tahun 2026-2029 33 Kabupaten/Kota			
	2030	"-			
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 – 2030)	2025	tidak ada	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja) Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah - Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat - Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan - Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD - Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal - Penyediaan Akomodasi dokter residen
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	1. Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM 2. Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030 RSUD Kab. Batu Bara, RSUD Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah Kab. Serdang Bedagai, RSUD Tuan Rondahaim di Kab. Simalungun, RSUD Salak di Kab. Pakpak Bharat, RSUD Parapat Kab. Simalungun, RSUD Kota Pinang Kab. Labusel, RSUD Pandan Kab. Tapteng, RSUD Dolok Sanggul Kab. Humbahas, RSUD Tapanuli Selatan Kab. Tapsel, RSUD Dr. Djasamen Saragih Kota P. Siantar, RSUD Dr. FL Tobing Sibolga, RSUD Dr. R. M. Djoelham Binjai Kota Binjai, RSUD Pancur Batu Kab. Deli Serdang, Lanjutan 2027 : 9 Orang, Lanjutan 2026 : 8 Orang, Lanjutan 2022 : 21 orang			
	2029	tidak ada			
	2030	1. Pemenuhan dokter spesialis melalui pemberian beasiswa bekerja sama dengan Perguruan Tinggi yakni USU dan UGM 2. Distribusi dokter spesialis sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Primer dan Rujukan melalui dokter residen (Layanan MedisMerata) Tahun 2025-2030			

		• kab/kota yang terintervensi pada tahun 2026, 2027, 2028 dan 2029			
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	2025	-	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajemen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	• Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas • Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas Koordinasi Linta Pemerintahan
	2026	Penyusunan Kajian dan Dokumen Perencanaan Peningkatan Sarana Prasarana RSUD Lau Simomo, RSUD Mata, RSUD Paru Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit 2026			
	2027	tidak ada			
	2028	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Fasilitas RSUD Paru			
	2029	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan serta Fasilitas RSUD Mata			
	2030				
PP4 PEMBERANTASAN KEMISKINAN MELALUI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RENTAN SECARA MENYELURUH DAN TEPAT SASARAN					-
1. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	2025	tidak ada	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBE dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Dukungan penajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran. Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota. Replikasi kegiatan serupa di kab/kota masing-masing.
	2026	1. Pendataan dan penetapan penerima manfaat (KK/KUBE) 2. Pembuatan Bank Data pensasaran masyarakat miskin sebanyak 200 KK (40 KUBE) di 4 kab/kota: Mandailing Natal, Humbahas, Toba, Padang Lawas Utara, Dairi serta 200 KK (UEP) di Kab. Labusel, Kab. Batu Bara, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Nias			
	2027	tidak ada			
	2028	1. Penyaluran bantuan modal usaha dan Pelatihan keterampilan/pengembangan usaha Program Masyarakat Produktif Tahun 2026-2029 2. Pendampingan dan monitoring serta Evaluasi lapangan Tahun 2026-2029 •Sebanyak 600 KK (120 KUBE) di 5 kab/kota: Tapsel, Karo, Nias, Sergei, Medan serta 600 KK (UEP) di 5 kab/kota:			

		Deli Serdang, Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Labuhanbatu, Pakpak bharat			
	2029	tidak ada			
	2030				
2. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	2025	tidak ada tidak ada	DISPERINDAG ESDM	- Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok - Dinas Perhubungan : Transportasi logistik - Dinas Sosial : Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) - Dinas Koperasi & UMKM: Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok - Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi - Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan - Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030): - Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin; - Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok; - Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok; - Kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok - Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan; - Monitoring dan evaluasi
	2026	Konsolidasi kelembagaan, integrasi sistem informasi daerah; Pelaksanaan Pasar Murah Bergerak (PMB) Lokasi: Mandailing Natal (kemiskinan struktural), Tapanuli Utara (akses terbatas), Nias Barat (isolasi logistik), Humbahas (wilayah dataran tinggi), Pakpak Bharat (akses sangat terbatas), Dairi (wilayah perbatasan), Kab. Batu Bara (wilayah pesisir), Toba (hinterland), Samosir (wilayah tertutup), Labuhanbatu Selatan (kemiskinan tinggi), Nias Selatan (akses sulit), Padang Lawas (rawan logistik), Padang Lawas Utara (wilayah sulit distribusi), Tapanuli Tengah (akses dan harga tinggi), Langkat (distribusi padat dan IHK)			
	2027	tidak ada			
		tidak ada			
	2028	tidak ada			
		tidak ada			
	2029	tidak ada			
		tidak ada			
	2030	tidak ada			
		tidak ada			
3. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	2025	- Pendataan dan verifikasi - Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (Pekerja rentan yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar) sebanyak 21.000 (APBD dan DBH Sawit) - Penguatan peran dan komitmen kabupaten/kota dalam pembiayaan dan regulasi (MoU PemprovSU dengan Kabupaten dan Kota) -33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2)	DISNAKER	- Dinas Sosial - Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan. - Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target <i>Universal Coverage Jamsostek</i> (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029 - Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk

	2026	Perluasan kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.645 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota • 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2		sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS. • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil • Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas • Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan. • Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif. • Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS. • Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. • BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja.	tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan 3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin ekstrem desil 1 dan 2
	2027	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.646 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota • 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2028	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.647 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota • 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2029	Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% kab/kota • 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara informal prioritas Masyarakat miskin ekstrem di Desil 1 dan 2			
	2030	1. Pembayaran kepesertaan pekerja rentan di sektor informal sebanyak 44.648 dengan skema penganggaran 20% Provinsi dan 80% Kab/kota 2. Evaluasi menyeluruh dan pencapaian target cakupan 60% UCJ • 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara			

				• Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal. • Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun. • Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun. • Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK. • Kominfo: Publikasi Kegiatan	
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi	2025	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi		PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	• Kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja • Kab/kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.
	2026	Penyusunan dokumen <i>appraisal</i> /penilaian kerusakan bekerja sama dengan Dinas PUPR Penyusunan dokumen perencanaan (jasa konsultan perencanaan) untuk 13 panti sosial Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2027	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			
	2028	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (4 unit) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi			

	2029	Revitalisasi fisik gedung Panti Sosial (5 unit) Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi				
	2030	Bimbingan keterampilan dasar bagi PPKS/penghuni panti Pemberian bantuan sosial bagi PPKS/penghuni panti sosial yang akan memasuki masa terminasi				
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH						
1. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	2025	KEK Pertanian Identifikasi lokasi dan Penlok (Humbang hasundutan dan Kab potensial lainnya) 1. Penentuan lokasi pengusulan KEK Pertanian 2. Pengusulan KEK Pertanian melalui proses kelengkapan dokumen: - Tata lokasi - Rencana tata ruang KEK - Rencana sumber pembiayaan - Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% - Persetujuan Pemkab	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	Bappelitbang: - Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup: - Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan Dinas Ketenagakerjaan: - Peningkatan Capacity Building Pariwisata dan Pertanian Dinas Pendidikan: - Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian Dinas PUPR: - Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW Dinas Kominfo : - Dukungan Publikasi Kegiatan Biro Hukum: - Penetapan Regulasi Perda/Pergub DPMPSTSP :	2025: - Dukungan Kabupaten/kota untuk Pengembangan KEK Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK 2026: - Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi - Penertapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR 2027: - Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal terdapat lahan yang belum dibebaskan) - Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi) - Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kab/kota 2028: - Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian - Penyediaan Lahan	
		tidak ada				
	2026	KEK Pertanian 1. Penentuan lokasi pengusulan KEK pertanian 2. Pengusulan KEK Pariwisata melalui proses kelengkapan dokumen: - Tata lokasi - Rencana tata ruang KEK - Rencana sumber pembiayaan - Studi kelayakan ekonomi penguasaan lahan 50% - Persetujuan Pemkab - Pembentukan kelembagaan badan usaha pengelolaan KEK.				
		tidak ada				
	2027	Pertanian				

		1. Penyusunan Prosedur dan Persyaratan (Menyediakan lahan dengan luas minimal 50% dari area yang diusulkan, sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung); Kelengkapan Dokumen (Peta lokasi ;Rencana tata ruang KEK; Rencana dan sumber pembiayaan; Persetujuan lingkungan; Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; Bukti penguasaan lahan paling sedikit 50% dari rencana; Persetujuan Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi. 2. Peningkatan kapasitas SDM Lokal		• Fasilitasi perizinan	- Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota - Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kab/kota
	2028	Pertanian 1. Mekanisme Proses Pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus (Pemerintah Daerah / Badan Usaha mengajukan surat usulan kepada Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus; Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen usulan; Dewan Nasional KEK melakukan kajian pemenuhan kriteria lokasi dan kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan; Berdasarkan hasil kajian, Dewan Nasional 2. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan BLK Tematik 3. Perluasan badan usaha pengelolaan KEK dengan BUMN, swasta dan investor potensial			2029: - Peningkatan SDM Pariwisata - Penyediaan Lahan - Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota - Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kab/kota - Promosi Investasi 2030: - Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian - Penyediaan Lahan - Peningkatan Infrastruktur kewenangan kab/kota - Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan Kab/kota - Promosi Investasi
	2029	KEK Pertanian 1. Peningkatan kapasitas pelaku industri pertanian sekitar kawasan KEK 2. Pembangunan infrastruktur dasar di kawasan KEK dan infrastruktur pendukung (jalan), produksi dan hilirisasi			
	2030	KEK Pertanian			

2. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara		Promosi dan Investasi untuk meningkatkan kelompok tani, BumDes di KEK Pertanian			
		tidak ada			
	2025	Penguatan Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Identifikasi rantai pasok dan IKM Komoditas Unggulan Lokasi - Kelapa: Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Utara, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, dan Kab. Labuhanbatu Utara - Kopi: Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara, dan Kab. Simalungun - Aren: Kabupaten Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Mandailing Natal - Cabai : Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang - Kelapa Sawit :	DISPERINDAG ESDM	- Dinas TPH: Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani - Dinas Perkebunan dan Peternakan : Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani - Dinas PUPR : Penguatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan - Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Dukungan kab/kota: Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)
	2026	Hilirisasi komoditas Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi IKM dengan Produk Hilirisasi, Riset inovasi produk dan teknologi tepat guna - Kelapa: VCO, Santan Kemasan, Minyak kelapa kopra (<i>cooking oil</i>); Gula Kelapa/gula semut, Kelapa kering, arang aktif dari batok kelapa, Produk berbasis serat sabut (keset, geotekstil, jok mobil) - Cabe : Cabe Kering, Cabe Bubuk, Saos (cabe bawang tomat), saos pasta ; Produk Turunan untuk Industri Non-Pangan (Ekstrak capsaicin → bahan baku industri farmasi, kosmetik (krim pereda nyeri, pelangsing), pestisida organik; Oleoresin cabai → pewarna dan pemberi rasa pedas alami untuk industri makanan & minuman; <i>Spray</i> pengusir hama berbahan capsaicin - Kopi : Minuman kopi kemasan siap minum (RTD Coffee) — botol/<i>sachet/cup</i>; Kopi instan (<i>pure instant coffee, 3-in-1, cappuccino</i>)			Peningkatan <i>capacity building</i> pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,

		<i>sachet</i>); <i>Drip bag coffee</i> — kopi bubuk dalam kantong celup; <i>Cold brew</i> • Aren : Gula Aren, Sirup Aren, Tuak, manisan kolang kaling, Sapu ijuk, sikat, keset, anyaman kerajinan dari lidi atau serat kayu/daun aren			
		• Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara dan Asahan • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Karo dan Kab. Batu Bara			
	2027	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan Kapasitas Produksi Hilir dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir ; Diversifikasi Produk & Inovasi • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara,Asahan, Kab. Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Karo, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang			Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. Pemasaran, dukungan promosi, capacity buliding diversivikasi produk hilirisasi , Penyediaan Rumah kemasan oleh kab/kota
	2028	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Peningkatan SDM, Peningkatan Kapasitas Produksi dan peningkatan kemitraan IKM dengan industri hilir; Penguatan Pasar & Branding ; MoU dengan Industri Besar untuk menampung produk hilirisasi dari IKM Binaan • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara,Asahan,Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			Menentukan IKM yang akan dilakukan <i>capacity building</i>, menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi <i>capacity building</i> standarisasi ekspor bagi pelaku IKM.

	2029	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Integrasi Ekosistem Industri / (dari hulu ke hilir mulai dari bahan baku, sampai ke pasok industri besar) dan Bisnis Matching dengan Industri Besar dalam dan luar negeri • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe : Karo, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan <i>business matching</i> .
	2030	Hilirisasi Produk Unggulan Sumatera Utara Evaluasi, Ekspansi dan Keberlanjutan Produk Hilirisasi Industri di pasar global • Kelapa: Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Asahan, Batu Bara, dan Labuhanbatu Utara • Kopi: Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, dan Simalungun • Aren: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal • Cabe: Kabupaten Karo, Batu Bara, Serdang Bedagai dan Deli Serdang			Branding Ekspor
3. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	2025	Melakukan audit menyeluruh, penilaian kesehatan BUMD pada tahun 2025, dan peningkatan kesehatan • 3 BUMD sehat (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda), Perumda Tirtanadi)	-	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG Biro Hukum : percepatan fasilitasi regulasi Biro PemOtda : Fasilitasi Kerja sama Diskominfo : Publikasi Kegiatan Inspektorat : Audit BUMD	-
	2026	Melakukan audit menyeluruh, penilaian kesehatan BUMD pada tahun 2025, dan peningkatan kesehatan; Menyusun roadmap reformasi dan melakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan sesuai dengan perundangan dan bisnis kerja serta SDM;Menerapkan GCG dengan praktik terbaik, menumbuhkan ekosistem BUMD, kerja sama			

		BUMD antar daerah dan sistem pengukuran kinerja berbasis digital • BUMD sehat (PT. Perkebunan Sumatera Utara (Perseroda))			
	2027	Melakukan audit menyeluruh, penilaian kesehatan BUMD pada tahun 2025, dan peningkatan kesehatan; Menerapkan GCG dengan praktik terbaik, menumbuhkan ekosistem BUMD, kerja sama BUMD antar daerah dan sistem pengukuran kinerja berbasis digital; Mengembangkan model bisnis baru dan memperluas keterlibatan BUMD di sektor prioritas (pangan, hilirisasi pertanian dan hilirisasi industri) • 2 BUMD sehat (PD. Aneka Industri dan Jasa Provsu dan PT. Dhirga Surya Sumatera Utara)			
	2028	Menerapkan GCG dengan praktik terbaik, menumbuhkan ekosistem BUMD, kerja sama BUMD antar daerah dan sistem pengukuran kinerja berbasis digital; Memperkuat permodalan dasar (jamkrida dan bank sumut 2025-2027) dan permodalan bisnis baru, membangun kemitraan strategis • PT.Jamkrida Sumut (Perseroda) Terbentuk			
	2029	Menerapkan GCG dengan praktik terbaik, menumbuhkan ekosistem BUMD, kerja sama BUMD antar daerah dan sistem pengukuran kinerja berbasis digital • Penguatan 7 BUMD			
	2030	Menerapkan GCG dengan praktik terbaik, menumbuhkan ekosistem BUMD, kerja sama BUMD antar daerah dan sistem pengukuran kinerja berbasis digital • Penguatan 7 BUMD			
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	2025	1. Inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum optimal, serta potensi pemanfaatan 2. Penyusunan skema/proses bisnis pemanfaatan aset BMD 3. Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi	BKAD	Bapenda Provsu: - Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi Bappelitbang Provsu:	Dukungan Pemerintah kab/kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)

		4. Proses digitalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah		- Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan Diskominfo: - Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi OPD Pengguna BMD : • Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD	
	2026	1. Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) 2. Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi 3. Penyusunan Regulasi penggunaan web aplikasi pemanfaatan Barang Milik Daerah 4. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM penilai barang			
	2027	1. Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) 2. Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi 3. Pengembangan skema pemanfaatan Barang Milik Daerah 4. Pengembangan sistem informasi atau promosi			
	2028	1. Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) 2. Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi 3. Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain			
	2029	1. Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) 2. Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi 3. Penguatan kemitraan dalam perluasan pemanfaatan Barang Milik Daerah termasuk kerja sama dengan platform lain (kerja sama dengan 1 Platform) 4. Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah produktif berkelanjutan			

	2030	1. Pemanfaatan aset Barang Milik Daerah yang berdasarkan hasil inventarisasi (target 2 BMD yang termanfaatkan) 2. Pengamanan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil investarisasi 3. Evaluasi dan Monitoring secara berkala terhadap Pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui kerja sama ekonomi berkelanjutan			
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU					
1. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	2025	tidak ada	DISBUNAK	- Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan <i>coconut milk</i>, kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol - Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren; - Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan - Diskominfo: untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Dukungan data CPCL di lokasi intervensi - Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	1. Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok pekebun di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan Maret 2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan pada bulan Juli-Agustus untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan dan pelatihan pengolahan hasil produksi di lokasi intervensi yang telah dilaksanakan pada tahun 2028 3. Pemberian benih pada komoditas kelapa sebanyak 80.000 batang benih, 160 ton pupuk organik dan 10 paket alat pasca panen pembuatan kopra dan VCO kepada 20 kelompok pekebun di Kab. Asahan dan Kab. Batu Bara. pemberian benih pada komoditas aren sebanyak 10.000 batang benih, 20 ton pupuk organik dan 8 paket alat pengolahan pembuatan gula semut kepada 10 kelompok pekebun di Kab. Simalungun dilaksanakan pada bulan Oktober			
	2030	tidak ada			
	2025	tidak ada	DISKANLA		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi
	2026	tidak ada			

2. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	2027	tidak ada		- Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. - Dinas Koperasi dan UKM– Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan). - Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi - Replikasi di daerah yang sama
	2028	tidak ada			
	2029	1. Pembangunan sarana prasana produksi - Perikanan tangkap: sampan, jala dan dermaga - Perikanan budidaya: revitalisasi kolam, benih, pakan, kincir, saluran air, automatic feeder - Perikanan tangkap: Kab. Batu Bara, Kab. Langkat, Kota Medan dan Kab. Deli Serdang; - Perikanan budidaya : Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapsel, Kab. Batu Bara			
	2030	1. Pengembangan unit pengolahan ikan dalam bentuk coolbox dan gudang ikan 2. Kemitraan usaha dengan: - Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan. - Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya. - Perikanan tangkap : Kab. Batu Bara, Langkat, Kota Medan dan Kab. Deli Serdang; - Perikanan budidaya : Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Tapsel, Kab. Batu Bara			
3. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	2025	Pokja Pengawas Laut, Peta digital kawasan rawan pelanggaran, draf rencana aksi	DISKANLA	- BAPPELITBANG: Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah. - Dinas Lingkungan Hidup Provsu: Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut. - Dinas Perhubungan Provsu: Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli. - Satpol PP Provsu: Penegakan perda terkait konservasi laut. - Dinas Pariwisata Provsu: Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan Nelayan kab/kota - Klasterisasi - Sosialisasi dan Edukasi
	2026	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2027	Laporan Patroli dan Peralatan + Aplikasi e-Mawas Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2028	Modul Hukum & Klinik Konsultasi. Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
	2029	Laporan Evaluasi dan strategi pengawas baru			

		Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.		- Dinas Kominfo Provsu: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat. - Dinas Koperasi & UKM Provsu: Penguatan kelembagaan nelayan pengawas. - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut. - Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program	
	2030	Buku capaian dan film dokumenter Kabupaten/kota dan perairan Pantai Timur dan Barat Sumatera Utara.			
4. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	2025	tidak ada	DLHK	1. Dinas Kominfo - Media massa - Publikasi kegiatan 2. Kementerian Kehutanan - Penyediaan Regulasi - Koordinasi program-program	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan <i>Stakeholder</i> terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya: - Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan - Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat. - Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas - Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	1. Melakukan penanaman mangrove seluas 18 Ha di Kabupaten Kab. Batu Bara 2. Kegiatan <i>Mangrove Festival</i> berkolaborasi dengan NGO/Pemerhati, pemberdayaan masyarakat 3. Pembentukan ekowisata berbasis <i>mangrove</i> dan <i>silvofishery</i> Lingkungan			
	2030	tidak ada			
5. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air	2025	tidak ada	DISPERINDAG ESDM		Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas
	2026	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan,			

Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)		desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara		• TPH: Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang: monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat: Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan	Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030: 1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. Data penentuan lokasi 3. pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data readiness criteria
	2027	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2028	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2029	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
	2030	Evaluasi lokasi baru berdasarkan hasil proyek sebelumnya, perencanaan dan perizinan, desain teknis dan RAB, pengadaan peralatan dan pekerjaan sipil, instalasi dan uji coba sistem, pelatihan petani, monitoring awal, serta evaluasi dan serah terima akhir proyek - Kawasan pertanian yang memiliki keterbatasan irigasi di Sumatera Utara			
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN					

MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERDAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL					
1. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	2025	1. Kajian pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembuatan masterplan 3. Penyusunan tim kerja dan Inventarisir data 4. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 5. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi: Kabupaten Asahan dan Serdang Bedagai Kawasan jagung : Kabupaten Tapanuli utara dan Karo kawasan cabai Merah: Kota Padangsidempuan, Kabupaten Batu Bara, dan Deli Serdang Kawasan Bawang Merah : Kabupaten Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan. 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar. • Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes). • Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan. • Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi. • Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional. • Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan. Replikasi di daerah yang sama
	2026	1. Pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabai merah dan bawang merah 2. Pembangunan sarana dan prasarana produksi pertanian Kawasan Padi: Kabupaten Deli Serdang, Simalungun, Asahan dan Serdang Bedagai. Kawasan Jagung: Kabupaten Humbahas, Langkat, Tapanuli Utara dan Karo Kawasan Cabai Merah: Kabupaten Simalungun, Dairi, Batu Bara, dan Deli Serdang Kawasan Bawang Merah: Kabupaten Humbang Hasundutan, Samosir dan Simalungun			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			

				Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan. 4. Diskominfo (Publikasi)	
	2030	Evaluasi dan monitoring Kegiatan			
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	2025	tidak ada	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi 2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak 3. Dinas PMD Dukcapil: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 4. Diskominfo: Untuk publikasi media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: 1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi 2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan 4. Replikasi di daerah yang sama
	2026	tidak ada			
	2027	1. Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan April 2. Pembinaan dan pengawasan serta pennguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2026 3. Pemberian 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/ peternak di Kabupaten Karo, 30 ekor kerbau kepada 3 kelompok tani/peternak di Padang Lawas, 200 ekor domba kepada 10 kelompok tani/peternak di Batu Bara, dan 4000 ekor itik kepada 4 kelompok tani/peternak di Mandailing Natal dilaksanakan pada bulan September			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	1. Verifikasi CPCL dan sosialisasi awal kepada kelompok peternak di lokasi intervensi pengembangan kawasan yang dilaksanakan mulai bulan April			

		2. Pembinaan dan pengawasan serta penguatan kelembagaan peternak yang dilakukan mulai bulan Juli untuk melihat perkembangan kawasan perkebunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2029 3. Pemberian bibit 100 ekor sapi potong kepada 10 kelompok tani/peternak di Kabupaten Labuhanbatu Utara, 200 ekor kambing kepada 10 kelompok tani/peternak di Deli Serdang, 200 ekor domba kepada 10 kelompok tani/peternak di Labuhanbatu, dan 4000 ekor itik kepada 4 kelompok tani/peternak di Batu Bara dan 4000 ekor ayam kepada 4 kelompok tani/peternak di Simalungun dilaksanakan pada bulan September			
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	2025	tidak ada	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi	PT. Dirga Surya: memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra produksi padi			
	2030	Pengembangan produksi benih unggul dan pemasaran di kab/kota sentra provinsi Sumatera Utara dan di kepulauan Sumatera			
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	2025	Fokus pada persiapan program, pembentukan Tim Pokja FPPS di provinsi dan kabupaten/kota, rekrutmen dan pelatihan Fasilitator Pembiayaan Petani Swadaya (FPPS), pemutakhiran data kelompok tani, koordinasi dengan lembaga keuangan, dan sosialisasi program. • 33 Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga	• Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok

	2026	Mulai pelaksanaan Temu Pembiayaan tahap I dan II, pendampingan realisasi kredit, pelatihan manajemen keuangan bagi kelompok tani penerima pembiayaan, serta monitoring awal terhadap usaha penerima kredit. • 33 Kabupaten/Kota	penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.	permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan. • Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi. • Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian. • Dinas Pemdesdukcapi memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapi memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran	
	2027	Memperluas cakupan penerima pembiayaan, memperkuat kemitraan dengan BUMN, BUMD, dan swasta, serta memberikan pelatihan lanjutan kepada FPPS terkait negosiasi bisnis dan pemasaran. • 33 Kabupaten/Kota			
	2028	Mengintegrasikan pemasaran digital dan <i>e-commerce</i> , mengembangkan sistem informasi pembiayaan pertanian berbasis aplikasi, serta melatih FPPS dan kelompok tani dalam penggunaannya • 33 Kabupaten/Kota			
	2029	Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui koperasi, CSR, dan investor. Mengembangkan usaha hilir di bidang pascapanen dan olahan, memberikan pelatihan manajemen usaha hilir, serta mendorong pemasaran produk hilir. • 33 Kabupaten/Kota			
	2030	Melaksanakan kajian dampak ekonomi program, menyusun model pendampingan berkelanjutan, dan melatih FPPS menjadi konsultan atau koperasi tani. • 33 Kabupaten/Kota			

				dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani. • Diskominfo (Publikasi)	
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)					
1. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	KOMINFO : Publikasi Media DISBUDPAREKRAF: Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi; PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba): Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah): Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan	- Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di daerah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIPDN kedalam renja OPD - Menyusun rencana aksi tahunan - Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba - Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik) - Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; - Pembentukan Tata Kelola/Kelembagaan untuk Desa Wisata; - Pendampingan Desa Wisata; - Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; - Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent));
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

				Inovatif & Kolaboratif Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprovsu yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun	10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata 11. Pelaksanaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
2. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	• DISBUDPAREKRAF: Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan <i>Visibilities di Geosite</i>; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan <i>Cultural Heritage</i> di Kawasan Geopark; Melaksanakan <i>Event Geofest</i>. • DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan <i>Geosite</i>; • Dinas Pendidikan: Melaksanakan kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar; • Dinas PUPR: Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar <i>geosite</i>; • Bappelthang: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Kaldera UGGp maupun di Kawasan <i>Geopark</i> yang baru; • BPBD: Mitigasi Bencana & Sosialisasi;	• Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan Geosite di masing-masing Kabupaten; • Penyusunan muatan Lokal; • Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang <i>Geopark</i>; • Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk; • Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi <i>Geological Heritage, Biological/Natural Heritage</i> dan <i>Cultural Heritage</i>; • Rutin melaksanakan <i>Event GeoFest</i>; • Menyusun kajian awal terkait Kawasan <i>Geopark</i> baru; • Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; • Pembentukan Tata Kelola/Kelembagaan untuk Desa Wisata; • Pendampingan Desa Wisata;
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

				- Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba - Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	- Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent); - Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata
3. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	- Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. - Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. - Dinas PMD : Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDES Wisata - Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam: - Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; - Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); - Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; - Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata; - Pendampingan Desa Wisata; - Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif; - Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (<i>Homestay/Hotel</i>), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent)); - Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; - Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; - Pendampingan kepada pelaku UMKM;
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

					• Pelaksanaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
4. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	• Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. • Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. • Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata • Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan • Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	• Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; • Penyediaan Lahan yang <i>Clean & Clear</i> (jika terdapat pembangunan fisik); • Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat Kabupaten/Kota; • Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; • Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; • Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota • Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi; • Pembentukan Tata Kelola/Kelembagaan untuk Desa Wisata; • Pendampingan Desa Wisata; • Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa Travel Agent)); • Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; • Pendataan dan Pendampingan UMKM; • Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF		

5. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	2026	tidak ada		- Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan - Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans - Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan event internasional - Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan - Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan Event dan ketertiban penyelenggaraan acara - Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan event (sport, e-sport, dsb)	- Pelaksanaan Side Event saat pelaksanaan Event Internasional; - Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak; - Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & Homestay),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan Travel Agent); - Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; - Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan Event internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI					
1. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	- Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif - Biro Perekonomian: Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. - Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. - Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM - Dinas Kominfo: Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	- Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; - Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; - Fasilitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; - Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; - Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
2. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	2025	Evaluasi Platform e-commerce yang sudah ada (SIMITRA)	DISKOP UMKM	KOMINFO : Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi

	2026	Desain dan pengembangan platform e-commerce; Kurasi awal 100 produk UMKM; Kemitraan dengan <i>platform</i> logistik & <i>payment gateway</i> . Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan Kabupaten/Kota - Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri - <i>Capacity Building</i>
	2027	<i>Onboarding</i> UMKM; Pelatihan dan fasilitasi branding, dan manajemen toko online. Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2028	Pengembangan <i>E-commerce</i> menjadi Market Place; Integrasi dengan katalog elektronik, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2029	Galeri Virtual 3D; Kampanye digital nasional & regional, Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> ; Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
	2030	Kurasi produk ekspor; Promosi virtual di <i>event</i> internasional (<i>virtual expo, marketplace</i> ASEAN), Manajemen Operasional <i>platform e-commerce</i> dan Promosi dan sosialisasi <i>platform e-commerce</i> ; • PLUT			
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN					
1. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	2025	1. Penyusunan SK Tim Forum Pemangku Kepentingan SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 2. Sosialisasi SK Tim forum dan <i>milestone</i> TPB SDGs 2025-2030 3. Updating target capaian SDGs tahun 2025 disesuaikan dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 4. Penyusunan skema <i>Declaration and Registration System</i> 5. Pembangunan fitur aplikasi pendaftaran BRS SDGs	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	• Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se-Sumut tahun 2025-2030 • Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha • Dukungan pelaksanaan <i>North Sumatera SDGs Action Awards</i>

		6. Replikasi, instalasi dan <i>Capacity Building</i> Aplikasi E-Monev SDGs (Inovasi) 7. Menyusun Draf Rancangan Awal RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2030 8. <i>Launching</i> dan Pelaksanaan BRS <i>pilot project</i> sekaligus penyerahan sertifikat kepada 15 UMKM 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 10. Modifikasi Aplikasi E-Monev SDGs 11. <i>Workshop E-Monev</i> dengan Bappeda/Bapperida/Bappelitbang Kabupaten/Kota 12. Menyusun <i>draf Monev</i> capaian SDGs tahun 2025			• Dukungan proses penginputan E-Monev Kabupaten/Kota • Peningkatan kapasitas untuk implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs
	2026	1. Inovasi <i>Business Registration System Policy TPB/SDGs</i> 2. Diseminasi Skema BRS TPB/SDGs (Kolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM pada acara FYP, BRS SDGs dijadikan kurikulum) 3. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2025 4. Finalisasi Draf RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 melalui desk per pilas TPB/SDGs 5. <i>Launching</i> Aplikasi e-Monev 6. Pelaksanaan skema <i>Declaration and Registration System BRS TPB/SDGs</i> 7. Diseminasi RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026-2030 8. Penyusunan Rancang Bangun aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 9. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2026 11. Sosialisasi <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev)			

	2027	1. Pembangunan aplikasi e-Monev SDGs (INOVASI) 2. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2026 3. Forum <i>Business Registration System</i> (BRS) 4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2027</i> (Indikator RAD TPB/SDGs, VLR dan Laporan Monev) 5. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2026 6. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 7. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2027 8. Sosialisasi penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI)			
	2028	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2027 2. Finalisasi aplikasi e-Monev SDGs 3. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 4. <i>North Sumatra SDGs Action Award 2028</i> 5. <i>Launching</i> aplikasi e-Monev SDGs 6. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 7. <i>Desk</i> capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2027 8. <i>Workshop</i> Penyusunan <i>Voluntary Local Review</i> (VLR) Kabupaten/Kota 9. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2028			
	2029	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2028 2. Pelaksanaan Skema BRS 3. Finalisasi integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA 4. <i>Launching</i> integrasi Satu Data SDGs pada aplikasi SADAINA			

		5. Diseminasi pemanfaatan aplikasi e-Monev SDGs 6. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs Tahun 2028 7. Penyusunan rancang bangun Integrasi Satu Data SDGs Provinsi Sumatera Utara (INOVASI) 8. North Sumatra SDGs Action Award 2029 9. Pelaksanaan Skema BRS 10. Menyusun draf Monev capaian SDGs tahun 2029			
	2030	1. Menyusun Laporan Monev TPB/SGDs Tahun 2029 2. Desk capaian pelaksanaan program unggulan tematik berbasis lokus prioritas SDGs tahun 2029 3. North Sumatra SDGs Action Award 2030 4. Menyusun Draf Laporan Monev RAD TPB/SGDs Tahun 2026-2030 5. Workshop Penyusunan Voluntary Local Review (VLR) Kabupaten/Kota 6. Menyusun laporan akhir kegiatan SDGs			
2. Kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	2025	1. Penyusunan MoU antara APIP dengan APH (Kejaksaaan Tinggi, Kepolisian) 2. Pendampingan Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis	Inspektorat kab/kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota
	2026	1. Reviu Perencanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara 2. Pendampingan Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara 3. Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			
	2027	1. Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara 2. Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah 3. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2028	1. Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara			

		2. Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah 3. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2029	1. Reviu Pelaksanaan Proyek Strategis Daerah Sumatera Utara 2. Pelaksanaan Kolaborasi Pendampingan Proyek Strategis Daerah 3. Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
	2030	Evaluasi Pelaksanaan Pendampingan Proyek Strategis Daerah			
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT					
1. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	2025	1. Tindak lanjut MoU terkait kerja sama teknis dengan BPS dan Diskominfo dalam pembangunan aplikasi Satu Data (SADAINA Reborn) 2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD 3. <i>Launching</i> SADAINA Reborn di Konreg PDRB ISEI (BPS dan Diskominfo) 4. <i>Updating</i> SK Tim Pelaksana SADAINA 5. Diseminasi aplikasi dan tupoksi tim SADAINA	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait
	2026	1. Pemanfaatan SADAINA Reborn 2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD 3. Forum Satu Data tingkat Daerah 4. Proses integrasi Satu Data dengan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Provsu 5. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data Geospasial 6. Penyusunan Proses Bisnis integrasi SADAINA dan Data SDGs			
	2027	1. Pemanfaatan SADAINA Reborn 2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD			

		3. Forum Satu Data tingkat Daerah 4. Pemanfaatan SADAINA dan Data Geospasial 5. Pemanfaatan SMART SADAINA SDGs 6. Proses bisnis integrasi SADAINA Reborn dengan kab/kota			
	2028	1. Pemanfaatan SADAINA Reborn 2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD 3. Forum Satu data tingkat Daerah 4. Pengembangan fitur SADAINA (API) 5. Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn 6. Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn			
	2029	1. Pemanfaatan SADAINA Reborn 2. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD 3. Forum Satu data tingkat Daerah 4. Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) 5. Peningkatan kapasitas user SADAINA Reborn 6. Pemanfaatan dan replikasi SADAINA Reborn			
	2030	1. Menyediakan API (<i>Application Programming Interface</i>) 2. Pemanfaatan SADAINA Reborn 3. Proses input dan sinkronisasi data statistik sektoral OPD 4. Forum Satu data tingkat Daerah 5. Monitoring dan Evaluasi			
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL					
1. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan	Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			

	2030	tidak ada		untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan - Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. - Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.
2. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	- Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah. - Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan. - Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan. - Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu memperbaiki dan memverifikasi data kemiskinan lokal.
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING					

1. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta Commuter	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan. Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah-Daerah Terpencil	2025	tidak ada	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	- Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah Kabupaten/Kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi. - Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan - Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

					nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek • Pengawasan dan <i>Monitoring</i>: Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA					
1. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	• Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/Kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) • Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/Kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) • Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan
	2026	tidak ada			
	2027	1. Pengerjaan fisik. 2. Penyusunan DED (<i>Detail Engineering Design</i>) dan pemenuhan <i>readiness</i> Kriteria • Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias pada Sungai Muzoi, Sungai Lahomi, Sungai Idano Mola sepanjang 72 meter			
	2028	1. Pengerjaan fisik 2. Penyusunan DED (<i>Detail Engineering Design</i>) dan pemenuhan <i>readiness</i> Kriteria • Kabupaten Batu Bara, Nias Utara, Tapanuli Tengah pada Sungai Suka, Sungai Humanga, Sungai Aek Sirahar sepanjang 648 meter			
	2029	1. Pengerjaan fisik 2. Penyusunan DED (<i>Detail Engineering Design</i>) dan pemenuhan <i>readiness</i> Kriteria			

		Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara, Batu Bara pada Sungai Lae Bongkaras, Sungai Aek Siandurian, Sungai Aek Sigaeon, Sungai Gambus sepanjang 489 meter			infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah Kabupaten/Kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) - Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota) - Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/Kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP Kabupaten/Kota, BPBD)
	2030	tidak ada			
2. Pembangunan TPST Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR: - Penyiapan dokumen Lingkungan, - Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya, Dinas LHK: - Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup	- Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah - Penyediaan dan penentuan lokasi - Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan - Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan - Dukungan SDM
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

				• Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, • Dinas Kominfo untuk publikasi media	
3. Pembangunan PLTSa	2025	tidak ada	DISPERINDAG ESDM	• PUPR: Pembangunan TPST • LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Kabupaten/Kota berperan dalam menyiapkan: Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah Perizinan • Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah • Penyediaan dan penentuan lokasi • Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota • Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan • Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan • Dukungan SDM
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
4. Pengembangan SPAL Regional	2025	tidak ada	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	• Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang) • Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPSTSP) • Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan) • Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang) • Menyediakan alokasi anggaran (BKAD) • Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			

5. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	2025	Rapat koordinasi, pembentukan tim <i>appraisal</i> dan pembentukan pokja rencana Pembangunan Taman Kehati	DLHK	Biro Pem Otda - SK Penlok BPN - Sertifikat Lahan Diskominfo - Publikasi Media	- Dukungan terhadap pengadaan lahan - Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota
	2026	Penyusunan dokumen DPPT dan pembebasan lahan			
	2027	Penyusunan dokumen FS, DED, dan dokumen administrasi lainnya			
	2028	Pekerjaan fisik di lapangan sesuai dengan Perdirjen KSDAE Nomor P.5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan <i>Design</i> Dasar (<i>Design</i> Vegetasi dan <i>Design</i> Infrastruktur Taman Kehati)			
	2029	Tahap lanjutan kegiatan penanaman dan pemeliharaan vegetasi serta - Membuat Rencana Kesepakatan Bersama/ kerja sama Pembangunan Taman Kehati sebagai dukungan Pengembangan Kawasan Konservasi Taman Kehati			
	2030	1. Pembukaan dan peresmian Taman Kehati serta tahap lanjutan kegiatan penanaman 2. Pemeliharaan vegetasi serta kegiatan pengembangan 3. Pembentukan UPT Taman Keanekaragaman Hayati			
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA					
1. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan Master Plan Desa Produktif dan Mandiri.	2025	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	- Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan - Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan - Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok. - Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing. - Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
	2025	Pendataan BUMDES/BUMDesma yang akan menerima pemanfaatan kegiatan		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Disperindag, Dinas Koperasi UMKM,	

48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES		•27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa		(Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	• Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES. • Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital. • Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.
	2026	1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kegiatan • Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Nias, Simalungun, Asahan, Dairi, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labura, Gunungsitoli, Padangsidimpuan, Karo, Toba, Labuhanbatu Selatan, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu (20 Kabupaten/Kota)			
	2027	1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDes/BUMDesma 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kegiatan • 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa			
	2028	1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kegiatan • 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa			
	2029	1. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi pengelola BUMDES/BUMDesma 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi kegiatan • 27 Kabupaten/Kota yang memiliki desa			
	2030				
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN					
1. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	2025	1. Penyusunan perubahan Pergub Hibah Rumah Ibadah dengan mekanisme penyaluran hibah yang memuat alokasi terhadap biaya operasional pengelola dan sarpras rumah ibadah Tahun 2025	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)	-

		2. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 3. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 • 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2026	1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 • 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2027	1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 • 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2028	1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 • 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
	2029	1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 • 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			

	2030	1. Penerimaan Proposal Usulan, Verifikasi Proposal Usulan dan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 2. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyaluran Bantuan Hibah Rumah Ibadah Tahun 2025-2030 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara			
2. Festival Seni dan Budaya Daerah	2025	tidak ada	DISBUDPAREKRAF	- Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan - Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans - Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksanaan <i>event</i> internasional - Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i>-pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan - Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara	- Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; - Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; - Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; - Memastikan kontinuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah - Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; - Penyusunan Kalender Budaya
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
3. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat	2025	tidak ada		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota
	2026	1. Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konflik di Sumatera Utara di Tahun 2026 2. Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2026 3. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2026 Kota Medan, Tanjungbalai, Kabupaten Batu Bara, Toba, Serdang Bedagai			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			

	2030	1. Pendataan Sasaran Ormas dan Kelompok masyarakat pada daerah rawan konflik di Sumatera Utara di Tahun 2030 2. Pelaksanaan Kegiatan edukasi wawasan kebangsaan dan Solidaritas bagi Ormas Tahun 2030 3. Monitoring dan Evaluasi Tahun 2030 Kota Medan, Tanjungbalai, Binjai, P.Sidempuan, Kabupaten Deli Serdang, , Karo, Langkat, Mandailing Natal, Kab. Batu Bara, Serdang Bedagai.			
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB					
1. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	2025	tidak ada	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba) Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kabupaten/Kota)
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			
2. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan	2025	tidak ada		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan) Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba) Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gembong narkoba)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah
	2026	tidak ada			
	2027	tidak ada			
	2028	tidak ada			
	2029	tidak ada			
	2030	tidak ada			